

KOTA PELABUHAN AMBON 1817-1865 : STUDI TENTANG PERKEMBANGAN KOTA PELABUHAN

TESIS

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan mencapai
derajat Sarjana S-2 Program Studi Sejarah
Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora



diajukan oleh

LUCIA JUNINGSIH

4488/IV-4/284/92



Kepada
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
1996

Tesis

KOTA PELABUHAN AMBON 1817-1865:

STUDI TENTANG PERKEMBANGAN KOTA PELABUHAN

dipersiapkan dan disusun oleh

Lucia Juningsih

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal 10 Mei 1996

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Dewan Penguji Lain

Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo

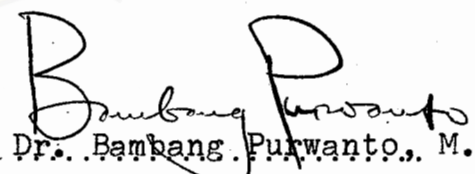
Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian, M.A.

Pembimbing Pendamping I



Dr. Djoko Suryo

Pembimbing Pendamping II



Dr. Bambang Purwanto, M.A.



Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal 18 JUL 1996

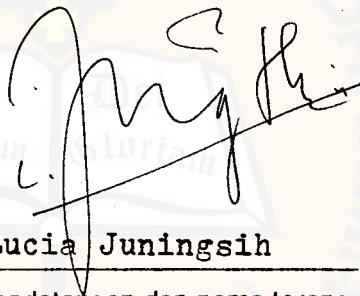
Dr. Bambang Purwanto, M.A.

Pengelola Program Studi Sejarah

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Juli 1996



Lucia Juningsih

Tandatangan dan nama terang

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan rahmat dan kekuatan, sehingga penulisan tesis ini meskipun mengalami berbagai kesulitan dan hambatan akhirnya dapat terselesaikan.

Tesis yang berjudul Kota Pelabuhan Ambon Tahun 1817-1865: Studi Tentang Perkembangan Kota Pelabuhan ini, pada dasarnya ingin mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan kota pelabuhan Ambon pada tahun 1817-1865 mengalami kemunduran dan dampaknya bagi kehidupan sosial ekonomi penduduk.

Upaya penulis mengungkap kemunduran kota pelabuhan Ambon ke dalam sebuah tesis, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu lewat tulisan prakata ini penulis dengan rendah hati menyampaikan ucapan terima kasih.

Ucapan terima kasih yang mendalam pertama-tama penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan sejak awal pemilihan topik sampai selesainya penulisan ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pada Romo dan Bapak-bapak pimpinan Universitas Sanata Dharma, yang telah membantu dan membebastugaskan penulis dari tugas dan kewajiban selaku dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang Pasca Sarjana S2.

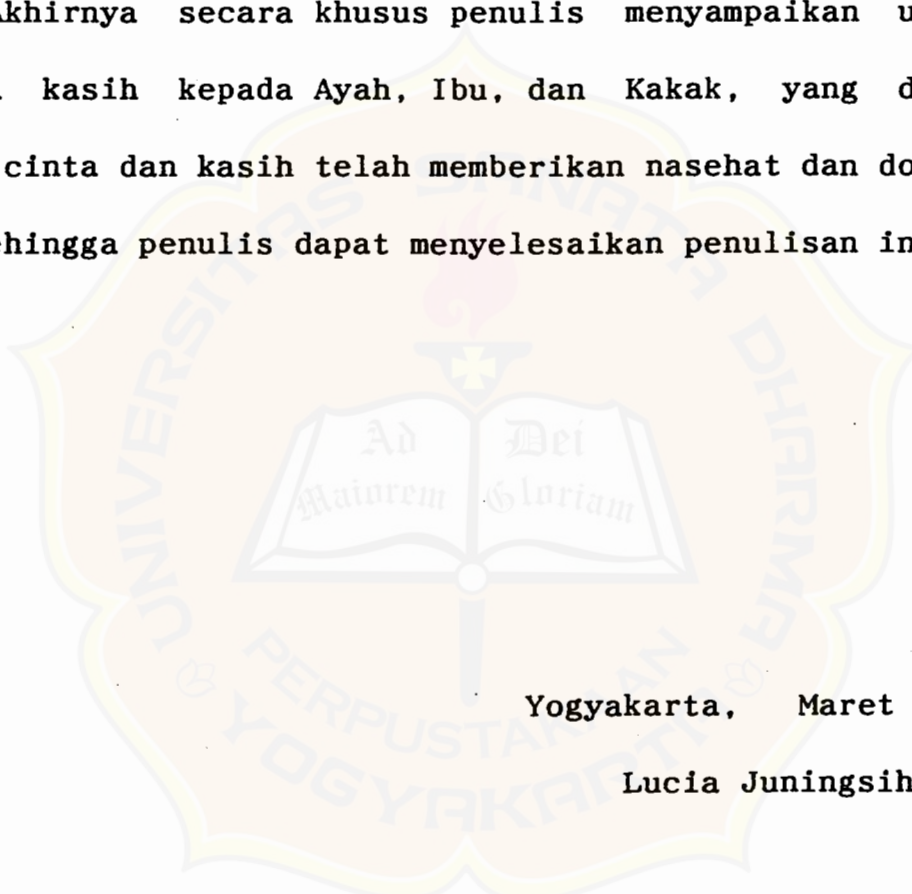
Upaya penulis dalam menyusun tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Program Studi Sejarah Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, yang telah menularkan ilmu kepada penulis. Atas jasa-jasanya itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, Ibu Prof. Dr. Sulastin Soetrisno, Ibu Prof. Dr. Darsiti Soeratman, Bapak Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian, M.A., Bapak Prof. Dr. R.M. Soedarsono, Bapak Prof. Dr. Umar Kayam, Bapak Prof. Dr. Loekman Soetrisno, Bapak Prof. Dr. Suhartono, dan Bapak Dr. Djoko Suryo.

Demikian pula ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. P.J. Soewarno, S.H., Bapak Drs. G. Moe-djanto, M.A., dan Bapak Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R., yang telah banyak memberikan dorongan dan nasehat kepada penulis.

Kelancaran penulisan ini juga tidak terlepas dari dukungan sumber yang penulis peroleh dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada

pimpinan dan karyawan Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, dan Perpustakaan Yayasan Mohammad Hatta, yang telah memberikan bantuan selama penulis mengadakan penelitian.

Akhirnya secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ayah, Ibu, dan Kakak, yang dengan penuh cinta dan kasih telah memberikan nasehat dan dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini



Yogyakarta, Maret 1996

Lucia Juningsih

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR UKURAN SATUAN	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiv
BAB I. PENGANTAR	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Masalah	15
3. Keaslian Penelitian	15
4. Sasaran Studi	16
5. Faedah Yang Dapat Diharapkan	19
6. Tujuan Penelitian	21
7. Tinjauan Sumber	21
8. Kerangka Konseptual dan Pendekatan	27
9. Sistematika Penulisan	36
BAB II. GAMBARAN UMUM AMBON PADA MASA VOC	
1. Keadaan Sosial Politik	38



2. Keadaan Sosial Ekonomi	
a. Perkebunan Cengkih	46
b. Ekspor dan Impor	60
c. Perdagangan Kota	69
d. Industri Rumah Tangga	72

BAB III. PELABUHAN AMBON 1817-1865

1. Sarana dan Prasarana Pelabuhan	76
2. Ekspor dan Impor	80
3. Cukai	108
4. Pelayaran	112

BAB IV. KOTA PELABUHAN AMBON 1817-1865

1. Faktor-faktor Internal Yang Mempengaruhi Perkembangan Kota Pelabuhan Ambon	
A. Faktor Politik	127
B. Faktor Demografi	140
C. Faktor Ekonomi	
1. Perdagangan Kota	154
2. Industri Rumah Tangga	160
3. Perikanan	164
D. Faktor Sosial	166
2. Faktor-faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Perkembangan Kota Pelabuhan Ambon	

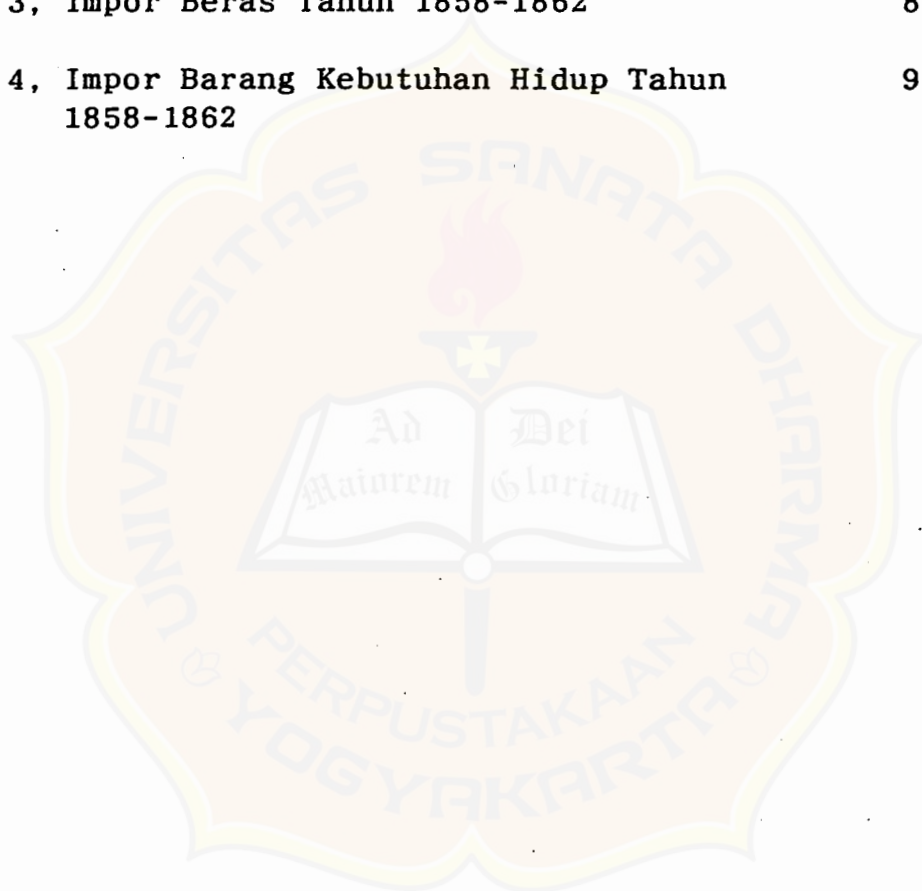
A. Potensi Wilayah Pulau Ambon	
1. Perkebunan Cengkih	177
2. Perkebunan Coklat	185
3. Perkebunan Pala dan Fuli	190
4. Hasil Bumi Yang Lain	193
B. Potensi Wilayah Pulau Sekitarnya	
1. Pulau Buru	197
2. Pulau Seram	199
3. Lease	203
 BAB V. DAMPAK KEMUNDURAN KOTA PELABUHAN BAGI KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PENDUDUK	
1. Kesempatan Kerja	208
2. Pendidikan	218
3. Perkembangan Fisik Kota	224
4. Kesehatan Masyarakat	228
 BAB VI. KESIMPULAN	231
 DAFTAR PUSTAKA	235
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	242

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1, Pengeluaran Pemerintah Hindia Belanda Untuk Membeli Cengkih Tahun 1817-1863	242-244
Lampiran 2, Jumlah Penduduk Karesidenan Amboina Yang Divaksinasi Cacar dan Divaksinasi Cacar Ulang Tahun 1842-1863	245
Lampiran 3, Pendapatan Pemerintah Dari Penyewaan dan Sarana Yang Lain	246
Lampiran 4, Harga dan Jenis Barang Yang Dijual di Pasar Kota Ambon Tahun 1832	247
Lampiran 5, Harga dan Jenis Barang Yang Dijual di Pasar Kota Ambon Tahun 1862	248
Lampiran 6, Peta Pulau Ambon	249
Lampiran 7, Peta Kota Ambon Pada Masa VOC	250
Lampiran 8, Peta Kota Ambon Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda	251
Lampiran 9, Peta Pantai Kota Ambon	252

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1, Jumlah Pohon Cengkih di <i>Lease</i> dan Ambon Tahun 1673	52
Tabel 2, Jumlah Pohon Cengkih di <i>Lease</i> dan Ambon Tahun 1693	52
Tabel 3, Impor Beras Tahun 1858-1862	89
Tabel 4, Impor Barang Kebutuhan Hidup Tahun 1858-1862	91



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik No. 1, Cengkih Yang Disetorkan Oleh Penduduk Pada VOC Dari Tahun 1675-1799	48
Grafik No. 2, Jumlah Budak di Ambon dan <i>Lease</i> Tahun 1671-1695	55
Grafik No. 3, Impor Kain Lena Tahun 1851-1862	83
Grafik No. 4, Ekspor dan Impor Tahun 1824-1862	93
Grafik No. 5, Harga Jual Cengkih di Pasar Eropa Per pon Amsterdam	99
Grafik No. 6, Ekspor Pala dan Fuli Tahun 1851-1862	102
Grafik No. 7, Ekspor Minyak Kayu Putih Dari Tahun 1851-1862	105
Grafik No. 8, Ekspor Kayu Dari Tahun 1851-1862	107
Grafik No. 9, Ekspor Coklat Dari Tahun 1857-1864	109
Grafik No. 10, Cukai Ekspor-Impor Antara Tahun 1812-1854	111
Grafik No. 11, Kapal dan Perahu Yang Berlabuh di Pelabuhan Ambon Antara Tahun 1827-1862	124
Grafik No. 12, Penduduk Afdeling Amboina Tahun 1824-1862	142
Grafik No. 13, Penduduk Kastil Ambon dan Sekitarnya Tahun 1819, 1833-1840	144
Grafik No. 14, Jumlah Budak Dari Tahun 1834-1855	147
Grafik No. 15, Perkawinan, Kelahiran, dan Kematian di Karesidenan Amboina Tahun 1829-1862	153

Grafik No. 16, Cengkih Yang Disetorkan Oleh Penduduk Pada Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1817-1863	181
Grafik No. 17, Jumlah Pohon Coklat Dari Tahun 1857-1863	189
Grafik No. 18, Sagu Yang di Ekspor ke Ambon Dari Tahun 1834-1855	201
Grafik No. 19, Jumlah Pohon Cengkih di <i>Lease</i> Pada Tahun 1826, 1839, 1854	204



DAFTAR UKURAN SATUAN

- 1 Duit : 0,20 sen
- 1 Koyang : kurang lebih 1792,32 kilogram
- 1 Last : 2000 kilogram
- 1 Kati : kurang lebih 0,8 kilogram
- 1 Pikul : 125 pon = 61,76 kilogram
- 1 Bahar : 550 pon Amsterdam
- 1 Depa : 1,70 meter

Sumber: G.J. Knaap, "Some Observations on a Thriving Dancing-Party the Cultivation for Cloves in Sixteenth and Seventeenth Century Ambon", Sartono Kartodirdjo, ed., Papers of the Fourth Indonesian-Dutch History Conference Yogyakarta 24-29 July 1983, Agrarian History. Volume One (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986), hlm. 81; G.W.W.C. Baron van Hoëvell, Ambon en Meer Be paaldelijk de Oeliasers, Geographisch, Ethnographisch, Politisch en Historisch (Dordrecht: Blusse en van Braam, 1875), hlm. 25; R.Z. Leiris-sa, dkk., Maluku Tengah di Masa Lampau Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982), hlm. 141; Koloniaal Verslag Over het Jaar 1858-1859, hlm. 126-127; J.S. Furnivall, Netherlands India A Study of Plural Economy (Cambridge: At The University Press, 1939), hlm. xxiii.

INTISARI

KOTA PELABUHAN AMBON 1817-1865:
STUDI TENTANG PERKEMBANGAN KOTA PELABUHAN

Perkembangan kota pelabuhan Ambon pada tahun 1817 sampai tahun 1865, ditentukan oleh faktor-faktor internal dari kota pelabuhan itu sendiri dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dalam bidang politik dan ekonomi, faktor demografi, faktor sosial, dan fungsi dari pelabuhan Ambon. Faktor-faktor eksternal meliputi potensi ekonomi wilayah sekitar kota Ambon dan pulau-pulau di sekitarnya seperti, Pulau Seram, Pulau Buru, dan *Lease*, yang menjadi daerah penyangga kota pelabuhan Ambon, serta berbagai peristiwa di luar Maluku seperti pembukaan pelabuhan Singapura sebagai pelabuhan bebas, dan turunnya harga cengkih di pasar Eropa.

Tujuan Pemerintah Hindia Belanda menduduki Ambon, yakni untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari perdagangan cengkih. Untuk mewujudkan tujuannya itu Pemerintah Hindia Belanda menetapkan berbagai kebijakan politik dan ekonomi yaitu, penanaman paksa dan penyerahan wajib cengkih, monopoli perdagangan cengkih dan pengangkutannya, pembatasan dan larangan terhadap perdagangan asing terutama perdagangan senjata dan mesiu, menutup pelabuhan Ambon bagi kapal-kapal yang berbendera asing, dan setiap kapal yang mengadakan pelayaran niaga harus mempunyai *pas*, pemungutan cukai pelabuhan pada kapal yang berlabuh dan cukai pada barang-barang yang dibongkar dan dimuat ke kapal. Ternyata berbagai kebijakan itu menyebabkan perdagangan di kota Ambon kurang dapat berkembang.

Perdagangan mempunyai pengaruh yang menentukan bagi perkembangan kota. Maju mundurnya perdagangan kota ditentukan oleh aktivitas para pedagangnya. Di kota Ambon pedagang Arab, Cina, dan *Burger* peranannya dalam perdagangan terbatas yaitu pada perdagangan impor seperti, tekstil, beras, dan barang kebutuhan hidup yang lainnya. Keterbatasan itu karena Pemerintah Hindia Belanda tidak memberi kebebasan dalam perdagangan dan memonopoli perdagangan ekspor cengkih, pala, fuli, coklat, minyak kayu putih, dan kayu. Sementara itu penduduk pribumi peranannya dalam perdagangan sangat kecil, sebab tidak mempunyai banyak modal sehingga kurang mampu bersaing dengan pedagang Arab dan Cina. Dominasi Pemerintah Hindia Belanda dalam perdagangan menyebabkan perdagangan di kota Ambon kurang dapat berkembang.

Cengkih merupakan barang dagangan utama dari Pulau Ambon, tetapi dalam perkembangannya perdagangan cengkih mundur sebagai akibat turunnya harga cengkih di pasar Eropa. Hal itu mengakibatkan perdagangan di kota Ambon mundur. Sementara itu perikanan dan industri rumah tangga yang ada kurang mampu berkembang. Perikanan kurang dapat berkembang karena teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan masih sangat sederhana, sedangkan pengolahan ikan menjadi ikan asin sulit dilakukan karena langkanya garam. Industri rumah tangga kurang dapat berkembang karena pada umumnya kekurangan modal, teknologi yang digunakan masih sederhana, dan langkanya bahan baku.

Seperti halnya Pulau Ambon, pulau-pulau di sekitarnya mempunyai potensi ekonomi yang terbatas. Pulau-pulau itu berfungsi sebagai wilayah penyangga kota pelabuhan Ambon dalam hal pangan dan produk ekspor.

Pelabuhan Ambon mempunyai peran yang penting bagi perkembangan kota Ambon. Akan tetapi kondisi alam pantai Ambon kurang dapat mendukung perkembangan pelabuhan. Perairan pantai Ambon dangkal dan sungai-sungai yang ada muaranya sempit dan dangkal, sehingga tidak dapat berfungsi sebagai tempat bagi kapal untuk berlabuh.

Dominasi politik dan ekonomi oleh Pemerintah Hindia Belanda, terbatasnya potensi ekonomi wilayah, monopoli perdagangan cengkih, dan keadaan perairan pantai Ambon, menyebabkan kota pelabuhan Ambon dalam tahun 1817 sampai tahun 1865 mengalami kemunduran.

ABSTRACT

PORT OF AMBON FROM 1817 TO 1865:
A STUDY OF THE PORT DEVELOPMENT

The development of the port of Ambon from 1817 to 1865 was determined by the internal factors of the port city, and the external factors. The internal factors covered the political and economic policies, demographic and social factors, and the function of the port city. The external factors comprised the regional economic potencies around Ambon and the surrounding islands like Seram, Buru and Lease which became the supporting regions of the port city, and several events outside Maluku like the opening of the port of Singapore as a free port and the decrease of the clove price in the European market.

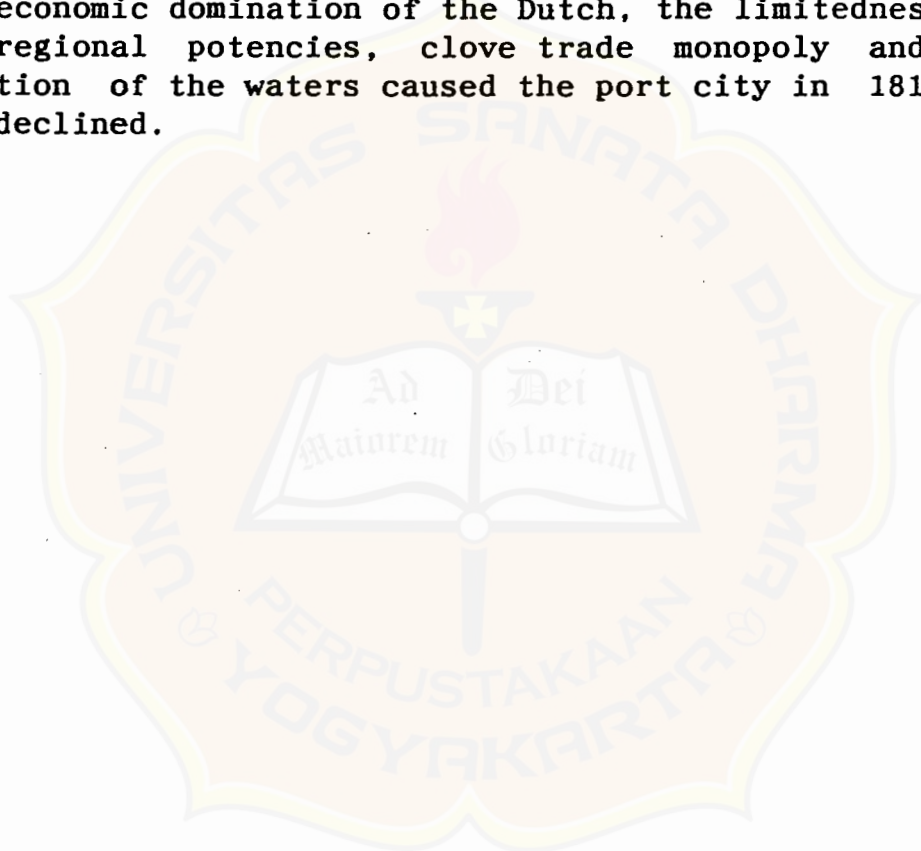
The purpose why the Dutch colonized Ambon was to get great profit from the clove trade. To realize it, the Dutch had established several political and economic policies i.e., *Cultuurstelsel* and clove delivery requirement, clove trade monopoly and its transportation, limitation and prohibition for the foreign trade especially weapon and ammunition trade, the blocking of the port of Ambon for the ships with foreign flags, the possession of *pas* for merchant shippings, levying taxes on the ships which anchored to the port and on the loaded and unloaded goods. In fact, the policies caused the merchant shippings and the trade in the port of Ambon could not develop well.

Trading has determining effects for the growth of a city. The growth of a city is determined by traders' activities. In Ambon, Arabian, Chinesse and Burgher traders had limited role in the import trade such as textile, rice and other necessities of life. The limitedness was because the Dutch did not give freedom in trading, but monopolized export trade such as clove, nutmeg, mace, cacao, maleleuca oil and timber. Meanwhile, the Ambon inhabitants had small role in trading because they lacked enough capital so that they could not compete with the Arabian and Chinese traders. The big role of Government in trading caused the trade in the city undeveloped well.

Clove is the basic commodities from the island of Ambon, but in its development, clove trade decreased as the result of the decline of the clove price in the European market. This caused trade in Ambon declined. Meanwhile, fishery and home industry could not develop. Fishery could not develop because the technology being used was still very simple, while the salted-fish processing

was difficult to do because of lack of salt. Home industry could not develop because of the lack of capital and the use of very simple technology, and the lack of raw materials. Like Ambon, the surrounding islands had limited economic potency. The islands functioned as supporting regions of the port city which supplied foodstuffs and little export products.

A Port has important roles for the evolution of a port city. However, the coastal condition in Ambon could not support the evolution of the port city. The waters and estuaries of the rivers in Ambon were shallow and could not function as a place for ships to anchor. The political and economic domination of the Dutch, the limitedness of the regional potencies, clove trade monopoly and the condition of the waters caused the port city in 1817 to 1865 declined.



BAB I

PENGANTAR

1. Latar Belakang Masalah

Cengkih, pala, dan fuli yang di pasaran internasional biasa disebut sebagai *The Trinity of Spices*,¹ merupakan hasil bumi yang utama dari Pulau Ambon. Di antara ketiga hasil bumi itu cengkih yang paling banyak dicari orang, sebab mempunyai banyak kegunaan antara lain untuk kesehatan dan untuk melezatkan masakan. Bangsa Cina menggunakan cengkih untuk obat-obatan, mempermanis dan mengharumkan nafas, serta untuk membumbui makanan. Di Eropa cengkih digunakan sebagai obat untuk mempertajam pandangan, mendinginkan kepala, dan bila ditambahkan pada makanan dan minuman dapat menambah nafsu makan, melancarkan air seni, dan membersihkan usus.²

Oleh karena cengkih itu, Pulau Ambon menarik berbagai bangsa seperti, Portugis, Belanda, dan Inggris untuk menguasainya. Diantara bangsa-bangsa itu, bangsa Belanda

¹Leonard Y. Andaya, The World of Maluku Eastern Indonesia in the Early Modern Period (Honolulu: University of Hawai Press, 1993), hlm. 1.

²Ibid.

yang berhasil menduduki Pulau Ambon dalam waktu yang relatif lebih lama.

Pendudukan Belanda atas Pulau Ambon dimulai pada tahun 1605, dengan tujuan utama mengadakan monopoli perdagangan cengkih. Untuk mewujudkan tujuannya itu maka penguasaan daerah secara politis dan ekonomis menjadi sangat penting. VOC kemudian menerapkan berbagai kebijakan politik dan ekonomi, yang mendapat pengaruh dari perkembangan politik ekonomi merkantilis yang sedang berkembang di Eropa.³

³Merkantilis merupakan politik ekonomi yang berpengaruh di Eropa dari sekitar tahun 1500 sampai kira-kira pertengahan abad ke-18. Ketika itu peredaran uang di Eropa mulai berkembang, sehingga negara-negara merkantilis bermaksud untuk melindungi perkembangan industri dan perniagaan negeri masing-masing. Oleh karena uang dipersamakan dengan kekayaan, mereka berusaha mendapatkan emas, bahan mata uang, dengan meningkatkan hasil produksi pabrik, ekspor, biaya impor dan pemerasan kolonial oleh negara. Pengawasan oleh negara merupakan bagian vital dalam proses tersebut. Ensiklopedi Indonesia. No. 4. (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1989), hlm. 2210. Pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik ekonomi merkantilis untuk melindungi perdagangan dan industri nasionalnya dengan cara, pemungutan bea cukai yang tinggi untuk perdagangan asing, menerapkan pajak yang berbeda-beda di tanah jajahan demi kepentingan hasil-hasil industri dari negeri induk, monopoli perdagangan barang-barang kolonial. Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. Jilid II (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 11. Di samping itu salah satu tujuan dijalankannya politik ekonomi merkantilis, supaya mengalirnya modal ke luar dapat dicegah oleh koloni yang menjamin tersedianya barang-barang mentah, yang selanjutnya

Beberapa kebijakan politik dan ekonomi itu meliputi, ekstirpasi,⁴ *hongi-tochten*,⁵ monopoli perdagangan cengkih dan pengangkutannya, menutup pelabuhan Ambon bagi kapal-kapal yang berbendera asing, membatasi kekuasaan para

akan digunakan untuk membeli emas. Robert Sobel, Basic Facts to Improve Your Grades in United States History (New York: Collier Books, 1963), hlm. 5.

⁴Ekstirpasi yaitu penebangan pohon-pohon cengkih dan pala untuk membatasi produksi. E. Katoppo, Nuku Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 30.

⁵*Hongi* dalam bahasa Ternate berarti "armada" atau "angkatan kapal laut". Sartono Katodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium. Jilid I (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), hlm., 179. Pada jaman Portugis *hongi* sudah ada. Pada masa Belanda, *hongi* pertama kali diterapkan pada tahun 1607. Pada saat itu dalam melaksanakan tugas, *kora-kora Gnato Hudi*, para pelaut *Mardijker*, dijalankan di belakang *kora-kora* Gubernur dengan cap dan bendera Belanda, kemudian diikuti oleh *kora-kora* Raja Soja, Kilang dan Nusanive, yang semuanya mempunyai nama keluarga Portugis seperti, Emanuel Coelho, Thomas de Sousa, Duarte, dan Silva. Dahulu raja-raja Maluku menggunakan *hongi* untuk memungut pajak, menjatuhkan hukuman, menghancurkan dan merompak. R. Broersma, "Koopvaardij in de Molukken", Koloniaal Tijdschrift. Drie-en-Twintigste Jaargang. 1934, hlm. 130. Pelayaran *Hongi* kemudian berubah buruk fungsinya sebab digunakan sebagai sarana untuk membunuh tanaman cengkih yang melebihi jatah monopoli, juga untuk mengusir para penyelundup. H.J. de Graaf, Geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken (T. Wever B.V.-Franeker, 1977), hlm. 52. *Hongi-tochten* merupakan armada yang jumlahnya mencapai 100 *kora-kora*, yang didayung dengan cepat sekali oleh sekitar 100 pendayung, dilengkapi dengan bendera, umbul-umbul, dan genderang. Willard A. Hanna, Hikayat Jakarta (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm. 72.

elite lokal,⁶ khususnya yang memerintah dan untuk seterusnya disebut penguasa pribumi, penanaman paksa dan penyerahan wajib cengkih, larangan dan pembatasan perdagangan asing.

Secara politis dan ekonomis penguasa pribumi mempunyai peran dan kedudukan yang penting di dalam masyarakatnya. Oleh sebab itu untuk dapat mewujudkan tujuannya VOC perlu membatasi kekuasaan para penguasa pribumi. Melalui perjanjian politik yang sebagian besar dicapainya dengan kekerasan, VOC berhasil mengambil alih peran penguasa pribumi dalam perdagangan cengkih khususnya dan penyerahan wajib cengkih. Selanjutnya VOC menempatkan penguasa pribumi di bawah kekuasaannya dan diberi tugas sebagai pengawas perkebunan cengkih dan perantara hubungan antara VOC dengan penduduk pribumi. Untuk tugas itu penguasa pribumi mendapat bonus sebesar 5 *rixdollars* Spanyol per *bahar*

⁶Istilah "elite" digunakan pada abad ke-17 untuk menyebut barang-barang dagangan yang mempunyai keutamaan khusus. Istilah itu kemudian digunakan juga untuk menyebut kelompok-kelompok sosial yang tinggi seperti, kesatuan-kesatuan militer yang utama atau kalangan bangsawan atas. Elite dapat dibedakan dalam dua kelompok yakni, elite yang memerintah yang terdiri dari para individu yang secara langsung maupun tidak langsung memainkan bagian yang berarti dalam pemerintahan, dan elite yang tidak memerintah yang terdiri dari mereka yang tidak termasuk dalam kelompok pertama. T.B. Bottomore, "Kelompok Elite dan Masyarakat", Sartono Kartodirdjo, penyunting, Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 24-25.

seberat 550 lb.⁷

Pendudukan Ambon oleh VOC telah membuka babak baru bagi sejarah pelabuhan Ambon. Pada masa sebelum Kompeni, pelabuhan Ambon belum menunjukkan fungsinya sebagai pelabuhan dagang yang patut diperhitungkan. Pelabuhan Ambon masih merupakan pelabuhan persinggahan dan bersifat lokal, karena fungsinya hanya untuk melayani kepentingan lokal. Secara berangsur-angsur pelabuhan Ambon berkembang fungsinya menjadi pelabuhan *enterport* atau sebagai pelabuhan penimbunan barang-barang hasil bumi dari daerah di sekitarnya. Perubahan itu berkaitan erat dengan keberhasilan budi daya tanaman cengkih di Pulau Ambon yang menjadi komoditi ekspor untuk pasar internasional. Dengan berkembangnya pelabuhan Ambon maka kota Ambon juga ikut berkembang. Dapat dikatakan bahwa perkembangan kota Ambon berjalan seiring dengan perkembangan pelabuhan Ambon.

Dari hasil monopoli perdagangan cengkih, VOC mendapatkan keuntungan yang besar. Akan tetapi hal itu tidak dapat berlangsung terus, sebab VOC bangkrut sebagai akibat

⁷G.J. Knaap, "Some Observations on a Thriving Dancing-Party the Cultivation for Cloves in Sixteenth and Seventeenth Century Ambon", Sartono Kartodirdjo, ed., Papers of the Fourth Indonesian-Dutch History Conference Yogyakarta 24-29 July 1983. Agrarian History, volume one. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986), hlm. 81.

terjadinya kecurangan dan korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC. Sesudah itu Pulau Ambon diduduki oleh Inggris.

Pendudukan Ambon oleh Inggris yang relatif singkat yakni tahun 1811-1816, telah memberi warna baru bagi perkembangan kota pelabuhan Ambon. Perdagangan di pelabuhan Ambon mulai ramai apabila dibandingkan dengan masa sebelumnya, sehingga muncul suatu kesimpulan bahwa Inggris mencoba menjadikan pelabuhan Ambon sebagai pelabuhan internasional di Asia.⁸ Pelabuhan Ambon menjadi relatif lebih ramai karena Pemerintah Inggris dengan kebijakannya yang liberal,⁹ melaksanakan perdagangan bebas dan membuka

⁸R.Z. Leirissa, dkk., Maluku Tengah di Masa Lampau Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982), hlm. 149.

⁹*Liberalisme* merupakan paham kebebasan. Dalam pandangan John Locke manusia dilahirkan sama, secara alami setiap orang mempunyai kebebasan yang sama. Selanjutnya dikatakan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia bukan kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang dibatasi oleh hukum alam. Hukum itu memberikan ketentuan bahwa tidak seorangpun dibenarkan merusak orang lain dalam soal hidup matinya, kesehatannya, kemerdekaannya, ataupun miliknya. Sir Ernest Baker, ed., Social Contract (London: Oxford University Press, 1958), hlm. 6-7. Dalam keadaan alami itu manusia mempunyai kebebasan menentukan dirinya, menggunakan miliknya sejauh tidak bertentangan dengan hukum alam. Semua manusia sama dalam arti bahwa semua memiliki hak yang sama untuk mempergunakan kemampuan yang ada pada dirinya. Franz Magnis Suseno, Etika Politik (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 220. Dalam kaitannya dengan daerah jajahan yang paling pokok dari ideologi liberal yakni

pelabuhan Ambon sebagai pelabuhan bebas, sehingga pelbagai kapal dapat memasuki pelabuhan untuk berdagang.

Ketika Belanda kembali ke Pulau Ambon perdagangan dan pelayaran bebas tidak berlaku lagi, sebab Pemerintah Hindia Belanda melarang dan membatasi perdagangan asing, serta menutup pelabuhan Ambon sebagai pelabuhan bebas. Di samping itu pelayaran niaga antar pulau diawasi dengan cara mengeluarkan surat ijin pelayaran yang disebut *pas*.¹⁰ Tampaknya Pemerintah Hindia Belanda masih berharap dapat meraih sukses dalam perdagangan cengkih seperti yang pernah dialami oleh VOC. Oleh sebab itu monopoli perdagangan cengkih menjadi tujuan utama pendudukan Belanda di Ambon. Untuk mewujudkan tujuannya itu Pemerintah Hindia Belanda melanjutkan kebijakan politik dan ekonomi VOC, yang berlawanan dengan pemikiran liberal yang tengah berkembang di negeri Belanda pada waktu itu.

Tampak bahwa pemikiran liberal kurang berpengaruh pada pengambilan kebijakan politik kolonial. Hal itu

prinsip kebebasan dalam pemerintahan, kebebasan pribadi, perdagangan bebas, penghapusan kerja paksa, dan jaminan hukum bagi penduduk pribumi.

¹⁰Di dalam *pas* biasanya terdapat keterangan tentang jenis dan bobot perahu, pemiliknya, kadang-kadang barang dagangannya, dan tujuannya. R.Z. Leirissa, dkk., 1982, loc. cit.

disebabkan, bahwa sistem liberal kurang cocok diterapkan pada masyarakat jajahan yang masih bersifat komunal dan berdasar pada ekonomi natura. Di samping itu kurang dapat melindungi kepentingan ekonomi nasional Belanda. Oleh sebab itu kebijaksanaan politik kolonial yang berdasarkan pada pandangan golongan konservatif yang dijiwai oleh pemikiran merkantilis, yang paling menguntungkan dan mungkin untuk dilaksanakan.

Keadaan geografi menentukan jenis tanaman, teknologi, kebudayaan, aktivitas, dan watak masyarakatnya.¹¹ Pulau Ambon beriklim tropis, mempunyai curah hujan yang merata sepanjang tahun, dan keadaan alamnya yang bergunung-gunung menyebabkan tumbuh suburnya tanaman cengkih. Akan tetapi sistem persawahan tidak muncul, karena kurangnya tanah datar dan beberapa sungai yang ada relatif kecil dan dangkal, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengairi sawah. Selain tanaman cengkih tanaman yang dapat tumbuh subur yakni tanaman sejenis palma seperti pohon sagu dan kelapa,¹² tetapi tanaman itu bukan merupakan tanaman

¹¹Untuk penjelasan itu dan contohnya lihat Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II. Volume I (New York: Harper & Row, 1972), hlm. 25-162

¹²J. Keuning, Sejarah Ambon Sampai Pada Abad ke-17. (Jakarta: Bhratara, 1973), hlm. 8.

ekspor untuk pasar internasional. Tanaman yang lain seperti, kopi, teh, kayu manis, dan tembakau kurang dapat berkembang karena tanahnya kurang cocok untuk tanaman itu, kekurangan modal, dan kekurangan tenaga kerja.

Laut Ambon mempunyai berbagai macam ikan tetapi perikanan kurang dapat berkembang, sebab teknologi penangkapan ikan yang digunakan masih sangat sederhana. Pada abad ke-19 alat yang dipakai untuk menangkap ikan antara lain, tali, pancing, jala, bubu, dan sero.¹³ Di samping itu pengolahan ikan menjadi ikan asin sulit dilakukan karena garam sulit didapatkan. Di Ambon terdapat beberapa tempat penggaraman, tetapi garam yang dihasilkan mutunya sangat rendah, dan tidak baik untuk mengasinkan ikan. Oleh sebab itu untuk mengasinkan ikan penduduk mendatangkan garam dari Jawa.

¹³Bubu merupakan alat perangkap ikan yang terbuat dari bambu atau rotan dan berbentuk silinder, sehingga mudah diikat dari dalam air dan diangkut ke daerah penangkapan untuk dipasang di dasar, atau dekat permukaan perairan selama jangka waktu tertentu. Bubu yang telah berisi ikan juga berfungsi sebagai alat pengangkut. Bubu mempunyai pintu masuk satu atau dua, dan untuk mengambil hasil tangkapan ada pintu khusus. Ensiklopedi Indonesia. No. I. (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1989), hlm. 530. Sero merupakan alat penangkap ikan yang terdiri dari susunan sejumlah pagar dari kere bambu, yang berfungsi sebagai penuntun ikan menuju ke perangkap yang sebenarnya. Hasil tangkapan yang terkumpul di bilik sero paling ujung kemudian diambil dengan serok. Ibid, hlm. 3101.

Industri rumah tangga seperti, penenunan kain, kerajinan dari emas, perak, dan besi kurang dapat berkembang, sebab wilayah Ambon tidak menghasilkan bahan bakunya, kekurangan modal, dan teknologi yang dipakai masih sangat sederhana. Demikian pula kerajinan dari bunga karang dan bulu burung kurang dapat berkembang, walaupun bahan bakunya tersedia cukup banyak. Hal itu disebabkan oleh sedikitnya modal, terbatasnya konsumen dan daerah pemasaran.

Berdasarkan kondisi geografi seperti itu dapat dikatakan bahwa Pulau Ambon mempunyai potensi alam yang terbatas. Di antara hasil bumi, cengkih merupakan komoditi ekspor yang paling utama. Akan tetapi dalam perkembangannya perdagangan cengkih menurun, sebagai akibat semakin turunnya harga cengkih di pasaran Eropa.¹⁴ Harga cengkih turun karena pasar Eropa telah dipenuhi oleh cengkih dari berbagai wilayah seperti dari, Madagaskar, Mauritius, dan Zansibar. Dengan demikian cengkih tidak lagi menjadi monopoli alamiah Pulau Ambon, sebab sesungguhnya tanaman cengkih tidak hanya dapat ditanam di daerah yang istimewa seperti Ambon, tetapi wilayah lain yang mempunyai iklim

¹⁴G.W.W.C. Baron van Hoëvell, "De Hervorming der Molukken", Tijdschrift Voor Nederlandsch Indië. 2^e Jaargang. 1. Eerste Gedeelte (Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon, 1868), hlm. 135.

dan jenis tanah yang mirip dengan Ambon, cengkih dapat dibudidayakan.¹⁵ Akibatnya monopoli perdagangan cengkih oleh Belanda yang telah berlangsung begitu lama tidak dapat dipertahankan lagi.

Perkembangan kota ditentukan pula oleh aktivitas kelompok-kelompok sosial yang berada di dalam kota itu sendiri. Oleh karena perdagangan mempunyai pengaruh yang menentukan bagi perkembangan kota, maka golongan pedagang mempunyai peran yang menentukan bagi maju mundurnya kota. Pedagang Arab, Cina, dan *Burger*.¹⁶ perannya dalam perda-

¹⁵AAK, Petunjuk Bercocok Tanam Cengkih (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 28-41.

¹⁶*Burger*, pada awalnya merupakan golongan bekas budak orang Portugis yang berada di Kota Ambon yang kemudian dibebaskan oleh VOC, dan diberi tempat pemukiman sendiri di sekitar benteng Victoria. Mereka dikenal dengan nama *Mardijkers*, dan kampung tempat tinggalnya dikenal dengan nama kampung *Mardika*. Dalam perkembangannya pegawai VOC yang menetap di kota Ambon, dan tidak bekerja sebagai pegawai Pemerintah dikelompokkan dalam golongan *Burger*. Dengan demikian tercipta suatu golongan dalam *Burger* yang bukan pegawai pemerintah dan bukan anak negeri. Kehidupan *Burger* diatur oleh Gubernur, diwajibkan turut mempertahankan benteng Victoria bila keadaan memerlukannya. Oleh sebab itu mereka diharuskan melakukan latihan-latihan militer di bawah pimpinan seorang Sersan, dan dikelompokkan menurut kebiasaan tentara lengkap dengan kepangkatan-kepangkatannya. R.Z. Leirissa, "Maluku Tengah Dalam Abad Ke Sembilan Belas: Studi Pendahuluan", Prisma. Th. IX, no. 8, 1980 (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 74. Semua *Burger* yang tinggal di kota mendapat seragam militer dan dipersenjatai. G.W.W.C. Baron van Hoëvell, Ambon en Meer Bepaalde-lijk de Oeliasers, Geographisch, Ethnographisch, Politisch, en Historisch Geschets (Dordrecht: Blusse en van

gangan terbatas sebab Pemerintah menguasai perdagangan ekspor beserta pengangkutannya dan mengadakan larangan serta pembatasan dalam perdagangan. Pedagang Arab, Cina, dan *Burger* hanya terbatas peranannya dalam perdagangan impor.

Kemunduran perdagangan cengkih dan potensi wilayah Ambon yang terbatas menyebabkan pelayaran dan perdagangan ke Ambon tidak lagi menarik para pedagang, akibatnya kota Ambon mengalami kemunduran. Untuk mengatasi masalah itu, pada tahun 1854 Gubernur Jendral Charles Ferdinand Pahud

Braam, 1875), hlm. 18. Kelompok itu dinamakan *Schutterij*. Pada abad ke-19, seseorang mudah mendapatkan status *Burger*, tidak saja orang Eropa, Indo Eropa, Cina, dan Arab yang berdiam di sekitar benteng, tetapi anak negeripun dapat memperolehnya. Caranya dengan menunjukkan bukti bahwa pekerjaannya bersangkutan dengan kehidupan kota, atau orang tuanya sudah lama berdiam di kota, maka orang itu dapat mengajukan permohonan untuk mendapat status *Burger*, dan bila disetujui mereka mendapat Surat Keterangan *Burger*. Golongan *Burger* dibebaskan dari semua tugas rodi, yang melekat pada status penduduk pribumi. Sebagai penggantinya mereka diwajibkan membayar Kas *Burger* pada pengurus *Burgerij*. Di samping itu mereka diwajibkan menjadi anggota *Schutterij*. R.Z. Leirissa, 1980, loc. cit. Golongan *Burger* disebut pula Golongan Warga. G.W.W.C. Baron van Hoëvell, 1875, op. cit., hlm. 34, dan P. Bleeker, Reis Door de Minahasa en den Molukschen Archipel Gedaan in de Maanden September en Oktober 1855 in het Gevolg van den Gouverneur Generaal Mr. A.J. Duymaer van Twist (Batavia: Lange & Co., 1856), hlm. 156.

membuka pelabuhan Ambon, Ternate, Banda, dan Kajeli di Pulau Buru sebagai pelabuhan bebas.¹⁷ Ternyata pembukaan pelabuhan Ambon sebagai pelabuhan bebas kurang dapat meningkatkan pelayaran niaga dan perdagangan di kota Ambon, sebab di pelabuhan bebas masih ada pungutan cukai bagi kapal yang berlabuh, tidak ada kebebasan dalam perdagangan, dan Pemerintah Hindia Belanda masih memonopoli perdagangan cengkih.

Ada perbedaan mengenai pengertian pelabuhan bebas antara Belanda dengan Inggris. Bagi Inggris pelabuhan bebas berarti pelabuhan yang bebas dari semua beban pajak perdagangan seperti, pajak impor, ekspor, dan pelabuhan. Di samping itu tidak dibenarkan adanya pemberian hak-hak istimewa kepada pedagang dan pengusaha tertentu, larangan berniaga komoditi tertentu, formalitas yang menghambat, dan menghidupkan keadaan persaingan bebas.¹⁸ Bagi Pemerintah Hindia Belanda yang dimaksudkan dengan pelabuhan bebas adalah pelabuhan yang bebas disinggahi oleh kapal-kapal

¹⁷R.Broersma, *op. cit.*, hlm. 139, dan G.W.W.C. Baron van Hoëvell, 1868, *op. cit.*, hlm. 128-129.

¹⁸Edward Lamberthus Poelinggomang, Proteksi dan Perdagangan Bebas: Kajian Tentang Perdagangan Makasar Pada Abad Ke-19. Disertasi dari Vrije Universiteit te Amsterdam, tahun 1991, hlm. 1-2. Tidak diterbitkan.

berbendera asing tetapi dengan syarat harus membayar pajak. Dapat dikatakan bahwa pelabuhan bebas yang dimaksudkan oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah pelabuhan bebas yang bersyarat.

Pelabuhan Ambon mempunyai peranan yang penting bagi perkembangan kota Ambon. Akan tetapi pelabuhan Ambon kurang dapat berkembang menjadi pelabuhan yang besar karena kondisi alam pantai Ambon yang kurang mendukung perkembangannya. Pelabuhan Ambon mempunyai pantai yang dangkal dan beberapa sungai mempunyai muara yang sempit dan dangkal, sehingga menyulitkan kapal-kapal yang berukuran relatif besar untuk merapat ke pantai. Hanya kapal-kapal yang berukuran relatif kecil yang dapat merapat ke pantai. Oleh karena kondisi pantai pelabuhan itu maka aktivitas perniagaan menjadi terhambat.

Dari penjelasan itu tampak bahwa faktor monopoli perdagangan cengkih, keterbatasan potensi wilayah sekitar kota Ambon dan pulau di sekitarnya, serta kondisi alam pelabuhan Ambon, berpengaruh pada perkembangan kota pelabuhan Ambon. Oleh sebab itu kota pelabuhan Ambon menarik sebagai bidang kajian sejarah, bagaimana dinamika perkembangannya pada tahun 1817-1865 ?

2. Perumusan Masalah

Penelitian ini hendak menjelaskan perkembangan kota pelabuhan Ambon dari tahun 1817 sampai tahun 1865. Permasalahan-permasalahan pokok yang hendak diteliti adalah,

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perkembangan kota pelabuhan Ambon, dan bagaimana faktor-faktor itu saling kait mengkait sehingga dapat mempengaruhi perkembangan kota ?
2. Bagaimanakah hubungan antara perkembangan pelabuhan dengan perkembangan kota Ambon ?
3. Apakah dampak perkembangan kota bagi kehidupan sosial ekonomi penduduk ?

3. Keaslian Penelitian

Kajian tentang perkembangan kota pelabuhan Ambon periode tahun 1817 sampai tahun 1865 belum ada. Memang ada beberapa penelitian tentang Ambon, tetapi masih bersifat umum dan tidak menjelaskan tentang perkembangan kota pelabuhan itu sendiri. Oleh sebab itu kajian tentang perkembangan kota pelabuhan Ambon dari tahun 1817 sampai tahun 1865 merupakan penelitian yang asli. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian tentang sejarah Ambon itu sendiri, serta kota-kota pelabuhan di wilayah Indonesia bagian Timur.

4. Sasaran Studi

Banyak aspek yang dapat dikaji dari sejarah kota pelabuhan seperti, aspek sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Oleh karena luasnya aspek kota itu maka penulisan ini dibatasi pada aspek sosial ekonomi. Dalam aspek sosial akan dibahas mengenai kelompok-kelompok sosial yang berperan dalam perkembangan kota pelabuhan Ambon seperti, pedagang Cina, Arab, *Burger*, Makasar, dan Bugis. Di samping itu akan dibahas pula kelompok elite pribumi, karena perannya sebagai pengawas perkebunan cengkih dan perantara hubungan antara Pemerintah dengan penduduk pribumi. Penguasa pribumi merupakan penentu bagi keberhasilan penanaman paksa dan penyerahan wajib cengkih dari penduduk kepada Pemerintah. Di dalam aspek ekonomi akan dibahas mengenai perdagangan kota, ekspor dan impor, cukai, pelayaran niaga, peranan pelabuhan, potensi ekonomi Pulau Ambon dan pulau di sekitarnya yang mendukung perkembangan kota.

Sejarah Kota Pelabuhan Ambon merupakan salah satu bentuk dari sejarah lokal.¹⁹ Batasan spasial dari penulis-

¹⁹Menurut Pierre Goubert, sejarah lokal adalah sejarah mengenai desa, beberapa desa, kota kecil, kota ukuran sedang, dan daerah geografi yang tidak lebih besar dari unit propinsi pada umumnya. Pierre Goubert, "Local History", Felix Gilbert and Stephen R. Graubard, ed., Historical Studies Today (New York: W.W. Norton and Company Inc., 1972), hlm. 300. Menurut Taufik Abdullah, pengertian lokal

an ini adalah kota pelabuhan Ambon. Pembatasan lokalitas itu didasarkan pada alasan bahwa perdagangan cengkih merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota. Batasan temporalnya adalah tahun 1817 sampai tahun 1865. Pengambilan batasan tahun 1817 didasarkan pada alasan, bahwa tahun 1817 merupakan tahun awal pendudukan Belanda di Ambon setelah pendudukan Inggris. Tepatnya pada tanggal 25 Maret 1817, Pemerintah Inggris yang diwakili oleh pejabat W.B. Marten menyerahkan Pulau Ambon pada Belanda yang diwakili oleh komisaris J.A. van Middelkoop dan Nicolaas Engelhard.²⁰

Pada tahun itu juga Pemerintah Hindia Belanda membentuk administrasi pemerintahan, yaitu *Gouvernement der Molukken* yang wilayah kekuasaannya mencakup seluruh kepulauan yang terbentang antara Sulawesi sampai Irian Barat, dengan pusat pemerintahan Kota Ambon. *Gouvernement der Molukken* itu sebenarnya merupakan hasil penyatuan dari

adalah "tempat", "*locality*", yang batasannya ditentukan oleh "perjanjian" yang diajukan penulis sejarah. Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979), hlm. 14-15.

²⁰P.H. van der Kemp, "Het Herstel van het Nederlandsch Gezag in de Molukken Naar Oorspronkelijke Stukken", *Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlands Indië* ('S Gravenhage: 1911-1912), hlm. 450; H.J. de Graaf, *op. cit.*, hlm. 213.

tiga administrasi pemerintahan yang pernah dibangun oleh VOC, yakni *Gouvernement der Molukken*, *Gouvernement van Amboina*, dan *Gouvernement van Banda*. Pada masa VOC wilayah *Gouvernement der Molukken* meliputi Maluku Utara ditambah daerah ekspansi kerajaan Tidore di Irian Barat bagian utara dengan pusat pemerintahan di Ternate. Wilayah *Gouvernement van Amboina* meliputi seluruh Maluku Tengah dengan pusat pemerintahan di Ambon, sedangkan *Gouvernement van Banda* wilayahnya mencakup Maluku Tenggara dan Barat Daya dengan pusat pemerintahan di Banda Neira.²¹ Penyatuan ketiga administrasi pemerintahan itu oleh Belanda didasarkan pada alasan penghematan, sebab perekonomian negeri Belanda hancur akibat perang Napoleon dan isolasi ekonomi yang disebabkan oleh Stelsel Kontinental, yang menyebabkan Belanda kehilangan sebagian besar perdagangan dan pelayarannya. Demikian pula perannya sebagai pasar penimbunan barang menjadi mundur.²² Alasan lain yaitu mempermudah pengawasan dan memusatkan monopoli perdagangan cengkih di satu wilayah.

Pengambilan batasan tahun 1865 didasarkan pada alasan, pertama terjadi reorganisasi administrasi pemerintah-

²¹R.Z. Leirissa, dkk., 1982, *op. cit.*, hlm. X-XI

²²Sartono Kartodirdjo, 1992, *op. cit.*, hlm. 10.

an yaitu Residensi Menado berdiri sendiri sebagai residensi, demikian pula dengan residensi Ternate. Kedua, adanya penggabungan tiga wilayah yaitu Maluku Tengah digabung dengan Maluku Tenggara dan Barat Daya menjadi satu wilayah yang diberi nama Residentie Amboina, dengan pusat pemerintahan di Ambon.²³ Ketiga, pada tahun 1864 Pemerintah Hindia Belanda menghapus monopoli cengkih, tetapi Pemerintah masih menerima cengkih sampai tahun 1865.

5. Faedah Yang Dapat Diharapkan

Faedah yang dapat diharapkan dari penelitian ini, pertama, memperkaya khasanah sejarah lokal untuk memberi sumbangan bagi pemahaman sejarah nasional. Sejarah lokal sebagai *micro-unit* mempunyai ciri khas yang tidak terdapat pada *micro-unit* lain ataupun pada *macro-unit*.²⁴ Sejarah lokal mempunyai permasalahannya sendiri, mempunyai latar belakang sosio-kultural sendiri, yang jelas tidak akan tampak bila dideskripsikan secara makro pada tingkat nasional. Oleh sebab itu sejarah lokal seperti halnya sejarah nasional bersifat otonom, dalam pengertian merupa-

²³R.Z. Leirissa, dkk., loc. cit.

²⁴Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 26.

kan bidang kajian yang dapat berdiri sendiri karena kekhasannya itu. Dalam kaitannya dengan sejarah nasional, sebagai *macro-unit* sejarah nasional mencakup interaksi antar *micro-unit* antara lain melalui pelayaran, perdagangan, perang, penyiaran agama, atau menuntut belajar, hubungan antar lembaga-lembaga nasional seperti partai-partai politik.²⁵ Dengan demikian pengkajian sejarah lokal berfaedah bagi pemahaman sejarah nasional.

Kedua, mengungkap sejarah kota pelabuhan khususnya di wilayah Indonesia Bagian Timur. Penelitian ini penting sebab dapat dijadikan titik tolak bagi Pemerintah Republik Indonesia, dalam mengambil kebijakan untuk mengembangkan kota pelabuhan masa sekarang dan masa-masa yang akan datang.

Ketiga, penelitian ini merupakan studi awal dan diharapkan dapat menggugah minat sejarawan atau penulis lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai kota-kota pantai di wilayah Maluku yang merupakan suatu unit kajian sejarah tersendiri.

²⁵Ibid.

6. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini hendak mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota pelabuhan Ambon, peranan pelabuhan Ambon bagi perkembangan kota, dan dampak kemunduran kota bagi kehidupan sosial ekonomi penduduk. Supaya tujuan itu dapat mencapai sasarnya, maka akan dijelaskan pokok-pokok pembahasan yang khusus, sekaligus untuk membatasi luasnya jawaban terhadap permasalahan, yaitu kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dalam bidang politik dan ekonomi, perdagangan kota, ekspor dan impor, kelompok-kelompok sosial yang ikut berperan dalam bidang perdagangan, pelayaran niaga, potensi wilayah Pulau Ambon dan pulau di sekitarnya sebagai wilayah penyangga, dan dampak kemunduran kota pelabuhan Ambon bagi kehidupan sosial ekonomi penduduk.

7. Tinjauan Sumber

Ada beberapa sumber yang digunakan dalam penulisan ini. Pertama, arsip-arsip dari masa Pemerintahan Hindia Belanda antara periode tahun 1800 sampai tahun 1900, yang terdapat dalam koleksi Arsip Nasional. Arsip-arsip itu berupa surat-surat (*missiven*) dari pejabat pemerintah Hindia Belanda mengenai perdagangan dan pelayaran, yang dilengkapi dengan lampiran yang berisi tentang barang-

barang yang diekspor dan diimpor lengkap dengan berat, harga, jumlah, jenisnya, nama kapal, dan nahkodanya.

Kedua, *Algemeen Verslag over het jaar 1849, 1855, 1858-1859, Inkoop en kosten van lijnwaden over het jaar 1827, dan Inkoop en kosten van rijst over het jaar 1827.*

Ketiga, dokumen yang digunakan yaitu *Staatsblad van Nederlandsch Indië over het jaar 1824, No. 19 a*, terutama mengenai peraturan Pemerintah Hindia Belanda, hak, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para penguasa negori dan penduduk pribumi.

Keempat, buku tentang perjalanan pejabat Pemerintah Hindia Belanda, seperti perjalanan Gubernur Jendral Mr. A.J. Duymaer van Twist ke Minahasa dan Kepulauan Maluku, yang ditulis oleh P. Bleeker seorang ahli ikan. Dalam buku itu diuraikan tentang keadaan Karesidenan Amboina secara umum. Uraian yang paling banyak mengenai perdagangan, ekspor dan impor yang dilengkapi dengan tabel-tabel, penduduk kota yang majemuk, kesehatan masyarakat, hak dan kewajiban penduduk *negori* pada Pemerintah Hindia Belanda dan penguasa *negori*, perkebunan cengkih yang dilengkapi dengan jumlah pohon dan hasil panen, harga cengkih, dan jumlah dati yang terlibat dalam penanaman cengkih, uraian singkat mengenai keadaan flora dan fauna Pulau Ambon, pengangkutan kota, dan pertahanan kota. Uraian itu sangat

membantu dalam penulisan ini terutama mengenai perdagangan, ekspor dan impor, perkebunan cengkih dan masyarakat Ambon.

Buku tentang perjalanan Gubernur Jendral Charles Ferdinand Pahud seorang Perwira dari Pemerintahan Raja ke Kepulauan Maluku. Di dalam buku itu diuraikan tentang fisik kota Ambon, pemandangan alam Teluk Ambon, pelayaran niaga, kebun cengkih, panen cengkih dan harganya, penduduk kota dan aktivitasnya, upah kerja, barang-barang ekspor dan impor, serta jumlah kapal yang berlabuh dan berangkat dari pelabuhan Ambon. Buku itu penting dalam penulisan ini, karena dapat membantu untuk menjelaskan perkembangan pelayaran niaga di Pulau Ambon, perdagangan, ekspor dan impor.

Beberapa buku yang digunakan dalam penulisan ini pertama, karya E.W.A. Ludeking, *Schets van de Residentie Amboina*. Buku itu berisi banyak informasi tentang Ambon yang sangat membantu penulisan ini. E.W.A. Ludeking menguraikan secara panjang lebar mengenai kondisi geografi, geologi, dan iklim Pulau Ambon, yang ternyata memberi pengaruh besar pada pertanian, peternakan, kebudayaan, yang meliputi jenis dan cara berpakaian, serta pembuatan berbagai makanan dari sagu. Selanjutnya diuraikan tentang struktur masyarakat Ambon terutama masyarakat kota Ambon

yang mempunyai keragaman penduduk. Dalam bidang perdagangan diuraikan tentang jenis dan barang yang diperdagangkan, terutama barang-barang ekspor dan impor yang dilengkapi dengan jumlah barang yang diekspor dan diimpor, serta golongan-golongan sosial yang terlibat dalam perdagangan.

Masalah kesehatan masyarakat mendapat perhatian yang besar dari E.W.A. Ludeking. Dijelaskan bahwa kondisi masyarakat Residensi Amboina kurang baik, sebagai akibat berjangkitnya berbagai wabah penyakit hampir sepanjang abad ke-19. Di antara berbagai wabah penyakit itu yang paling banyak meminta korban adalah penyakit cacar, kolera, dan malaria. Secara umum penyebab rendahnya tingkat kesehatan masyarakat adalah kondisi kota Ambon yang kotor, saluran air yang ada tidak berfungsi, dan mutu makanan yang dikonsumsi oleh penduduk rendah. Untuk memperjelas kondisi kesehatan masyarakat, E.W.A. Ludeking melengkapi buku itu dengan tabel yang berisi jumlah penduduk yang menikah, meninggal, dan lahir, serta jumlah penduduk yang divaksinasi cacar dan divaksinasi cacar ulang. Kekurangan dari buku ini terletak pada sedikitnya informasi mengenai hasil bumi, dan perdagangan dari pulau-pulau di sekitar Ambon seperti Pulau Buru, Pulau Seram, Pulau Haruku, Pulau Saparua, dan Pulau Nusa Laut, yang merupakan daerah penyangga kota Ambon.

Kedua, karya J. Keuning, *Sejarah Ambon Sampai Abad Ke-17*. Bagian terbesar dari karya ini menguraikan tentang pergulatan orang-orang Portugis dan Belanda dalam menguasai pasar rempah-rempah, dan misi penyebaran agama nasrani. Usaha bangsa Eropa itu menyebabkan terjadinya pertentangan, konflik-konflik bersenjata, penumpasan, pembunuhan secara massal dan keji, serta penghancuran mata pencaharian penduduk pribumi. Persaingan kedua bangsa itu berlangsung hampir lima puluh tahun dan berakhir dengan kemenangan di pihak Belanda. Selanjutnya J. Keuning menjelaskan usaha VOC untuk menguasai pasar cengkih di Pulau Ambon dan *Uliaser*, dengan jalan mengadakan monopoli perdagangan cengkih, pembatasan daerah penanaman cengkih, dan ekstirpasi untuk membatasi produksi cengkih. Monopoli cengkih oleh VOC mengakibatkan serangkaian perlawanan dari rakyat Ambon yang ternyata sulit ditindas oleh VOC, dan menimbulkan perdagangan gelap. Untuk mengatasi masalah perdagangan gelap VOC menjalankan pelayaran hongkong. Akan tetapi dalam kenyataannya perdagangan gelap tidak dapat dihentikan. Buku ini penting karena memberi banyak informasi tentang Ambon pada masa VOC, yang menjadi latar belakang sejarah dalam penulisan ini.



Ketiga, karya H.J. de Graaf yang berjudul *De Geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken*. Buku itu berisi gambaran umum sejarah Ambon dari masa Portugis sampai masa Pemerintahan Hindia Belanda. Ada satu uraian yang penting dari karya H.J. de Graaf, yakni uraian singkat mengenai pertumbuhan fisik kota Ambon. Dijelaskan bahwa sebelum kedatangan orang Eropa di Maluku Tengah tidak ada kota, tetapi hanya ada *negori*. Orang Portugis membangun kota Ambon yang dimulai dengan pembangunan sebuah benteng. Oleh penduduk setempat benteng itu disebut *Kota Laha*, yang artinya kota di teluk. Di sisi barat daya benteng itu dibangun sebuah pasar.

Pada tahun 1605 benteng itu direbut oleh Belanda, dan secara berangsur-angsur fisik kota Ambon mulai berkembang. Sampai abad ke-18 kota Ambon telah memuat, gereja, toko-toko, pemukiman penduduk, rumah sakit, balai kota baru, rumah fakir dan yatim piatu, rumah Gubernur yang terletak di Batu Gajah dan terkenal dengan sebutan "*Versailles van Ambon*". Karya H.J. de Graaf ini mempunyai kelebihan, karena dilengkapi dengan peta kota Ambon dan beberapa gambar bangunan di kota Ambon, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk dan struktur kota Ambon.

Selain sumber-sumber itu digunakan pula sumber tersier seperti, disertasi, tesis, dan majalah yang berhubungan dengan penulisan ini.

8. Kerangka Konseptual dan Pendekatan

Untuk mengkaji sejarah kota pelabuhan diperlukan pemahaman tentang konsep kota pelabuhan secara jelas. Hal itu penting sebab untuk menghindari penafsiran yang keliru atau multiinterpretasi. Oleh karena pelabuhan Ambon mempunyai kedudukan dan peran yang penting bagi perkembangan kota, maka perlu juga dipahami konsep pelabuhan itu sendiri. Tidak berarti penelitian ini terdiri dari dua topik yang terpisah yakni kota dan pelabuhan, tetapi merupakan satu topik yakni kota pelabuhan. Pemahaman tentang konsep kota dan konsep pelabuhan untuk membantu pemahaman tentang konsep kota pelabuhan secara keseluruhan.

Ada beberapa pengertian tentang pelabuhan seperti, *harbour*, *port*, *haven*, dan *reede*. Menurut Rhoads Murphey, *harbour* lebih menunjuk pada konsep fisik yakni pelabuhan sebagai tempat berlindung bagi kapal-kapal, sedangkan *port* lebih menunjuk pada konsep ekonomi yakni sebagai pusat pertukaran antara darat dan laut. Supaya pertukaran itu dapat berjalan lancar, maka dibutuhkan jalan masuk yang lebih baik dari daerah pantai sampai pedalaman beserta

alat pengangkutannya.²⁶ *Haven* mempunyai pengertian yang mirip dengan *harbour* yaitu tempat berlindung, berteduh, dan tempat singgah.²⁷ Sementara itu *reede* diartikan sebagai pelabuhan luar.²⁸

Pelabuhan Ambon dapat dikelompokkan ke dalam jenis *reede*, sebab hanya kapal-kapal yang berukuran relatif kecil yang dapat merapat sampai pantai, untuk bongkar muat baik barang maupun orang. Sementara itu kapal-kapal yang berukuran relatif besar hanya dapat membuang sauh di luar pantai, maka untuk memindahkan orang dan barang dari kapal besar ke darat dan sebaliknya, digunakan perahu-perahu

²⁶Rhoads Murphey, "On the Evolution of the Port City", Frank Broeze, ed., Brides of the Sea Port Cities of Asia from the 16th-20th Centuries (Kensington: New South Wales University Press, 1989), hlm. 230-232.

²⁷John. M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 292.

²⁸*Reede*, merupakan tempat bagi kapal untuk mengikatkan diri pada sauhnya, dan untuk itu dasar pelabuhan harus terdiri dari macam tanah yang baik. Lumpur yang terlalu lembek dan dasar karang yang licin tidak baik digunakan sebagai *ankerground*. *Reede* tidak boleh terlalu dalam, karena rantai sauh atau jangkar tidak akan cukup panjangnya untuk mencapai dasar tanah. Agar jangkar dapat bekerja dengan baik dan tidak terseret oleh gelombang, maka yang ideal dalamnya air sekitar 18 sampai 20 meter. Wiwoho Soedjono, SH., Sarana-sarana Penunjang Pengangkutan Laut Aid to Navigation (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 58.

yang relatif kecil seperti *orembai*¹ dan *kora-kora*.²

Pelabuhan Ambon juga dapat diartikan sebagai *harbour* dan *port*. Dalam pengertian *harbour* pelabuhan Ambon merupakan tempat yang aman bagi kapal untuk berlindung. Hal itu disebabkan pelabuhan Ambon terletak di Teluk Ambon yang dilindungi oleh Semenanjung Hitu dan Semenanjung Leitimor. Di samping itu lautnya tidak terlalu dalam dan arus airnya tenang, walaupun perjalanan menuju Teluk Ambon tidak mudah sebab seringkali terjadi badai. Dengan kondisi fisik seperti itu, maka pelabuhan Ambon menjadi tempat yang aman bagi kapal dan perahu untuk tempat berlabuh. Dalam pengertian ekonomi, pelabuhan Ambon merupakan tempat untuk mengekspor dan mengimpor barang-barang, dan tempat untuk mendistribusikan barang-barang impor.

Sebagai kajian sejarah kota maka pemahaman tentang konsep kota sangat penting. Ada banyak konsep kota yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain, Max Weber,

²⁹ *Orembai* merupakan perahu dayung dengan menggunakan layar. Willard A. Hanna, Kepulauan Banda Kolonialisme dan Akibatnya di Kepulauan Pala (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 13.

³⁰ *Kora-kora* merupakan perahu bersayap yang terbuat dari kayu besi, dengan panjang sekitar 50 yard, dan didayung oleh sekitar 100 orang. J.C. van Leur, Indonesian Trade and Society Essays in Asian Social and Economic History (Bandung: Sumur Bandung, 1960), hlm. 116.

Rhoads Murphey, Ibn Khaldun, Henri Pirenne, Richard Fox, dan Claude Guillot. Max Weber mengatakan bahwa secara umum kota terdiri dari sekelompok rumah, tetapi antara rumah yang satu dengan yang lain terpisah, dan merupakan tempat kediaman yang relatif tertutup. Selanjutnya dijelaskan bahwa pengertian kota dipandang dari segi ekonomi, merupakan tempat tinggal yang penduduknya terutama hidup dari perniagaan dan perusahaan bukan dari pertanian. Di pemukiman itu terdapat pasar yang merupakan tempat untuk tukar menukar barang, yang terjadinya bukan sekali-kali tetapi berlangsung secara kontinu. Setiap hari penduduk lokal memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal, sedangkan para pedagang memperoleh barang dagangan dari penduduk setempat dan dari daerah pemangku yang terdekat.³¹

Rhoads Murphey, Ibn Khaldun, Henri Pirenne, dan Richard Fox, memberikan pengertian tentang kota yang mirip dengan yang dikemukakan oleh Max Weber, yakni bahwa perdagangan mempunyai pengaruh yang menentukan bagi pasang surutnya sebuah kota. Rhoads Murphey menjelaskan bahwa kota itu ada karena barang-barang dan pelayanan. Kota

³¹Max Weber, "Apakah Yang Disebut Kota", Sartono Kartodirdjo, ed., Masyarakat Kunc dan Kelompok-kelompok Sosial (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm. 11-12.

menyediakan barang-barang utama dan pelayanan-pelayanan, termasuk keuangan dan pelayanan asuransi bagi wilayah yang lebih luas. Di samping itu di kota terdapat kegiatan penjualan, ekspor, dan sebagian orang yang datang ke kota untuk urusan perdagangan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan fungsi utama dari kota.³²

Sejarawan Islam terkenal Ibn Khaldun mengatakan bahwa di kota terdapat berbagai kegiatan terutama yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup seperti, perdagangan, kerajinan, keagamaan, pengadilan, pengajaran, dan arsitektur.³³ Henri Pirenne tidak mendefinisikan pemukiman sebagai kota jika kota itu tidak beroperasi atas dasar perdagangan interlokal.³⁴ Richard Fox berpendapat bahwa kota-kota yang berhubungan dengan perdagangan, telah memberikan bobot khusus dalam perkembangan ide-ide tentang asal mula

³²Rhoads Murphey, op. cit., hlm. 228.

³³Ibn. Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History. Translated from the Arabic by Franz Rosenthal. Edited and abridged by N.J. Dawood (New York/New Jersey, 1970), hlm. 297-332.

³⁴Peter Reeves, Frank Broeze, and Kenneth McPherson, "Studying the Asian Port City", Frank Broeze, ed., Brides of the Sea Port Cities of Asia from the 16th-20th Centuries (Kensington: New South Wales University Press, 1989), hlm. 30.

urbanisasi.³⁵

Lebih khusus lagi apa yang dikemukakan oleh Claude Guillot,³⁶ bahwa perkembangan kota pelabuhan dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi dan lainnya yang dapat mempengaruhi fungsi dari pelabuhan itu sendiri. Claude Guillot dalam penjelasannya tentang Banten menunjukkan adanya beberapa ciri yakni pertama, masyarakat kota itu heterogen yang tampak dari adanya perkampungan etnis seperti, perkampungan Cina, Makasar, India, dan Persia. Kedua, fungsi pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan terminal bagi kapal dagang dari Barat menuju ke Timur yakni ke Kepulauan Maluku. Ketiga, golongan penguasa pribumi yakni Sultan dan para bangsawan ikut berdagang. Keempat, adanya unsur-unsur yang mendukung kota seperti, pasar, alat transportasi baik darat maupun laut, dan jalan yang baik. Pada umumnya ciri-ciri itu dimiliki oleh hampir semua kota pelabuhan, dan perbedaannya terletak pada fungsi dari kota pelabuhan itu sendiri.

Perkembangan sebuah kota pelabuhan ditentukan oleh berbagai faktor baik itu faktor internal maupun faktor

³⁵Richard Fox dalam ibid.

³⁶Claude Guillot, The Sultanate of Banten (Jakarta: Gramedia Book Publishing Division, 1990), hlm. 44-53.

eksternal.³⁷ Faktor internal mencakup karakteristik demografis, kelompok-kelompok sosial yang berperan dalam bidang perdagangan, perdagangan kota, kebijaksanaan politik, kebudayaan kota, sarana transportasi di dalam kota itu sendiri, dan peranan pelabuhan dalam pelayaran niaga antar pulau. Rhoads Murphey menjelaskan bahwa pelabuhan merupakan pintu keluar masuk bagi barang-barang. Secara ekonomis kota pelabuhan menguasai perdagangan, industri, keuangan seperti bank, pasar, modal, dan asuransi, juga jaringan transportasi yang modern, serta hasil pertanian dari daerah pedalaman. Menurut Rhoads Murphey, hubungan antara daerah pedalaman dengan kota, dan antara penduduk pribumi dengan kelompok minoritas orang asing merupakan faktor yang penting dari dinamika internal.³⁸ Perdagangan cengkih merupakan faktor internal yang utama bagi perkembangan kota pelabuhan Ambon, di samping faktor-faktor yang lain.

Faktor eksternal menyangkut potensi wilayah penyangganya, baik yang tergolong sebagai wilayah pemasok bahan

³⁷Edi Sedyawati, dkk., Tuban Kota Pelabuhan di Jalan Sutera (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1992)

³⁸Peter Reeves, Frank Broeze and Kenneth McPherson, op. cit., hlm. 32-34.

pokok, maupun wilayah lain yang menjadi patner sederajat atau patner yang lebih dominan khususnya dalam segi ekonomi. Wilayah Karesidenan Amboina,³⁹ terutama pulau-pulau, Lease, Seram, dan Buru, merupakan wilayah penyangga kota pelabuhan Ambon terutama dalam hal pangan dan produk ekspor.

Berdasarkan pengertian itu tampak bahwa ada hubungan simbiotik antara kota pantai dengan wilayah sekitarnya. Keduanya saling menghidupi, saling tergantung, dan terikat.⁴⁰ Eksistensi kota pelabuhan Ambon tergantung pada potensi sekitar kota Ambon dan pulau-pulau di sekitarnya terutama dalam hal bahan pangan dan produk ekspor. Wilayah sekitar kota dan pulau-pulau di sekitarnya tergantung pada kota pelabuhan karena fasilitas-fasilitas yang diberikannya seperti, pasar, pelabuhan sebagai pusat ekspor hasil bumi, gudang, pengaturan pemerintahan, perlindungan keamanan, dan pusat distribusi barang impor yang sebagian besar

³⁹Karesidenan Amboina meliputi pulau-pulau, Ambon, Seram Besar (bagian barat dan tengah), Buru, Haruku, Saparua, Nusalaut, Amblau, Manipa, Kelang, Boeano, dan beberapa pulau kecil yang terletak disekitarnya. Staasblad van Nederlandsch-Indië over het jaar 1824, No. 19 a.

⁴⁰F.A. Sutjipto Tjiptoatmodjo, Kota-Kota Pantai di Sekitar Selat Madura Abad ke-17 Sampai Medio Abad ke-19. Disertasi dari Universitas Gadjah Mada, 1983, hlm. 16. Tidak diterbitkan.

berada di tangan pedagang Cina dan Arab. Dalam hal itu kedudukan pemerintahan kota sebagai pengatur dan penjaga keamanan sangat sentral.

Hubungan antara penduduk pribumi dengan kelompok minoritas asing beserta keturunannya seperti, orang Eropa, Cina, dan Arab, lebih merupakan hubungan kepentingan terutama dalam sektor ekonomi. Penduduk pribumi mempunyai arti penting bagi kelompok minoritas asing karena merupakan konsumen utama barang dagangannya dan juga karena hasil buminya. Demikian pula kelompok minoritas asing penting bagi penduduk pribumi karena mampu menyediakan barang-barang kebutuhan hidup yang kurang dapat diproduksi sendiri. Dinamika hubungan kedua kelompok itu menjadi salah satu faktor yang dapat menggerakkan kehidupan kota.

Hubungan kota pelabuhan Ambon dengan wilayah di sekitarnya kurang lancar, sebab berbagai sarana dan prasarana pengangkutan kurang dapat berfungsi. Kondisi jalan di dalam kota Ambon relatif lebih baik dan dapat dilalui. Sebaliknya jalan di luar kota sempit dan terjal sehingga sulit dilalui. Akibatnya pengangkutan hasil bumi dari daerah penghasil sampai ke daerah pantai kurang lancar. Di samping itu sungai-sungai yang ada tidak dapat dilayari karena dangkal, bahkan pada musim kemarau sering tidak ada airnya.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah kota pelabuhan yang menitik beratkan pada sejarah sosial ekonomi. Oleh sebab itu pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosial ekonomi. Pendekatan sosial digunakan untuk membantu dalam menjelaskan struktur masyarakat kota Ambon, golongan-golongan sosial di dalam kota Ambon seperti golongan Cina, Arab, Burger, dan Eropa, serta perannya dalam perkembangan kota. Pendekatan ekonomi digunakan untuk menjelaskan struktur perekonomian kota seperti, perdagangan kota, ekspor dan impor, pelayaran niaga, dan harga barang.

Pendekatan sosial ekonomi dan konsep tentang kota pelabuhan yang telah dipaparkan itu, dapat dipakai untuk menjelaskan perkembangan kota pelabuhan Ambon. Akan tetapi pemakaian konsep itu dengan memperhatikan waktu dan kasus yang terdapat di kota Ambon.

9. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi dalam 6 bab. Bab I tentang pengantar yang berisi latar belakang masalah yang akan dibahas, kerangka konseptual dan pendekatan yang dipakai untuk menjelaskan permasalahan, tinjauan pustaka terutama tinjauan tentang buku-buku yang mendukung penulisan baik dari segi konsep dan fakta-faktanya. Di samping itu juga

dijelaskan tentang sasaran, faedah, dan tujuan dari penulisan ini.

Dalam bab II, dijelaskan gambaran umum tentang Ambon pada masa VOC sebagai latar belakang sejarahnya, terutama keadaan sosial politik dan keadaan sosial ekonomi. Hal itu penting sebab untuk mengetahui perkembangan kota pelabuhan Ambon dari waktu ke waktu.

Bab III, berisi penjelasan tentang peranan pelabuhan Ambon bagi perkembangan kota pelabuhan Ambon khususnya dalam bidang ekonomi. Faktor-faktor yang dibahas dalam bab ini meliputi sarana dan prasarana pelabuhan seperti dermaga, gudang, galangan kapal, kapal-kapal dan perahu yang berangkat dan berlabuh dari dan ke pelabuhan Ambon, ekspor dan impor, serta cukai.

Bab IV, berisi penjelasan tentang kota pelabuhan Ambon pada tahun 1817 sampai tahun 1865. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan kota pelabuhan Ambon, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Dalam bab V, diuraikan tentang dampak kemunduran kota pelabuhan Ambon bagi kehidupan sosial ekonomi penduduk. Bab VI, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam bab pengantar.

BAB II

GAMBARAN UMUM AMBON PADA MASA VOC

1. Keadaan Sosial-Politik

Pada tanggal 23 Februari tahun 1605, VOC menduduki kota Ambon,¹ dengan tujuan utama monopoli perdagangan cengkih. Supaya tujuan itu berhasil maka penguasaan daerah secara politis menjadi sangat penting. Setahap demi setahap VOC berhasil menguasai kota Ambon dan sekitarnya. Selanjutnya VOC menetapkan berbagai kebijakan seperti, tanam paksa dan penyerahan wajib cengkih, ekstirpasi, pelayaran *hong*i, larangan dan pembatasan perdagangan. Berbagai kebijakan itu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat Ambon. Perubahan-perubahan itu tampak pada semakin merosotnya peran dan kedudukan elite pribumi dalam bidang politik dan ekonomi, sistem perdagangan cengkih, sistem penanaman cengkih dan pelaksanaannya, dan semakin banyak kewajiban yang dituntut oleh VOC pada penduduk pribumi, yang sebenarnya berada di luar kerangka ikatan desa dan ikatan tradisional.

¹H.J. de Graaf, De Geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken (T.Weaver B.V.-Franeker: 1977), hlm. 46.

Sebelum kedatangan bangsa Barat, elite pribumi mempunyai kekuasaan ekonomi dan politik yang besar di wilayahnya. Elite pribumi menguasai seluruh penjualan hasil bumi rakyat dan barang-barang dari luar, memonopoli pembelian rempah-rempah penduduknya, menguasai pohon rempah-rempah, seperti hutan-hutan cengkih di Pulau Ambon dan pala di Pulau Banda, serta kebun buah. Para elite pribumi mengeksploitasi hutan-hutan dan kebun buah mereka sendiri, dengan menggunakan budak-budaknya sendiri. Selain itu masih mendapatkan penghasilan dari penduduknya melalui penyerahan sebesar sepersepuluh penghasilan penduduk sebagai tanda kesetiaan.²

Penguasaan seluruh perdagangan itu oleh elite pribumi sebagai akibat dari posisi monopoli dan kekayaan yang dimiliki, yang memberi mereka keuntungan dari uang bea, dan hak-hak memberikan ijin perdagangan di pelabuhan.³ Barang-barang impor yang diperoleh elite pribumi berasal dari pedagang luar seperti kain dan kerajinan tembaga khususnya gong dari Patani. Selanjutnya elite pribumi menjual barang impor itu kepada pedagang keliling seperti,

²J.C. van Leur, Indonesia Trade and Society Essays in Asian Social and Economic History (Bandung: Sumur Bandung, 1960), hlm. 116.

³Ibid.

pedagang Arab, Gujarat, juga mungkin Jawa. Oleh karena perannya dalam perdagangan itu, maka elite pribumi disebut sebagai pedagang *Wholesale*.⁴ Tampak jelas bahwa elite pribumi menguasai perdagangan "ekspor" dan "impor" di kota Ambon. Dominasi ekonomi oleh elite pribumi dipandang VOC sebagai penghalang bagi tercapainya tujuan. Oleh karena itu melalui berbagai perjanjian politik yang sebagian besar dicapainya dengan kekerasan, VOC mengambil alih peran ekonomi elite pribumi. Hal itu merupakan pukulan berat bagi elite pribumi dan pedagang "dalam negeri". Selanjutnya VOC menempatkan elite pribumi di bawah kekuasaannya, mengangkatnya sebagai Kepala *Negori*,⁵ dengan

⁴*Wholesale* dapat diartikan sebagai perdagangan borongan atau besar-besaran. Ibid.

⁵Dari segi politik teritorial Kepala *Negori* merupakan penguasa tertinggi di *negorinya*, dan biasanya berasal dari keluarga bangsa "Raja", yang sekaligus merupakan orang terkaya di *negorinya*, oleh sebab itu mereka disebut juga *Orang Kaya*. Kepala *Negori* beserta pemimpin-pemimpin tradisional yang lain seperti Kepala *Soa* diangkat dan diberhentikan oleh Kompeni. G.J. Knaap, Kruidnagelen en Christenen de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Bevolking van Ambon 1656-1696 (Dordrecht-Holland: Foris Publications, 1987), hlm. 9. Proses pengangkatan Kepala *Negori* didahului dengan kegiatan pemilihan yang dilakukan oleh para Kepala *Soa*. Apabila calon Kepala *Negori* pilihan para Kepala *Soa* tidak disetujui oleh Kompeni, maka diadakan pemilihan lagi. Apabila calon yang diajukan masih tidak disetujui oleh Kompeni, maka Kompeni sendiri yang memilih Kepala *Negori*. Bagi VOC pengangkatan Kepala *Negori* sangat penting karena kedudukan dan perannya dalam masyarakat. Hal itu dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan cengkih.

tugas sebagai pengawas perkebunan cengkih dan perantara hubungan antara VOC dengan penduduk pribumi. Atas jasanya itu elite pribumi mendapat bonus sebesar 5 *rixdollars* Spanyol per *bahar* seberat 550 lb.⁶

Monopoli perdagangan cengkih oleh VOC menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks dalam masyarakat Ambon. Hal itu dikarenakan monopoli perdagangan cengkih berkaitan erat dengan perkebunan cengkih, produksi cengkih, dan tenaga kerja. VOC memperkenalkan sistem perkebunan cengkih pada masyarakat sebagai usaha mendapatkan cengkih secara maksimal. Selanjutnya VOC menetapkan tanaman cengkih sebagai tanaman paksa. Penduduk pribumi dipaksa menanam cengkih dalam kebun-kebun secara teratur, dan hasilnya wajib diserahkan pada VOC, dengan harga yang telah diten-

Kepala *Soa* atau Kepala *Kampung* mempunyai hak memilih Kepala *Negori*, mengawasi bagian dari *negori* yakni *Soa* atau *Wijk*, tetapi mereka tidak berfungsi sebagai perantara yang aktif antara penduduk dengan Kompeni. R.Z. Leirissa, "Maluku Tengah Dalam Abad Sembilan Belas: Studi Pendahuluan", *Prisma*. Th. IX. No. 8, 1980 (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 71.

⁶G.J. Knaap, "Some Observations on a Thriving Dancing-Party the Cultivation for Cloves in Sixteenth and Seventeenth Century Ambon", Sartono Kartodirdjo, ed., Papers of the Fourth Indonesian-Dutch History Conference Yogyakarta 24-29 July 1983. Agrarian History, volume one (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986), hlm. 81. Bonus disebut pula sebagai "*Uang Barot*". G.J. Knaap, 1987, op. cit., hlm. 208.

tukan secara sepihak oleh VOC. Sistem itu merupakan hal yang baru bagi penduduk pribumi, sebab sebelumnya cengkih tidak dibudidayakan dalam kebun-kebun secara teratur, tetapi tumbuh secara liar dalam hutan-hutan. Bagi penduduk pribumi sistem tanam paksa dipandang sangat merugikan baik dari segi harga cengkih maupun waktu. VOC membayar cengkih yang disetorkan oleh penduduk lebih kecil bila dibandingkan dengan yang dibayarkan oleh pedagang asing. Sementara itu penduduk waktunya banyak tersita untuk bekerja di perkebunan cengkih. Dengan demikian hasil yang diterima oleh penduduk tidak sepadan dengan apa yang telah dilakukan untuk perkebunan cengkih.

Sebagai perkebunan untuk tanaman ekspor yang banyak dicari oleh berbagai bangsa, maka jumlah pohon cengkih yang dibudidayakan dalam kebun-kebun cengkih sangat banyak. Hal itu membawa konsekuensi pada masalah tenaga kerja dan waktu untuk mengelola perkebunan. Dibutuhkan tenaga kerja yang jumlahnya tidak sedikit terutama pada musim panen cengkih. Akan tetapi VOC mengalami kesulitan mengerahkan penduduk pribumi untuk bekerja dalam kebun-kebun dan pekerjaan yang lain. Hal itu disebabkan VOC tidak mempunyai pengaruh dalam masyarakat seperti elite pribumi. Di samping itu penduduk pribumi tidak biasa menerima perintah dari VOC. Penduduk pribumi biasa bekerja

atas perintah elite pribumi. Oleh karena perannya yang penting di dalam masyarakat itu, VOC menggunakan elite pribumi untuk mengerahkan penduduk bekerja di kebun cengkih dan pekerjaan yang lain.

Sudah menjadi gejala umum bahwa dalam masyarakat agraris penguasaan dan kepemilikan tanah merupakan dasar bagi struktur sosial dan struktur kekuasaan. Hubungan tuan dengan abadinya erat sebagai akibat dari ikatan desa dan ikatan tradisional. Dengan menggunakan ikatan-ikatan itu pelbagai jasa dapat dikerahkan. Rakyat menyediakan barang-barang, hasil bumi, dan jasa yang dibutuhkan oleh elite pribumi, sebaliknya elite pribumi memberikan jasa perlindungan, keamanan, dan menyediakan barang-barang dari luar yang tidak dapat diproduksi sendiri. Dalam kenyataannya hasil bumi, barang, dan jasa yang mengalir ke atas lebih besar daripada ke bawah. Dapat dikatakan bahwa hubungan antara tuan tanah dengan abadinya menimbulkan hubungan yang saling tergantung dan terikat.⁷ Akibat dari sistem itu beban yang harus dipikul oleh penduduk pribumi sangat berat. Hal itu disebabkan penduduk tidak hanya memenuhi kewajibannya pada elite pribumi, tetapi juga harus meme-

⁷Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium. Jilid I (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), hlm. 295.

nuhi kewajibannya pada penguasa VOC.

Kebijakan penanaman pohon cengkih baru dan ekstirpasi membingungkan dan merugikan penduduk pribumi. Suatu saat VOC memerintahkan penduduk untuk menanam sejumlah pohon cengkih, tetapi secara tiba-tiba datang perintah untuk menebangi pohon-pohon cengkih, kemudian penduduk diperintahkan lagi untuk menanam pohon yang baru. Perubahan-perubahan kebijakan itu karena VOC tidak dapat menetapkan jumlah produksi secara tepat, sebab hal itu berkaitan dengan masalah permintaan pasar. Oleh karena itu ketika pohon ditanam kemudian ditebangi sesudah itu ditanam lagi, sebenarnya merupakan usaha VOC untuk mendapatkan jumlah cengkih yang harus diproduksi secara tepat.⁸ Di samping itu jumlah cengkih yang melebihi permintaan pasar Eropa dapat mengakibatkan turunnya harga cengkih di pasar Eropa, hal itu merugikan VOC.

Selama masa VOC, penduduk telah mengalami beberapa kali ekstirpasi yang sangat merugikan. Ekstirpasi pertama kali dilaksanakan pada tahun 1649, langsung dipimpin oleh Gubernur Arnold de Vlaming. Dengan menggunakan armada *hongki*, Gubernur memimpin penebangan pohon-pohon cengkih di

⁸M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

Seram Barat, dengan alasan bahwa di wilayah Seram Barat terjadi perdagangan gelap cengkih antara penduduk pribumi dengan pedagang Makasar.⁹

Sekitar akhir abad ke-17, pelaksanaan ekstirpasi di semua wilayah melibatkan hampir semua pihak baik itu pihak penguasa VOC, penguasa pribumi maupun penduduk pribumi. Penebangan berada di bawah pengawasan para komandan militer dari benteng VOC, dan dihadiri oleh Kepala *Negori* dan Kepala *Soa*. Sebagai pelaksana penebangan pohon cengkih adalah orang Ambon, yang sekaligus sebagai pemandu untuk menunjukkan lokasi tanaman cengkih. Biasanya para pemandu dipilih dari kampung yang berbeda dengan lokasi penebangan, dan hal itu mengakibatkan permusuhan antar desa di kemudian hari.¹⁰

Sistem monopoli perdagangan cengkih menyebabkan munculnya perdagangan gelap, yang dilakukan oleh pedagang asing dan pribumi melalui laut. Penduduk pribumi terus menjual cengkihnya kepada pedagang Jawa, Cina, dan Arab, yang mau membayar cengkih dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya cengkih itu diselundupkan ke Makasar dan

⁹D.G.E. Hall, Sejarah Asia Tenggara (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), hlm. 282.

¹⁰G.J. Knaap, 1987, op. cit., hlm. 248.

dijual kembali pada pedagang Inggris, Perancis, Denmark, Portugis, dan Spanyol. Para pedagang berhasil dalam kegiatan perdagangan gelap, sebab para pedagang lebih mengetahui keadaan perairan Maluku, sehingga dengan mudah dapat menghindari patroli laut VOC yang jumlahnya tidak banyak.¹¹

Penetrasi Belanda dalam kehidupan sosial politik masyarakat Ambon, telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang mendasar dalam kekuasaan elite pribumi dan pola hubungan dengan masyarakatnya. Bagaimana dengan kehidupan sosial-ekonomi di Ambon ?

2. Kedadaan Sosial-Ekonomi

a. Perkebunan Cengkih

VOC menjalankan sistem perkebunan cengkih melalui suatu kelompok atau satuan masyarakat yang dinamakan *negori*,¹² sedangkan tanah yang digunakan untuk menanam

¹¹Willard A. Hanna, Hikayat Jakarta (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm. 69.

¹²*Negori* tercipta sebagai akibat dari perang antara VOC dengan Ternate dalam masalah penguasaan perdagangan cengkih di Maluku Tengah. *Uli-uli* yang tinggal di daerah pegunungan dan melawan VOC dipaksa turun ke daerah pantai yang telah ditentukan oleh VOC, dan tempat baru itu dinamakan *negori*. R.Z. Leirissa, 1980, op. cit., hlm. 69. Menurut rekonstruksi Holleman, *Uli* dapat disebut sebagai suku bangsa yaitu suatu kelompok agak besar-kadang-kadang agak lebih kecil-terdiri dari orang-orang yang merasa mereka sebagai kesatuan tersendiri, dan mengira berasal

cengkih yakni tanah *dati*.¹³ Pada tahun 1675 sampai tahun 1799, dari seluruh daerah penanaman cengkih yang telah ditetapkan oleh VOC, cengkih yang diserahkan oleh penduduk pada VOC dapat dilihat pada grafik no. 1. Dari grafik itu dapat dilihat bahwa pada tahun 1675 sampai tahun 1704, jumlah cengkih cenderung meningkat sebagai akibat penanaman baru pada tahun-tahun sebelumnya, yang dilakukan oleh beberapa gubernur seperti, Gubernur Arnold de Vlaming, Jacob Hustaerdt, dan Simon Cos. Pada tahun 1655, Gubernur Arnold de Vlaming memerintahkan penduduk Ambon dan Lease untuk menanam 500.000 pohon cengkih, karena produksi cengkih berkurang sebagai akibat ekstirpasi di Maluku Utara dan Hoamoal. Sementara itu di Leitimor dan Lease

dari satu keturunan di samping kelompok-kelompok lain yang strukturnya sama. J. Keuning, Sejarah Ambon Sampai Pada Akhir Abad ke-17 (Jakarta: Bhratara, 1973), hlm. 11.

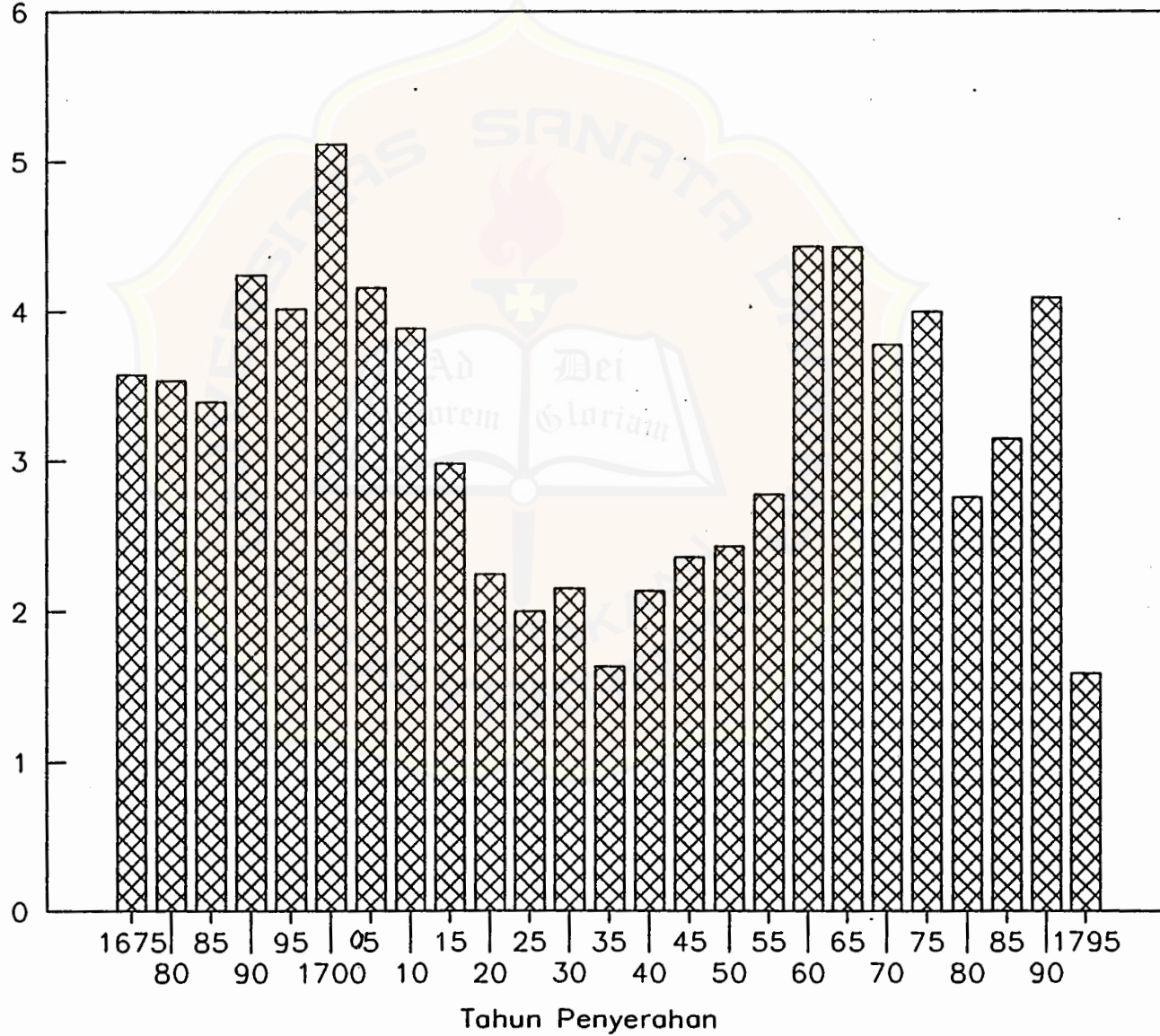
¹³*Dati* merupakan kelompok keluarga yang menyerupai suatu keluarga atau "keluarga luas". Pada prinsipnya setiap *dati* menyerahkan satu orang untuk kerja wajib. G.J. Knaap, 1987, op. cit., hlm. 138. Tanah *dati* yaitu tanah milik *dati*, yang ditetapkan untuk menghasilkan pangan bagi *dati* ketika ada kerja wajib yang harus dijalankan. Hak waris di tanah *dati* bersifat *patrilineal*. Kaum wanita apabila pindah ke tempat lain kehilangan hak atas hasilnya. Ibid., hlm. 162. VOC mempertahankan bentuk tanah *dati* karena tanah *dati* berhubungan erat dengan kerja wajib. Dalam abad ke-17 tanah *dati* diperluas dengan perluasan tanaman cengkih, dan orang Ambon menyebut bidang itu sebagai kebun. Ibid., hlm. 163.

Grafik No. 1

Cengkih Yang Diserahkan Oleh Penduduk

Pada VOC dari Tahun 1675-1799

Jumlah Cengkih (Pon)
(Millions)



Sumber: E.W.A. Ludeking, *Schets van de Residentie Amboina (1615-1868)*, Martinus Nijhoff, 1868), hlm. 92.

pohon-pohon tua yang sudah berumur lebih dari 20 tahun ditebangi, untuk kemudian diganti dengan tanaman baru. Usaha penanaman itu kurang berhasil karena terjadi kekeringan. Pada tahun 1656 VOC mengulangi lagi dengan memerintahkan penduduk untuk menanam satu juta pohon yang dibagi dalam, 300.000 pohon ditanam di distrik Amsterdam, 300.000 pohon ditanam di distrik Rotterdam, 400.000 pohon ditanam di distrik Zeelandia dan Hollandia. Di samping itu setiap dati diharuskan menanam sepertiga dari jumlah pohon yang sudah ada. Perintah itu hanya sebagian yang dituruti oleh penduduk, bahkan di *Lease* penduduk hanya menanam 300.000 pohon, sebab pada waktu penanaman pohon cengkih terjadi hujan deras, dan penduduk khawatir pada musim panen tidak ada tenaga kerja.¹⁴

Setelah kepergian Arnold de Vlaming pada tahun 1656, Gubernur Jacob Hustaerdt berusaha meluaskan tanaman cengkih tetapi juga kurang berhasil. Kemudian pada tahun 1659, penduduk di distrik Victoria diperintahkan untuk menanam 15.000 pohon, sedangkan *Uli* di Hitu diharuskan menanam 10.000 pohon cengkih, dan usaha itu berhasil sekitar 70-75 persen. Pada tahun 1660 terjadi kekeringan sehingga pohon yang ditanam di *Lease* pada tahun 1656 mati, demikian pula

¹⁴Ibid., hlm. 234-235.

pohon yang ditanam di Pulau Ambon. Oleh sebab itu pada tahun 1661, Jacob Hustaerdt memerintahkan setiap dati untuk menanam 6.000 pohon dan sekitar 20-25 persen yang berhasil.¹⁵

Pada tahun 1662, yakni masa pemerintahan Gubernur Simon Cos produksi cengkih turun yang disebabkan oleh cuaca buruk dan ekstirpasi. Untuk mengatasi masalah itu maka Pemerintah mengeluarkan Plakat 23 Juni Tahun 1663 yang berisi, supaya semua tanaman yang sudah ada dirawat dengan baik, dan setiap dati dalam setiap tahun pada musim hujan diperintahkan untuk menanam 20 pohon. Penduduk yang melanggar dihukum denda satu ringgit untuk setiap pohon yang tidak ditanam. Untuk mengawasi apakah penduduk menanam pohon atau tidak, maka VOC mengangkat seseorang untuk menjadi pengawas cengkih.¹⁶

Pada tahun 1670 permintaan cengkih dari Eropa turun, sebab pasar Eropa telah dipenuhi oleh cengkih dari Brazil yang harganya relatif lebih murah.¹⁷ Oleh sebab itu pada tahun 1679, Dewan XVII memerintahkan VOC di Ambon untuk melarang penduduk menanam pohon cengkih sebagai ganti

¹⁵Ibid., hlm. 235.

¹⁶Ibid., hlm. 236.

¹⁷Ibid., hlm. 246.

pohon yang telah mati, dan semua tanaman baru dianggap tidak sah. Akan tetapi penduduk masih saja menanam pohon cengkih, sebab informasi tentang larangan menanam pohon cengkih tidak semua sampai ke penduduk, di samping itu ada unsur kesengajaan dari penduduk untuk terus menanam pohon cengkih, dan hasilnya dijual pada pedagang Makasar, Arab, dan Cina. Oleh karena larangan penanaman itu dipandang tidak berhasil, maka pada tahun 1684 Pemerintah mengeluarkan lagi larangan penanaman pohon cengkih, yang terus diterapkan oleh Gubernur Nicolaas Schaghen.

Peningkatan produksi cengkih merupakan akibat penanaman pohon cengkih yang telah dilakukan oleh penduduk pada tahun-tahun sebelumnya. Jumlah pohon cengkih, di *Lease* dan Ambon tahun 1673 dan tahun 1693 dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

Tabel 1
Jumlah Pohon Cengkih di *Lease* dan Ambon
Tahun 1673

Nama daerah	Pohon Tua	Pohon 1/2 Tua	Pohon Muda	Jumlah
Hitu	58386	59262	32766	150414
Larike	30024	22744	25956	78724
Hitu Tenggara	13837	16414	16142	46393
Leitimor	19822	19586	22652	62060
Ambon	122069	118000	97516	337591
Haruku	12752	19013	14881	46646
Saparua	18939	23052	28552	70543
Nusa Laut	17285	111936	58718	187939
Lease	48976	154001	102151	305128
Gouvernement	171045	272007	199667	642719

Sumber: G.J. Knaap, Kruidnagelen en Christenen de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Bevolking van Ambon 1656-1696 (Dordrecht: Foris Publications, 1987), hlm. 240.

Tabel 2
Jumlah Pohon Cengkih di *Lease* dan Ambon
Tahun 1693

Nama Daerah	Pohon Tua	Pohon 1/2 Tua	Pohon Muda	Jumlah
Hitu	86449	19882	945	107276
Larike	37252	6918	88	44258
Hitu Tenggara	40722	17586	2455	60763
Leitimor	29852	11960	5625	47437
Ambon	194275	56346	9113	259734
Haruku	22239	13055	-	35294
Saparua	26288	22205	-	48493
Nusa Laut	133121	33242	-	166363
Lease	181648	68502	-	250150
Gouvernement	375923	124848	9113	509884

Sumber: G.J. Knaap, Kruidnagelen en Christenen de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Bevolking van Ambon 1656-1696 (Dordrecht: Foris Publications, 1987), hlm. 240.

Berdasarkan tabel itu tampak bahwa di *Lease*, Ambon, dan *Gouvernement* pohon tua dan berbuah semakin meningkat. Pohon setengah tua di wilayah Ambon cenderung meningkat, tetapi di *Lease* dan *Gouvernement* cenderung turun. Mengenai pohon muda di *Lease* tidak tercatat sehingga tidak dapat dilihat perkembangannya, sedangkan jumlah pohon cengkih di Ambon dan *Gouvernement* cenderung menurun.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi cengkih. Perkebunan cengkih membutuhkan banyak tenaga kerja untuk penanaman, pemeliharaan, dan memetik cengkih pada masa panen. Keterlambatan dalam memetik cengkih dapat menurunkan kualitas cengkih, dan akibatnya harga menjadi turun. Dengan demikian semakin banyak tenaga kerja yang terlibat dalam panen, maka panen cengkih dapat berhasil, sebaliknya kekurangan tenaga kerja dapat menggagalkan panen.

Pekerja di perkebunan cengkih terdiri dari budak¹⁸

¹⁸Pada masa VOC terdapat perdagangan budak tetapi pada masa Inggris perdagangan itu dihapus. Budak banyak didatangkan dari daerah Papua, oleh karena begitu terkenalnya budak Papua, maka dalam bahasa Tidore kata Papua diartikan sebagai budak. E. Katoppo, Nuku Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 27. Di Ambon budak tidak hanya dipekerjakan di kebun tetapi juga di rumah-rumah terutama rumah orang-

dan penduduk *negori* baik itu orang dewasa laki-laki, wanita maupun anak-anak. Bagi penduduk *negori* bekerja di kebun cengkih Pemerintah dan penguasa pribumi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena jumlah tenaga kerja dari penduduk pribumi tidak sebanding dengan kebun-kebun yang luas, maka baik Pemerintah maupun penguasa pribumi menggunakan tenaga budak. Pada tahun 1671 sampai tahun 1695 jumlah budak di Ambon dan *Lease* dapat dilihat pada grafik no. 2.

Pada tahun 1671 sampai tahun 1674, jumlah budak di Ambon cenderung turun yang disebabkan oleh berkurangnya penanaman pohon cengkih dan ekstirpasi. Sejak tahun 1675 sampai tahun 1695, jumlah budak di Ambon cenderung semakin meningkat yang pada umumnya disebabkan oleh adanya peningkatan dalam penanaman pohon cengkih. Demikian pula sejak tahun 1671 di *Lease* jumlah budak cenderung meningkat, yang juga disebabkan oleh meningkatnya penanaman pohon cengkih.

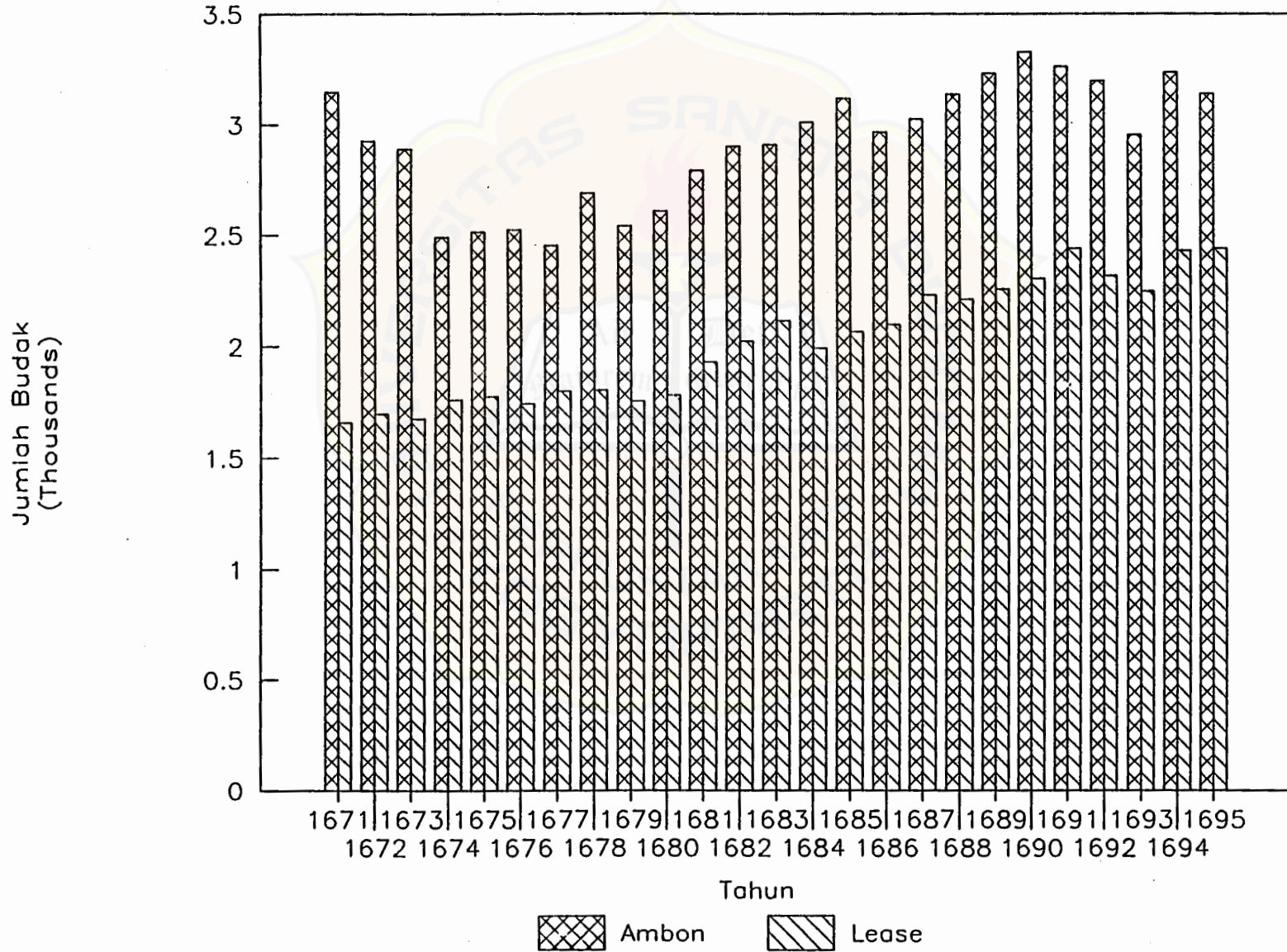
Pada tahun 1704 sampai tahun 1744, produksi cengkih cenderung menurun yang disebabkan oleh ekstirpasi, cuaca yang kering, kekurangan tenaga kerja, kurangnya pengetahuan tentang penanaman cengkih terutama mengenai jarak

orang kaya, yang sekaligus merupakan simbol kekayaannya.

Grafik No. 2

Jumlah Budak di Ambon dan Lease

Tahun 1671-1695



Sumber: G.J. Knaap, Kruidngelen en Christenen de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Bevolking van Ambon (Dordrecht: Foris Publications, 1987), hlm. 127.

tanam dan perawatannya, sehingga seringkali terjadi perubahan-perubahan dalam cara penanaman, serta wabah penyakit ulat. Di samping itu penduduk tidak terbiasa menanam pohon dalam jumlah yang besar, akibatnya sebagian penduduk tidak mau mengikuti perintah penanaman.¹⁹ Ekstirpasi dan perintah penanaman yang silih berganti menyebabkan penduduk tidak dapat memahami apa yang sebenarnya diinginkan Pemerintah, oleh sebab itu seringkali terjadi kesengajaan dari penduduk untuk tidak menanam pohon cengkih atau menyembunyikan pohon-pohon cengkih supaya tidak terkena ekstirpasi.

Pada tahun 1744 sampai tahun 1774, produksi cengkih meningkat lagi sebagai akibat penanaman pohon baru dan tersedianya tenaga kerja. Akan tetapi pada tahun 1775 sampai tahun 1784 produksi cengkih turun lagi, karena VOC sudah kelebihan cengkih dari panen tahun sebelumnya, sehingga VOC perlu mengadakan ekstirpasi. Pada tahun 1775 gudang-gudang di Batavia dan Belanda sudah penuh dengan cengkih. Oleh sebab itu secara bertahap di wilayah Kompeni pemusnahan cengkih yang berlebihan diperlukan. Pada tahun 1775 setelah tiga kali ekstirpasi jumlah pohon cengkih berkurang sampai 513.268 pohon. Diduga dengan 500.000

¹⁹G.J. Knaap, 1987, *op. cit.*, hlm. 235.

sampai 550.000 pohon termasuk pohon muda dan semi dewasa, hasilnya sudah dapat untuk memenuhi kebutuhan cengkih dunia. Ternyata jumlah cengkih masih terlalu banyak, maka pada tahun 1780 VOC memerintahkan ekstirpasi lagi hingga mencapai 380.300 pohon, termasuk 200.000 pohon siap buah dan 108.300 pohon dewasa.²⁰

Pada tahun 1784 sampai tahun 1794 ada sedikit peningkatan, tetapi sejak tahun 1795 sampai tahun 1799 produksi cengkih turun. Hal itu disebabkan oleh ekstirpasi, keke-
rangan, dan perkebunan cengkih tidak terurus dengan baik sebagai akibat bangkrutnya VOC, karena banyak pegawainya yang korupsi dan melakukan berbagai penipuan, serta administrasi dan manajemen yang tidak baik.

VOC menetapkan harga cengkih 56 *rijksdaalders* (ringgit) per *bahar* seberat 550 pon atau rata-rata 0,30 *gulden* per pon. Harga cengkih sebesar 56 *rijksdaalders* per *bahar* itu belum termasuk biaya angkut dan prosen bagi para kepala sebesar 5 *rijksdaalders*. Setelah dikurangi dengan biaya itu VOC membayar cengkih pada penduduk sebesar 50 *rijksdaalders*. Apabila panen rata-rata 600.000 pon per tahun, maka penduduk menerima uang sebesar 180.000 *gulden*

²⁰H.J. de Graaf, op. cit., hlm. 190.

per tahun.²¹

Pada tahun 1656 sampai tahun 1696, rata-rata harga jual cengkih di Surat sebesar 4,35 *gulden* dan di Amsterdam 5,21 *gulden* per pon, yang berarti kenaikan sebesar 1400 sampai 1700 persen. Prosentase itu masih merupakan laba kotor karena belum termasuk biaya bagi distribusi dan pengangkutan.²²

Seringkali pembayaran cengkih dari VOC pada penduduk kurang lancar, sebab VOC tidak mempunyai banyak uang sebagai akibat perang dengan Inggris dan Perancis di Eropa. Oleh sebab itu Pemerintah di Batavia seringkali tidak mengirimkan uang yang diminta oleh Pemerintah VOC di Ambon untuk membeli cengkih. Sehubungan dengan itu Pemerintah di Ambon melakukan pembayaran cengkih dalam bentuk uang sesedikit mungkin, dan selebihnya pembayaran dilakukan dalam bentuk kain dan dikredit.²³

Berkaitan dengan masalah pendapatan, walaupun pendapatan penduduk dari cengkih relatif besar tetapi penduduk banyak dirugikan. Hal itu disebabkan oleh banyaknya aparat Kompeni yang melakukan berbagai kejahatan seperti, pen-

²¹G.J. Knaap, 1987. op. cit., hlm. 254.

²²Ibid., hlm. 253.

²³Ibid., hlm. 240-241.

curian beberapa genggam cengkih dari satu karung ketika disetorkan pada VOC, penipuan dalam penimbangan, dan penipuan dalam pembayaran.²⁴

Sebagai pengganti tanaman cengkih yang telah ditebang, VOC mengusahakan beberapa tanaman seperti, pala, kopi, dan nila. Pada tahun 1715 Pemerintah telah mengusahakan tanaman kopi dan nila tetapi gagal. Pada tahun 1734, VOC mengusahakan lagi tanaman nila dengan berbagai sarana meskipun sangat sulit. Sepuluh tahun kemudian dalam usahanya mengembangkan tanaman nila, VOC menetapkan tanaman nila tidak lagi sebagai tanaman paksa tetapi tetap gagal. Oleh sebab itu pada tahun 1757 VOC menghentikan tanaman nila. Dua tahun kemudian atas perintah Dewan XVII, VOC mengusahakan lagi tanaman nila tetapi tetap gagal. Hal itu disebabkan tanah Pulau Ambon kurang cocok untuk tanaman nila, kekurangan lahan, dan kekurangan tenaga kerja untuk merawatnya.²⁵

VOC menetapkan tanaman pala sebagai tanaman paksa. Pada tahun 1785, VOC memerintahkan penduduk untuk menanam pohon pala sebanyak 10.000 pohon dan relatif berhasil,

²⁴Ibid., hlm. 243.

²⁵H.J. de Graaf, op. cit., hlm. 191.

sebab tanahnya cocok untuk tanaman itu dan tidak banyak membutuhkan tenaga kerja. Dari berbagai tanaman itu hanya tanaman cengkih dan pala yang tetap dikenal dan mampu bertahan, sebab merupakan produk untuk pasar internasional dan merupakan kehidupan sebagian besar penduduk Ambon.

b. Sektor Ekspor dan Impor

Pada masa VOC seluruh hasil bumi dan usaha rakyat serta penjualan barang-barang dari luar, dipusatkan pada kantor-kantor dan loji-loji Kompeni. Barang-barang ekspor meliputi, cengkih, pala, kulit masoi, karet, tripang, sedikit mutiara, dan kulit mutiara, sedangkan barang-barang impor meliputi, beras, tekstil, porselin, besi, senjata, dan mesiu.²⁶

Diantara barang-barang impor, beras merupakan barang impor yang paling penting, sebab dibutuhkan oleh sebagian besar penduduk kota. Oleh karena Pulau Ambon dan pulau di sekitarnya kurang dapat menghasilkan beras, maka VOC maupun pedagang swasta dalam hal ini pedagang Cina, Arab, dan pedagang pribumi mendatangkan beras dari Jawa Timur dan Makasar. Sampai akhir abad ke-17 VOC mengimpor beras sekitar 375.000 kilogram setiap tahunnya. Pada tahun 1680-

²⁶E. Katoppo, op. cit., hlm. 30.

an, sekitar 60-70 persen beras impor digunakan untuk memberi makan para pegawai Kompeni, tenaga lepas, dan pekerja wajib. Beberapa kilogram beras diangkut ke daerah di sekitarnya, dan hanya sekitar 5 persen dari impor yang dijual secara kontan, sedangkan penyusutan sekitar 10 persen.²⁷

Bagi pedagang swasta, beras merupakan impor yang terpenting walaupun pengangkutannya tidak teratur. Impor beras antara 225.000-1.200.000 kg setiap tahun. Pada tahun 1675-1680 terjadi perubahan yang besar, yakni terjadinya penurunan pengangkutan beras dari Jawa Timur sebagai akibat peperangan di Mataram. Pada tahun 1680-an impor beras dari Jawa dibuka lagi, akibatnya di Ambon terdapat banyak beras. Menurut laporan, pada tahun 1673 di kota Ambon terdapat 650 *last* beras,²⁸ pada tahun 1688 dan 1690 meningkat menjadi 800 *last* beras. Jumlah seluruh impor beras baik oleh VOC maupun swasta, rata-rata 400 sampai 1.000 *last* atau 600.000 sampai 1.500.000 kilogram setiap tahun.²⁹

²⁷G.J. Knaap, 1987, *op. cit.*, hlm. 221.

²⁸*Last* merupakan ukuran berat, 1 *last* sama dengan 2000 kilogram.

²⁹G.J. Knaap, 1987, *op. cit.*, hlm. 222.

Pada tahun 1620 harga beras antara 20 sampai 60 *real* per *last*, atau antara 48 sampai 144 *gulden*. Sesudah tahun 1660 harga beras naik menjadi 20 sampai 80 *rijksdaalders* atau antara 60 sampai 240 *gulden* per *last*. Sementara itu cukai beras dan barang-barang yang lainnya sebesar 10 persen dari nilai seluruh barang. Pada tahun 1688 impor bahan pangan bebas dari cukai sedangkan barang lain dipungut cukai tetapi besarnya tidak diketahui.³⁰

Di samping beras, kain juga merupakan barang impor yang penting, sebab kain tenun yang dihasilkan oleh penduduk Ambon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Di samping itu penduduk kota yang mempunyai banyak uang lebih senang membelanjakan uangnya untuk membeli kain impor. VOC memonopoli perdagangan kain yang mempunyai kualitas relatif lebih baik dan harganya relatif mahal seperti kain India, sedangkan pedagang Jawa dan Cina menjual kain yang harganya relatif lebih murah.

Pada perempat pertama abad ke-17, pedagang Jawa membawa kain katun kasar besar-besaran dari Sunda Kecil,

³⁰Ibid., hlm. 221 dan 223.

Buton, dan Selayer.³¹ Runtuhnya perdagangan Jawa Timur menyebabkan impor kain dari Sunda Kecil berakhir. Sekitar tahun 1625 ketika perdagangan Makasar meningkat, persaingan dalam perdagangan kain Selayer dan Buton juga meningkat. Akan tetapi pada tahun 1642 impor kain Buton dan Selayer terhenti, sebagai akibat putusnya hubungan perdagangan dengan Makasar. Melalui pemulihan hubungan dagang dengan Makasar maka kain Buton dapat memasuki pasar Ambon kembali.³²

VOC di Ambon tidak mampu bersaing dengan pedagang Jawa dalam perdagangan kain. Oleh karena itu VOC minta bantuan pada Pemerintah di Batavia untuk melarang impor kain Buton tetapi tidak berhasil, sebab Pemerintah di Batavia tidak tahu menahu soal perdagangan kain di Ambon.³³ Ketidakmampuan VOC bersaing dalam perdagangan kain, karena kain yang dijual oleh VOC harganya relatif lebih mahal dan dijual dalam ukuran India asli yakni antara 5 sampai 10 meter per potong. Bagi penduduk ukuran

³¹Kain Buton mempunyai ukuran panjang 1,00 sampai 1,30 meter dan lebar 0,85 sampai 0,90 meter, tetapi ada juga yang mempunyai ukuran panjang 1,00 sampai 1,30 meter dan lebar 1,75 meter, sedangkan ukuran kain Selayer tidak diketahui. Ibid., hlm. 224.

³²Ibid.

³³Ibid.

itu terlalu panjang dan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pedagang Cina yang merupakan langganan baik VOC mampu menjadi perantara bagi penjualan kain VOC. Pedagang Cina lebih berhasil dalam menjual kain, sebab pedagang Cina mau pergi ke *negori-negori* untuk menjual kain, penjualan dilakukan secara kredit, dan kain dijual panjangnya sesuai dengan permintaan penduduk. Biasanya ukuran yang dipakai yakni *depa* atau sekitar 1,70 meter.³⁴

Sampai akhir abad ke-17, kain impor yang paling laku yaitu kain Gujarat. Kain itu terjual 2.600 potong dengan harga 2,67 *gulden* per potong. Jenis kedua yaitu kain Surat, terjual 2.400 potong dengan harga 2,71 *gulden* per potong. Kemudian kain dari Coromandel yang terkenal dengan nama kain *Guinness*, terjual 2.300 potong dengan harga 12,93 *gulden* per potong. Kain Mori *Salempuri* terjual 2.000 potong dengan harga 7,84 *gulden* per potong, dan kain Biru terjual 1.000 potong dengan harga 7,28 *gulden* per potong.³⁵

³⁴Ibid., hlm. 221 dan 224.

³⁵Kain Gujarat mempunyai ukuran panjang 0,70 sampai 6,40 meter dan tidak berwarna. Kain Surat mempunyai ukuran panjang 8,20 meter dan lebar 0,60 sampai 0,70 meter, serta berwarna. Kain *Guinness* mempunyai ukuran panjang dari 0,90 sampai 33,70 meter, sedangkan kain mori *Salempuri* mempunyai ukuran panjang 14,50 meter dan lebar 0,90 meter. Ibid., hlm. 224-225.

Impor barang kebutuhan hidup yang lain oleh VOC meliputi, paku, besi, porselin, arak, gula, garam, dan budak. VOC mengimpor paku sekitar 20 tong per tahun, besi sekitar 10.000 kilogram, arak dari Jawa untuk memenuhi kebutuhan Belanda sendiri sekitar 3.000 liter setiap tahun, gula antara 3.000 sampai 4.500 kilogram setiap tahun, dan garam 15.000 kilogram setiap tahun. Porselin Cina yang didatangkan dari Batavia.³⁶

Pedagang swasta mengangkut tekstil, kasumba, dan nila rata-rata 600 kilogram setiap tahun, arak sekitar 800 liter, gula sekitar 6.000 sampai 31.000 kilogram, kacang sekitar 7.500 kilogram, dan garam sekitar 45.000 kilogram setiap tahunnya dan menjadi saingan berat garam pribumi. Tampak bahwa impor gula, kacang, dan garam oleh pihak swasta lebih besar daripada impor VOC. Impor budak dimulai pada tahun 1670 dan ketika itu ada sekitar 600 budak yang diimpor. Dalam perkembangannya jumlah budak semakin meningkat sebab kebutuhan tenaga budak untuk kebun cengkih semakin meningkat. VOC memberi batasan-batasan dalam mengimpor budak, yakni tidak boleh mengimpor budak yang "jahat" dan "berbahaya".³⁷ Budak-budak itu dibeli dari

³⁶Ibid., hlm. 224.

³⁷Ibid., hlm. 221-222.

Papua,³⁸ dan dari Seram Timur yang merupakan pusat perdagangan budak,³⁹

VOC membatasi pedagang swasta dan asing terutama dalam perdagangan barang-barang ekspor.⁴⁰ VOC memonopoli perdagangan ekspor yang terpenting yaitu cengkih dan mutiara. Pada tahun 1656 sampai tahun 1670, di samping cengkih dan mutiara VOC juga mengekspor sumbu, jumlahnya antara 10.000 sampai 20.000 bos setiap tahunnya.⁴¹ Sumbu merupakan kerajinan tangan dari penduduk Pulau Manipa dan orang-orang Cina yang mendominasi pembuatan sumbu. Pada tahun 1668 sumbu yang dihasilkan sekitar 20.000 bos. Harga sumbu naik dari 0,30 *gulden* per bos menjadi 0,50 *gulden* per bos. Sekitar tahun 1670 ekspor sumbu dihentikan, karena VOC menemukan tempat lain yang menawarkan harga sumbu relatif lebih murah. Setelah itu sumbu lokal hanya

³⁸E. Katoppo, op. cit., hlm. 27.

³⁹R.Z. Leirissa, dkk., Maluku Tengah di Masa lampau Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982), hlm. 150.

⁴⁰G.J. Knaap, 1987, op. cit., hlm. 220.

⁴¹Sumbu terbuat dari serabut kelapa atau serabut kayu totara. Rumphius menyebutnya sebagai "pohon sumbu putih". Satu bos sumbu mempunyai panjang 42,5 meter. G.J. Knaap, 1987, op. cit., hlm. 193.

untuk memenuhi kebutuhan daerah di sekitarnya.⁴²

Kadangkala VOC mengekspor 2.000 sampai 4.000 masoi yang dibelinya dari para pedagang Seram Timur. Pada tahun 1679 VOC mulai mengekspor kulit lawan yang di Jawa berharga seperti masoi, dan berfungsi sebagai obat kuat dan pemberi aroma. Akan tetapi jumlah produk itu tidak besar yakni rata-rata 300 pon per tahun. Sejak tahun 1689 VOC mengekspor *sasafras* yakni akar kulit lawan. Setiap tahunnya VOC mengapalkan sekitar 500 pon *sasafras*. Di samping itu pada tahun 1681 VOC mengekspor burung hias ke Cina dan Benggala. Berbeda dengan VOC, pedagang swasta sedikit melakukan ekspor sebab hampir semua barang ekspor dimonopoli oleh VOC. Namun demikian pihak swasta masih mampu mengapalkan 8.000 pon masoi dan mengekspor kembali tembikar cina dan kain India yang dibelinya dari VOC di Batavia.⁴³

VOC melarang dan membatasi berbagai perdagangan seperti, cengkih, mutiara, senjata, dan mesiu. Larangan dan pembatasan itu mengakibatkan munculnya perdagangan gelap. Penduduk lebih senang menjual cengkihnya kepada pedagang pribumi seperti pedagang Makasar dan Jawa, sebab

⁴²Ibid., hlm. 194.

⁴³Ibid., hlm. 220-221.

kedua pedagang itu berani membayar cengkih dengan harga yang relatif lebih tinggi yakni bukan 60 ringgit tetapi 80 atau 100 ringgit per *bahar*.⁴⁴ Seram menjadi pusat perdagangan gelap. Oleh sebab itu banyak penduduk Ambon pergi ke Seram untuk menjual cengkihnya pada pedagang Makasar dan Jawa. Kemudian pedagang itu membawa cengkih ke Makasar yang juga merupakan pusat pasar rempah-rempah. Banyak pedagang asing termasuk pedagang Inggris ikut berpartisipasi dalam perdagangan cengkih itu. Terbukti bahwa pada tahun 1637 Inggris mampu mengapalkan 200.000 pon cengkih ke Eropa.⁴⁵ Kejadian itu menunjukkan bahwa larangan dan pembatasan perdagangan terhadap pedagang asing dan pribumi yang dijalankan oleh VOC kurang berhasil. Hal itu disebabkan oleh sistem pengawasan yang kurang ketat sebagai akibat keterbatasan tenaga dan peralatan seperti kapal, tentara, dan amunisi.

Dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa peranan pedagang Cina, Arab, Jawa, dan Makasar terbatas pada perdagangan impor, sedangkan perdagangan ekspor dikuasai

⁴⁴Sartono Kartodirdjo, 1987, *op. cit.*, hlm. 176.

⁴⁵M.A.P. Meilink-Roelofs, Asian Trade and European Influence: In the Indonesian Archipelago Between 1500 and About 1630 (Netherlands: Martinus Nijhoff, 1962), hlm. 220-221.

oleh VOC. Keterbatasan itu menyebabkan kurangnya dinamika perdagangan di kota, yang selanjutnya dapat mempengaruhi perkembangan kota Ambon.

c. Sektor Perdagangan Kota

Kota Ambon mempunyai sebuah pasar yang buka setiap hari dari pagi sampai petang, dan menjadi pusat perdagangan. Barang-barang yang diperdagangkan meliputi hasil bumi dari Pulau Ambon dan pulau-pulau di sekitarnya, barang-barang industri rumah tangga, dan barang-barang dari luar yang semuanya dijual secara eceran.

Di pasar kota Ambon terdapat tiga kategori pedagang. Pertama, "*vaste*" *kooplieden* yang pada tahun 1675 jumlahnya mencapai 90 pedagang. Setiap minggu "*vaste*" *kooplieden* diharuskan membayar pajak sebesar 1 *stuiver* untuk barang-barang yang dijualnya, sedangkan pajak beras besarnya 2 *stuiver*. Kedua, "*bijlopers*" yang tidak setiap hari muncul terutama orang Ambon. "*Bijlopers*" yang berasal dari daerah yang dekat dengan kota Ambon diwajibkan membayar pajak menurut tingkat kekerapan kunjungannya. Ketiga, "*bergluiden*" yang berasal dari daerah gunung Leitimor. Kelompok itu dibebaskan dari kewajiban membayar pajak pasar sebab jarak yang mereka tempuh dari tempat tinggalnya sampai ke pasar

cukup jauh.⁴⁶

Untuk menjaga ketertiban dan kebersihan pasar, VOC mengangkat seorang Kepala Pasar yang digaji dengan pajak pasar. Kepala Pasar harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh VOC, yakni tidak diperbolehkan menjadi penjual dan perantara dalam perdagangan untuk menjaga kestabilan harga. Demikian pula Kepala Pasar dilarang membeli barang dagangan dari pedagang asing, serta bahan makanan dari penduduk pegunungan Ambon sebelum mencapai pasar.⁴⁷ VOC menetapkan bahwa besarnya pajak untuk setiap pedagang tidak melebihi 5 sen dalam setiap minggunya. Dalam pelaksanaannya Kepala Pasar banyak melakukan penyimpangan. Seringkali terjadi Kepala Pasar memungut pajak pada para pedagang setiap hari. Padahal ada banyak pedagang yang hanya membawa barang dagangan seharga 5 sen atau 10 sen. Bagi pedagang kecil pemungutan pajak itu dirasa sangat berat. Ketika VOC mengetahui Kepala Pasar melakukan penyimpangan, maka VOC memecatnya dan mengangkat Kepala Pasar yang baru. Oleh karena itu tidak mengherankan bila pada masa VOC seringkali terjadi pergantian jabatan Kepala Pasar.

⁴⁶G.J. Knaap, 1987, op. cit., hlm. 211.

⁴⁷Ibid., hlm. 211.

Kain merupakan salah satu barang impor yang laku dijual di pasar kota Ambon. Perdagangan kain berhubungan erat dengan struktur sosial ekonomi masyarakat kota Ambon. Oleh sebab itu baik kain yang harganya mahal maupun murah laku dijual. Di kota Ambon relatif banyak orang bermodal, yang membelanjakan sebagian uangnya untuk membeli kain yang mahal, yang sekaligus untuk menunjukkan status sosialnya. Sementara itu kain yang harganya relatif murah juga laku dijual, karena sebagian besar untuk konsumsi para budak dan pelayan. Perlu untuk diketahui bahwa di kota Ambon terdapat pemusatan budak dan pelayan yang menjadi konsumen utama kain yang harganya murah.

Di pasar Ambon dijual berbagai bahan pangan seperti, sagu, sayuran, buah, telur, daging, gula, arak, kacang, beras, garam, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Barang-barang yang dijual itu tidak hanya berasal dari daerah sekitar kota Ambon, tetapi ada yang berasal dari pulau-pulau di sekitarnya seperti sagu yang banyak berasal dari Pulau Seram dan Pulau Buru, serta arak dari Jawa. Di samping itu juga dijual barang-barang tembikar dari daerah Ow dan porselin dari Cina.

Dari uraian itu dapat diketahui bahwa perdagangan di pasar kota Ambon sebagian besar dikuasai oleh pedagang lokal, hanya untuk barang perdagangan impor seperti, kain,

gula, dan garam dikuasai oleh pedagang Arab dan Cina. Barang-barang yang diperdagangkan berasal dari daerah sekitar kota Ambon, pulau-pulau di sekitarnya, dan dari tempat yang relatif jauh seperti dari Jawa. Bagaimana dengan dinamika industri rumah tangga ? Barang-barang apa yang dihasilkan ? Siapakah yang berperanan dalam industri rumah tangga ? dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambatnya ?

d. Sektor Industri Rumah Tangga

Di kota Ambon terdapat berbagai industri rumah tangga antara lain, penenunan, pembuatan tali, pembuatan keranjang, tikar, dan industri logam. Usaha penenunan dan pemintalan yang ditekuni oleh sebagian penduduk kurang dapat berkembang, sebab pulau Ambon mempunyai sedikit bahan bakunya seperti, kapas, serabut kelapa, dan gemutu. Oleh karena terbatasnya bahan untuk membuat tenun maka hanya ada sedikit yang dapat dipintal, sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang penduduk. Kain tenun yang dihasilkan berupa seni tenun ikat dengan pola geometris. Supaya tenunan itu dapat berwarna biru, maka digunakan pewarna dari nila yang didatangkan dari

Pulau Jawa.⁴⁸ Oleh karena kain yang dihasilkan oleh penduduk tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan penduduk pada umumnya, maka baik VOC maupun pedagang Cina, Arab, Makassar, dan Bugis mendatangkan kain dari Pulau Jawa dan Makasar.

Sebagian penduduk kota Ambon menekuni bidang pembuatan tali kapal, tali untuk mencari ikan yang terbuat dari serat bambu, keranjang, "dus", tikar, dan karung. Tikar dan "dus" merupakan perkakas rumah tangga yang dimiliki oleh sebagian penduduk Ambon, karena pada umumnya penduduk Ambon tidak mempunyai meja, kursi, dan lemari.⁴⁹ Beberapa kerajinan itu kurang dapat berkembang menjadi kerajinan yang besar, sebab perajin kekurangan modal sehingga jumlah barang yang dihasilkan sedikit, dan alat yang digunakan masih sangat sederhana.

Di kota Ambon terdapat usaha pembuatan kapal-kapal yang relatif kecil seperti *kora-kora*, *orembai*, dan perahu kecil yang hanya dapat dimuati oleh beberapa orang saja. Bahan untuk pembuatan kapal-kapal itu tersedia cukup banyak di Ambon, tetapi industri perkapalan kurang dapat berkembang karena kekurangan modal dan kekurangan tenaga

⁴⁸Ibid., hlm. 193.

⁴⁹Ibid., hlm. 190-191.

kerja. Kurangnya tenaga itu tampak pada jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk membuat sebuah kapal yang relatif kecil yakni antara 3 sampai 4 orang. Oleh karena kekurangan tenaga kerja, maka untuk menyelesaikan sebuah kapal diperlukan waktu yang cukup lama.⁵⁰

Selain kota Ambon wilayah lain yang mempunyai kegiatan membuat kapal adalah, Pulau Manipa, Pulau Buru, Pulau Boeano, dan Ambelau. Jenis-jenis kapal yang dibuat sama yakni *kora-kora*, *orembai*, dan perahu kecil. Harga sebuah kapal berbeda-beda tergantung pada ukurannya. Kapal yang relatif besar harganya sekitar 160 sampai 200 ringgit, sedangkan sebuah *orembai* harganya dapat mencapai 75 ringgit.⁵¹

Kerajinan logam juga kurang dapat berkembang di kota Ambon, sebab di Ambon bahan baku seperti, emas, perak, dan besi sangat langka. Para pande besi di kota Ambon menggunakan besi lama atau impor untuk membuat parang, pisau, lembing, dan senjata. Kerajinan emas dan perak juga tidak banyak digeluti oleh penduduk kota, karena bahan bakunya sangat sedikit. Perhiasan dari emas dan perak yang berupa cincin, gelang, kalung, dan anting-anting, bahannya diper-

⁵⁰Ibid., hlm. 202.

⁵¹Ibid., hlm. 203.

oleh dengan cara melebur kepingan uang. Pusat peleburan emas kota Ambon terletak di kampung Mardika.⁵² Berdasarkan data itu tampak bahwa penduduk kota Ambon yang banyak menggeluti kerajinan logam mulia adalah golongan warga atau *burger*. Oleh karena langkanya logam mulia, maka di dalam masyarakat beredar emas dan perak palsu.

Berdasarkan penjelasan dalam bab II dapat disimpulkan bahwa kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi di Ambon didominasi oleh VOC. Dominasi itu mengakibatkan peran dan kedudukan penguasa pribumi merosot, pelayaran niaga ke Ambon berkurang, peran pedagang Arab, Cina, dan pribumi terbatas. Bagaimana dengan perkembangan pelabuhan Ambon pada masa Pemerintahan Hindia Belanda ?

⁵²Ibid., hlm. 203-204

BAB III

PELABUHAN AMBON 1817-1865

1. Sarana dan Prasarana Pelabuhan

Pelabuhan Ambon merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan maju mundurnya kota Ambon. Pelabuhan mempunyai arti penting bagi kota Ambon karena merupakan pintu keluar masuk barang-barang perdagangan. Untuk mendukung aktivitas itu maka diperlukan berbagai sarana dan prasarana pelabuhan seperti, gudang, dermaga, galangan kapal, jalan-jalan di dalam dan di luar kota yang menuju pelabuhan, alat pengangkutan, dan manajemen pelabuhan yang baik. Oleh karena fungsinya yang penting itu dan supaya aktivitas di pelabuhan dapat berjalan dengan lancar, maka Pemerintah Hindia Belanda mengangkat seorang Kepala Pelabuhan dan seorang Pegawai yang memelihara perlengkapan kapal (*Haven-en-Equipagemeester*). Jabatan itu dipegang oleh orang Belanda yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Pelabuhan Ambon mempunyai sebuah galangan kapal yang berfungsi sebagai tempat untuk membuat dan memperbaiki kapal. Di samping itu terdapat lima gudang satu di antaranya untuk menyimpan batubara, dan empat gudang lainnya

untuk menyimpan barang-barang ekspor.¹ Khusus mengenai masalah gudang, Pemerintah Hindia Belanda mengangkat seorang Kepala Gudang dengan tugas dan kewajiban mempertanggungjawabkan semua barang-barang yang keluar dan masuk gudang, serta melaporkan semua barang-barang itu pada Pemerintah. Seperti halnya dengan jabatan Kepala pelabuhan, jabatan Kepala Gudang juga dipegang oleh orang Belanda.

Kondisi geografis Ambon yang bergunung-gunung menyebabkan prasarana jalan darat pada umumnya kurang baik. Jalan-jalan yang menuju daerah di belakang pegunungan sempit dan terjal, sehingga tidak dapat dilewati oleh kereta maupun kuda, dan hanya dengan jalan kaki dapat mencapai daerah itu. Sebaliknya jalan-jalan yang terdapat di dalam kota keadaannya relatif lebih baik dalam pengertian dapat dilalui oleh kereta, tandu, dan kuda, sehingga komunikasi dan pengangkutan dapat berjalan lebih lancar. Dibandingkan dengan jalan darat, laut merupakan jalur yang paling mudah untuk dilalui. Pengangkutan barang dan orang lewat laut, baik di pulau Ambon itu sendiri maupun antar

¹P. van der Crab, De Molukschen Eilanden Reis van Z.E. den Gouverneur-Generaal Charles Ferdinand Pahud door den Molukschen Archipel (Batavia: Lange & Co., 1862), hlm. 173.

pulau dilaksanakan dengan menggunakan *orembai*, sedangkan untuk pengangkutan ke tempat-tempat yang relatif jauh dilaksanakan dengan menggunakan kapal Pemerintah, kapal swasta yang disewa oleh Pemerintah, dan kapal dari pedagang asing yang mendapat *pas* dari Pemerintah Hindia Belanda.²

Oleh karena kondisi jalan di luar kota Ambon pada umumnya kurang baik, maka komunikasi kurang lancar. Demikian pula pengangkutan barang-barang perdagangan dari daerah penghasil ke pelabuhan juga terhambat. Alat pengangkutan di dalam kota yang berupa kereta kuda dan tandu terbatas jumlahnya. Hanya orang Cina dan Arab yang kaya saja yang memiliki kereta kuda dan tandu untuk disewakan.³ Keterbatasan itu menghambat aktivitas di pelabuhan, sebab diperlukan waktu yang relatif lama untuk sampai ke pelabuhan.

Daerah ibukota tanahnya mengandung pasir dan letaknya

²H. van Kol, Uit Onze Koloniën Uitvoerig Reisverhaal (Leiden: A.W. Sijhoff, 1903), hlm. 161.

³Ibid.

miring ke arah pantai,⁴ sehingga pada musim penghujan sering kali terjadi pendangkalan pantai. Di samping itu beberapa sungai yang ada seperti Sungai Gajah dan Sungai Tomo mempunyai muara yang sempit dan dangkal, sehingga kurang dapat digunakan oleh kapal sebagai tempat untuk berlabuh. Pantai yang seringkali dangkal menghambat aktivitas pelayaran niaga, sebab perahu-perahu kecil yang membawa barang-barang dari kapal yang berlabuh di luar pantai mengalami kesulitan untuk merapat ke pantai, demikian pula sebaliknya pengangkutan barang-barang dari pantai ke kapal juga mengalami kesulitan. Untuk mengatasi masalah pendangkalan pantai Pemerintah Hindia Belanda menyediakan sebuah kapal keruk. Akan tetapi biaya yang dikeluarkan untuk pengerukan tidak sedikit, oleh sebab itu pengerukan jarang dilakukan.

Itulah beberapa prasarana dan sarana yang dimiliki oleh pelabuhan Ambon serta kondisi alam pantainya. Perlu untuk diperhatikan bahwa sejak pendudukan sampai tahun 1853, pelabuhan Ambon merupakan pelabuhan yang tertutup. Baru pada tahun 1854 pelabuhan Ambon dibuka sebagai pela-

⁴P. Bleeker, Reis door de Minahasa en den Molukschen Archipel Gedaan in de Maanden September en Oktober 1855 in het Gevolg van den Gouverneur-Generaal Mr. A.J. Duymaer van Twist. Tweede Deel (Batavia: Lange & Co., 1856), hlm. 102.

bahan bebas. Apakah perubahan status itu dapat meningkatkan pelayaran, perdagangan, ekspor dan impor di kota Ambon?

2. Ekspor dan impor

Impor

Barang-barang impor yang masuk ke pelabuhan Ambon berasal dari berbagai wilayah seperti dari Cina, Jawa, Bali, Banda, Ternate, Gorontalo, Kepulauan Kei, dan Kepulauan Aru.⁵ Sebelum tahun 1854 barang-barang impor meliputi, kain sutera, kain lena beserta bahan mentahnya, beras, dan barang-barang kebutuhan hidup lainnya seperti, garam, gula, keramik Cina, barang dari tembaga, besi, tali, dan beberapa makanan Eropa.⁶ Diantara barang-barang impor itu, tekstil terutama kain lena merupakan barang dagangan yang paling penting dan banyak dicari orang. Hal itu disebabkan tekstil tidak hanya sebagai konsumsi massa, tetapi juga merupakan petunjuk status dan kekayaan seseorang. Pada umumnya salah satu cara orang memamerkan kekayaan dan statusnya dengan cara memamerkan pakaian dan

⁵E.W.A. Ludeking, Schets van de Residentie Amboina ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1868), hlm. 115.

⁶Algemeen Verslag van het Moluksche Over het Jaar 1833. Bagian F.

perhiasan yang mewah. Sementara itu pakaian yang *exotic* mempunyai nilai lebih sebagai pembuat status. Berdasarkan alasan itu pedagang-pedagang asing menemukan bahwa kain yang dapat dijadikan sebagai penunjuk status seseorang berasal dari India dan sutera dari Cina, yang ternyata merupakan barang dagangan yang paling laku.⁷

Tekstil diimpor dari Jawa khususnya dari Semarang, Surabaya, dan dari Eropa. Tekstil dari Jawa berupa kain lena yang berbentuk sarung, gingams, dan tjele.⁸ Di samping itu ada pula kain lurik Jawa, pakaian jadi yang berupa celana jawa, dan handuk besar.⁹

Tekstil banyak dibutuhkan oleh penduduk hal itu dapat dilihat dari frekuensi dan jumlah pengiriman. Sebelum pertengahan abad ke-19 terjadi beberapa kali pengiriman kain ke Ambon. Pada tahun 1817 dari Jawa dikirim kain katun sebanyak 20 pikul, yang diangkut dengan menggunakan

⁷Anthony Reid, "The Pre-Colonial Economy of Indonesia", Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol.XX, No. 2, Agustus, tahun 1984, hlm. 155.

⁸R.Z. Leirissa, dkk., Maluku Tengah Di Masa Lampau, Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982), hlm. 156-157.

⁹Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van President en Raden van Finantien van Nederlands Indië, Zaturdag den 20^e Juny 1818, No. 498. Bundel Ambon.

kapal swasta Inggris yang disewa menurut konsinyasi.¹⁰ Selama bulan Februari sampai Desember tahun 1827 penjualan kain mencapai 1005,44 *gulden*.¹¹ Pada tahun 1833 dari Jawa dikirim kain sebanyak 390 potong yang diangkut dengan menggunakan kapal *Poeboes*, 90 potong kain diangkut dengan menggunakan kapal *Dolmares*, dan 240 potong kain diangkut dengan menggunakan kapal *Chelassen*.¹² Perkembangan impor kain dari tahun 1851 sampai tahun 1862 dapat dilihat pada grafik no. 3.

Berdasarkan grafik itu dapat dilihat bahwa impor kain Eropa lebih besar daripada impor kain pribumi. Hal itu disebabkan, pertama, Pemerintah Hindia Belanda lebih mengutamakan penjualan kain buatan Belanda sendiri untuk melindungi perdagangan dan industri nasionalnya, dan untuk mengimbangi perdagangan kain Inggris. Di tanah jajahan Inggris dapat dengan mudah menjual kain *lanchaster* dengan

¹⁰ Surat Gubernur Maluku kepada Komisaris Jendral tanggal 10 Juni 1817, no. 4. Bundel Ambon no. 472.

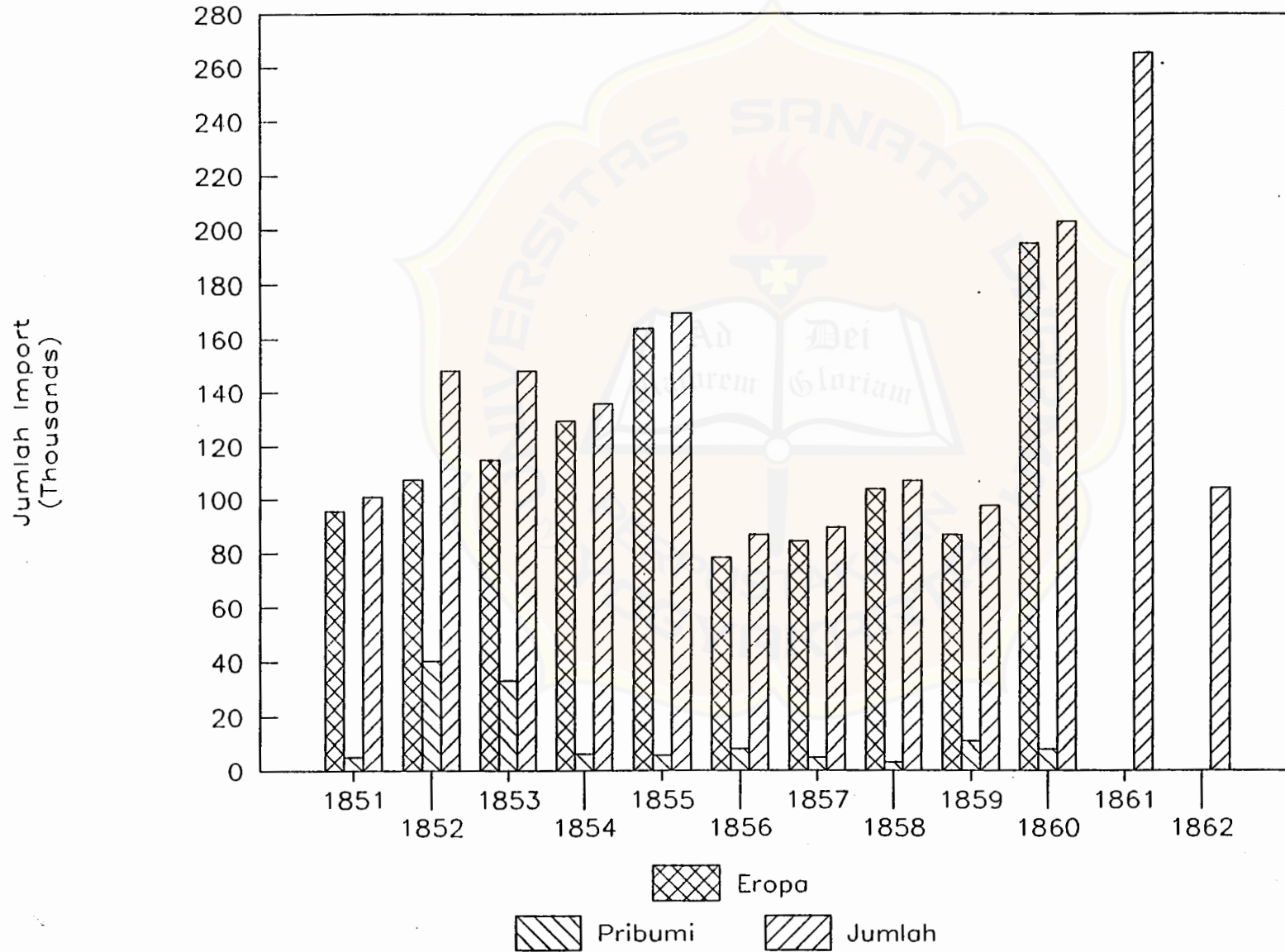
¹¹ Inkoop en Kosten van Lijnwaden over het jaar 1827, no. 12. Bundel Ambon.

¹² Surat Direktur Keuangan Kepada Gubernur Maluku No. 4816, tanggal 25 Nopember tahun 1833, dalam Bundel Ambon no. 1103 A.

Grafik No. 3

Impor Kain Lena Tahun 1851 – 1862

Tahun Import



Sumber: P. van der Crab, De Moluksche Eilanden Reis van Z.E. den Gouverneur-Generaal Charles Ferdinand Pahud Door den Molukschen Archipel (Batavia: Lange & Co., 1862), hlm. 171, dan R.Z. Leirissa, dkk., Maluku Tengah di Masa Lampau Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982), hlm. 178.

harga yang relatif lebih murah.¹³ Pemerintah Hindia Belanda tidak hanya menjual kain Belanda saja, tetapi juga kain dari India dan Cina untuk menambah pemasukan. Kedua, Pemerintah Hindia Belanda masih memegang peranan penting dalam impor kain, walaupun Pemerintah telah "menyerahkan" perdagangan tekstil dan barang kebutuhan hidup yang lain pada pedagang *Burger*.¹⁴ Ketiga, sebagian besar konsumen kain impor adalah penduduk ibukota. Terutama penduduk yang kaya banyak membelanjakan uangnya untuk membeli kain yang mahal karena untuk menunjukkan status sosialnya. Keempat, kain pribumi lebih banyak dikonsumsi oleh penduduk yang mempunyai status lebih rendah seperti buruh dan budak. Dapat dikatakan bahwa perdagangan kain ditentukan pula oleh struktur sosial dan ekonomi masyarakatnya.

Impor kain Eropa dari tahun 1851 sampai tahun 1855 menunjukkan kecenderungan meningkat sebab permintaan penduduk meningkat. Akan tetapi pada tahun 1856, dua tahun sesudah Ambon dibuka sebagai pelabuhan bebas impor kain

¹³Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. Jilid II (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 11, dan R. Broersma, "Koopvaardij in de Molukken", Kolonial Tijdschrift. Drie-en-Twintigste Jaargang, 1934, hlm. 136.

¹⁴R.Z. Leirissa, dkk., 1982, op. cit., hlm. 149.

Eropa turun sebab, pertama, kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan bebas masih ditarik cukai impor, sehingga banyak pedagang yang menghindari pelabuhan Ambon. Kedua, adanya perdagangan gelap yang dilakukan oleh pedagang Bugis dan Makasar, yang membawa barang-barang dari Singapura dengan harga yang relatif lebih murah. Perdagangan itu mengurangi pendapatan Pemerintah Hindia Belanda dan memusatkan komo-diti ditangan orang asing, sehingga ada tuntutan untuk mendatangkan kapal perang.¹⁵ Ketiga, permintaan kain turun yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah penduduk akibat wabah penyakit. Pada tahun 1860 impor kain meningkat lagi, karena permintaan meningkat sebagai akibat kondisi kesehatan masyarakat yang membaik, sehingga daya beli penduduk juga meningkat.

Pada tahun 1852, impor kain pribumi mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan. Akan tetapi sesudah tahun 1852 sampai tahun 1860, impor kain pribumi cenderung turun yang disebabkan oleh pertama, turunnya permintaan karena daya beli masyarakat turun, sebagai akibat wabah penyakit yang melanda penduduk Ambon. Kedua, adanya perdagangan gelap kain yang dilakukan oleh

¹⁵Algemeen Verslag van het Moluksche over het Jaar 1833. Bagian F.

pedagang Makasar dan Bugis, yang membawa barang-barang dari Singapura dengan harga yang relatif lebih murah. Kain selundupan harganya relatif lebih murah bila dibandingkan dengan kain yang dijual oleh Pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan jumlah impor kain dari tahun ke tahun tampak bahwa pembukaan Ambon sebagai pelabuhan bebas ternyata kurang dapat meningkatkan perdagangan kain pribumi di kota pelabuhan Ambon.

Beras merupakan barang impor yang penting sesudah kain. Sebagian besar penduduk kota Ambon seperti, orang Eropa, orang Arab, dan orang Cina mengkonsumsi beras. Di samping itu sebagian penduduk pribumi ada yang mengkonsumsi beras terutama pada saat mengadakan pesta.¹⁶ Padahal Pulau Ambon dan pulau sekitarnya sedikit menghasilkan beras. Di Pulau Buru ada sedikit penanaman padi di bawah pengawasan Pemerintah Hindia Belanda dengan hasil 148 pikul di tahun 1854. Di Pulau Haruku dan Nusa Laut sama sekali tidak ada penanaman padi, sedangkan di Pulau Ambon dan Pulau Saparua hanya ada sedikit penanaman padi. Di Pulau Seram ada penanaman padi yang cukup luas di tanah kering yang diusahakan oleh suku Alfur.¹⁷ Jumlah beras

¹⁶Koloniaal Verslag over het Jaar 1855. Hlm. 149.

¹⁷Ibid.

yang dihasilkan oleh pulau-pulau itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Oleh sebab itu baik Pemerintah Hindia Belanda maupun pedagang-pedagang Arab, Cina, Makasar, dan Bugis mendatangkan beras dari Jawa, Bali, dan Menado.

Kebutuhan penduduk kota Ambon akan beras cukup besar, hal itu dapat dilihat dari terjadinya beberapa kali pengiriman beras dari Jawa dan Bali ke Ambon. Pada tahun 1817 dari Surabaya dikirim beras sebanyak 187.416 kilogram atau 55 koyang.¹⁸ Pada bulan Juni tahun 1817 ada pengiriman beras sebanyak 370 koyang, yang diangkut dengan menggunakan kapal swasta Inggris yang disewa menurut konsinyasi oleh Pemerintah Hindia Belanda, dan sebuah pancalang yang berisi 25 koyang beras yang dikirim untuk Pemerintah. Sementara itu kapal Arab yang mengangkut 60 koyang beras dihantam badai di Pulau Buru.¹⁹ Pada tahun 1818 dari Jawa dikirim 60 koyang beras, yang diangkut dengan menggunakan

¹⁸Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van Presiden en Raden van Finantien van Nederlands Indië. Maandag, den 26 Januarij 1818, no. 45. Bundel Ambon.

¹⁹Surat Gubernur Maluku pada Komisaris Jendral tanggal 10 Juni 1817, No. 4. Bundel Ambon, No. 472. Koyang merupakan ukuran berat, 1 koyang = 1875 pon Amsterdam. Lihat R.Z. Leirissa, dkk., 1982, op. cit., hlm. 141, atau sama dengan 1.792,32 kilogram.

kapal Jane secara konsinyasi dengan nahkoda kapal Kapten Schmidt,²⁰ dan kemudian dikirim lagi beras sebanyak 4097 kilogram.²¹ Pada tanggal 2 Januari tahun 1826 ada pengiriman beras dari Jawa sebesar 217.173 pon yang diangkut dengan menggunakan kapal Latona, berdasarkan kontrak yang dibuat oleh A. Givers, pemasok Pemerintah dari Kantor Asisten Residen Surabaya T.H. Smulsers, dengan tuan Jossen seharga 7000 *gulden* per koyang. Pada bulan Pebruari ada pengiriman beras dari Jawa sebesar 645.326 pon, berdasarkan jumlah yang ditetapkan oleh A. Givers, yang diangkut dengan menggunakan kapal swasta Thalia,²² Pada bulan Januari tahun 1827 ada pengiriman beras sebanyak 12 ton, sedangkan pada bulan Februari ada pengiriman beras dari Menado sebesar 10 koyang dengan harga 40 *gulden* per koyang, yang dibawa oleh orang Cina Tan Kampu seorang nahkoda kapal swasta Baikoleh. Pada bulan Maret dari Menado

²⁰Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van President en Raden van Finantien van Nederlands Indië, Vrijdag, den 23 Oktober 1818, no. 45. Bundel Ambon Ger. No. 1856.

²¹Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van President en Raden van Finantien van Nederlands Indië, Vrijdag, den 8 Meij 1818, no. 27. Bundel Ambon, Ger. No. 1095.

²²Inkoop en Kosten van rijst over het jaar 1827, Bundel Ambon, No. 12 .

dikirim beras sebanyak 136.000 pon dengan harga 40 *gulden* per koyang, yang diangkut dengan menggunakan kapal swasta Anna Agustina dengan nahkoda T. Samuels.²³ Pada tahun 1854 impor beras dari Jawa dan Bali sekitar 925 koyang dengan harga 140.000 *gulden*.²⁴

Jumlah beras dalam *gulden* yang diimpor oleh Pemerintah Hindia Belanda antara tahun 1858 sampai tahun 1862 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Impor Beras Tahun 1858-1862

Tahun	Beras
1858	150.408 <i>gulden</i>
1859	148.210 <i>gulden</i>
1860	85.210 <i>gulden</i>
1861	115.986 <i>gulden</i>
1862	58.598 <i>gulden</i>

Sumber: R.Z. Leirissa, dkk., Maluku Tengah Di Masa Lampau Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982), hlm. 178.

Dari tabel itu tampak bahwa sejak tahun 1858 impor beras cenderung semakin turun, meskipun pelabuhan Ambon sudah dibuka sebagai pelabuhan bebas. Pada tahun 1861 impor beras meningkat tetapi sesudah itu turun lagi. Penurunan itu disebabkan oleh permintaan penduduk yang

²³Ibid.

²⁴R. Broersma, "Koopvaardij in de Molukken", Koloniaal Tijdschrift. Drie-en-Twintigste Jaargang, 1934, hlm. 142.

turun sebagai akibat wabah penyakit, adanya perdagangan gelap beras, dan cukai impor di pelabuhan yang menyebabkan harga beras menjadi relatif mahal. Peningkatan impor pada tahun 1861 karena permintaan naik sebab daya beli penduduk meningkat lagi sebagai akibat kondisi kesehatan masyarakat yang semakin baik. Dapat dikatakan bahwa pembukaan Ambon sebagai pelabuhan bebas tidak membawa peningkatan bagi perdagangan beras di ibukota Ambon.

Impor barang-barang kebutuhan hidup yang lain meliputi, ikan kering, garam, tembakau, kopi, teh, arak, gambir, candu, barang-barang tembikar, dan besi.²⁵ Di samping itu ada gula, keramik Cina, barang tembaga, besi, tali, dan beberapa makanan Eropa.²⁶ Pada tahun 1817, ada pengiriman 4000 karung *stro* dari Jawa, 4000 botol minyak sere, 20 tong arak, beberapa barang perlengkapan, dan perhiasan.²⁷ Pada tahun itu juga ada pengiriman 8 kati arak khusus bagi

²⁵P. Bleeker dalam G.W.W.C. Baron van Hoëvell, 1868, op. cit., hlm. 129.

²⁶Algemeen Verslag van het Moluksche Over het Jaar 1833. Bagian F.

²⁷Surat Gubernur Maluku pada Komisaris Jendral, 10 Juni 1817, no. 4. Bundel Ambon, no. 472.

pasukan Eropa dan kayu jati.²⁸ Pada tahun 1854 dari Jawa dan Bali dikirim sepatu, minuman, dan barang konsumsi lainnya sebesar 53.000 *gulden*.²⁹

Jumlah impor barang-barang kebutuhan hidup yang lain dalam *gulden* dari tahun 1858 sampai tahun 1862, dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Impor Barang Kebutuhan Hidup Tahun 1858-1862

Tahun	Barang Kebutuhan Hidup
1858	46.166 <i>gulden</i>
1859	39.651 <i>gulden</i>
1860	38.677 <i>gulden</i>
1861	63.613 <i>gulden</i>
1862	49.713 <i>gulden</i>

Sumber: R.Z. Leirissa, dkk., Maluku Tengah di Masa Lampau Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982), hlm. 178.

Berdasarkan tabel itu dapat diketahui bahwa dari tahun 1858 sampai tahun 1860 impor barang-barang kebutuhan hidup cenderung turun, tetapi pada tahun 1861 meningkat lagi, dan tahun 1862 turun lagi. Naik turunnya impor barang kebutuhan hidup disebabkan oleh naik turunnya permintaan penduduk. Pada umumnya turunnya impor barang-

²⁸Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van President en Raden van Finantien van Nederlands Indië, Maandag, den 26 Januarij 1818, no. 45. Bundel Ambon.

²⁹R. Broersma, loc. cit.

barang kebutuhan hidup disebabkan oleh turunnya daya beli penduduk sebagai akibat wabah penyakit dan perdagangan gelap, sedangkan meningkatnya impor barang-barang kebutuhan hidup disebabkan oleh meningkatnya permintaan.

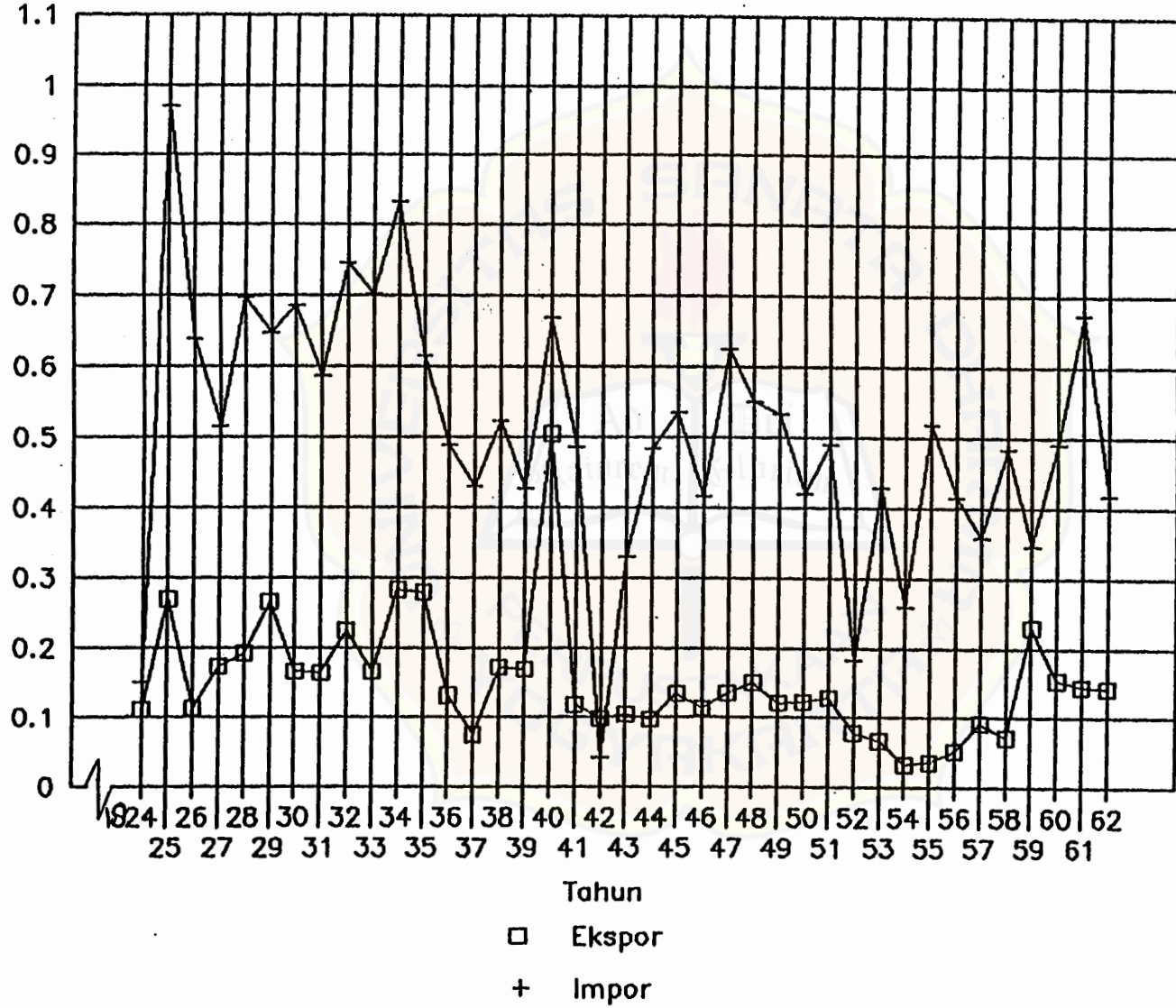
Di antara barang-barang impor, kain lena merupakan impor paling penting, sebab penduduk kota Ambon dan sekitarnya kurang dapat memproduksi kain sendiri. Menurut P. Bleeker,³⁰ pada tahun 1855 nilai impor kain mencapai 163.976 *gulden* dan bila dihitung dari seluruh impor, nilai impor kain besarnya mencapai sepertiga dari seluruh impor. Impor beras mencapai 133.011 *gulden* yang besarnya mencapai seperempat dari nilai seluruh impor. Sementara itu barang-barang kebutuhan hidup besarnya mencapai seperlima dari keseluruhan impor. Jumlah seluruh impor dari tahun 1824 sampai tahun 1864 dapat dilihat pada grafik no. 4.

Berdasarkan grafik itu dapat dilihat, bahwa pembukaan Ambon sebagai pelabuhan bebas kurang membawa pengaruh bagi peningkatan impor bahkan terjadi beberapa kali penurunan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, di

³⁰) P. Bleeker dalam G.W.W.C. Baron van Hoevell, "De Hervorming der Molukken", Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. 2^e Jaargang 1. Eerst Gedeelte (Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon, 1868), hlm. 132.

Ekspor dan Impor Tahun 1824–1862

Jumlah Ekspor—Impor
(Millions)



Sumber: P. van der Crab, De Moluksche Eilanden Reis van

Z.E. den Gouverneur-Generaal Charles Ferdinand
Pahud Door den Molukschen Archipel (Batavia:

Lange & Co., 1862), hlm. 170 dan R.Z. Leirissa, dkk.,

Maluku Tengah di Masa Lampau Gambaran Sekilas Lewat

Arsip Abad Sembilan Belas (Jakarta: Arsip Nasional

Republik Indonesia, 1982), hlm. 178 dan P. Bleeker,

Reis Door de Minahasa en den Molukschen Archipel

Gedaan in de Maanden September en Oktober 1855 in het

Gevolg van den Gouverneur Generaal Mr. A.J. Duymaer

van Twist (Batavia: Lange & Co., 1856), hlm. 130.

E.W.A. Ludeking, Schets van de Residentie Amboina

(S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1868), hlm. 115.

pelabuhan Ambon masih ada pungutan cukai ekspor dan impor, sehingga harga barang menjadi lebih mahal. Akibatnya di dalam masyarakat beredar barang selundupan yang harganya relatif lebih murah. Kedua, berjangkitnya wabah penyakit yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

Bagaimana dengan perkembangan ekspor pada masa sebelum dan sesudah Ambon dibuka sebagai pelabuhan bebas ? Apakah dengan dibukanya pelabuhan Ambon sebagai pelabuhan bebas ada pengaruhnya bagi peningkatan produksi barang ekspor ?

Ekspor Cengkih

Pada tahun 1817 sampai tahun 1856 ekspor utama Pulau Ambon meliputi, cengkih, pala, fuli, minyak kayu putih, dan kayu, tetapi sesudah tahun 1857 jenis ekspor bertambah dengan masuknya produk coklat. Barang-barang itu diekspor ke Jawa, Makasar, Gorontalo, Bali, Ternate, Banda, Borneo, Cina, dan Manila.³¹ Diantara produk hasil bumi itu, cengkih merupakan ekspor utama dan dimonopoli oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Jumlah cengkih yang diekspor ke Eropa tergantung pada permintaan pasar. Dalam kenyataannya pasar di Eropa tidak

³¹E.W.A. Ludeking, op. cit., hlm. 115.

lagi dimonopoli oleh cengkih dari Ambon, tetapi sudah dipenuhi oleh cengkih dari berbagai wilayah. Cengkih yang dihasilkan oleh penduduk kadang-kadang melebihi permintaan pasar Eropa, dan kelebihanannya itu dijual oleh Pemerintah Hindia Belanda ke Batavia, Surabaya, dan tempat-tempat lain di Jawa yang ramai dikunjungi oleh pedagang.³²

Barang-barang ekspor terutama cengkih diangkut dengan menggunakan kapal-kapal Pemerintah Hindia Belanda dan kapal swasta yang disewa oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1824, Pemerintah mengirimkan rempah-rempah ke Jawa dengan menggunakan kapal swasta Johanna Wilhelmina yang dinahkodai oleh O.B. Williams. Sehubungan dengan pengangkutan itu, Pemerintah Hindia Belanda membuat kontrak dengan nahkoda senilai 5000 *gulden* untuk mengangkut persediaan rempah-rempah seberat 194.600 pon, yang terdiri dari 590 pon cengkih, 1809 pon pala, dan 150 pon fuli menurut faktur yang berlaku. Pada tahun yang sama Pemerintah Hindia Belanda mengirim 4 bak cengkih dan 2 bak pala muda secara konsinyasi ke Surabaya dengan menggunakan kapal swasta Anna yang dinahkodai oleh W.H. Nash.³³ Pada

³²P. van der Crab, *op. cit.*, hlm. 131-132.

³³Surat Gubernur Ambon kepada Direktur Keuangan Tanggal 10 Agustus 1824, no. 66. Bundel Ambon, no. 477.

tahun 1853, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan bahwa pengangkutan rempah-rempah di perairan Maluku dapat menggunakan perahu yang berdagang di Ambon dan Banda. Pemilik perahu itu harus tunduk pada Pemerintah Hindia Belanda, dan tidak boleh menolak mengangkut rempah-rempah Pemerintah Hindia Belanda bila dianggap perlu dan perintah itu disampaikan oleh Residen.³⁴

Pemerintah Hindia Belanda di Batavia yang membayar cengkik kepada penduduk secara kontan dengan uang, dan tidak dibayar dengan kain atau dikredit seperti pada masa VOC. Untuk itu pada tahun 1817, Pemerintah Hindia Belanda mengirim 10.000 keping uang perak dan 15.000 keping duit, yang diangkut dengan menggunakan kapal swasta Inggris yang disewa oleh Pemerintah Hindia Belanda secara konsinyasi.³⁵ Pada tahun 1818 Pemerintah mengirim 11 peti uang perak senilai 50.000 *gulden*, dan 200.000 *gulden* tembaga yang diangkut dengan menggunakan Kapal Aurora dan dinahkodai oleh G. Naning.³⁶ Uang yang dikirim oleh Pemerintah tidak

³⁴Kolonial Verslag Over het Jaar 1855. Hlm. 164.

³⁵Surat Gubernur Maluku kepada Komisaris Jendral Tanggal 10 Juni 1817, no. 4. Bundel Ambon, no. 472.

³⁶Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van Presiden en Raden van Finantien van Nederlands Indië, no. 57, Maandag, den 25 Februarij 1818. Bundel Ambon, no. 688.

hanya untuk membayar cengkih yang disetorkan oleh penduduk, tetapi juga untuk membiayai Pemerintahan seperti untuk menggaji pegawai-pegawainya.

Harga cengkih di Ambon cenderung semakin turun dari tahun ke tahun. Kompeni membayar cengkih sebesar $19\frac{7}{11}$ duit atau 3,92 sen untuk setiap pon, dan kemudian turun menjadi 16 duit atau 3,20 sen. Sejak tahun 1824, harga cengkih ditetapkan 24 duit atau 4,80 sen per satu pon.³⁷ Menurut Laporan Pemerintah Tahun 1863, oleh karena harga beli dan prosen bagi para kepala sebesar 15 *gulden* per *bahar*, maka harga cengkih ditetapkan 34,65 *gulden* per pikul. Sementara hasilnya setelah dikurangi oleh biaya pengangkutan dan penjualan di negeri Belanda, tetapi tidak termasuk biaya pengangkutan dari Ambon ke Jawa, pada tahun 1854 harga cengkih per pikul ditetapkan sebesar $31,25\frac{9}{10}$ *gulden*, tahun 1855 sebesar $34,02\frac{7}{10}$ *gulden*, dan tahun 1856 sebesar $28,11\frac{1}{10}$ *gulden*.³⁸

Perhitungan harga 34,65 *gulden* per pikul tidak sepenuhnya benar, karena belum diperhitungkan gaji dari lima pengawas cengkih, mandor, para pelayan di gudang, pengelu-

³⁷Kolonial Verslag Over het Jaar 1855. Hlm. 129.

³⁸G.W.W.C. Baron van Hoëvell, 1868, op. cit., hlm. 135.

aran untuk hadiah tahunan bagi para Kepala *Negori*, biaya pengangkutan cengkih dari Hila dan Larike ke Ambon, dan biaya untuk penyediaan karung goni yang diimpor dari Jawa. Setelah diperhitungkan dengan seluruh biaya itu, maka harga bersih cengkih per pikul ditetapkan sebagai berikut, pada tahun 1857 tidak ada penjualan, tahun 1858 harga cengkih ditetapkan sebesar $16,49^8/10$ *gulden*, tahun 1859 tidak ada penjualan, tahun 1860 harga cengkih $15,54^9/10$ *gulden*, tahun 1861 harga cengkih $12,35^3/10$ *gulden*, tahun 1862 harga cengkih $16,43^6/10$ *gulden*, dan tahun 1863 harga cengkih $16,12^3/10$ *gulden*.³⁹

Harga cengkih di pasar Eropa cenderung semakin turun dari tahun ke tahun. Harga jual cengkih di pasar Eropa dari tahun 1852 sampai tahun 1862 dapat dilihat pada grafik no. 5. Harga cengkih turun disebabkan pasar Eropa telah dipenuhi oleh cengkih dari berbagai wilayah seperti dari Mauritius, Madagaskar, Malagasi, dan Zanzibar. Dengan demikian bagi Pemerintah cengkih tidak lagi menguntungkan, dan hal itu diakui oleh Menteri Koloni Rochussen,⁴⁰

Berdasarkan harga cengkih yang berlaku di Ambon dan

³⁹Ibid., hlm. 136, dan P. Bleeker, op. cit., hlm. 128.

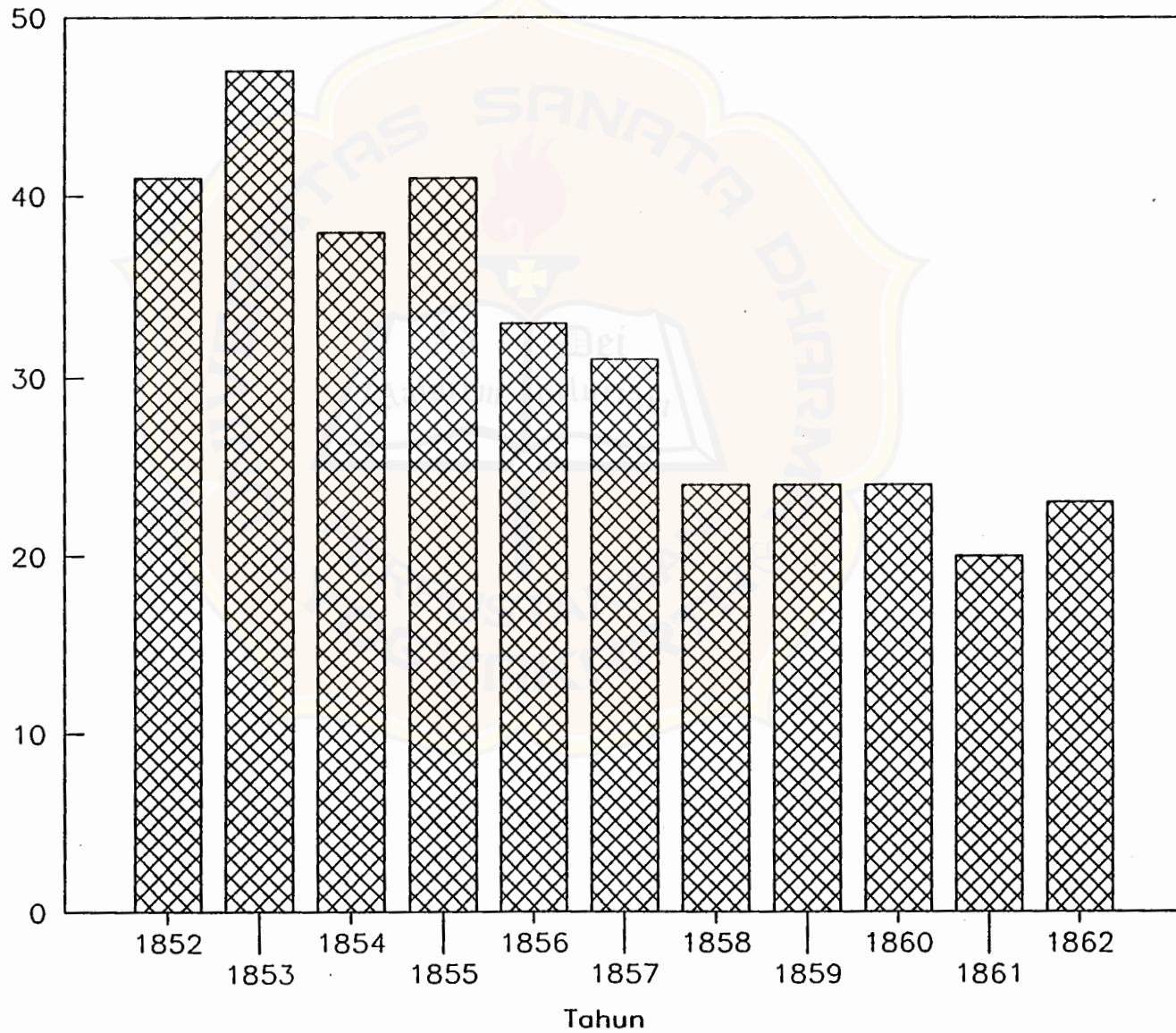
⁴⁰P. Bleeker, op. cit., hlm. 132, dan Kolonial Ver-
slag Over het Jaar 1858-1859. Hlm. 37

Grafik No. 5

Harga Jual Cengkih di Pasar Eropa

Per Pon Amsterdam

Harga Jual



Sumber: G.W.W.C. Baron van Hoevell, "De Hervorming der Mglukken", Tijdschrift voor Nederlandsch Indie. 2e Jaargang. 1. Eerste Gedeelte (Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon, 1868), hlm. 135.

jumlah panen cengkih, dari tahun 1817 sampai tahun 1823. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan uang untuk membeli cengkih sebesar 50.817,88 *gulden*, pada waktu itu harga cengkih 16 duit per pon. Pada tahun 1824 sampai tahun 1853, harga cengkih 24 duit per pon, berarti Pemerintah membayar cengkih pada penduduk sebesar 294.522,98 *gulden*, dan dari tahun 1854 sampai tahun 1863, harga cengkih bervariasi dan Pemerintah Hindia Belanda membayar cengkih pada penduduk sebesar 530.259,76 *gulden*.⁴¹ Jadi dari tahun 1817 sampai tahun 1863, Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan uang sebesar 875.600,62 *gulden* untuk membeli cengkih. Secara lengkapnya jumlah uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk membeli cengkih setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 5, 6, dan 7 di lampiran 1.

Ekspor Pala dan Fuli

Sejak tahun 1827 Pemerintah Hindia Belanda menetapkan tanaman pala sebagai tanaman bebas, dengan tujuan untuk mengembangkan perdagangan di kota pelabuhan Ambon. Akan tetapi ekspor pala dan fuli tetap dikuasai oleh Pemerintah

⁴¹Jumlah cengkih yang disetorkan oleh penduduk pada Pemerintah Hindia Belanda dari tahun 1817 sampai tahun 1863, diambil dari E.W.A. Ludeking, op. cit., hlm. 92-93, dan P. Bleeker, op. cit., hlm. 120-121.

Hindia Belanda. Pada tahun 1824 Pemerintah Hindia Belanda telah mengirim pala sebanyak 1809 pon dan fuli sebanyak 150 pon ke Jawa.⁴² Pada tahun 1848, Pemerintah Hindia Belanda telah menjual pala sebanyak $5928^{269}/1000$ pikul dengan harga $99,60^{3/4}$ *gulden* per pikul berarti 540.499,86 *gulden*, dan fuli sebesar $1585^{334}/1000$ pikul dengan harga 112,71 *gulden* per pikul berarti 178.683,49 *gulden*.⁴³ Pada tahun 1849, Pemerintah telah menjual pala sebanyak $9.232^{44}/1000$ pikul dengan harga $141.26^{5/10}$ *gulden* per pikul, berarti 1.304.163,55 *gulden*, dan fuli sebanyak $2.063^{820}/1000$ dengan harga $146.69^{6/10}$ *gulden* per pikul, berarti senilai 302.753,26 *gulden*.⁴⁴ Jadi pada tahun 1849, ekspor pala dan fuli meningkat karena produksi dan permintaan meningkat. Perkembangan ekspor pala dan fuli pada tahun 1851 sampai tahun 1862, dapat dilihat pada grafik no. 6.

Naik turunnya ekspor pala dan fuli disebabkan oleh naik turunnya permintaan, harga, bencana alam seperti

⁴²Surat Gubernur Ambon kepada Direktur Keuangan Tanggal 10 Agustus 1824, no. 66. Bundel Ambon, no. 477.

⁴³Kolonial Verslag Over het Jaar 1849. Hlm. 260.

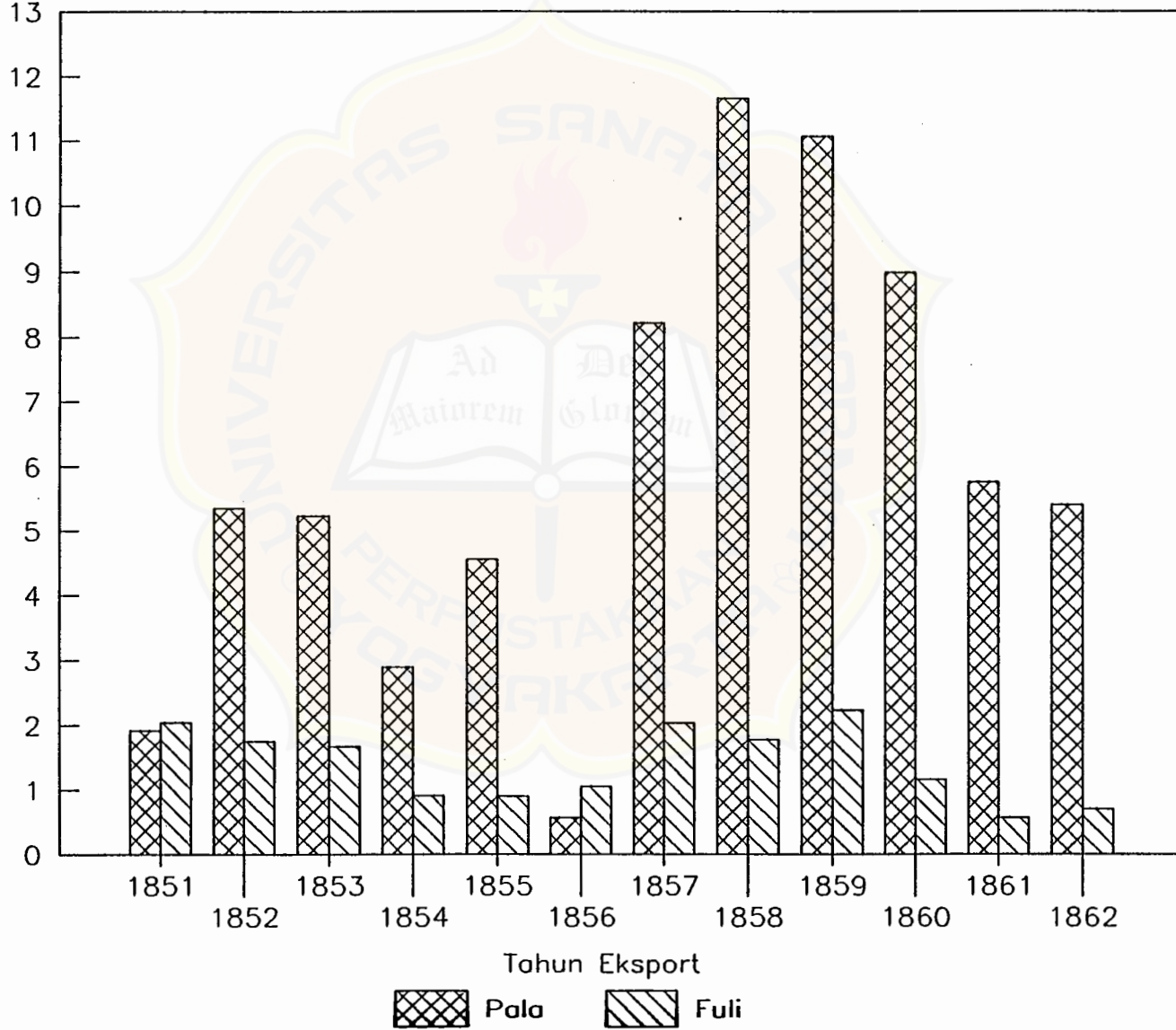
⁴⁴ibid., hlm. 276.

Grafik No. 6

Ekspor Pala dan Fuli

Tahun 1851-1862

Jumlah Ekspor (Gulden)
(Thousands)



Sumber: P. van der Crab, De Moluksche Eilanden Reis van Z.E. den Gouverneur-Generaal Charles Ferdinand Pnhud Door de Molukschen Archipel (Batavia: Lange & Co., 1862), hlm. 172, R.Z. Leirissa, dkk., Maluku Tengah di Masa Lampau Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982), hlm. 178.

gempa bumi, dan kondisi kesehatan masyarakat, bukan karena pembukaan Ambon sebagai pelabuhan bebas. Pada tahun 1856 ekspor pala turun tajam sebagai akibat berkurangnya tenaga kerja karena wabah penyakit cacar. Akan tetapi pada tahun 1858 ekspor pala meningkat tajam karena produksi naik sebagai akibat kondisi penduduk yang membaik, di samping itu juga karena permintaan meningkat. Pada tahun 1859 sampai tahun 1862 ekspor pala cenderung turun sebab permintaan turun.

Pada tahun 1851 sampai tahun 1855 impor fuli cenderung turun sebagai akibat bencana alam gempa bumi yang menyebabkan banyak pohon mati dan rusak dan berkurangnya tenaga kerja karena wabah penyakit. Akan tetapi pada tahun 1856 sampai tahun 1859 impor fuli cenderung meningkat sebab kondisi masyarakat yang agak membaik sebagai akibat vaksinasi cacar yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1860 dan 1861 impor fuli cenderung turun sebab bencana alam gempa bumi.

Ekspor Minyak kayu Putih

Seperti halnya pala dan fuli, ekspor minyak kayu putih juga dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Ekspor minyak kayu putih dari pelabuhan Ambon sebagian besar berasal dari Pulau Buru. Perkembangan ekspor minyak kayu

putih antara tahun 1851 sampai tahun 1861 dapat dilihat pada grafik no. 7.

Berdasarkan grafik itu dapat diketahui bahwa ekspor minyak kayu putih mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Pada umumnya peningkatan ekspor disebabkan oleh produksi dan permintaan meningkat, sedangkan penurunan ekspor disebabkan oleh permintaan menurun, bencana alam yang dapat merusak pohon, dan berkurangnya tenaga kerja sebagai akibat wabah penyakit. Penurunan ekspor pada tahun 1851 sampai tahun 1862 berkaitan erat dengan kondisi kesehatan penduduk, yang pada waktu itu terjangkit berbagai wabah penyakit seperti, malaria, cacar, dan bisul. Akibatnya jumlah penduduk Kajeli turun tajam sehingga kekurangan tenaga kerja untuk mengurus perkebunan.⁴⁵

Ekspor Kayu

Ekspor kayu dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda Kayu yang diekspor, produknya tidak hanya berasal dari Ambon, tetapi juga dari pulau di sekitarnya seperti Pulau

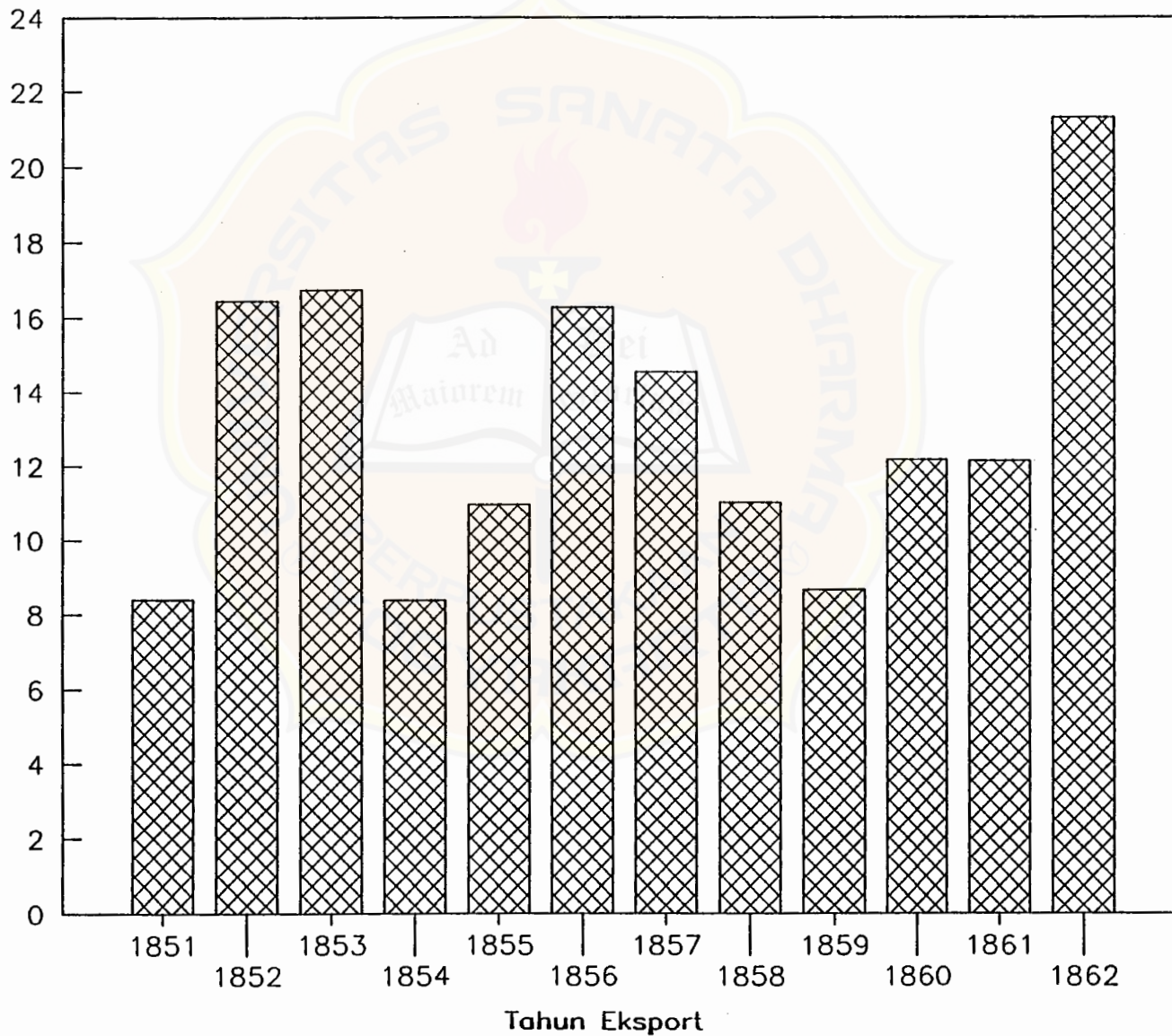
⁴⁵E.W.A. Ludeking, op. cit., hlm. 143-145.

Grafik No. 7

Eksport Minyak Kayu Putih

Dari Tahun 1851-1862

Jumlah Eksport
(Thousands)



Sumber: P. van der Crab, De Moluksche Eilanden Reis van Z.E. den Gouverneur-Generaal Charles Ferdinand Pahud Door den Molukschen Archipel (Batavia: Lange & Co., 1862), hlm. 172, R.Z. Leirissa, dkk., Maluku Tengah di Masa Lampau Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982), hlm. 178.

Seram dan Pulau Buru.⁴⁶ Untuk jenis Kayu abanus yang mempunyai warna hitam sebagian besar dikirim ke Cina.⁴⁷ Perkembangan ekspor kayu antara tahun 1851 sampai tahun 1862 dapat dilihat pada grafik no. 8.

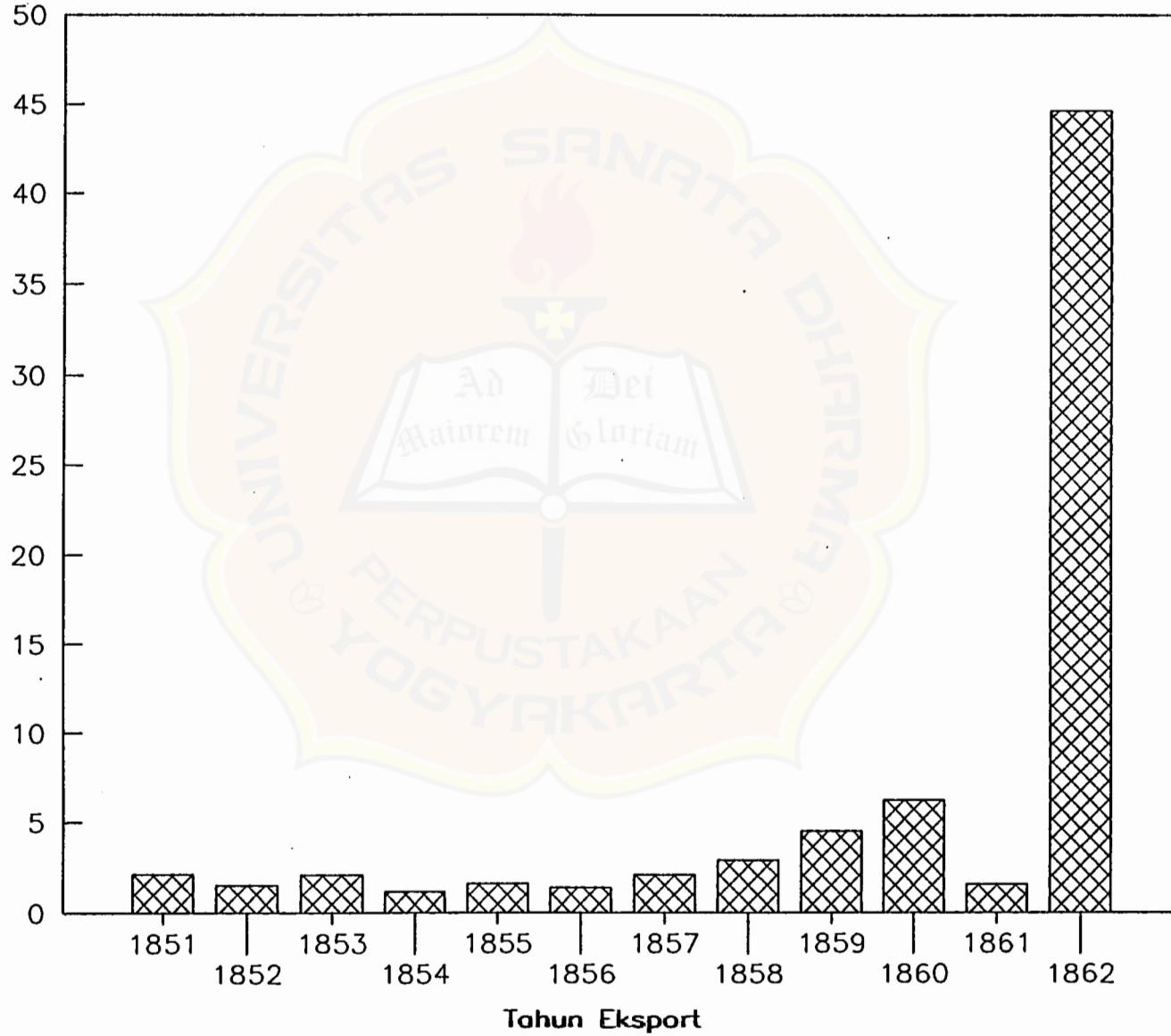
Berdasarkan grafik itu tampak bahwa ekspor kayu dari tahun 1851 sampai tahun 1862 mengalami naik turun. Pada tahun 1854 ketika pelabuhan Ambon dibuka sebagai pelabuhan bebas ekspor kayu turun. Hal itu menunjukkan bahwa pembukaan pelabuhan Ambon kurang berpengaruh pada peningkatan ekspor kayu. Perunan ekspor lebih disebabkan oleh turunnya permintaan. Pada tahun 1862 ekspor kayu meningkat tajam sebab permintaan meningkat. Pada umumnya turun naiknya ekspor kayu berkaitan erat dengan permintaan, bencana alam, dan kekurangan tenaga kerja.

⁴⁶Yang dimaksud dengan ekspor kayu disini, meliputi berbagai jenis kayu seperti, kayu lingoa, kayu lasi, kayu arang, kayu buku, kayu besi, kayu abanus, kayu akar, dan sebagainya. G.W.W.C. Baron van Hoëvell, Ambon en Meer Bepaaldelijk de Oeliasers, Geographisch, Ethnographisch, Politisch, en Historisch Geschets (Dordrecht: Blusse en van Braam, 1875), hlm. 198.

⁴⁷D.W.R. van Hoëvell, "Tegenwoordige Gesteldheid der Moluksche Eilanden", Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. 18^{de} Jaargang, AFL. 1-6, Eerste Deel (Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon, 1856), hlm. 257.

Eksport Kayu Dari Tahun 1851–1862

Nilai Eksport (Gulden)
(Thousands)



Sumber: P. van der Crab, De Molukse Eilanden Reis van Z.E. den Gouverneur-Generaal Charles Ferdinand Pahud Door den Molukschen Archipel (Batavia: Lange & Co., 1862), hlm. 172, R.Z. Leirissa, dkk., Maluku Tengah di Masa Lampau Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982), hlm. 178.

Ekspor Coklat

Coklat diekspor ke Manila yang menjadi satu-satunya pasar bagi coklat Ambon. Perkembangan ekspor coklat dari tahun 1857 sampai tahun 1864 dapat dilihat pada grafik no. 9. Dari grafik itu dapat dilihat bahwa ekspor coklat dari tahun 1857 sampai tahun 1862 selalu meningkat yang disebabkan oleh produksi dan permintaan yang terus meningkat. Akan tetapi pada tahun 1863 ekspor coklat turun karena harga coklat turun. Pada tahun 1864 ekspor tetap turun meskipun harga meningkat. Hal itu disebabkan oleh pengaruh turunnya harga coklat di tahun 1863.

Itulah beberapa impor dan produk ekspor dari Pulau Ambon dan pulau sekitarnya. Berdasarkan perhitungan impor dan ekspor dapat diketahui bahwa impor lebih besar daripada ekspor. Impor lebih besar sebab Pulau Ambon dan pulau sekitarnya terbatas potensinya, sedangkan ekspor lebih sedikit sebab selain cengkih, minyak kayu putih, kayu, coklat, pala dan fuli, tidak ada lagi komoditi ekspor untuk pasar regional dan internasional. Lebih besarnya impor dari pada ekspor menunjukkan bahwa perdagangan di Ambon mengalami kemunduran.

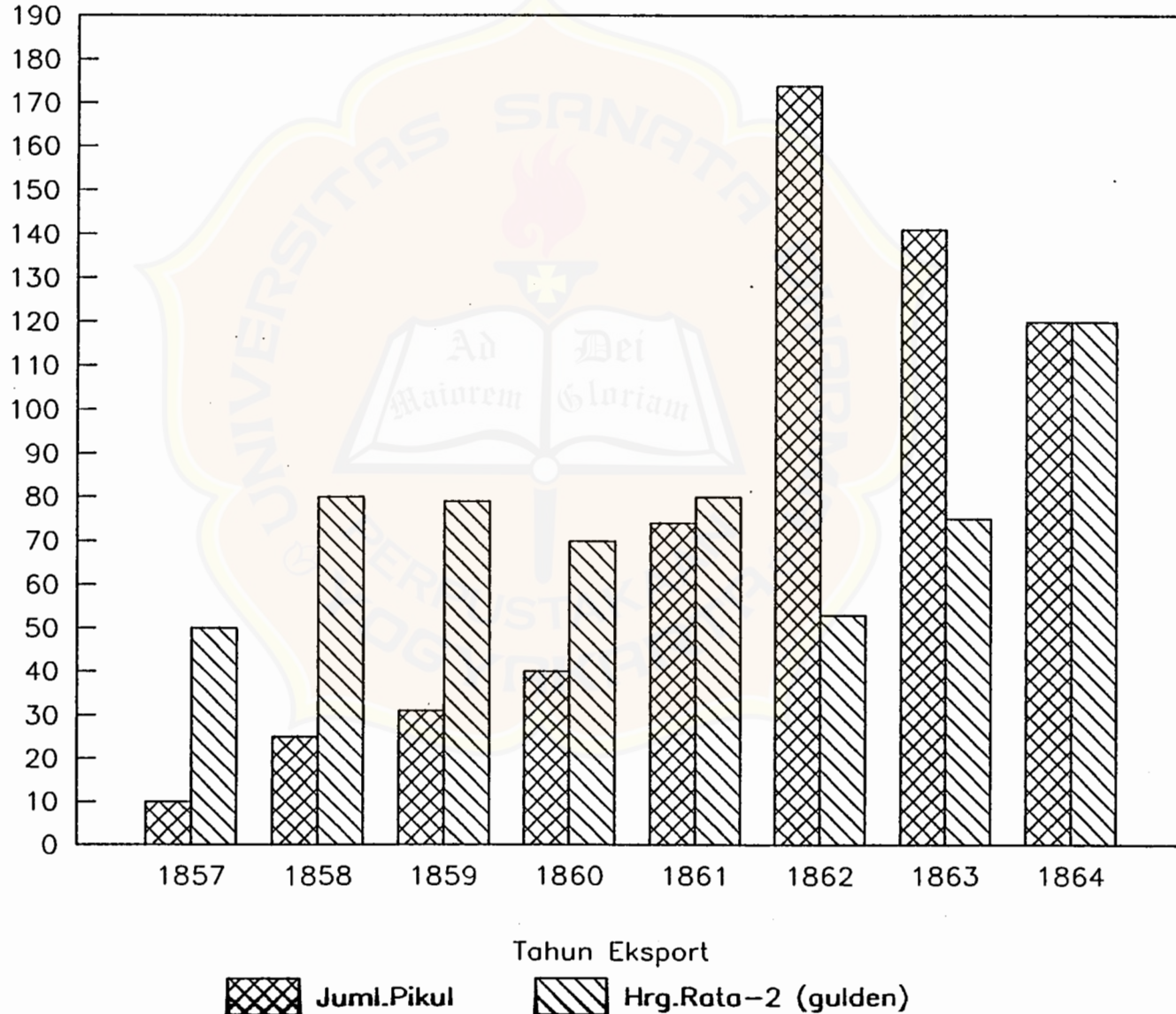
3. Cukai

Maju mundurnya perdagangan kota pelabuhan Ambon dapat

Grafik No. 9

Eksport Coklat Dari tahun 1857–1864

Jumlah Eksport (Pikul)



Sumber: P. van der Crab, De Moluksche Eilanden Reis van Z.E. den Gouverneur-Generaal Charles Ferdinand Pahud Door den Molukschen Archipel (Batavia: Lange & Co., 1862), hlm. 172, R.Z. Leirissa, dkk., Maluku Tengah di Masa Lampau Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982), hlm. 178.

dilihat dari besar kecilnya cukai ekspor dan impor. Pada tahun 1817 sampai tahun 1854, naik turunnya cukai ekspor impor di pelabuhan Ambon dapat dilihat pada grafik no. 10.

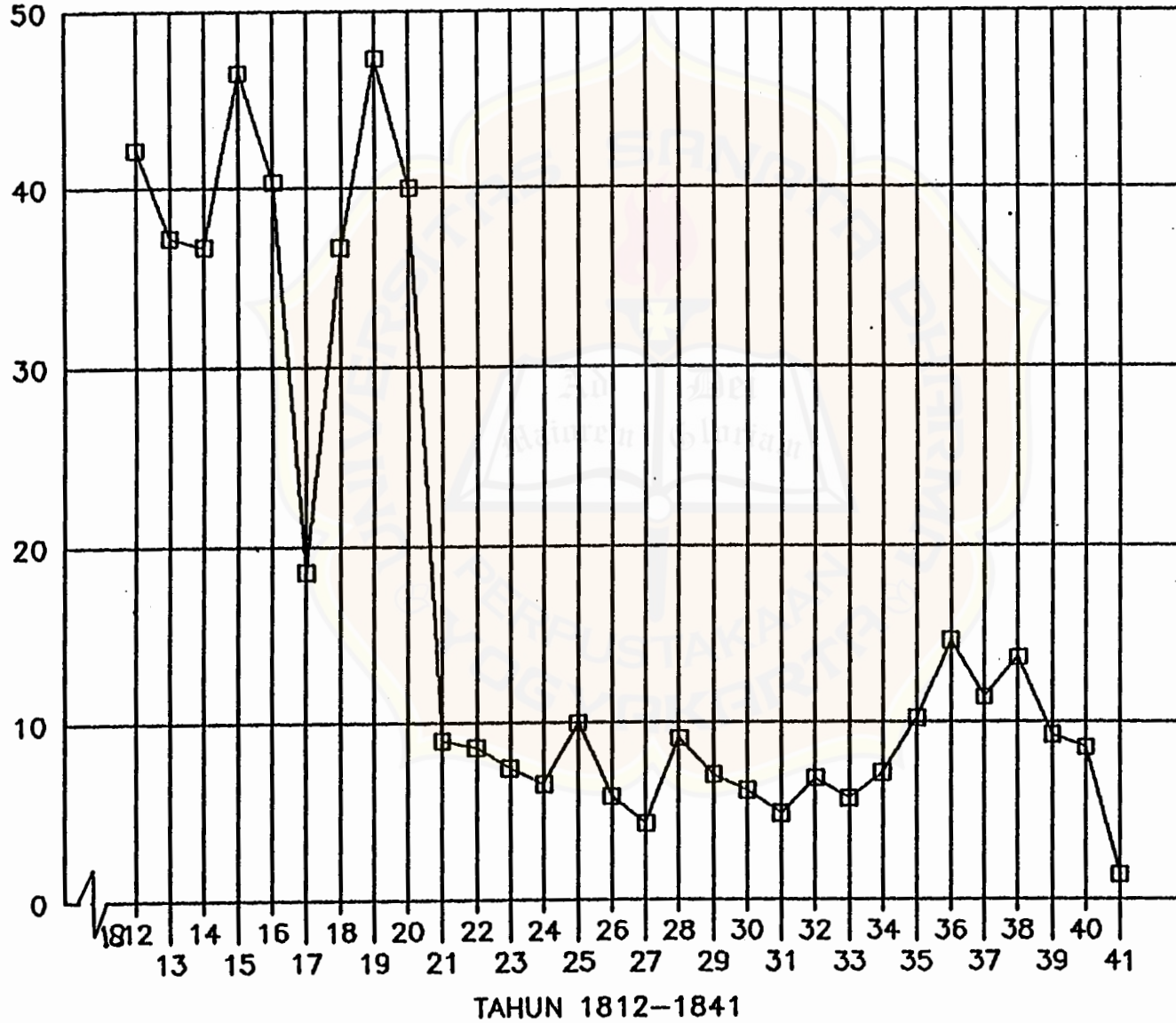
Berdasarkan grafik itu dapat dilihat bahwa pada tahun 1812 sampai tahun 1816 besarnya cukai ekspor dan impor yang diterima oleh Pemerintah Inggris relatif lebih besar bila dibandingkan pada masa-masa sesudahnya. Hal itu disebabkan Pemerintah Inggris melaksanakan perdagangan bebas dan membuka pelabuhan Ambon sebagai pelabuhan bebas, sehingga semua kapal dapat memasuki pelabuhan Ambon. Semakin banyak kapal yang berlabuh maka semakin banyak cukai yang didapatkan. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda besarnya cukai yang diterima lebih sedikit daripada masa sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh, pertama, Pemerintah Hindia Belanda menutup pelabuhan Ambon dan menetapkan bahwa semua kapal yang memasuki pelabuhan Ambon harus mempunyai *pas*. Kedua, Pemerintah melarang dan membatasi perdagangan asing terutama perdagangan senjata dan mesiu. Ketiga, Pemerintah memungut cukai pada kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan Ambon. Beberapa kebijakan itu mengakibatkan banyak kapal yang menghindari pelabuhan Ambon terutama kapal-kapal pribumi, berarti hanya ada sedikit cukai yang diterima oleh Pemerintah Hindia Belan-

Grafik No. 10

CUKAI EKSPOR-IMPOR

ANTARA TAHUN 1812-1854

JUMLAH CUKAI
(Thousands)



Sumber: P. Bleeker, Reis Door de Minahasa en den Molukschen Archipel Gedaan in de Maanden September en Oktober 1852 in het Gevolg van den Gouverneur Generaal Mr. A.J. Duyvaer van Ewist (Batavia: Lense & Co., 1856), hlm. 151.

da. Tujuan Pemerintah Hindia Belanda menetapkan kebijakan itu untuk melindungi monopoli perdagangan cengkiknya.

Dapat dikatakan bahwa semakin besar jumlah cukai yang diterima oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka perdagangan semakin maju. Sebaliknya semakin kecil jumlah cukai yang diterima berarti perdagangan semakin menurun. Berdasarkan jumlah angka yang terdapat dalam garfik no. 10 tampak bahwa cukai ekspor dan impor yang diterima oleh Pemerintah Hindia Belanda sesudah tahun 1829 relatif lebih kecil, bila dibandingkan pada masa sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa perdagangan di kota Ambon mengalami kemunduran.

4. Pelayaran

Selama pendudukan Pemerintah Hindia Belanda terjadi satu peristiwa penting bagi pelayaran di pelabuhan Ambon, yaitu dibukanya Ambon sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1854. Apakah dengan dibukanya pelabuhan Ambon sebagai pelabuhan bebas pelayaran dan perdagangan di kota pelabuhan Ambon dapat meningkat ?

Perkembangan pelayaran di Ambon ditentukan oleh faktor dari dalam dan dari luar Ambon. Faktor dari dalam meliputi, pertama, kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dalam pelayaran niaga seperti, menutup pelabuhan Ambon bagi kapal-kapal yang berbendera asing tetapi pada tahun

1854 pelabuhan Ambon dibuka sebagai pelabuhan bebas, monopoli pengangkutan barang-barang ekspor terutama cengkih, larangan dan pembatasan terhadap pedagang asing, pungutan cukai ekspor dan impor, pungutan pajak berlabuh. Kedua, kondisi perairan pelabuhan serta potensi ekonomi Pulau Ambon. Faktor dari luar meliputi, pembukaan Singapura sebagai pelabuhan bebas oleh Inggris pada tahun 1819, meningkatnya aktivitas pedagang Makasar dan Bugis sejak tahun 1827, pembukaan Makasar sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1847.

Pemerintah Hindia Belanda menetapkan bahwa pengangkutan cengkih dan barang-barang ekspor lainnya, dengan menggunakan kapal-kapal Pemerintah Hindia Belanda dan kapal swasta yang disewa oleh Pemerintah dari Inggris, Jerman, dan Perancis.⁴⁸ Penggunaan kapal-kapal swasta itu karena Pemerintah Hindia Belanda tidak mempunyai banyak kapal, sebagai akibat kurang adanya usaha meningkatkan jumlah kapal melalui pengembangan industri perkapalan, dan terbatasnya jumlah galangan kapal. Belanda mendapatkan kapal khususnya kapal api dengan cara membeli dari perusahaan

⁴⁸Edward Lambertus Poelinggomang, Proteksi dan Perdagangan Bebas: Kajian Tentang Perdagangan Makasar Pada Abad ke-19. Amsterdam, Vrije Universiteit, 1991, hlm. 102. Disertasi tidak diterbitkan.

asing seperti dari Inggris dan Jerman. Hal itu menunjukkan bahwa Belanda kurang memperhatikan usaha pengalihan teknologi dan pengetahuan pembuatan kapal api dan hanya bergantung pada jasa negara lain.⁴⁹

Untuk menjamin monopoli perdagangan cengkih dan pengangkutannya itu, Pemerintah Hindia Belanda menutup pelabuhan Ambon bagi kapal-kapal berbendera asing supaya tidak ada pencurian, perdagangan, dan pengangkutan cengkih secara gelap. Bahkan pada masa panen cengkih semua kapal kecuali kapal Belanda dilarang berlabuh dan mendekati daerah produksi cengkih. Pemerintah juga menetapkan bahwa setiap pedagang asing, *Burger*, dan pribumi yang memasuki pelabuhan Ambon diharuskan mempunyai *pas*, yang ternyata sangat sulit didapatkan.

Usaha Pemerintah Hindia Belanda yang lain yaitu melarang dan membatasi perdagangan asing terutama perdagangan mesiu dan senjata. Dengan alasan untuk mencegah perdagangan gelap. Kapal-kapal asing seperti kapal Amerika dan Inggris singgah di pelabuhan Ambon dengan alasan mengambil air dan makanan, ternyata melakukan perdagangan gelap dengan pedagang di Ambon. Barang-barang yang diperdagangkan itu meliputi, kain, besi, tembikar, candu, arak,

⁴⁹Ibid.

senapan, dan mesiu.⁵⁰ Bagi Pemerintah Hindia Belanda perdagangan gelap sangat merugikan perdagangannya dan mengurangi keuntungan.

Pemerintah Hindia Belanda menarik cukai pada setiap kapal dan perahu yang berlabuh di pelabuhan Ambon seperti, cukai berlabuh, cukai ekspor dan impor. Penarikan berbagai cukai itu bagi pedagang dirasakan cukup berat, sehingga para pedagang lebih senang menghindari pelabuhan Ambon. Hal itu mengakibatkan pelayaran niaga dan perdagangan di kota pelabuhan Ambon kurang dapat berkembang.

Ada hubungan yang erat antara potensi Pulau Ambon dengan pelayaran dan perdagangan di kota pelabuhan Ambon. Cengkih merupakan hasil utama Pulau Ambon tetapi harganya semakin turun di pasaran Eropa, sebab wilayah lain sudah menghasilkan cengkih. Selain cengkih dan pala, Ambon tidak banyak mempunyai barang komoditi ekspor untuk pasar Eropa. Memang ada beberapa barang ekspor seperti coklat dan kayu, tetapi hasilnya relatif sedikit. Di samping itu kualitas produknya relatif rendah, sehingga kurang mampu bersaing dengan produk dari daerah lain seperti dari Jawa. Keterbatasan itu menyebabkan para pedagang kurang tertarik untuk mendatangi pelabuhan Ambon, karena hanya ada sedikit

⁵⁰R.Broersma, op. cit., hlm. 132.

barang perdagangan yang dapat dimuat kembali ke kapalnya.

Kondisi perairan Maluku Tengah dan iklim mempengaruhi aktivitas pelayaran di Pulau Ambon. Perairan Maluku Tengah mempunyai banyak selat yang menyebabkan arus di laut sangat kuat. Hal itu membahayakan pelayaran terutama pelayaran yang menggunakan perahu kecil. Di samping itu perubahan musim dan kondisi alam kepulauan menyebabkan seringkali terjadi badai di lautan dan gelombang pasang. Oleh sebab itu diperlukan pengetahuan tentang iklim dan kelautan bagi setiap orang yang berlayar ke pulau Ambon. Dapat dikatakan bahwa pelayaran niaga ke Ambon penuh resiko dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kondisi alam seperti itu menjadi salah satu penghambat aktivitas pelayaran di Ambon.

Pada abad ke-19, perdagangan di daerah jajahan masih dikuasai oleh Inggris. Pada tahun 1819 Thomas Stamford Raffles membuka pelabuhan Singapura, yang segera menjadi pusat pelayaran niaga.⁵¹ Pelabuhan Singapura cepat berkembang karena Pemerintah Inggris membuka pelabuhan Singapura sebagai pelabuhan bebas, sehingga setiap kapal dapat memasukinya. Di samping itu tidak ada pungutan bagi kapal

⁵¹Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium. Jilid I (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), hlm. 360.

yang berlabuh, tidak ada pungutan cukai ekspor dan impor, serta diberlakukannya perdagangan bebas. Dengan kelonggaran-kelonggaran itu maka barang-barang yang dijual harganya relatif lebih murah. Akibatnya perdagangan dan pelayaran dari Indonesia Timur lebih berorientasi ke Singapura, sehingga pelayaran dan perdagangan di Ambon, Banda, dan Makasar kurang dapat berkembang.⁵²

Pembukaan pelabuhan Singapura menyebabkan perdagangan Belanda mundur. Akan tetapi pelayaran pribumi dari pulau ke pulau dapat berkembang. Setiap tahun pedagang dari Seram Timur yakni pedagang dari Geser dan Kilwaru, berlayar dengan menggunakan paduakan ke Bali.⁵³ Orang-orang Gorong berlayar dengan menggunakan 7 atau 8 perahu mengunjungi Bali untuk membeli belerang. Pedagang Gorong juga mengambil tripang dari Kepulauan Aru, kemudian menjualnya pada Nahkoda kapal di Kepulauan Kei yang datang dari Makasar.⁵⁴ Pelayaran itu merupakan pelayaran musiman dari bangsa Timur.

Pedagang Gorong dan Kei membawa barang-barang dagang-

⁵²R. Broersma, *op. cit.*, hlm. 138.

⁵³Paduakan yaitu perahu layar yang mampu memuat 400 sampai 500 pikul barang. *Ibid.*, hlm. 132.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 133.

an seperti, minyak, kelapa, sirih, daun pinang, kopra, dan sagu ke pelabuhan Dobo. Di samping itu pedagang Gorong menjual katun yang dibelinya dari toko pemerintah pada pedagang di Nieuwe Guinea dan Kepulauan sebelah barat daya. Pedagang Gorong menjual barang dagangannya secara eceran. Sementara itu di pelabuhan Dobo pedagang Makasar menjual mesiu, senapan, gong perunggu, dan gading gajah, dan membeli tripang. Perdagangan itu muncul sekitar tahun 1830-an yang oleh Belanda disebut "Perdagangan Kecil".⁵⁵ Di samping itu pelayaran niaga dari pedagang Cina dan Arab dengan perantaraan pedagang Bugis, Makasar, dan Madura tetap berjalan di Maluku Selatan.⁵⁶ Dari penjelasan itu tampak bahwa pelayaran dan perdagangan tidak berada di tangan orang Ambon. Hal itulah yang menyebabkan perdagangan di Ambon kurang dapat berkembang.

Pemerintah Hindia Belanda melakukan berbagai cara untuk mengembangkan pelayaran dan perdagangan di kota Ambon. Pertama, Pemerintah Hindia Belanda melalui Perjanjian Bongaya yang telah diperbaiki pada tahun 1824, tidak lagi melarang dan membatasi aktivitas pedagang Bugis dan Makasar. Hal itu dikarenakan Pemerintah Hindia Belanda ti-

⁵⁵Ibid., hlm. 133-134.

⁵⁶Ibid., hlm. 138.

dak lagi mempunyai kepentingan monopoli pelayaran dan perdagangan di Makasar seperti pada jaman VOC, yang menduduki Makasar untuk melindungi perdagangannya di Kepulauan Maluku. Pada waktu perdagangan di Ambon mulai menunjukkan kemunduran, fungsi pelabuhan Makasar untuk melindungi kepentingannya di Maluku tidak berlaku lagi.

Kedua, Pemerintah melalui Surat Keputusan Komisaris Jendral Tanggal 13 Agustus tahun 1827, No. 18, memberi ijin pada para pedagang Bugis dan Makasar untuk berdagang langsung ke Kepulauan Goram, Nieuwe Guinea, Kepulauan sebelah tenggara, dan barat daya termasuk Kepulauan Kei dan Aru.⁵⁷ Kebijakan itu ternyata kurang dapat meningkatkan pelayaran pribumi di Ambon, bahkan dari tahun 1827 sampai tahun 1831 pelayaran pribumi cenderung turun. Hal itu disebabkan monopoli perdagangan cengkih oleh Pemerintah Hindia Belanda, tidak adanya kebebasan dalam berdagang, dan adanya pungutan cukai di pelabuhan.

Ketiga, Pemerintah Hindia Belanda meminta bantuan *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) untuk melakukan usaha pelayaran dan perdagangan di Ambon. Pada tahun 1826 NHM mengirimkan kapal ke Maluku untuk melakukan penyelidikan

⁵⁷E.W.A. Ludeking, *op. cit.*, hlm. 116, dan *Algemeen Verslag van het Moluksche Over het Jaar 1833*. Bagian F.

an tetapi gagal, sebab para awak kapal merampas kapal dan membunuh kaptennya. Usaha terus dilakukan dan pada tahun 1836 usaha itu mulai menunjukkan hasilnya, yang tampak dari adanya pengiriman barang secara teratur terutama tekstil Belanda. NHM menyerahkan pemasaran tekstil itu pada agennya yang terdiri dari perusahaan-perusahaan dagang. Di Manado pemasaran tekstil dikelola oleh Dayghton & Co., Di Ternate oleh Van Duyvenbode, di Makasar oleh Weyergang, dan di Ambon ditangani oleh seorang pegawai pemerintah.⁵⁸

Keempat, Pemerintah membuka pelabuhan Riau sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1827 untuk mengimbangi pelabuhan Singapura. Akan tetapi pembukaan pelabuhan itu tidak berhasil sebab di pelabuhan itu masih ada pungutan cukai dan tidak adanya kebebasan dalam perdagangan, sehingga barang-barang yang dijual harganya lebih mahal bila dibandingkan dengan barang yang dijual di Singapura. Di samping itu letak Riau yang kurang strategis bila dibandingkan dengan pelabuhan Singapura, sehingga tidak menarik bagi

⁵⁸I Nyoman Wijaya, Kekaisaran Finansial Kompeni Kecil: Pengaruh Kegiatan Bisnis Nederlandsche Handel Maatschappij Bagi Perkembangan Sosial Ekonomi Indonesia 1824-1900. Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 1994, hlm. 194-195. Tesis tidak diterbitkan, dan R. Broersma, op. cit., hlm. 136.

kapal-kapal untuk mengunjunginya.

Kelima, Pemerintah Hindia Belanda membuka pelabuhan Makasar sebagai pelabuhan bebas pada awal tahun 1847 untuk memajukan pelayaran dan perdagangan di Makasar dan Ambon. Pembukaan itu dapat meningkatkan aktivitas pelayaran di Ambon, yang tampak dari meningkatnya jumlah kapal-kapal Eropa dan kapal pribumi yang berlabuh di pelabuhan Ambon. Akan tetapi peningkatan pelayaran itu kurang dapat meningkatkan perdagangan di Ambon, sebab Pemerintah masih memonopoli perdagangan cengkih dan tidak adanya kebebasan dalam berdagang. Sebagian besar kapal pribumi yang berlabuh di pelabuhan Ambon hanya singgah untuk membongkar dan menjual barang, mengambil persediaan bahan pangan dan air untuk pelayaran yang lebih jauh lagi yakni ke kepulauan sebelah tenggara dan barat daya, serta menunggu musim. Seringkali kapal-kapal meninggalkan pelabuhan Ambon dalam keadaan kosong sebab hampir tidak ada barang yang dapat dimuat ke kapal.

Langkah selanjutnya Pemerintah mengadakan kontrak dengan *Cores de Vries*, untuk menjalankan jasa pelayaran tertentu. Pada tahun 1850, dibuka jalur Surabaya - Makasar, sesudah itu hubungan Makasar-Menado lewat Ambon dan Ternate. Akan tetapi pelayaran itu kurang dapat meningkatkan perdagangan di Ambon, sebab masih terbatas dan

mahal.⁵⁹

Keenam, pada tahun 1854 Charles Ferdinand Pahud membuka pelabuhan Ambon, Ternate, Banda, Manado, dan Kajeli sebagai pelabuhan bebas, tetapi di pelabuhan itu Pemerintah masih memungut cukai.⁶⁰ Bersamaan dengan kebijakan itu Pemerintah Hindia Belanda mencabut larangan izin perdagangan mesiu dan senjata. Pembukaan pelabuhan Ambon menyebabkan pelayaran Eropa dan pribumi cenderung meningkat, tetapi perdagangan tetap saja kurang dapat berkembang, sebab Pemerintah Hindia Belanda masih memonopoli perdagangan cengkih, menguasai perdagangan ekspor, tidak adanya kebebasan dalam berdagang, dan masih adanya pungutan cukai di pelabuhan. Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa selama Pemerintah Hindia Belanda masih memonopoli perdagangan cengkih, tidak adanya kebebasan dalam perdagangan, dan pemungutan cukai di pelabuhan, maka pembukaan pelabuhan Ambon tidak ada artinya sebab kurang dapat mengembangkan perdagangan di kota Ambon.

Maju mundurnya pelayaran di Ambon dapat dilihat dari jumlah kapal yang berlabuh dan pergi. Dari tahun 1827 sampai tahun 1862 jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan

⁵⁹R. Broersma, op. cit., hlm. 138.

⁶⁰Ibid., hlm. 139.

Ambon dapat dilihat pada grafik no. 11 dalam lampiran. Dari grafik itu dapat dilihat bahwa pada tahun 1827 sampai tahun 1854 jumlah kapal-kapal Eropa, yang sebagian besar merupakan kapal Pemerintah Hindia Belanda dan kapal swasta yang disewa oleh Pemerintah, yang berlabuh di pelabuhan Ambon mengalami naik turun seiring dengan naik turunnya barang-barang yang diekspor. Sesudah tahun 1854 jumlah kapal yang berlabuh cenderung semakin meningkat sebab barang yang diekspor juga meningkat.

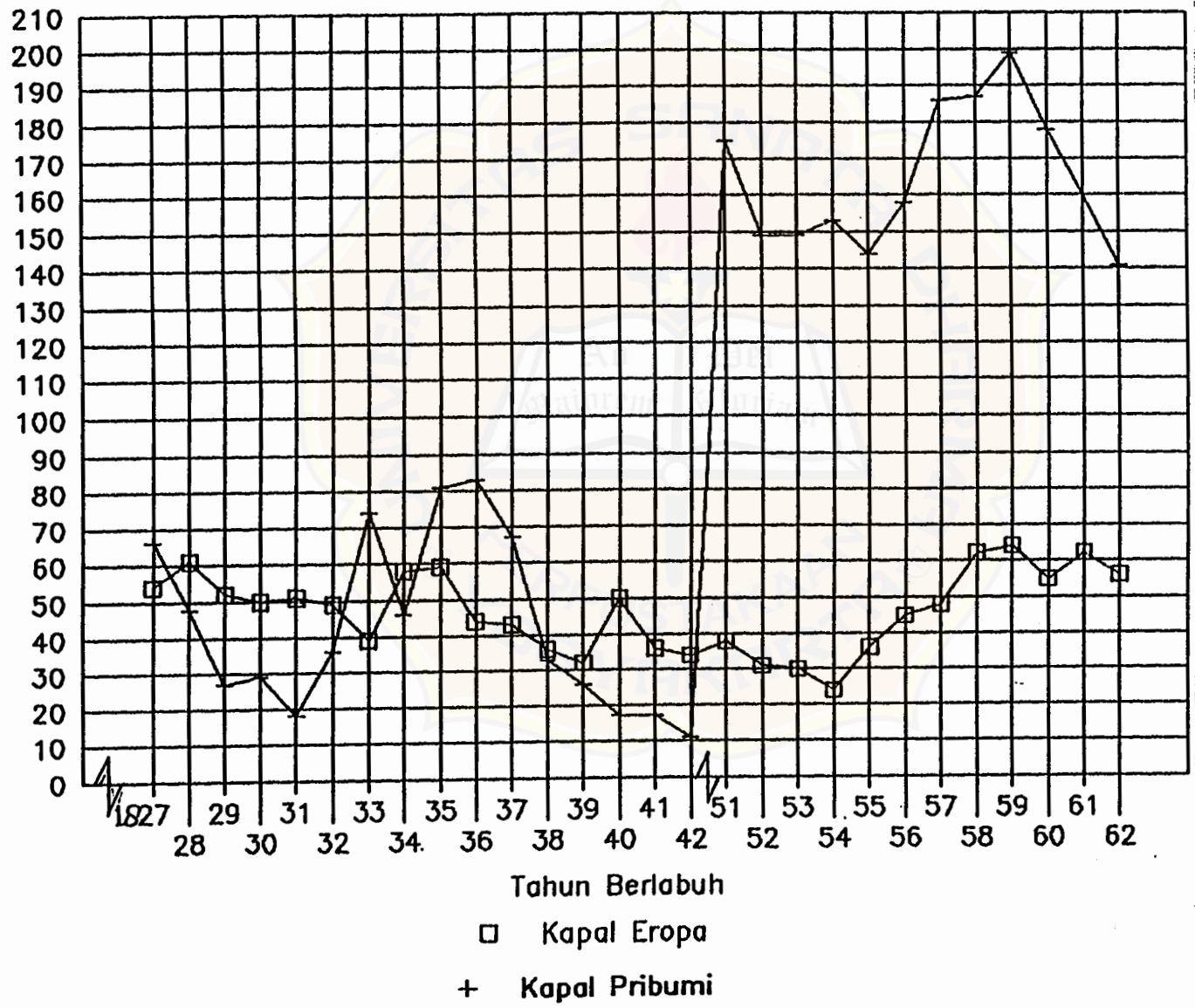
Pada tahun 1827 di pelabuhan Ambon berlabuh 70 sampai 80 paduakan Makasar dan Bugis yang sebagian besar mengangkut barang impor Ambon ke tempat lain.⁶¹ Akan tetapi sejak tahun 1827 sampai tahun 1831 jumlah kapal pribumi yang berlabuh turun, meskipun Pemerintah telah memberi ijin pada pedagang Bugis dan Makasar untuk berdagang di Maluku Tengah, Tenggara, dan Barat Daya. Penurunan jumlah kapal yang berlabuh juga terjadi pada tahun 1833 sampai tahun 1834, antara tahun 1836 sampai tahun 1842, dan 1859 sampai 1862. Penurunan itu disebabkan oleh kurang adanya kebebasan dalam perdagangan, barang perdagangan utama dari Ambon yakni cengkih masih dimonopoli oleh Pemerintah Hindia Belanda beserta pengangkutannya, dan kemungkinan serangan

⁶¹p. Bleeker, op. cit., hlm. 132

Grafik No. 11

Kapal dan Perahu yang Berlabuh

di Pelabuhan Ambon antara TH. 1827-1862



Jumlah Kapal dan Perahu

Sumber: P. Bleeker, Reis Door de Minahasa en den Molukschen Archipel Gedaan in de Maanden September en Oktober 1855 in het Gevolg van den Gouverneur Generaal Mr. A.J. Duymaer van Twist (Batavia: Lange & Co., 1856), hlm. 132 dan P. van der Crab, De Moluksche Eilanden Reis van Z.E. den Gouverneur Generaal Charles Ferdinand Pahud Door den Molukschen Archipel (Batavia: Lange & Co., 1862), hlm. 172 dan R.Z. Leirissa, dkk., Maluku Tengah di Masa Lampau Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982), hlm. 179.

badai serta perompakan di lautan.

Sesudah tahun 1831 sampai tahun 1833, tahun 1834 sampai tahun 1836, tahun 1842 sampai tahun 1851, tahun 1855 sampai tahun 1859, jumlah kapal yang berlabuh meningkat. Terutama pada tahun 1851 dan tahun 1859 jumlah kapal yang berlabuh meningkat dengan tajam. Hal itu merupakan akibat dari permintaan yang meningkat akan produk dari Maluku Tenggara dan Barat Daya, sehingga banyak kapal yang singgah di pelabuhan Ambon untuk mengambil persediaan bahan pangan dan air.

Sesudah tahun 1851 jumlah kapal pribumi yang berlabuh niaga di pelabuhan Ambon lebih besar daripada jumlah kapal Eropa, sebab kapal-kapal pribumi melayari jalur-jalur yang relatif dekat. Sementara itu kapal Eropa melayari jalur yang relatif jauh dan terbatas pada pengangkutan barang-barang ekspor. Munculnya kapal uap memang telah merubah keadaan pelayaran pada umumnya menjelang pertengahan abad ke-19. Kapal uap mempunyai keunggulan yakni dapat mempermudah dan memperlancar aktivitas pelayaran niaga antar daerah dan antar pulau, sebab dapat memperpendek waktu pelayaran, dapat mengatasi musim sebab tenaga angin telah diganti dengan tenaga mesin yang digerakkan oleh kekuatan uap. Namun demikian kapal layar tradisional masih tetap

dipertahankan untuk melayari sebagian dari pertukaran antar pulau.⁶² Dengan kata lain munculnya kapal uap tidak mendesak dan mematikan perahu-perahu pribumi.

Jumlah kapal Eropa dan kapal pribumi yang berangkat dari pelabuhan Ambon jumlahnya hampir sama dengan kapal yang berlabuh. Kadangkala jumlah kapal yang berangkat lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah kapal yang datang, hal itu disebabkan kapal mengalami kerusakan.

Dari penjelasan itu dapat diketahui bahwa pelabuhan Ambon kurang dapat mendukung aktivitas perdagangan kota, baik dari segi kondisi alam pelabuhan Ambon, maupun dari segi kebijakan Pemerintah yang menyangkut pelayaran dan perdagangan. Hal itu mengakibatkan perdagangan mengalami kemunduran, yang tampak pada lebih besarnya jumlah impor bila dibandingkan dengan ekspor, dan cukai yang diterima oleh Pemerintah relatif kecil. Sementara itu pelayaran pribumi cenderung meningkat, tetapi kurang dapat meningkatkan perdagangan kota, sebab pelayaran tidak berada di tangan penduduk Ambon, tetapi berada di tangan pedagang Bugis, Makasar, orang Gorong, dan Seram.

⁶²Marcel Bonneff, Henri Chambert-Loir, Denys Lombard, Christian Pelras (comite de Redaction), Archipel 18 (Paris: 1979), hlm. 9.

BAB IV

KOTA PELABUHAN AMBON TAHUN 1817-1865

1. Faktor-faktor Internal Yang Mempengaruhi Perkembangan Kota Pelabuhan Ambon

A. Faktor Politik

Menjelang akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, Negeri Belanda mengalami berbagai peristiwa yang sebagian berkaitan dengan pergolakan yang terjadi di Eropa. Pertama, pada tahun 1780-an peperangan dengan Inggris menyebabkan perdagangan VOC merosot. Kedua, pada tahun 1789 sampai tahun 1799 di Perancis terjadi revolusi yang mempengaruhi Belanda dengan ide Revolusi Perancis dan *liberalisme*.¹ Ketiga, VOC bangkrut akibat kecurangan dan korupsi di dalam tubuh VOC, bahkan meninggalkan hutang sebesar 1347 juta *gulden*. Keempat, Perang Napoleon pada tahun 1804 sampai tahun 1815 dan isolasi ekonomi yang disebabkan oleh

¹Pengaruh Revolusi Perancis terutama pada ide hak-hak asasi manusia dan hak-hak kewarganegaraan (*Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*) yang didasarkan pada ide *égalité*, *fraternité*, dan *liberté*. A. Malet & J. Issac, Revolusi Perancis 1789-1799 (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 43, dan Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negara Barat (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 112-114.

Stelsel Kontinental menyebabkan Negeri Belanda kehilangan sebagian besar perdagangan dan pelayarannya. Demikian pula perannya sebagai pasar penimbunan barang-barang mengalami kemunduran.² Kelima, industri Belanda terbelakang bila dibandingkan dengan Inggris, akibatnya di daerah jajahan Belanda tidak mampu bersaing dengan pedagang Inggris, yang menjual kain *Lanchaster* dengan harga yang relatif lebih murah. Keenam, pusat kedudukan dan daerah kekuasaan VOC jatuh ke tangan Inggris,³ padahal bagi Belanda fungsi daerah jajahan sebagai tempat penghasil tanaman untuk dijual di pasar Eropa.⁴

Beberapa peristiwa itu telah mempengaruhi Belanda dalam menetapkan kebijakan politik kolonial. Dalam proses penentuan kebijakan politik kolonial terjadi pertentangan antara golongan konservatif dengan golongan liberal. Pertentangan itu menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan politik kolonial. Akhirnya Belanda menetapkan kebi-

²Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. Jilid II (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 10.

³Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Imporium Sampai Imperium. Jilid I (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), hlm. 335.

⁴Sartono Kartodirdjo, 1992, op. cit., hlm. 11.

jakan politik kolonial konservatif yang dipandang dapat menguntungkan dan yang mungkin dapat dilaksanakan.⁵

Pengambilan kebijakan itu didasarkan pada alasan, pertama, kondisi perekonomian negeri Belanda menurun. Belanda berusaha meningkatkan perekonomiannya dengan cara menjadikan daerah jajahan sebagai *wingewest*, yakni daerah yang memberi keuntungan kepada negeri induk. Kedua, bahwa sistem liberal kurang cocok diterapkan pada masyarakat jajahan. Oleh sebab itu Belanda menyesuaikan kebijakan politik kolonial dengan kondisi masyarakat setempat. Dalam masyarakat tradisional dengan sifat komunal dan berdasar pada ekonomi natura, hubungan masyarakat baik vertikal maupun horizontal berdasarkan pada ikatan desa dan ikatan tradisional. Di dalam masyarakat tradisional para penguasa pribumi mempunyai peran dan kedudukan yang penting. Hubungan penguasa pribumi dengan penduduknya lebih bersifat hubungan antara tuan dengan kawulanya. Penduduk terbiasa membayar upeti kepada penguasanya dengan hasil bumi dan tenaga kerja. Oleh sebab itu tidak mudah mengerahkan tenaga kerja untuk kepentingan Pemerintah Kolonial tanpa

⁵Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoned Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia. Jilid V (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm. 2.

melalui penguasa pribumi.⁶ Dengan kondisi masyarakat seperti itu, maka pemerintah Hindia Belanda menempatkan penguasa pribumi sebagai penguasa di daerahnya, untuk mengurus masalah masalah daerahnya. Di samping itu dijadikan agen Pemerintah Hindia Belanda dengan tugas sebagai perantara hubungan antara Pemerintah dengan penduduk pribumi dan sebagai pengawas perkebunan cengkih. Sistem seperti itu mengakibatkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan seperti, permintaan para pegawai Belanda yang melampaui batas dan pemerasan dari pembesar-pembesar pribumi pada penduduk pribumi dalam bentuk kerja wajib, penanaman paksa, dan penyerahan wajib cengkih.

Pada tanggal 25 Maret 1817, kekuasaan atas Pulau Ambon diserahkan oleh Inggris pada Belanda yang diwakili oleh Komisaris Nicolaas Engelhard dan Jacobus Albertus V. Middelkoop.⁷ Pada awal pendudukan, Pemerintahan di Ambon diatur oleh Peraturan Tahun 1817 yang sebenarnya masih bersifat sementara. Menurut Peraturan itu yang didasarkan pada Instruksi Komisaris Jendral melalui Surat Keputusan

⁶Sartono Kartodirdjo, 1992, op. cit., hlm. 10.

⁷P.H. van der Kemp, "Het Herstel van het Nederlandsch Gezag in de Molukken in 1817 Naar Oorspronkelijke Stukken", Bijdrage tot de Taal-, Land-en Volkenkunde van Nederlands Indië ('S Gravenhage: 1911-1912), hlm. 450.

Tanggal 31 Januari Tahun 1817, No. 15 a, pasal 15, ditetapkan bahwa urusan pemerintahan, pertanian, dan perdagangan dijalankan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di bawah Inggris. Akan tetapi dengan persetujuan lebih lanjut penguasa dapat melakukan perubahan, dengan syarat tidak merubah sistem pemerintahan.⁸ Oleh karena peraturan itu dipandang kurang dapat mewujudkan tujuan pendudukan Belanda di Ambon, maka Pemerintah Hindia Belanda menggantinya dengan *Staatsblad van Nederlandsch Indië Over het Jaar 1824, No. 19 a*,⁹ Peraturan itu oleh sikap dualistis Gubernur Jendral Van der Capellen.¹⁰ Pada satu

⁸Ibid., hlm. 360. Ketentuan-ketentuan di bawah Inggris dari segi ekonomi meliputi, pemasukan dapat dari penyewaan arak, candu, dan tuak sagu, tanaman rempah diatur menurut prinsip "serupa" dahulu yakni penduduk pribumi diwajibkan menyerahkan seluruh hasilnya dengan harga 50 rijksdaalders per *bahar* seberat 550 pon. Dari segi politik yakni tidak ada perubahan dalam sistem pemerintahan pribumi. Ibid., hlm. 384.

⁹Staatsblad van Nederlandsch Indië Over het Jaar 1824, No.19 a, Reglement op het Binnenlandsche Bestuur en dat der Financien op Amboina en Onderhoorigheden

¹⁰Pada tahun 1824 wali negeri Hindia Belanda saat itu Baron van der Capellen melakukan kunjungan pribadi ke Maluku. Berdasarkan kunjungannya itu Baron van der Capellen menetapkan beberapa keputusan, yang pada dasarnya ingin melindungi hak-hak penduduk pribumi, tetapi juga menetapkan kewajiban dan hak para kepala dan penduduk pada Pemerintah Hindia Belanda. Penyerahan wajib cengkik dipertahankan dan Pemerintah Hindia Belanda menjanjikan harga cengkik yang lebih tinggi. P. van der Crab, De Moluksche Eilanden Reis van Z.E. den Gouverneur-Generaal Charles

pihak Pemerintah masih melanjutkan sistem lama yaitu, eksploitasi, monopoli perdagangan, kerja paksa, penyerahan wajib cengkih, menempatkan penguasa *negori* di bawah kekuasaan Belanda, dan menutup pelabuhan Ambon bagi kapal-kapal asing. Di pihak lain Van der Capellen berusaha melindungi hak-hak penduduk pribumi dan memperbaiki nasibnya melalui pasal-pasal sebagai berikut, pasal 14 mengenai larangan terhadap pemerasan, penipuan, pemaksaan, pelanggaran, dan tindakan kejam terhadap orang pribumi. Pasal 39, mengenai bagaimana memajukan pertanian, perdagangan, dan perikanan. Pasal 58, tentang larangan atas pungutan gelap, penyerahan gelap, dan sebagainya atas tenaga manusia. Pasal 72, tentang penghapusan perbudakan tanah. Pasal 151, tentang pembayaran semua penyerahan bagi pemerintah menurut tarip. Pasal 163, mengenai penghapusan pelayaran *hong* dan kewajiban yang berkaitan dengannya. Pasal 164, tentang penghapusan ekstirpasi. Pasal 165, tentang tanaman bebas dengan pengaturan cengkih, dan pasal 167 tentang kesanggupan pemberian kebebasan dan harga yang tinggi atas tanaman

cengkih.¹¹

Beberapa pasal itu ternyata tidak dapat dilaksanakan, sebab ide liberal Van der Capellen di negeri Belanda tidak mendapat dukungan. Ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan, pertama, bahwa Pulau Ambon dan *Lease* tidak dapat sepenuhnya dianggap terbuka bagi sistem tanaman bebas. Kedua, Tanaman dan penyerahan paksa cengkih di Ambon tetap dipertahankan untuk menjamin Pemerintah mendapatkan cengkih. Ketiga, demi kelangsungan monopoli perdagangan cengkih, maka perlu ditolak semua kapal asing kecuali kapal Belanda dan kapal swasta yang disewa oleh Pemerintah Hindia Belanda, dan kapal milik raja-raja pribumi yang bersahabat dengan Pemerintah.¹²

Komisaris Jendral Du Bus de Ghisignies yang bersikap dualistis sama dengan Van der Capellen, berdasarkan pertimbangan itu melalui Surat Keputusan Tanggal 13 Agustus Tahun 1827 (*Staatsblad* No. 80) menetapkan, pertama, bahwa Gubernur Maluku berkaitan dengan tanaman cengkih perlu

¹¹Staatsblad van Nederlandsch Indië Over het Jaar 1824, No. 19 a Tahun 1824 Reglement op het Binnenlandsche Bestuur en dat der Financien op Amboina en Onderhoorigheden. Hlm. 55-90.

¹²G.W.W.C. Baron van Hoëvell, "De Hervorming der Molukken". Tijdschrift Voor Nederlandsch Indië. Eerste Gedeelte. 2^e Jaargang. AFL. 1 (Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon, 1868), hlm. 126.

melepaskan prinsip lama, tetapi harus menyediakan sejumlah tanah di Maluku untuk mendapatkan sebanyak mungkin cengkih. Di samping itu penanaman wajib cengkih di Ambon dan pala di Banda, termasuk *negori-negori* di pantai selatan Seram yang berada di bawah kekuasaan Asisten Residen Hila dan Saparua yang telah ada sejak dulu harus dipertahankan.¹³

Melihat ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Tanggal 13 Agustus tahun 1827, sebenarnya sistem lama yakni sistem VOC masih dilaksanakan. Hal itu tampak pada pelaksanaan penanaman paksa dan penyerahan wajib cengkih di Ambon dan pala di Banda, monopoli perdagangan cengkih, larangan terhadap kapal-kapal asing, pengawasan terhadap penanaman dan pengangkutan cengkih oleh polisi, sebagai pengganti pelayaran honggi dan ekstirpasi yang dihapus pada tahun 1824. Dengan demikian apa yang dikatakan penghapusan pelayaran *honggi* dan ekstirpasi sebenarnya tidak ada sebab dalam prakteknya masih ada. Di samping itu perbudakan tanah yang sudah dihapus melalui *Staatsblad van Nederlandsch Indië Over het Jaar 1824, No. 19 a*, pasal 72, dipulihkan kembali dengan pencabutan pasal itu lewat Surat Keputusan Komisaris Jendral Tanggal 28 Mei 1828, No. 10.

¹³Ibid.

Perbudakan tanah dipulihkan karena keuntungan yang diperoleh Pemerintah Belanda semakin berkurang.¹⁴

Menurut *Staatsblad van Nederlandsch Indië Over het Jaar 1824, No. 19 a*, Gubernur merupakan penguasa tertinggi wilayah Maluku, sedangkan penguasa tertinggi Residensi Amboina yakni Residen yang dalam menjalankan pekerjaannya dibantu oleh seorang sekretaris, beberapa orang Asisten Residen, dan pejabat dengan gelar lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pemerintahan. *Negori-negori* berada di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, dikepalai oleh seorang Kepala *Negori* dengan pangkat *Regent* atau Bupati, dengan tugas sebagai penghubung antara Pemerintah dengan penduduk pribumi. Kepala *Negori* atau Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jendral atau atas namanya. Gelar yang dipakai oleh Bupati biasanya adalah *Raja*, *Patih*, atau *Orang Kaya*. Gelar itu diberikan oleh Gubernur Jendral atau atas namanya.¹⁵

Di dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indië Over het jaar 1824, No. 19 a*, digariskan hak dan kewajiban para

¹⁴P. Bleeker, Reis door de Minahasa en den Molukschen Archipel Gedaan in de Maanden September en Oktober 1855 in het Gevolg van den Gouverneur Generaal Mr. A.J. Duymaer van Twist (Batavia: Lange & Co., 1856), hlm. 88.

¹⁵Staatsblad van Nederlandsch Indië Over het Jaar 1824, No. 19 a, pasal 81, 82, dan 83.

Kepala *Negori* dan penduduk *negori* serta hubungannya dengan Pemerintah Hindia Belanda. Dalam kaitannya dengan bidang ekonomi, hak dan kewajiban penguasa *negori* dan penduduk pribumi, diarahkan pada kepentingan Belanda dalam mendapatkan keuntungan yang besar dari tanaman rempah-rempah terutama cengkih di Ambon.

Tugas dan kewajiban para Kepala *Negori* yaitu mengawasi *negori* tempat ia tinggal supaya tidak ada rumah, pekarangan, kebun, dati dusun, dan tatanaman, yang di *negori*-nya digadaikan, dijual, dan dengan cara lain berganti pemilik, kecuali sebagai akibat kontrak tertulis dan keputusan yang ditandatangani atau diberikan oleh Kepala *Negori*, dicatat dan disetujui oleh Asisten Residen, setelah dilakukan penelitian secara cermat. Pengawasan itu diperlukan untuk mempertahankan kebun cengkih dan kerja wajib, sehingga Pemerintah dapat terus mendapatkan cengkih.

Untuk merangsang aktivitas para Kepala *Negori* dalam meningkatkan produksi cengkih, Pemerintah Hindia Belanda memberi berbagai hak istimewa seperti, uang *hatsil* dan uang *piti*,¹⁶ hak atas sebagian kerja wajib kawulanya yang

¹⁶Uang *Hatsil* merupakan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada para kepala bawahan. Besarnya sekitar 15 *gulden* untuk setiap *bahar* cengkih seberat 550 pon . Kepala

disebut *kwardiensten*,¹⁷ dan hadiah berupa kain seharga 25 *gulden* setiap tahunnya. Penghasilan para Kepala *Negori* dapat dilihat pada tabel 6. Dari tabel itu dapat dilihat bahwa penghasilan para Kepala *Negori* tidak sama. Ada beberapa Kepala *Negori* yang berpenghasilan relatif besar yakni diatas 100 *gulden*, tetapi ada juga yang berpenghasilan relatif kecil bahkan kurang dari 10 *gulden*. Ketidaksamaan penghasilan itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti, luas wilayah, tingkat kesuburan, dan tersedianya tenaga kerja.

Penduduk pribumi diwajibkan melakukan *hereendiensten*

Negori menerima tiga perlimanya, Kepala *Soa* menerima tiga persepuluh, dan *Marinyo* menerima sepersepuluh. Uang *Piti* merupakan pajak yang dipungut oleh Kepala *Negori* dari penduduk besarnya 4% dari cengkih yang diterimanya. G.W.W.C. Baron van Hoëvell, Ambon en Meer Bepaaldelijk de Oeliasers, Geographisch, Ethnographisch, Politisch en Historisch (Dordrecht: Blusse en van Braam, 1875), hlm. 25.

¹⁷Setiap Kepala *Negori* dapat menggunakan sejumlah tenaga dari penduduk *negorinya* untuk bekerja padanya selama masa satu bulan, sesudah itu penduduk lain yang masih dalam satu *negori* menggantikan mereka. Kerja itu tanpa upah dan dikenal dengan *kwardiensten*, sedangkan pekerjanya disebut *kwarto*. P. Bleeker, op. cit., hlm. 89.

dan *negoridiensten*.¹⁸ Penduduk pribumi yang mempunyai status *Burger* atau Warga dibebaskan dari berbagai jenis *hereendiensten* dan *negoridiensten* yang melekat pada penduduk pribumi. Sebagai gantinya seorang *Burger* diwajibkan membayar sejumlah uang pada pengurus *Burgerij*. Penduduk *Burger* tidak tunduk kepada *Raja*, *Pati*, atau *Orang Kaya*, tetapi hanya tunduk pada perintah Residen.

Kerja wajib yang dibebankan pada penduduk pribumi tidak semuanya tanpa upah, tetapi ada sebagian pekerjaan yang dihargai dengan pemberian upah. Pemerintah Hindia Belanda yang mengatur besar kecilnya upah kerja yang diberikan pada penduduk *negori*. Untuk kerja wajib bagi pemerintah, setiap orang yang bekerja di ibukota menerima

¹⁸*Heerendiensten* dan *negoridiensten* merupakan kerja wajib yang harus dilakukan oleh penduduk pribumi selama enam bulan, dengan pembagian waktu empat bulan kerja diberi upah dan dua bulan kerja tanpa upah. Pekerjaan wajib bagi negara merupakan kerja dengan upah seperti, pembongkaran dan pengangkutan barang pemerintah, pembongkaran beras Pemerintah di gudang, pengangkutan pejabat dan perwira yang dinas keliling dengan menggunakan tandu dan memikul barangnya, penyeretan kapal, penyerahan kayu dan material untuk kepentingan berbagai proyek pemerintah, baik di dalam Pulau Ambon atau daerah lainnya. Kerja tanpa upah yakni kerja untuk *negori* yang meliputi, kerja untuk Kepala *Negori*, membangun dan merawat sekolah, gereja, mesjid, perahu yang termasuk milik *negori*, jembatan, dan merawat 90 pohon cengkik baik di dalam dan di luar kebun, serta menyediakan alat pengangkutan menuju gudang cengkik. Selama kerja enam bulan itu penduduk pribumi bebas menentukan waktunya. *Ibid.*, hlm. 93-94.

upah sebesar 6 *gulden* ditambah 40 pon beras dan $1\frac{1}{4}$ pon garam, untuk setiap bulan. Penduduk pribumi yang bekerja di *negori* tempat penduduk yang bersangkutan bertempat tinggal mendapat upah sebesar 5 *gulden* ditambah 40 pon beras dan $1\frac{1}{4}$ pon garam. Untuk pekerjaan lain yang dilakukan pada siang hari, setiap orang mendapat upah sebesar 60 *duit* dan $1\frac{1}{4}$ pon beras sehari. Apabila pekerjaan yang dilakukan lamanya kurang dari setengah hari maka penduduk mendapat upah sebesar 5 *duit* untuk setiap jam.¹⁹

Untuk pekerjaan wajib bagi kepentingan pegawai pemerintah, setiap orang mendapat upah sebesar 6 *gulden* ditambah 40 pon beras untuk setiap sebulan. Sementara itu untuk pekerjaan yang lain penduduk mendapat upah sebesar 70 *duit* setiap minggu tanpa beras. Upah kerja yang diterima penduduk atas pekerjaan yang dilakukan pada pelancong ada sendiri ketentuannya yakni, setiap orang yang mendayung *orembai* mendapat upah 70 *duit* sehari atau 10 *duit* setiap jam. Untuk pekerjaan memikul barang setiap orang mendapat upah 10 *duit* untuk setiap jamnya. Pengangkutan orang dan barang dengan menggunakan *orembai* yang didayung oleh 15

¹⁹Staatsblad van Nederlandsch Indië Over het Jaar 1824, No. 19 a, pasal 158, 159, dan 161, hlm. 88-90.

orang, pendayung mendapat upah 2 *gulden* dan apabila pekerjaan itu lamanya lebih dari satu jam, setiap pendayung mendapat upah sebesar 10 *duit* untuk setiap jamnya.²⁰

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa kerja wajib yang dibebankan pada penduduk pribumi sangat berat, sebab mereka tidak saja melakukan kerja wajib untuk penguasa pribumi, tetapi juga untuk kepentingan Pemerintah Hindia Belanda. Akibatnya penduduk pribumi kurang mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kualitas kehidupannya. Hal itu tampak pada kondisi kesehatan masyarakat Ambon yang pada umumnya kurang baik.

B. Faktor Demografi

Dalam masyarakat agraris, tanah dan tenaga kerja merupakan modal pokok bagi produksi pertanian.²¹ Pulau Ambon mempunyai tanah yang sempit tetapi produktif untuk tanaman cengkih. Untuk mengelola perkebunan cengkih dibutuhkan banyak tenaga kerja terutama pada masa panen cengkih. Kekurangan tenaga kerja dapat menyebabkan panen cengkih terlambat dan keterlambatan itu mengakibatkan

²⁰Ibid.

²¹James C. Scott, Moral Ekonomi Petani Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 20-21.

harga cengkih turun karena kualitas cengkih yang dipanen turun. Dapat dikatakan ada hubungan yang erat antara pertumbuhan penduduk dengan kualitas dan produksi cengkih. Sementara itu naik turunnya produksi cengkih dapat mempengaruhi perkembangan kota Ambon, sebab perdagangan cengkih merupakan salah satu faktor yang menentukan perkembangan kota Ambon.

Pertumbuhan penduduk Ambon dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, kelahiran, kematian, kesehatan masyarakat, dan faktor bencana alam. Perlu diketahui bahwa data mengenai jumlah penduduk Ambon kurang lengkap, sebab ada beberapa kesulitan dalam pendataan penduduk seperti, transportasi yang terbatas, keadaan wilayah yang sulit dilalui, dan kekurangan tenaga.

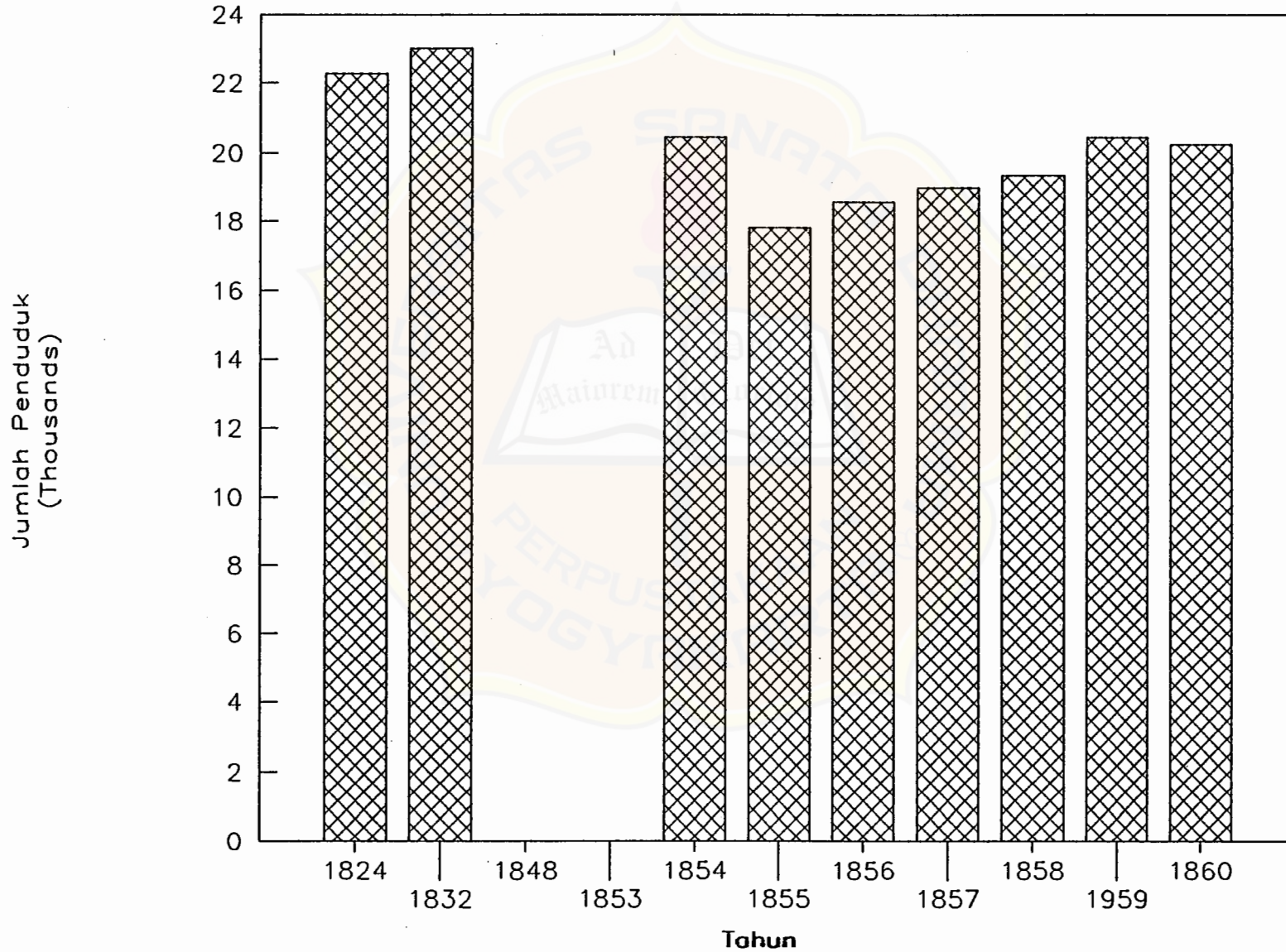
Jumlah penduduk *Afdeling* Amboina tahun 1824 sampai tahun 1862,²² dapat dilihat pada grafik no. 12. Dari grafik itu tampak bahwa tahun 1854 dan tahun 1855 jumlah penduduk *afdeling* Amboina turun karena wabah penyakit cacar. Di Pulau Saparua wabah penyakit cacar mengakibatkan

²²*Afdeling* Amboina wilayahnya meliputi seluruh Leitimor dari pantai Selatan Hitu di Tanjung Alang sampai celah Banguala, dan selanjutnya ujung Tenggara Hitu di celah Banguala sampai *negori* Waai. Bagian itu kecuali ibukota Ambon mempunyai 35 *negori*. P. Bleeker, *op. cit.*, hlm. 6.

Grafik No. 12

Penduduk Afdeling Amboina

Tahun 1824-1862



Sumber: E.W.A. Iudeking, Schets vnn de Residentie Amboinn (s'-Grovenhage: Martinus Nijhoff, 1868), hlm. 127-128, Algemeen Verslag vnn het Moluksche Over het Jaar 1833, bagian A.

1000 orang meninggal.²³ Sesudah tahun 1855 jumlah penduduk cenderung meningkat sebagai akibat vaksinasi cacar dan vaksinasi cacar ulang pada penduduk yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1855.

Jumlah penduduk kota Ambon sedikit diketahui karena sedikitnya data, sehingga sulit untuk menjelaskan perkembangan penduduknya. Berdasarkan grafik no. 13 tampak bahwa jumlah penduduk Kastil Ambon dan sekitarnya cenderung turun. Terutama pada tahun 1833 terjadi penurunan jumlah penduduk secara tajam sebagai akibat dari berjangkitnya berbagai wabah penyakit seperti, malaria, cacar, kolera, panas, demam, dan pes.²⁴ Jumlah penduduk kastil Ambon dan sekitarnya tahun 1819, 1833 sampai tahun 1840 dapat dilihat pada grafik no. 13.

Pada akhir tahun 1854 jumlah golongan Warga di ibukota Ambon dan Hila mencapai 7.800 orang. Di samping itu pada masa tertentu di kota Ambon terdapat 280 orang Cina, 400 orang Arab dan Timur Asing lainnya, 610 budak, serta beberapa ratus tahanan negara dan buangan.²⁵ Pada tahun

²³Koloniaal Verslag Over het Jaar 1855. Hlm. 5.

²⁴Algemeen Verslag van het Moluksche Over het Jaar 1833. Bagian A.

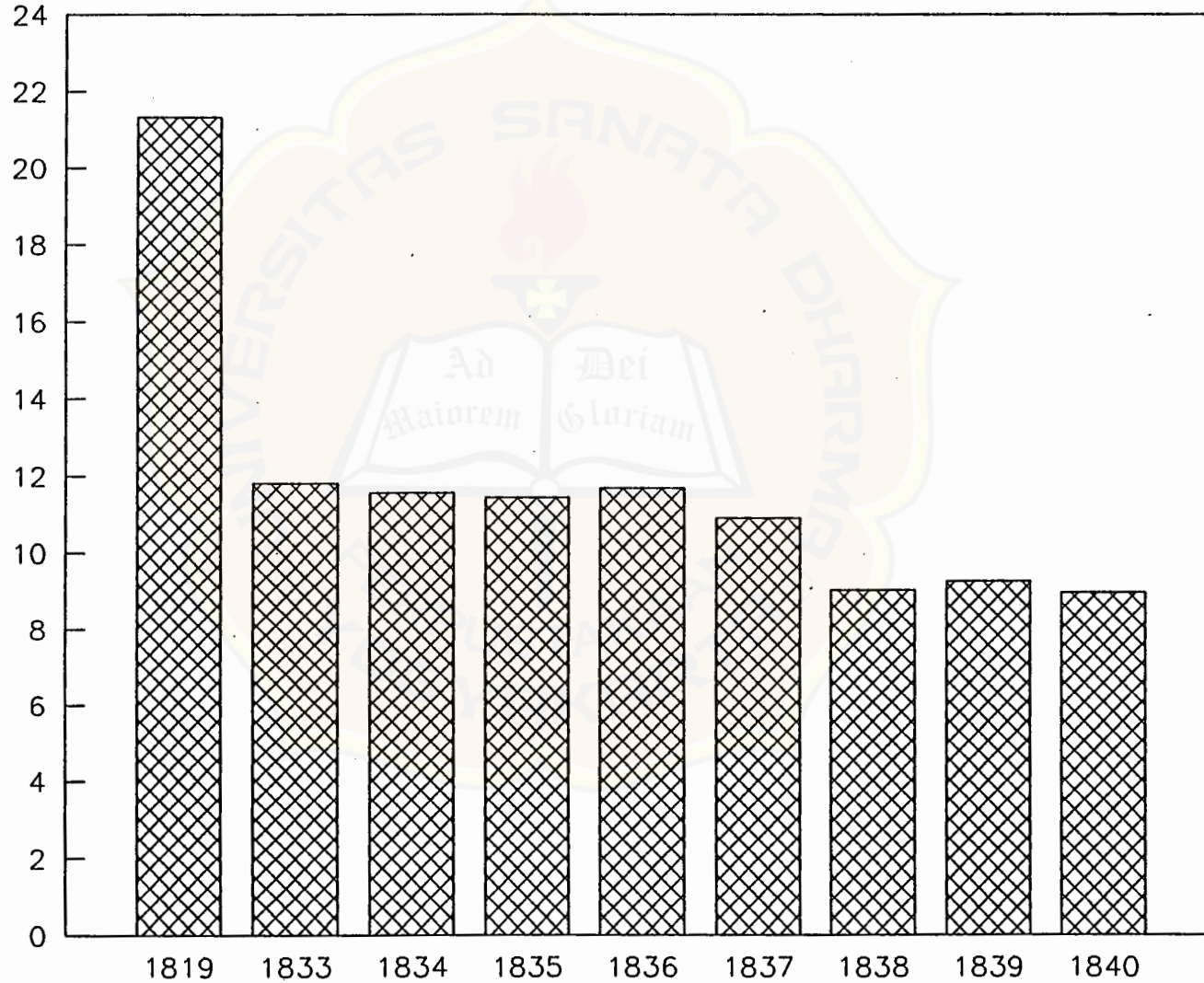
²⁵P. Bleeker, op. cit., hlm. 74-75.

Grafik No. 13

Penduduk Kastil Ambon dan Sekitarnya

Tahun 1819, 1833-1840

Jumlah Penduduk
(Thousands)



Sumber: P. Bleeker, Reis Door de Minahasan en den Molukschen Archipel Gedaan in de Maanden September en Oktober 1855 in het Gevolg van den Gouverneur Generaal Mr. A.J. Duymner van Twist. Tweede Deel (Batavia: Lange & Co., 1856), hlm. 80, D.W.R. van Hoevell, "Tegenwoordige Gestelheid der Moluksche Eilanden", Tijdschrift voor Nederlandsche Indie. 18^{de} Jaargang. AFL. 1-6. Eerste Deel (Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon, 1856), hlm. 241.

1854 Jumlah golongan *Mestizo* sekitar 628 jiwa yang terdiri atas 189 pria, 231 wanita, dan 208 anak-anak. Dari 189 pria, yang tidak bekerja pada dinas pemerintahan sekitar 167 orang, yang bekerja pada dinas pemerintahan 20 orang dan hanya 1 orang yang berdagang. Golongan *Mestizo* relatif banyak yang tidak bekerja pada dinas pemerintahan karena kesempatan kerja bagi orang *Mestizo* sangat terbatas. Pekerjaan di bidang pemerintahan didominasi oleh orang Belanda. Sementara itu jenis pekerjaan yang ditekuni oleh penduduk pribumi seperti, berkebun, mencari ikan, dan pelayan kurang diminati, sebab tidak sesuai dengan status sosialnya. Orang *Mestizo* beranggapan bahwa status sosialnya berada di bawah golongan kulit putih, tetapi lebih tinggi dari penduduk pribumi dan golongan Warga. Dua puluh tahun sebelumnya yakni tahun 1834, masih terdapat 958 orang *Mestizo* yang meliputi 491 orang dewasa dan 467 anak-anak. Jadi dalam waktu 20 tahun jumlah orang *Mestizo* berkurang hingga sepertiganya karena berbagai wabah penyakit seperti penyakit empedu, malaria, dan kolera.²⁶

Seperti halnya golongan *Mestizo*, jumlah budak juga cenderung turun sebagai akibat berbagai wabah penyakit seperti penyakit empedu, malaria, dan kolera, serta penga-

²⁶Ibid., hlm. 115.

ruh dari perkembangan liberalisme. Jumlah budak dari tahun 1834 sampai tahun 1855 dapat dilihat pada grafik no. 14.

Pada umumnya penurunan jumlah penduduk Karesidenan Amboina disebabkan oleh faktor rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hampir sepanjang abad ke-19 di Karesidenan Amboina berjangkit berbagai wabah penyakit. Pada tahun 1837 berjangkit wabah penyakit empedu yang mencapai puncaknya pada tahun 1837 sampai tahun 1838. Pada awalnya wabah empedu melanda ibukota Ambon kemudian menyebar ke pulau-pulau lain seperti, Haruku, Saparua, dan Nusa Laut, tetapi masih dalam ukuran kecil. Kemudian wabah penyakit empedu menyebar ke Pulau Seram, tetapi hanya mengenai sejumlah kecil penduduk. Bersamaan dengan wabah penyakit empedu berjangkit wabah penyakit kolera yang terus berlangsung sampai tahun 1840, dan disertai oleh penyakit panas.²⁷

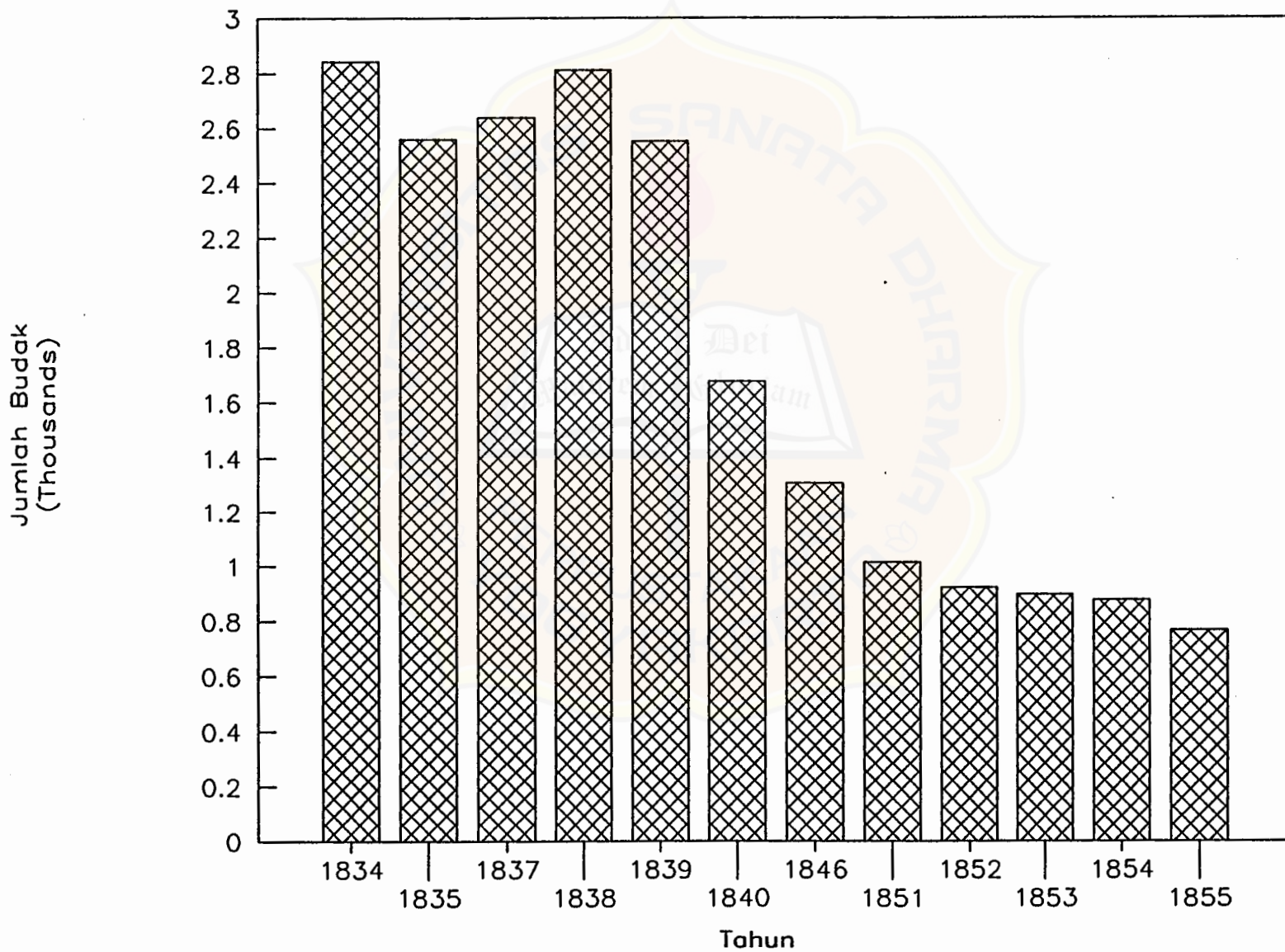
Pada tahun 1842 sampai tahun 1843, kondisi kesehatan masyarakat pada umumnya relatif lebih baik, tetapi penyakit empedu sering muncul di antara penduduk. Pada tahun 1847 di Ambon berjangkit lagi wabah penyakit empedu, dan

²⁷E.W.A. Ludeking, Schets van de Residentie Amboina ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1868), hlm. 141.

Grafik No. 14

Jumlah Budak Dari Tahun 1834–1855

147



Sumber: P. Bleeker, Reis Door de Minahasa en den Molukschen Archipel Gedann in de Maanden September en Oktober 1855 in het Gevolg van den Gouverneur General Mr. A.J. Duymner van Twist. Tweede Deel (Batavia: Lange & Co., 1856), hlm. 139.

tiga tahun kemudian berjangkit wabah influenza yang kemudian disusul oleh wabah malaria. Dari jumlah penduduk sebanyak 21.197 jiwa yang menjadi korban sekitar 5.279 orang. Pada tahun 1852 secara umum kondisi kesehatan masyarakat membaik, tetapi pada tahun 1853 berjangkit wabah malaria. Pada tahun 1854 wabah malaria melanda *negori-negori* Siri Sori, Ulat dan Ouw, dan terus menyebar ke Nusa Laut, Haruku, dan Seram bagian pantai selatan.²⁸

Pada tahun 1855 di Pulau Ambon berjangkit wabah penyakit cacar. Dari bulan Mei sampai Nopember ada 6336 orang yang meninggal dan 1466 orang dirawat.²⁹ Sebagian besar korban wabah penyakit itu adalah orang pribumi, sebab mutu makanan yang dikonsumsi dan tingkat kebersihan yang rendah, sehingga daya tahan tubuh terhadap penyakit juga rendah. Wabah penyakit cacar mulai berjangkit di kota Ambon kemudian menyebar ke *Lease*, Pulau Buru, dan Pulau Seram.³⁰ Di Larike terdapat 635 penderita dan yang meninggal 408 orang. Dua tahun kemudian yakni tahun 1857 di Pulau Ambon berjangkit wabah campak. Pada tahun 1860 kon-

²⁸Ibid., hlm. 143.

²⁹P. Bleeker, op. cit., hlm. 104.

³⁰Ibid.

disi kesehatan penduduk Karesidenan Amboina pada umumnya membaik. Pada tahun 1861 di Ambon dan Lease berjangkit wabah kolera, dari 2.083 penderita yang meninggal sekitar 37 orang. Pada tahun 1863-1864 kondisi kesehatan penduduk Karesidenan Amboina pada umumnya membaik kembali. Ternyata berbagai wabah penyakit yang melanda Ambon terutama dari tahun 1835 sampai tahun 1855 telah mengurangi jumlah penduduknya.³¹

Di kota Ambon sebagian dari penduduknya terjangkit penyakit sipilis. Hal itu disebabkan di kota Ambon terdapat tempat-tempat hiburan yang sering dikunjungi oleh awak kapal dagang dan kapal perang yang mencari hiburan.³² Berjangkitnya wabah penyakit malaria di kota Ambon menurut Dr. G.F. Pop, disebabkan oleh kondisi saluran air yang tidak terawat dan banyaknya rawa. Sebelum tahun 1837 yakni sebelum berjangkitnya penyakit malaria, kota Ambon tidak mempunyai saluran air, sehingga sumber penyakit jauh

³¹Ibid., hlm. 144-146, dan H.C. van Eijbergen, "Bijdrage tot de Kennis der Kakao-Kultuur in de Residentie Amboina", Tijdschrift voor Nijverheid en landbouw in Nederlandsch Indië. Nieuwe Serie. Deel VI (Batavia: W. Ogilvie, 1865), hlm. 121.

³²O. Mohnike, "Amboina", Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Nieuwe Serie. Deel I (Batavia: Lange & Co., 1859), hlm. 645-647.

lebih besar.³³

Pada tahun 1861 sampai tahun 1864, secara umum kondisi kesehatan masyarakat kota Ambon kurang baik, karena kota Ambon kotor yang disebabkan oleh banyaknya timbunan sampah dan kotoran, saluran air tidak terawat, rapatnya penanaman sagu menyebabkan udara menjadi tidak segar, padatnya bangunan di kota, dan padatnya tumbuhan di kampung yang dihuni oleh golongan Warga dan penduduk *negori*.³⁴ Demikian pula daerah pantai keadaannya sangat kotor karena banyak timbunan tanaman dan kotoran hewan.³⁵

Diantara berbagai wabah penyakit itu, wabah cacar yang paling banyak menimbulkan korban jiwa. Pemerintah Hindia Belanda berusaha mengatasi wabah penyakit cacar dengan mengadakan vaksinasi cacar dan vaksinasi cacar ulang pada penduduk. Sebagian besar vaksinasi cacar diberikan pada penduduk kota Ambon dan Pulau Ambon, karena wilayah itu yang paling padat penduduknya. Di pantai Buru dan Seram pelaksanaan vaksinasi cacar mengalami hambatan

³³E.W.A. Ludeking, *op. cit.*, hlm. 147-148.

³⁴P. Bleeker, *op. cit.*, hlm. 102.

³⁵*Ibid.*, hlm. 148.

sebab, vaksinasi cacar dianggap bertentangan dengan adat,³⁶ dan para kepala pribumi menolak adanya hubungan Pemerintah dengan rakyat.³⁷ Akibatnya di pantai Buru dan Seram hanya sebagian kecil penduduk yang mau diberi vaksin cacar. Vaksinasi cacar dilaksanakan oleh para Perwira Kesehatan dan dibantu oleh orang pribumi yang diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai petugas vaksin. Di dalam menjalankan tugas, petugas vaksin berada di bawah pengawasan Perwira Kesehatan.³⁸ Jumlah penduduk yang divaksinasi cacar dan divaksinasi cacar ulang di Karesidenan Amboina pada tahun 1842 sampai tahun 1863 dapat dilihat pada tabel 8 di lampiran 2. Berdasarkan tabel itu tampak bahwa pada tahun 1855 Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan vaksinasi cacar dan vaksinasi cacar ulang secara besar-besaran, untuk menanggulangi wabah penyakit cacar yang melanda Karesidenan Amboina.

Dari penjelasan itu tampak bahwa tingkat kesehatan penduduk yang rendah merupakan penyebab turunnya jumlah penduduk. Di karesidenan Amboina tingkat kematian penduduk

³⁶Algemeen Verslag van het Moluksche Over het Jaar 1833. Bagian A.

³⁷E.W.A. Ludeking, op. cit., hlm. 155.

³⁸Ibid.

lebih tinggi daripada tingkat kelahiran, terutama pada tahun-tahun 1834, 1838, 1840, 1843, dan 1855. Sehubungan dengan pertumbuhan penduduk, mengenai jumlah orang yang menikah, lahir, dan meninggal di Karesidenan Amboina pada tahun 1829 sampai tahun 1862 dapat dilihat pada grafik no. 15.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah penduduk yaitu bencana alam yang berupa gempa bumi. Sepanjang sejarah wilayah Maluku khususnya Ambon, dilihat dari segi vulkanologi wilayah itu rawan gempa. Pulau-pulau di Kepulauan Maluku muncul karena kekuatan-kekuatan vulkanologis pada masa pra sejarah, dan sampai abad ke-19 gejala-gejala vulkanologis itu masih tampak dalam bentuk gempa bumi. Sekalipun sebelum tahun 1674 sudah tercatat sejumlah gempa bumi yang berakibat buruk bagi kepulauan itu, tidak kurang dari 2.322 orang meninggal. Pada abad ke-19 terjadi beberapa kali gempa bumi, yang terbesar terjadi pada tahun 1830, 1837, 1842, 1845, 1850, 1852, 1861.³⁹ Berapa jumlah orang yang meninggal tidak diketahui secara pasti.

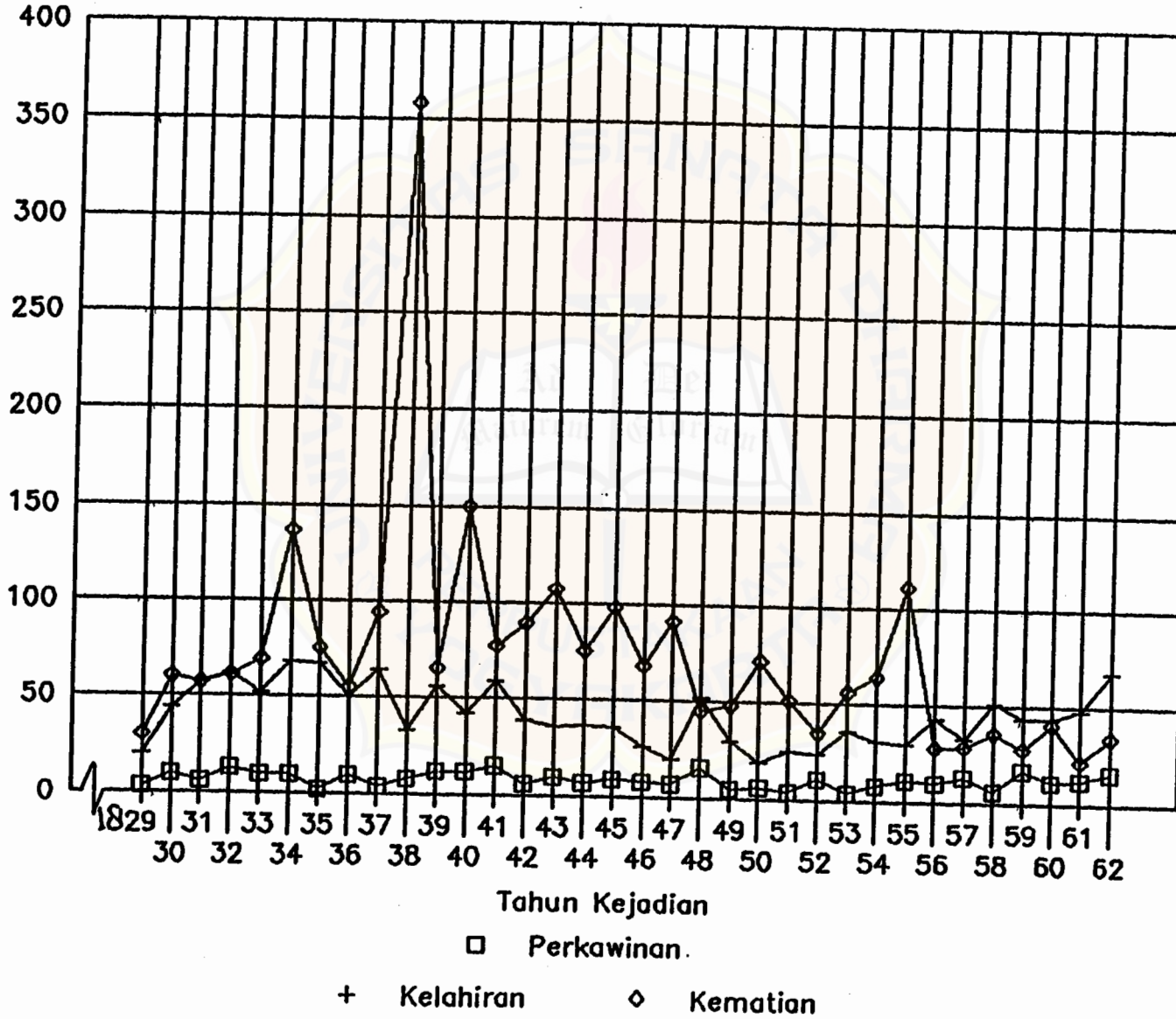
Pada umumnya, wabah penyakit, bencana alam, kemiskin-

³⁹ R.Z. Leirissa, "Maluku Tengah Dalam Abad Ke Sembilan Belas: Studi Pendahuluan", Prisma, Th. IX, No. 8, 1980 (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 64.

Grafik No. 15

Perkawinan, Kelahiran dan Kematian di Karisidenan Amboina Tahun 1829-1862

Jumlah Kejadian



Sumber: E.W.A. Ludeking, Schets van de Residentie Amboina
('S Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1868), hlm. 139.

an, perampokan, perselisihan dan kerusakan antar *negori*, serta pelanggaran hukum merupakan penyebab dari menurunnya jumlah penduduk Karesidenan Amboina.⁴⁰ Di samping itu kurangnya bantuan kesehatan dari Pemerintah Hindia Belanda dan terbatasnya sarana di rumah sakit,⁴¹ juga menjadi salah satu penyebab turunnya jumlah penduduk.

C. Faktor Ekonomi

1. Perdagangan Kota

Max Weber mengatakan bahwa perdagangan mempunyai pengaruh yang menentukan bagi maju mundurnya sebuah kota.⁴² Selanjutnya dikatakan bahwa di kota terdapat pusat aktivitas tukar menukar barang yakni pasar yang buka setiap hari. Penduduk kota memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di pasar itu. Barang-barang yang diperdagangkan sebagian besar diperoleh dari penduduk setempat dan daerah

⁴⁰H.J. de Graaf, De Geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken (T.Weaver B.V.-Franeker, 1977), hlm. 239.

⁴¹E.W.A. Ludeking, op. cit., hlm. 143.

⁴²Peter Reeves, Frank Broeze, and Kenneth McPherson, "Studying the Asian Port City", Frank Broeze, ed., Brides of the Sea Port Cities of Asia From the 16th-20th Centuries (Kensington NSW Australia: New South Wales University Press, 1989), hlm. 30.

pemangku yang terdekat.⁴³ Dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan faktor utama penggerak kehidupan kota.

Kota Pelabuhan Ambon mempunyai dua pasar,⁴⁴ yakni pasar ikan dan pasar umum. Di pasar ikan dijual berbagai jenis ikan laut, diantaranya yang dijual dalam jumlah yang relatif besar yakni sejenis ikan bandeng atau ikan tongkol yang disebut ikan cakalang. Jenis ikan cakalang paling banyak dijual oleh pedagang, karena merupakan ikan yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk kota, sebab merupakan lauk utama dalam menu makanan sehari-hari.⁴⁵

Pada tahun 1834 sampai tahun 1855, Pemerintah Hindia Belanda menyewakan pasar ikan untuk menambah pemasukan kas Pemerintah.⁴⁶ Mengenai berbagai penghasilan Pemerintah Hindia Belanda di luar cengkong dapat dilihat pada tabel 9 di lampiran 3. Penyewaan pasar ikan jatuh pada orang Cina, sebab dalam lelang orang Cina yang mampu membayar sewa paling tinggi. Berarti orang Cina yang menarik pajak

⁴³Max Weber, "Apakah Yang Disebut Kota", Sartono Kartodirdjo, ed., Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm. 13.

⁴⁴Algemeen Verslag van het Moluksche Over het Jaar 1833. Bagian C.

⁴⁵P. Bleeker, op. cit., hlm. 100.

⁴⁶Ibid., hlm. 14.

penjualan ikan pada para pedagang ikan, dan mengenai besarnya pajak tidak diketahui secara pasti. Oleh karena orang Cina harus membayar sewa pasar ikan kepada Pemerintah dalam jumlah yang sudah ditentukan, maka penarikan pajak penjualan ikan pada pedagang ikan relatif lebih tinggi daripada pajak yang ditarik oleh Pemerintah, dan hal itu dirasakan oleh para pedagang ikan terlalu berat.

Di pasar umum dijual berbagai barang kebutuhan hidup sehari-hari. Barang-barang yang dijual berasal dari kota itu sendiri, daerah sekitar kota, pulau-pulau di sekitarnya, dan ada pula barang-barang impor dari daerah yang relatif jauh. Sekitar tahun 1832, barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari yang dijual meliputi, sagu, jagung, kentang, ubi, pisang, dan ikan sebagai makanan penduduk, serta nangka, cempedak, sebagai makanan selingan, sedangkan daging sedikit dikonsumsi karena langka dan harganya relatif mahal. Harga barang-barang yang dijual tergantung pada permintaan.⁴⁷ Harga dan jenis barang yang dijual di pasar Kota Ambon sekitar tahun 1832 dapat dilihat pada tabel 10 di lampiran 4.

Sebagian besar buah, kelapa, minyak kelapa, *sageru*

⁴⁷Algemeen Verslag van het Moluksche Over het Jaar 1833. Bagian C.

yang dijual berasal dari Pulau Ambon itu sendiri. Sagu yang merupakan bahan pangan pokok penduduk pribumi sebagian besar berasal dari Pulau Seram dan Pulau Buru. Beras, anggur merah, bir, keju, mentega, arak, teh, dan kopi berasal dari wilayah yang relatif jauh seperti dari Sulawesi, Jawa, dan Eropa.

Di pasar Ambon terdapat dua kelompok pedagang yakni, pertama, kelompok pedagang "besar" yang terdiri dari pedagang Cina dan Arab. Dikatakan "besar" karena memiliki modal yang relatif besar, sehingga mampu menguasai perdagangan impor. Di samping itu pedagang Cina dan Arab mempunyai jaringan perdagangan yang lebih luas, seperti jaringan perdagangan dengan Jawa dan Makasar. Pedagang Arab dan Cina mempunyai peranan yang besar dalam perdagangan di kota Ambon, sebab mampu memenuhi kebutuhan penduduk terutama untuk barang-barang kebutuhan hidup yang tidak mampu diproduksi sendiri oleh penduduk kota Ambon. Kedua, kelompok pedagang "kecil" yang jumlahnya paling banyak. Disebut pedagang "kecil" sebab, jenis, jumlah, dan harga barang yang dijual relatif kecil dan biasanya merupakan kelebihan dari hasil kebunnya. Pedagang "kecil" dalam hal ini pedagang pribumi yang berasal dari daerah sekitar kota, peranannya dalam perdagangan relatif kecil bila dibandingkan dengan pedagang Arab dan Cina yang memiliki

banyak modal. Di samping itu pengalaman berdagang kurang, sebab sejak dulu pedagang "kecil" hampir tidak pernah berhubungan dagang langsung dengan orang luar, karena perdagangan dikuasai oleh penguasa pribumi.

Sebagian besar barang yang dijual di pasar kota Ambon diperhitungkan dengan nilai uang. Alat tukar yang digunakan oleh penduduk dalam kegiatan jual beli barang yaitu uang emas, perak, dan tembaga. Namun demikian masih ada sebagian penduduk yang melakukan jual beli barang dengan menggunakan cara lama yakni barter.⁴⁸ Uang emas dan perak yang masuk ke Ambon sangat sedikit bila dibandingkan dengan uang tembaga, sebab perdagangan besar hanya berada di tangan Pemerintah, pedagang Arab dan Cina. Uang kertas Jawa kurang dikenal oleh penduduk Ambon, meskipun Direktur Keuangan telah mengirim uang kertas Jawa ke Ambon sebesar 9000 *gulden*.⁴⁹ Hal itu disebabkan uang kertas Jawa bukan merupakan alat tukar yang laku di pasaran internasional, karena bahan baku yang digunakan untuk membuat uang bukan merupakan bahan baku standart internasional yakni emas atau perak. Dengan demikian tidak tampak jelas pentingnya uang kertas Jawa itu bagi penduduk pribumi pada umumnya.

⁴⁸Ibid.

⁴⁹Ibid.

Sampai tahun 1862, barang-barang yang dijual di pasar kota Ambon tidak banyak mengalami perubahan baik dalam jenis, jumlah, dan harga barang, walaupun pelabuhan Ambon telah dibuka sebagai pelabuhan bebas. Mengenai harga yang meningkat dan menurun itu tergantung pada permintaan dan jumlah barang yang dapat disediakan oleh pasar. Harga dan jenis barang yang dijual di pasar kota Ambon pada tahun 1862 dapat dilihat pada tabel 11 di lampiran 5.

Pasar Ambon buka setiap hari dari pagi sampai petang dan ramai dikunjungi oleh banyak orang yang tidak saja berasal dari kota Ambon itu sendiri, tetapi juga dari *negori-negori* di sekitarnya.⁵⁰ Pasar ramai dikunjungi karena menjual berbagai barang yang kurang dapat diproduksi sendiri oleh penduduk Ambon. Untuk mengurus masalah pasar Pemerintah Hindia Belanda mengangkat seorang Kepala Pasar, yang tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan pasar.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pasar merupakan pusat aktivitas perdagangan kota, yang digerakkan oleh pedagang-pedagang Arab, Cina, serta pedagang pribumi. Kedua kelompok pedagang itu mempunyai peran yang

⁵⁰R.Z. Leirissa, dkk., Maluku Tengah di Masa Lampau Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982), hlm. 177.

sama dalam perdagangan kota, hanya tingkatannya yang berbeda. Hal itu disebabkan oleh perbedaan kekuatan ekonomi dan pengalaman berdagang. Bagaimana dengan perkembangan industri rumah tangga di kota Ambon ? Siapa yang berperan dalam industri rumah tangga ?, dan apa hambatan-hambatanya ?

2. Industri Rumah Tangga

Di kota pelabuhan Ambon terdapat berbagai macam industri rumah tangga, yang sebagian besar dikuasai oleh golongan Warga. Disebut industri rumah tangga karena merupakan usaha sambilan yang dikerjakan pada waktu luang, modal kecil, sedikit tenaga kerja dan biasanya hanya anggota keluarga yang terlibat, serta barang diproduksi dalam jumlah kecil.

Berbagai industri rumah tangga itu meliputi, kerajinan emas, perak, dan besi, penenunan kain, pembuatan batu bata, pembuatan sageru, pembuatan layar kapal yang banyak dilakukan bersama dengan kerajinan bambu,⁵¹ pembuatan tepung sagu, pembuatan minyak wangi, pembuatan *stroolap-*

⁵¹Algemeen Verslag van het Moluksche Over het Jaar 1833. Bagian E.

pen, kerajinan dari bunga karang dan dari daun cengkih,⁵² kerajinan bunga dan buah-buahan dari bulu burung nuri dan kayu.⁵³

Kerajinan emas, perak, dan besi, yang diusahakan oleh sebagian kecil penduduk kota kurang dapat berkembang, sebab Pulau Ambon tidak menghasilkan emas, perak, dan besi. Pada umumnya bahan yang digunakan oleh perajin untuk membuat kerajinan itu, diperoleh dengan cara melebur bahan yang sudah ada atau mendatangkan dari luar Ambon. Penyebab yang lain yakni teknologi pembuatan kerajinan yang masih sederhana.

Penenunan kain yang diusahakan oleh sebagian penduduk juga kurang dapat berkembang sebab, pertama, bahan untuk membuat tenunan seperti kapas terbatas jumlahnya, sehingga harus mendatangkan kapas dari Jawa. Kedua, teknologi penenunan masih sangat sederhana sehingga hasil tenunan kurang dapat bersaing dengan kain dari luar. Jumlah kain tenun yang dihasilkan oleh penduduk Ambon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang penduduk. Oleh sebab itu baik Pemerintah maupun pedagang Arab dan Cina mendatangkan

⁵²Koloniaal Verslag Over het Jaar 1855. Hlm. 162.

⁵³H. van Kol, Uit Onze Koloniën Uitvoerig Reisverhaal (Leiden: A.W. Sijthoff, 1903), hlm. 161.

kain dari Jawa, Makasar, dan Belanda. Dapat dikatakan perdagangan kain menjadi penting dan merupakan salah satu faktor yang dapat menggerakkan kehidupan kota.

Pembuatan kerajinan dari bunga karang, dari daun cengkih, kayu, dan bulu burung nuri oleh sebagian kecil penduduk kota juga kurang dapat berkembang, meskipun bahan dasarnya banyak tersedia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerajinan itu kurang dapat berkembang yaitu kekurangan modal, daerah pemasaran, konsumen terbatas karena tidak semua orang menyenangi kerajinan itu, dan teknologi pembuatan kerajinan itu masih sederhana.

Pembuatan tepung sagu diusahakan oleh sebagian besar penduduk karena merupakan bahan pangan utama. Pohon Sagu banyak tumbuh di Pulau Ambon tetapi masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk, sehingga perlu mendatangkan sagu dari Pulau Seram dan Pulau Buru. Oleh karena sagu banyak terdapat di Pulau Ambon dan pulau-pulau di sekitarnya, maka Pemerintah Hindia Belanda mencoba mendirikan sebuah pabrik pembuatan tepung sagu di Ambon dan hasilnya dikirim ke pasar Eropa. Akan tetapi pabrik itu tidak banyak menghasilkan keuntungan,⁵⁴ sebab dibutuhkan biaya yang relatif besar untuk mendatangkan sagu dari

⁵⁴Koloniaal Verslag Over het Jaar 1855. Hlm. 162.

Pulau Seram dan Pulau Buru. Di samping itu pengangkutan sagu dari Pulau Seram dan Pulau Buru beresiko tinggi, sebab seringkali terjadi badai di laut. Hal itu tidak sebanding dengan hasil yang diterima dari penjualan sagu.

Seperti halnya tepung sagu, pembuatan *sageru* juga diusahakan oleh sebagian besar penduduk, karena merupakan salah satu minuman keras yang digemari oleh penduduk di samping arak dari Jawa. Kegemaran penduduk pada *sageru* tampak pada tersedianya *sageru* di setiap kedai di kota Ambon. Demikian pula pada setiap pesta baik pesta panen cengkih maupun perkawinan *sageru* selalu disuguhkan. Akan tetapi perdagangan *sageru* kurang dapat berkembang, karena, pertama adanya arak impor dari Jawa yang banyak digemari oleh penduduk kota khususnya para tentara, meskipun harganya relatif lebih mahal. Pada tahun 1832 harga *sageru* per botol di pasar kota Ambon sekitar 15 *gulden*, sedangkan arak Jawa harganya sekitar 20 *gulden*.⁵⁵ Kedua, adanya perdagangan gelap arak Jawa sehingga merugikan pedagang *sageru*.⁵⁶ Ketiga, Pemerintah Hindia Belanda menarik pajak

⁵⁵Algemeen Verslag van het Moluksche Over het Jaar 1833. Bagian C.

⁵⁶Ibid.

atas *sageru* yang bagi pembuat *sageru* hal itu dipandang sangat merugikan.⁵⁷

3. Perikanan

Perikanan merupakan salah satu mata pencaharian penduduk kota Ambon. Perairan teluk Ambon kaya akan berbagai jenis ikan laut, tetapi perikanan kurang dapat berkembang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perikanan kurang dapat berkembang. Pertama, teknologi penangkapan ikan dan alat yang digunakan masih sangat sederhana seperti, kail, jala, jaring, bubu, dan sero. Sementara itu Teluk Ambon yang merupakan daerah penangkapan ikan dikuasai oleh *Seromeester*.⁵⁸ Setiap nelayan yang akan memasang sero dan bubu di teluk Ambon harus menyewa pada *Seromeester*. Bagi nelayan cara itu dipandang merugikan karna diperlukan biaya tambahan untuk memperoleh ikan.

Kedua, pengolahan ikan menjadi ikan asin sulit dilakukan karena langkanya garam. Di Ambon terdapat beberapa tempat penggaraman, tetapi garam yang dihasilkan mutunya

⁵⁷R.Z. Leirissa, dkk., 1982, op. cit., hlm. 187.

⁵⁸*Seromeester*, orang yang mendapat hak menyewakan tempat-tempat di Teluk Ambon untuk dipasang sero atau bulu. Hak itu biasanya diberikan oleh Pemerintah pada orang yang mampu menawar dengan harga yang tinggi untuk menjadi seorang *seromeester*. Ibid., hlm. 198.

kurang baik karena rasanya agak pahit dan berwarna kelabu. Garam seperti itu kurang baik untuk mengasinkan ikan, oleh sebab itu untuk mengasinkan ikan didatangkan garam dari Jawa,⁵⁹ yang harganya relatif lebih mahal. Pada tahun 1862 harga garam di pasar kota Ambon sekitar 15 *gulden* per pikul,⁶⁰ sedangkan cukai garam impor besarnya 6 *gulden* per koyang.⁶¹ Untuk mendatangkan garam dari Jawa dibutuhkan waktu yang relatif lebih lama, karena jarak yang cukup jauh antara Jawa dan Ambon. Di samping itu pelayaran tidak dapat dilakukan setiap saat, sebab pedagang harus menunggu musim berlayar dengan tepat. Sementara itu hasil tangkapan tidak dapat menunggu terlalu lama untuk diasinkan, akibatnya banyak ikan yang terbuang dengan percuma.

Dari beberapa penjelasan itu tampak bahwa perekonomian kota Ambon di sektor industri rumah tangga dan perikanan kurang dapat berkembang, sehingga kurang mampu untuk mendukung perkembangan kota pelabuhan Ambon. Bagaimana dengan peranan kelompok-kelompok sosial yang berada di kota Ambon, apakah perannya dapat mengembangkan kota

⁵⁹Algemeen Verslag van het Molukschen Over het Jaar 1833. Bagian F.

⁶⁰R.Z. Leirissa, dkk., 1982, op. cit., hlm. 175.

⁶¹Koloniaal Verslag Over het Jaar 1849. Hlm. 195.

pelabuhan ?

4. Faktor Sosial

Salah satu faktor yang menentukan maju mundurnya suatu kota yaitu aktivitas kelompok-kelompok sosial yang berada di dalam kota itu sendiri. Seperti pada umumnya kota-kota pantai, kota pelabuhan Ambon mempunyai masyarakat yang heterogen. Di kota Ambon terdapat berbagai macam suku dan bangsa seperti, bangsa Eropa, bangsa Cina, bangsa Arab, dan Timur Asing lainnya seperti, Jawa, Makasar, dan Bugis, di samping itu terdapat penduduk pribumi dan *Mestizo*.⁶²

Keberadaan orang asing itu tampak dari adanya beberapa pemukiman orang asing, yang dalam sejarah sering disebut sebagai koloni atau *fondachi*.⁶³ Di dalam perjalanan Gubernur Jendral Mr. A.J. Duymaer van Twist yang dicatat

⁶²*Mestizo*, seseorang yang mempunyai darah campuran pribumi dengan Portugis, dan dapat juga campuran pribumi dengan Belanda. Willard A. Hanna, Hikayat Jakarta (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm. 108.

⁶³J.C. van Leur, Indonesian Trade and Society Essays in Asian Social and Economic History (Bandung: Sumur Bandung, 1960), hlm. 107.

oleh P. Bleeker dijelaskan,⁶⁴ bahwa kota Ambon memuat deretan rumah yang didiami oleh orang Eropa, *Mestizo*, Cina, Arab, dan Timur Asing lainnya. Pemukiman itu membentang antara Sungai Tomo dan Sungai Gajah, yang jaraknya dari pantai atau dari Benteng Victoria tidak melebihi ratusan tombak, dan di luar batasan itu masih banyak rumah yang menjadi satu dengan kota itu. Sebagian besar orang Eropa tinggal di sebelah barat daya benteng, sedangkan di sisi selatan benteng antara kampung Eropa dan pantai terletak kampung Cina. Golongan warga menghuni perkampungan yang membatasi pemukiman Eropa dan Cina, meskipun di sana sini terdapat beberapa rumah orang Eropa dan *Mestizo*.

Sebagai kota pelabuhan, kota Ambon mempunyai banyak kegiatan. Namun demikian ada diferensiasi dan spesialisasi di bidang pekerjaan seperti, pegawai pemerintahan, pedagang, nelayan, pendeta, guru, tukang kayu, pengrajin, pande besi, tentara, dan pelayan. Pengelompokan penduduk kota atas profesi-profesi itu didasarkan pada diferensiasi menurut garis ekonomis. Diantara kelompok masyarakat itu, golongan pedagang mempunyai peran yang paling menentukan bagi maju mundurnya kota, sebab perdagangan dan pelayaran merupakan kegiatan utama di kota Ambon.

⁶⁴P.Bleeker, op. cit., hlm. 97-99.

Pedagang Arab dan Cina mempunyai peran yang besar dalam perdagangan impor, sedangkan Pemerintah Hindia Belanda menguasai perdagangan ekspor seperti, cengkih, pala, fuli, coklat, kayu, dan minyak kayu putih, beserta pengangkutannya. Di samping itu Pemerintah Hindia Belanda masih menutup perdagangan mutiara bagi perdagangan bebas,⁶⁵ sebab perdagangan itu merupakan perdagangan yang relatif mahal dan terbatas produksinya. Pemerintah juga melarang perdagangan senjata dan mesiu dengan alasan bahwa bebasnya kedua jenis perdagangan itu dapat mengancam kedudukannya. Pemerintah Hindia Belanda khawatir kelompok-kelompok masyarakat yang tidak menyukai Pemerintah dapat dengan mudah mempersenjatai diri dan melawan Pemerintah. Bagi Pemerintah Hindia Belanda perlawanan itu berarti penambahan biaya, padahal pendapatan Pemerintah dari cengkih dan penyewaan beberapa tempat umum seperti pasar ikan relatif sedikit. Dalam perkembangannya seiring dengan dibukanya pelabuhan Ambon sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1854, Pemerintah Hindia Belanda mengizinkan perdagangan senjata dan mesiu dengan pertimbangan bahwa sampai tahun 1854 keadaan politik di wilayah kekuasaannya stabil.

⁶⁵R. Broersma, "Koopvaardij in de Molukken", Koloniaal Tijdschrift. Drie-en-Twintigste Jaargang, 1934, hlm. 130.

Hal itu terbukti bahwa sampai tahun 1854 hampir tidak terjadi perlawanan dari penduduk, sehingga pemberian ijin perdagangan senjata dan mesiu dipandang tidak mengancam kedudukannya. Pertimbangan yang lain yaitu untuk mendorong perdagangan dan pelayaran niaga di Ambon dan menambah pemasukan Pemerintah. Pada masa itu perdagangan mesiu dan senjata penting, karena dibutuhkan oleh banyak pedagang untuk mempersenjatai diri dari ancaman perompak Bugis di lautan Timur.⁶⁶

Pedagang *Burger* mempunyai peran yang penting dalam perdagangan kecil-kecilan dengan pedagang-pedagang dari pulau-pulau di sekitarnya di pantai Ambon. Di samping itu ada sebagian dari golongan *Burger* yang menguasai cabang-cabang industri rumah tangga, perikanan, dan pertukangan.⁶⁷ Perannya yang penting dalam industri rumah tangga tampak pada jumlah penduduk *Burger* yang menekuni bidang kerajinan. Pada tahun 1854 dari 8755 jumlah penduduk pria yang menjadi perajin sekitar 4906 orang berarti lebih dari separonya.⁶⁸ Cabang industri rumah tangga dan pertukangan

⁶⁶Surat Gubernur Maluku kepada Direktur Departement van Oorlog, bulan April 1825. Bundel Ambon, No. 472

⁶⁷P. Bleeker, op. cit., hlm. 89, 140, dan 156.

⁶⁸Ibid., hlm. 140

meliputi, pembuatan tepung sagu, tembikar, penyulingan minyak kayu putih (yang terbesar ada di Pulau Buru), minyak wangi, minuman keras yang dikenal dengan nama *koelwater*, pembuatan kerajinan dari bunga karang dan daun cengkih serta pembuatan *stroleger*.⁶⁹ Di samping itu ada pembuatan minyak sere, minyak lawan, penenunan kain walaupun masih amat sederhana, kerajinan logam, pembuatan sepatu, dan pakaian,⁷⁰ serta pembuatan layar kapal yang banyak dilakukan bersama dengan kerajinan bambu,⁷¹

Di samping pedagang Arab dan Cina, pedagang *Burger* juga ikut ambil bagian dalam perdagangan impor seperti, beras, tekstil, dan barang-barang kebutuhan hidup lainnya.⁷² Pedagang *Burger* membeli barang-barang dari Pemerintah Hindia Belanda secara kontan, tetapi sulit menjualnya kembali sebab apa yang mereka beli dari Pemerintah terlalu mahal untuk dijual kembali.⁷³ Harga barang-barang menjadi mahal karena Pemerintah menjual barang dengan harga yang

⁶⁹Koloniaal Verslag Over het Jaar 1855. Hlm. 162.

⁷⁰G.W.W.C. Baron van Hoëvell, 1875, op. cit., hlm. 53.

⁷¹Algemeen Verslag van het Moluksche Over het Jaar 1833. Bagian E.

⁷²R.Z. Leirissa, dkk., 1982, op. cit., hlm. 149.

⁷³R.Broersma, op. cit., hlm. 131.

relatif mahal, dan barang itu sendiri terbatas jumlahnya, sehingga pedagang *Burger* tidak dapat membeli cukup dari pemerintah padahal barang-barang itu dijual sampai ke Kepulauan Aru.

Pedagang Arab dan Cina menguasai sebagian besar perdagangan impor.⁷⁴ Barang-barang yang diperdagangkan oleh pedagang Arab meliputi, beras, tekstil, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Pedagang-pedagang Arab membeli barang-barang itu dari Jawa dan Bali,⁷⁵ diangkut dengan menggunakan kapal-kapal milik mereka sendiri,⁷⁶ atau mengirimkan barang-barang itu lewat pelayaran konsinyasi kepada agen-agen dan rekan bisnis yang saat itu tinggal di Ambon.⁷⁷

Pedagang Cina mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi bila dibandingkan dengan pedagang Arab dan *Burger*. Perannya yang penting itu tampak pada berbagai aktivitas yang dilakukan. Pertama, menguasai perdagangan impor yakni, beras, kain, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Kedua, menguasai perdagangan tripang yang sebagian besar

⁷⁴P. Bleeker, op. cit., hlm. 140.

⁷⁵R. Broersma, op. cit., hlm. 134.

⁷⁶P. van der Crab, op. cit., hlm. 52.

⁷⁷P. Bleeker, op. cit., hlm. 133.

konsumennya adalah pedagang Makasar.⁷⁸ Ketiga, mengelola pertokoan besar di kota Ambon walaupun hanya merupakan cabang dari perusahaan dagang yang berpusat di Makasar.⁷⁹ Keempat, menguasai tempat-tempat umum yang disewakan oleh Pemerintah Hindia Belanda seperti pasar ikan dan tempat penjualan *sageru*.⁸⁰

Bagaimana dengan peranan pedagang Makasar dan Bugis di kota pelabuhan Ambon ? Pada masa VOC peran pedagang Bugis dan Makasar dalam pelayaran niaga terbatas.⁸¹ VOC membatasi aktivitas pedagang Bugis dan Makasar itu untuk melindungi monopoli perdagangan rempah-rempahnya di Maluku. Akan tetapi pembatasan itu kurang berhasil, sebab VOC kekurangan sarana untuk melakukan pengawasan. VOC mempunyai sedikit kapal dan tentara dan masih terbagi-bagi di seluruh perairan Indonesia. Di samping itu pedagang-pedagang pribumi lebih mengetahui keadaan perairan Maluku, sehingga dapat lebih mudah menghindari patroli laut VOC.

⁷⁸H. van Kol, op. cit., hlm. 163.

⁷⁹R.Z. Leirissa, 1980, op. cit., hlm. 69.

⁸⁰P. Bleeker, op. cit., hlm. 141 dan Koloniaal Verslag Over het Jaar 1849. Hlm. 195.

⁸¹Pembatasan kegiatan pelayaran orang Makasar ditetapkan oleh VOC dalam Perjanjian Bongaya tahun 1667. Sartono Kartodirdjo, 1987, op. cit., hlm. 106.

Keadaan itu segera berubah ketika pada tahun 1827 Pemerintah melalui Surat Keputusan Komisaris Jendral Tanggal 13 Agustus 1827 No. 18, memberi ijin pada pedagang Bugis dan Makasar untuk berdagang langsung ke Nieuwe Guinea, Kepulauan Goram, kepulauan sebelah barat daya dan kepulauan sebelah tenggara termasuk Kei dan Aru.⁸² Pemberian ijin itu merupakan usaha Pemerintah untuk meningkatkan aktivitas pelayaran dan perdagangan di kota pelabuhan Ambon.

Dalam Surat Keputusan Komisaris Jendral Tanggal 13 Agustus Tahun 1827 No. 18, para pedagang Bugis dan Makasar diwajibkan menjual barang-barang yang dibeli dari pulau-pulau itu di salah satu pelabuhan di Jawa, Banda, Ambon, atau Ternate. Akan tetapi karena Pemerintah kurang ketat dalam melaksanakan peraturan itu, maka pedagang Makasar dan Bugis dapat pergi ke Pelabuhan bebas Singapura. Di pelabuhan Singapura para pedagang Bugis dan Makasar menjual barang-barang yang dibeli dari kepulauan sebelah barat daya dan tenggara dengan harga yang tinggi, dan membeli barang-barang dengan harga murah bila dibandingkan dengan barang-barang yang ditawarkan oleh pedagang di Makasar dan Ambon. Barang-barang yang dibeli oleh pedagang itu meliputi, kain, barang-barang dari perunggu dan besi,

⁸²E.W.A. Ludeking, *op. cit.*, hlm. 116.

gading gajah, dan candu. Barang-barang itu kemudian dibawa secara langsung ke Nieuwe Guinea, Kepulauan Goram, kepulauan di sebelah tenggara dan barat daya, untuk kemudian ditukar dengan tripang, mutiara, kerang, pala liar, rumput laut, dan menjualnya kembali dengan harga yang tinggi di Singapura.⁸³ Surat Keputusan Tanggal 13 Agustus Tahun 1827 No. 18 mengakibatkan para pedagang dari Seram, Seram Laut, Goram, dan lainnya terdesak oleh pedagang Bugis dan Makassar.⁸⁴

Perkembangan pelabuhan bebas Singapura telah meningkatkan aktivitas pelayaran pribumi di pelabuhan Ambon. Terutama pada musim hujan, pelabuhan Ambon ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dari Makasar dengan tujuan utamanya ke kepulauan sebelah tenggara dan barat daya. Pedagang Makasar menjual sebagian barang dagangannya di Ambon dan Banda, kemudian membeli barang-barang yang diperlukan bagi pelayaran yang lebih jauh misalnya ke Cina.⁸⁵ Peningkatan itu dapat dilihat dari jumlah perahu pribumi yang berlabuh

⁸³Ibid.

⁸⁴Algemeen Verslag van het Moluksche Over het Jaar 1833. Bagian F

⁸⁵P. van der Crab, op. cit., hlm. 170.

dan berangkat dari pelabuhan Ambon yang selengkapnya dijelaskan dalam bab III.

Pedagang pribumi Ambon kurang berperan dalam perdagangan, sebab pertama, tidak mempunyai banyak modal sehingga tidak mampu bersaing dengan pedagang Arab dan Cina. Sementara itu barang-barang yang dijual oleh penduduk pribumi jumlahnya relatif kecil dan hanya merupakan kelebihan hasil kebunnya seperti, buah coklat, buah-buahan, bunga, dan sayuran.⁸⁶ Kedua, tradisi perdagangan besar tidak dijumpai sebab sejak dulu kegiatan perdagangan dengan orang "luar" berada di tangan elite pribumi. Ketiga, sebagian besar kegiatan penduduk pribumi berada di kebun cengkih dan memenuhi kewajibannya bekerja pada Pemerintah Hindia Belanda dan penguasa pribumi.

Diantara penduduk pribumi, kaum wanita Ambon mempunyai peran yang relatif lebih besar bila dibandingkan dengan kaum pria. Hal itu tampak dari kegiatan di dalam pasar yang sebagian besar didominasi oleh kaum wanita. Tampilnya wanita dalam perdagangan di pasar dimungkinkan oleh situasi yang mengharuskan kaum pria bekerja di kebun dan memenuhi kewajibannya pada Pemerintah Hindia Belanda dan Kepala *Negori*.

⁸⁶R.Z. Leirissa, dkk., 1982, op. cit., hlm. 150.

Kepala *Negori*, peran dan kedudukannya dalam bidang politik dan ekonomi telah merosot. Dalam bidang politik kedudukannya berada di bawah kekuasaan penguasa Belanda, dan hanya ditempatkan sebagai pengawas perkebunan cengkih dan sebagai perantara hubungan antara Pemerintah dengan penduduk pribumi. Dalam bidang ekonomi perannya dalam perdagangan cengkih telah diambil alih dengan paksa oleh Belanda. Selanjutnya penguasa pribumi hanya mampu melakukan perdagangan dalam skala kecil dan tidak mampu bersaing dengan pedagang Arab dan Cina yang mempunyai modal relatif lebih besar. Dengan merosotnya peran dan kedudukannya itu maka merosot pula tingkat kesejahteraan hidupnya, seperti yang dikatakan oleh G.W.W.C. Baron van Hoëvell, bahwa para Kepala *Negori* Ambon miskin hanya sebagian kecil yang dapat hidup mewah, meskipun rumah-rumah yang ditempati mereka dilengkapi dengan perabotan yang mewah.⁸⁷

Dari penjelasan di atas tampak bahwa peran pedagang Cina, Arab, dan *Burger* terbatas pada perdagangan impor, sedangkan perdagangan ekspor yang paling penting yakni cengkih dimonopoli oleh Pemerintah Hindia Belanda. Keterbatasan dalam perdagangan itu mengakibatkan kurang adanya

⁸⁷G.W.W.C. Baron van Hoëvell, 1875, op. cit., hlm. 28.

persaingan yang merupakan salah satu faktor penggerak kehidupan kota. Dengan kata lain peran pedagang Cina, Arab, dan *Burger* yang terbatas kurang dapat mendorong perkembangan kota.

2. Faktor-Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Perkembangan Kota Pelabuhan Ambon

Perkembangan kota pelabuhan tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor internal dari kota itu sendiri, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor eksternalnya yaitu, potensi wilayah sekitar kota Ambon, potensi pulau-pulau di sekitarnya seperti, Pulau Buru, Pulau Seram, dan *Lease*. Ada hubungan yang erat antara kota Ambon dengan wilayah di sekitarnya. Kota pelabuhan Ambon mempunyai peran penting bagi wilayah di sekitarnya, yaitu sebagai tempat untuk mengekspor dan pasar bagi hasil buminya, sedangkan wilayah sekitarnya penting bagi kota Ambon, karena menyediakan bahan pangan bagi penduduknya dan produk ekspor. Dengan demikian besar kecilnya potensi wilayah sekitar pulau Ambon dapat mempengaruhi perkembangan kota pelabuhan Ambon.

A. Potensi wilayah Pulau Ambon

1. Perkebunan Cengkih

Cengkih merupakan komoditi ekspor terpenting dari Pulau Ambon. Pada masa awal pendudukan perhatian Pemerintah Hindia Belanda lebih banyak dicurahkan pada perkebunan cengkih, sebab produksi cengkih turun bila dibandingkan dengan jumlah produksi cengkih pada masa VOC. Penurunan itu sebagai akibat dari pelaksanaan penanaman cengkih yang kurang ketat pada masa Inggris. Pada masa itu Pemerintah Inggris dengan kebijaksanaannya yang liberal memberi kelonggaran pada penduduk dalam melaksanakan kewajibannya pada Pemerintah.⁸⁸

Pada tahun 1825 sebagai langkah awal Pemerintah Hindia Belanda menginstruksikan penanaman pohon cengkih yang baru, dan mengangkat *Inspecteur der Cultuures* dengan tugas sebagai pengawas perkebunan cengkih. Pemegang jabatan itu adalah orang Belanda yang diangkat dan diberhentikan sebagai *Inspecteur der Cultuures* oleh Pemerintah Hindia Belanda. Penanaman cengkih itu gagal sebab banyak penduduk *negori* yang tidak aktif ambil bagian dalam usaha itu. Ketidakaktifan penduduk itu disebabkan oleh pengalaman yang tidak menyenangkan pada masa VOC yakni dalam hal tanam paksa, penyerahan wajib cengkih, dan penentuan harga cengkih yang sepihak oleh Pemerintah. Tugas *Inspecteur der*

⁸⁸R.Z. Leirissa, 1980, op. cit., hlm. 72.

Cultuures juga kurang dapat berjalan dengan lancar, sebab tidak mempunyai pengaruh dalam masyarakat, sehingga tidak dapat mengerahkan penduduk untuk bekerja di kebun.

Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengambil langkah baru yaitu dengan menciptakan *Gecommitteerde der Nagelcultuures*. Jabatan itu tidak lagi dipegang oleh orang Belanda, tetapi oleh penguasa pribumi terutama yang berasal dari kalangan bangsa "raja" dan yang paling berjasa dalam produksi cengkih. Tugas dan kewajiban utama *Gecommitteerde der Nagelcultuures* yaitu, membantu meningkatkan produksi cengkih, memberi laporan tentang cengkih secara tertulis, dan memberi nasehat apabila diminta oleh Pemerintah.⁸⁹ Langkah itu lebih berhasil sebab dengan pengaruhnya yang besar dalam masyarakat, penguasa pribumi dapat mengerahkan penduduk *negori* untuk ikut ambil bagian dalam penanaman cengkih.

Terdapat empat orang *Gecommitteerde der Nagelcultuures*, masing-masing satu untuk pulau Ambon, satu untuk Haruku, satu untuk Saparua, dan satu untuk Nusa Laut. Jabatan itu hanya ada di keempat pulau itu, sebab keempat pulau itu merupakan wilayah penghasil cengkih yang telah ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Sampai tahun 1865

⁸⁹Ibid., hlm. 126-127.

yakni tahun dihapuskannya sistem monopoli cengkih, jabatan *Gecommitteerde der Nagelcultuures* bergantian dipegang oleh penguasa pribumi yang terpenting di keempat pulau itu. Pejabat itu mendapat imbalan jasa dari Pemerintah Hindia Belanda sesuai dengan cengkih yang dihasilkannya.⁹⁰

Di Pulau Ambon cengkih ditanam di 1264 dati baik di dalam maupun di luar kebun.⁹¹ Jumlah cengkih yang disetorkan oleh penduduk pada Pemerintah Hindia Belanda dari tahun 1817 sampai tahun 1863 dapat dilihat pada grafik no. 16 (dihitung dalam jangka waktu lima tahunan).

Dari tahun 1817 sampai tahun 1826, produksi cengkih cenderung turun sebab, pertama, selama masa Pemerintahan Inggris tidak ada penanaman baru dan sebagian besar pohon mati karena kekeringan.⁹² Pada tahun 1827 sampai 1836, masa pemerintahan Gubernur Pieter Merkus produksi cengkih cenderung meningkat, sebagai akibat pembukaan areal baru dan penanaman pohon cengkih dengan sistem tanam yang lebih memperhatikan jarak tanam antar pohon. Sistem tanam itu diterapkan supaya tanaman cengkih dapat lebih teratur, dan tidak saling bersinggungan satu sama lain yang dapat

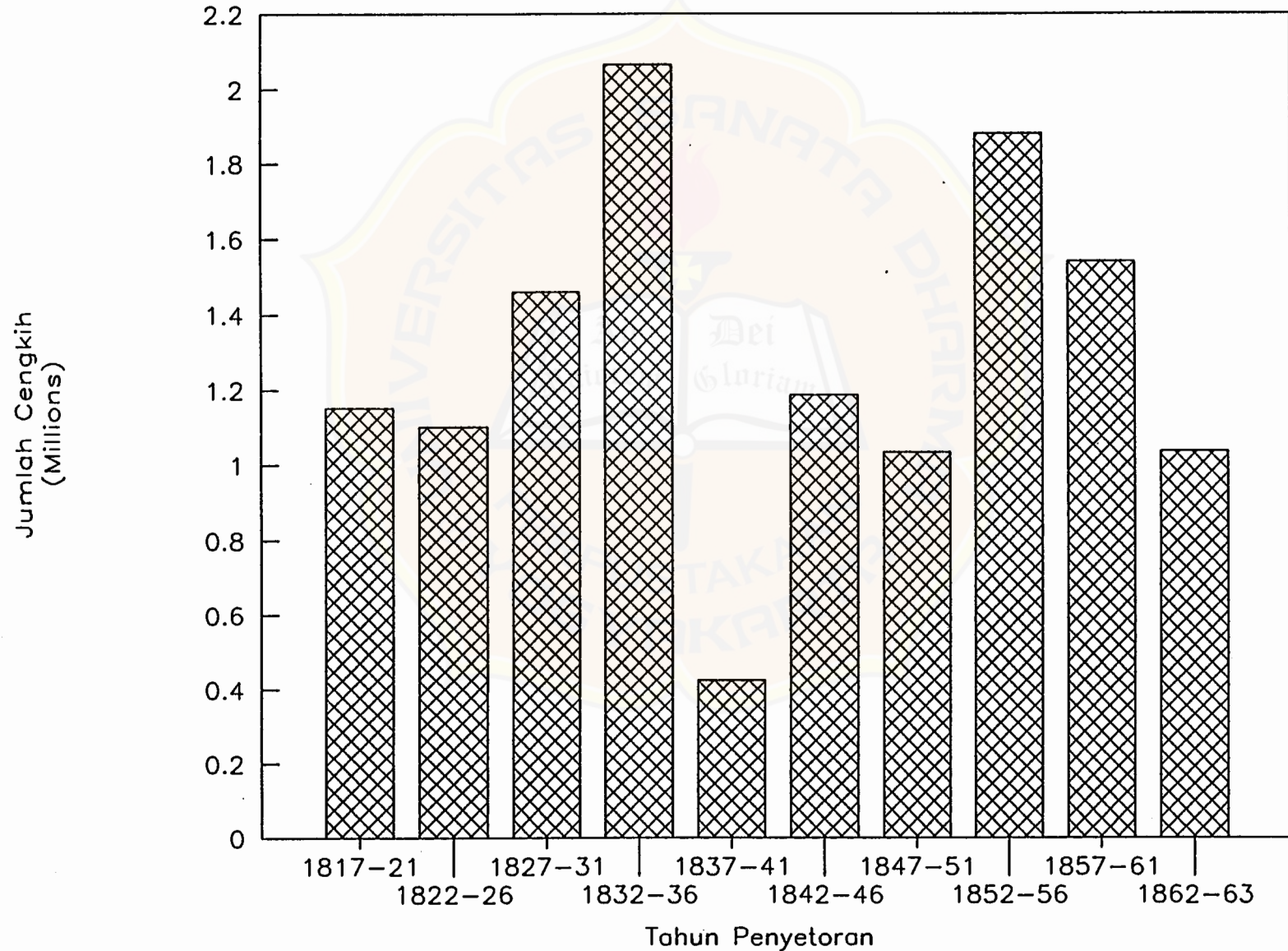
⁹⁰Ibid., hlm. 126.

⁹¹P. Bleeker, op. cit., hlm. 122.

⁹²E.W.A. Ludeking, op. cit., hlm. 92.

Cengkih Yang Disetorkan Oleh Penduduk

Pada Pem.Hindia Belanda Tahun 1817-1863



Sumber: E.W.A. Ludeking, Schets van de Residentie Amboina (s'-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1868), hlm. 93.

menurunkan produksi. Selama masa jabatannya penduduk telah menanam pohon cengkih sebanyak 115.000 pohon.⁹³

Satu tahun kemudian, Gubernur Pieter Merkus mengeluarkan Resolusi 28 Mei Tahun 1828, yang isinya melarang penduduk pribumi meninggalkan *negorinya* tanpa surat ijin, dan mewajibkan penduduk pribumi untuk merawat 90 pohon cengkih. Bagi penduduk pribumi kewajiban itu dirasa berat, oleh sebab itu banyak penduduk yang mencoba menolak dengan cara meninggalkan *negorinya*. Ketika penduduk minta ijin untuk meninggalkan *negorinya* yang didapatkan adalah perlakuan kejam dari Kepala *Negori*. Sangsi itu diberikan supaya tidak ada penduduk yang meninggalkan *negorinya*. Dengan cara itu Pemerintah terjamin dalam mendapatkan cengkih dan Kepala *Negori* terus mendapat uang dari penyerahan wajib cengkih. Resolusi itu menjadikan penduduk pribumi sebagai budak tanah dan menjadi penghalang bagi pertukaran, perdagangan, kesejahteraan, dan kemajuan penduduk.⁹⁴

Pada tahun 1837 sampai tahun 1851 produksi cengkih cenderung turun, meskipun Gubernur Francois Vincent Antone de Stuers yang menjabat Gubernur dari tahun 1837 sampai tahun 1841, mengeluarkan peraturan baru yakni penanaman

⁹³Ibid., hlm. 91.

⁹⁴Ibid., hlm. 93-94.

pohon cengkih supaya disesuaikan dengan situasi alam. Sesudah itu Gubernur Guillaume de Seriere menyuruh penduduk Kule untuk menanam pohon cengkih dengan beberapa ketentuan yakni tanaman cengkih sebagai tanaman bebas, pohon cengkih sedikit ditebangi, dinaungi oleh pohon besar, dan di tanam di tanah hutan yang subur. Hasilnya relatif lebih baik bila dibandingkan dengan masa sebelumnya.⁹⁵ Namun demikian secara keseluruhan produksi cengkih menurun sebab, pertama, berjangkitnya wabah hama pada pohon yang dimulai dengan munculnya bintik-bintik putih di sepanjang batang pohon yang menyebabkan pohon mati.⁹⁶ Kedua, bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tahun 1837, 1842, 1845, 1850, dan 1852 menyebabkan banyak pohon cengkih yang mati dan rusak. Ketiga, pengetahuan tentang penanaman dan perawatan pohon cengkih masih rendah. Sebagai contoh digunakannya pohon pisang sebagai pohon pelindung yang ternyata tidak banyak manfaatnya, sebab kebanyakan pohon cepat tumbuh tetapi juga cepat layu dan banyak juga yang mati. Di samping itu pohon-pohon besar ditebangi supaya angin laut dapat masuk dan penyiangan dilarang,

⁹⁵Ibid., hlm. 91.

⁹⁶Koloniaal Verslaag Over het Jaar 1859. Hlm. 126-127.

tetapi hasilnya tetap kurang memuaskan.⁹⁷ Keempat, faktor kesuburan tanah yang semakin berkurang. Kelima, banyak penduduk yang meninggal terutama pada tahun 1838, 1840, dan tahun 1843 karena berjangkitnya berbagai wabah penyakit, yang menyebabkan berkurangnya tenaga kerja di kebun.

Pada tahun 1852 sampai tahun 1856 produksi cengkih meningkat. Akan tetapi pada tahun 1857 sampai tahun 1863 produksi cengkih turun lagi, karena kekurangan tenaga kerja di perkebunan cengkih untuk memelihara dan memetik cengkih, sebagai akibat berjangkitnya wabah penyakit yang melanda penduduk Ambon. Di samping itu pengaruh dari turunnya harga cengkih di pasar Eropa.

Produksi cengkih berubah-ubah dari tahun ke tahun. Pada satu saat produksi cengkih dapat berlimpah tetapi pada saat lain produksi cengkih dapat amat sedikit. Dari tahun 1817 sampai tahun 1863, cengkih yang disetorkan oleh penduduk pada Pemerintah Hindia Belanda rata-rata 350.000 pon setiap tahun, sedangkan pada tahun 1675 sampai tahun 1816 cengkih yang disetorkan oleh penduduk rata-rata 610.000 pon setiap tahun.⁹⁸ Jadi pada masa Pemerintahan

⁹⁷E.W.A Ludeking, loc. cit.

⁹⁸Data produksi cengkih dari tahun 1675 sampai tahun 1863, ibid., hlm. 92-93.

Hindia Belanda produksi cengkih turun bila dibandingkan pada masa VOC.

2. Perkebunan Coklat

Kemunduran perdagangan cengkih dan pengaruh aliran liberal di negeri Belanda menyebabkan Pemerintah melibatkan pengusaha untuk mengusahakan tanaman lain yang laku dijual.⁹⁹ Sejak pertengahan abad ke-19, Pemerintah mengizinkan beberapa pensiunan dan pengusaha swasta memanfaatkan tanah-tanah di Maluku Tengah untuk ditanami coklat, kopi, dan tembakau. Supaya usaha itu berhasil Pemerintah Hindia Belanda ikut campur tangan dalam usaha itu dengan cara memberi bantuan berupa kredit, mencarikan bibit unggul terutama coklat dari Manado, dan teknik pengolahan.¹⁰⁰

Keberhasilan pengembangan perkebunan coklat di Manado telah mendorong Pemerintah untuk mengembangkan tanaman coklat di Ambon,¹⁰¹ yang kebetulan tanahnya cocok untuk tanaman coklat. Pada tahun 1830 sampai tahun 1840, beberapa pengusaha mencoba membuka kebun coklat. Pada awalnya

⁹⁹H.J. de Graaf, op. cit., hlm. 244.

¹⁰⁰R.Z. Leirissa, dkk., 1982, op. cit., hlm. 119-120.

¹⁰¹H.C. van Eijbergen, op. cit., hlm. 120.

perkebunan itu dapat berkembang, tetapi setelah berjalan beberapa tahun perkebunan itu ditutup. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang tanaman coklat, pemilihan tanah yang kurang tepat, kekurangan tenaga kerja, dan kekurangan modal. Pada tahun 1845 beberapa pengusaha mencoba membuka kembali perkebunan coklat dan sebagai langkah awal ditanam 4000 pohon. Usaha itu ternyata lebih berhasil bila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Keberhasilan itu telah mendorong pengusaha untuk membuka kebun-kebun coklat yang baru. Dalam perkembangannya perkebunan coklat semakin meningkat karena permintaan dan harga yang semakin meningkat. Menurut berita pasar di Eropa tanaman itu semakin banyak dicari.¹⁰²

Gubernur Maluku Jhr. C.F. Goldman yang mulai menjabat sebagai gubernur pada tahun 1855, mendorong perluasan tanaman coklat secara teratur. Pada tahun 1856 atas dorongan Gubernur beberapa pengusaha swasta membuka kebun-kebun baru di beberapa *negori*.¹⁰³ Selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda atas usul gubernur memberi pinjaman uang tanpa bunga sebesar 100.000 *gulden* untuk mengembangkan tanaman

¹⁰²P. van der Crab, *op. cit.*, hlm. 200.

¹⁰³H.C. van Eijbergen, *op. cit.*, hlm. 122.

coklat di Karesidenan Amboina.¹⁰⁴

Sampai akhir tahun 1860, Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan pinjaman uang kepada 13 pengusaha sebesar 78.000 *gulden*. Pada tahun 1861 pengusaha yang diberi pinjaman bertambah 3 orang, jadi seluruhnya ada 16 orang. Dana pinjaman sebesar 100.000 *gulden* ternyata hanya beberapa ribu *gulden* yang digunakan oleh pengusaha. Kepada para pengusaha Pemerintah Hindia Belanda meminjamkan uang sebesar,¹⁰⁵ 15.000 *gulden* pada tahun pertama (1860), 18.700 *gulden* pada tahun kedua (1861), 18.200 *gulden* pada tahun ketiga (1862), dan 17.500 *gulden* pada tahun keempat (1863), jadi seluruhnya 69.400 *gulden*. Pada akhir tahun 1863 masih tersisa dana sebesar 30.600 *gulden* yang sebenarnya masih dapat digunakan. Dengan menggunakan pinjaman itu para pengusaha telah menanam 40.000 pohon pada tahun 1860; 75.770 pohon pada tahun 1861, 94.694 pohon pada

¹⁰⁴Ibid., hlm. 122-126, dan dalam P. van der Crab, op. cit., hlm. 202, dijelaskan bahwa kredit sebesar 100.000 *gulden* diberikan secara bertahap dalam waktu 5 tahun. Rinciannya setiap setengah tahun seorang pengusaha memperoleh kredit sebesar sepersepuluh dari pinjaman itu. Angsuran dimulai pada tahun kedelapan, besarnya sepersepuluh dari pinjaman. Pada tahun keduapuluh yakni dua tahun setelah pinjaman lunas, peminjam wajib menyerahkan sepersepuluh dari keuntungan murni kepada pemerintah.

¹⁰⁵H.C. Eijbergen, op. cit., hal. 123.

tahun 1862, dan 92.575 pohon pada tahun 1863.¹⁰⁶

Di Ambon pohon coklat ditanam di kebun perorangan, kebun *negori*, dan kebun pengusaha. Tenaga kerja yang digunakan di perkebunan itu khususnya kebun pengusaha yaitu, orang Ambon, orang Sula, dan Binonko, yang jumlahnya tidak banyak. Para tenaga kerja itu mendapat upah kerja sebesar 10 sampai 12 *gulden*.¹⁰⁷ Jumlah seluruh pohon coklat yang ditanam di perkebunan dapat dilihat pada grafik no. 17. Dari grafik itu tampak bahwa pohon coklat yang ditanam semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan oleh permintaan dan harga coklat yang semakin meningkat.

Pada tahun 1857 harga coklat rata-rata 50 *gulden* per pikul. Setelah itu harga coklat mencapai sekitar 75 sampai 100 *gulden* per pikul, dan pada tahun 1864 harga mencapai 120 *gulden* per pikul.¹⁰⁸ Dengan semakin meningkatnya produk coklat, diharapkan ada barang-barang yang dapat dimuat kembali ke kapal yang datang di pelabuhan Ambon. Dengan demikian pelayaran dan perdagangan mungkin dapat

¹⁰⁶Ibid.

¹⁰⁷Ibid., hlm. 123-124.

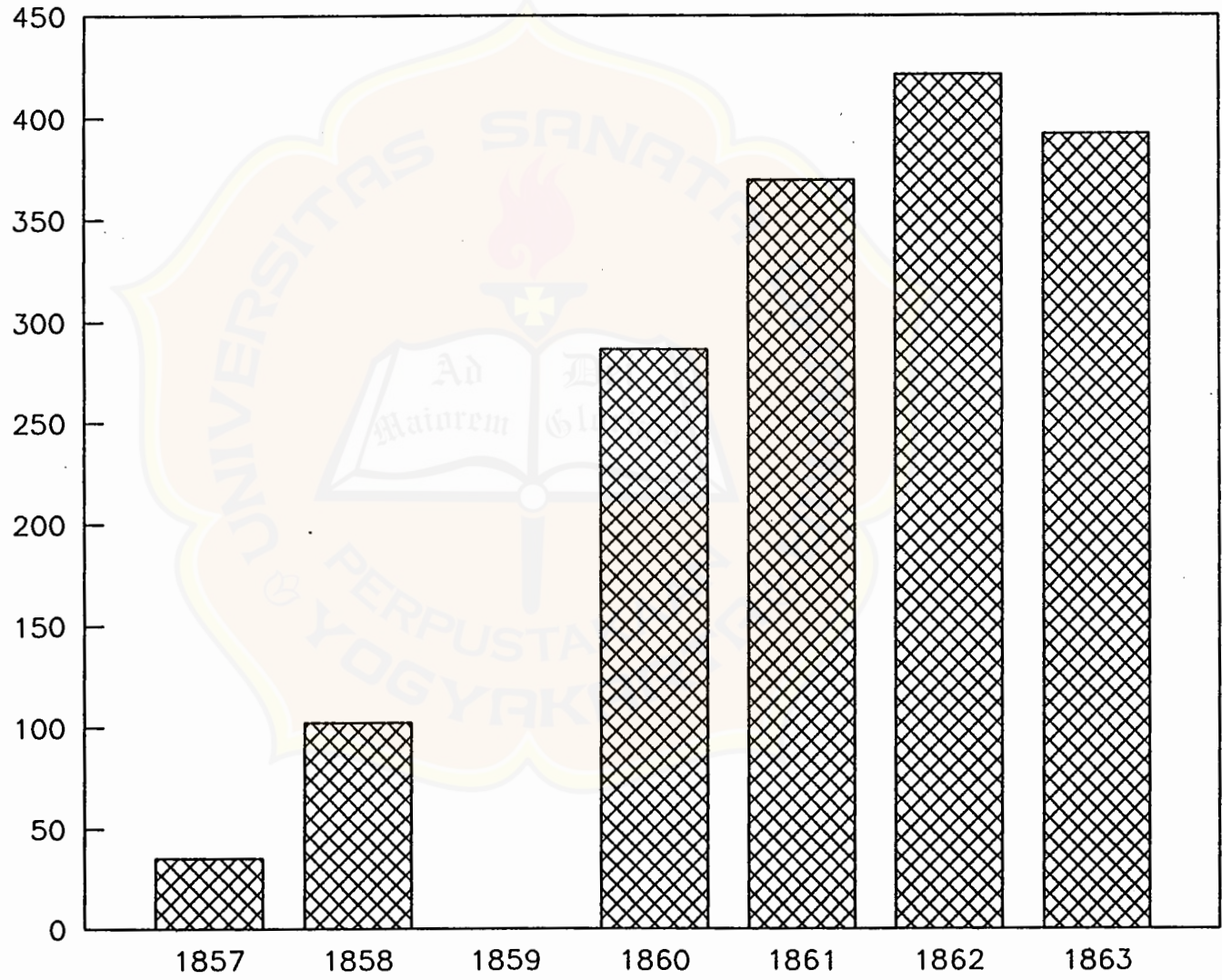
¹⁰⁸G.W.W.C. Baron van Hoëvell, 1868, op. cit., hlm.

Grafik No. 17

Jumlah Pohon Coklat

Dari tahun 1857-1863

Jumlah Pohon Coklat
(Thousands)



Sumber: E.C. van Eijbergen, "Bijdrage tot de Kennis der
 Koko-kultuur in de Residentie Amboina", Tijdschrift
 Voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch Indië.
 Nieuwe Serie. Deel VI (Batavia: W. Ogilvie, 1865),
 hlm. 125.

berkembang.

3. Pala dan Fuli

VOC menetapkan tanaman pala sebagai tanaman paksa. Pada tahun 1785 VOC memaksa penduduk Ambon untuk menanam dan merawat 10.000 pohon pala, dan hasilnya harus diserahkan pada VOC dengan harga 10 duit per 100 batang. Pada tahun 1817 sampai tahun 1819, pala yang diserahkan oleh penduduk kepada Pemerintah Hindia Belanda sebesar 390,491 pon dan fuli sebesar 93,285 pon dengan nilai seluruhnya 80.083 *gulden* 24 $\frac{1}{2}$ duit.¹⁰⁹ Selama bulan Juli sampai September tahun 1822, penduduk telah menyetorkan pala pada Pemerintah Hindia Belanda sebanyak 855 pon dengan harga 151,21 *gulden*.¹¹⁰ Sementara itu selama bulan Februari sampai Maret tahun 1826, penduduk telah menyetorkan 17.635 pon pala seharga 133,10 *gulden*.¹¹¹ Dari tahun 1826 sampai

¹⁰⁹D.W.R. van Hoëvell, "Tegenwoordige Gesteldheid der Moluksche Eilanden", Tijdschrift Voor Nederlandsch Indië. 18^{de} Jaargang, AFL. 1-6, Eerste Deel (Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon, 1856), hlm. 252.

¹¹⁰Inkoop van Specerijen Over het jaar 1822. Bundel Ambon, No. 1101 d.

¹¹¹Inkoop en Kosten van Specerijen Over het jaar 1827. Bundel Ambon, No. 12 .

tahun 1827, pala yang telah disetorkan oleh penduduk sebanyak 820 sampai 710 buah seharga 2736,04 *gulden*.¹¹² Pada tahun 1827 ketika pala masih menjadi tanaman paksa, hasilnya mencapai 3000 pon. Berdasarkan hasil itu tampak bahwa ada kenaikan dalam produksi pala.

Penanaman paksa pala itu berlangsung sampai tahun 1827. Melalui Surat Keputusan Komisaris Jendral Tanggal 13 Agustus 1827 No. 18, Pemerintah menetapkan tanaman pala sebagai tanaman bebas. Keputusan itu segera ditanggapi oleh penduduk dengan menebangi pohon-pohon pala dan menjualnya sebagai kayu bakar. Penduduk melakukan penebangan sebab khawatir Pemerintah Hindia Belanda akan melaksanakan kembali monopoli pala.¹¹³ Keadaan itu tidak berlangsung lama, sebab dengan kemauan sendiri penduduk mulai lagi menanam pala. Tindakan penduduk itu didasarkan pada dugaan bahwa Pemerintah Hindia Belanda tidak akan mengadakan monopoli pala lagi.

Pada tahun 1835, penduduk mampu menghasilkan pala sebanyak 94 pikul. Akan tetapi dua tahun kemudian jumlah pala yang dihasilkan turun menjadi 35 pikul. Penurunan itu disebabkan oleh gempa bumi yang besar pada tahun 1837,

¹¹²Ibid.

¹¹³P. Bleeker, op. cit., hlm. 90-91.

yang menyebabkan banyak pohon pala mati dan rusak. Satu tahun kemudian yakni tahun 1838 produksi pala naik lagi mencapai 337 pikul.¹¹⁴

Pada tahun 1857 sampai tahun 1860 jumlah pohon pala yang ditanam oleh penduduk di *afdeling* Amboina semakin meningkat, karena didorong oleh harga yang terus meningkat. Pada tahun 1857 penduduk telah menanam 18.609 pohon, pada tahun 1858 penduduk menanam 19.730 pohon, pada tahun 1859 penduduk menanam 27.760 pohon, dan pada tahun 1860 penduduk menanam 27.182 pohon pala.¹¹⁵ Dari 27.182 pohon yang ditanam oleh penduduk pada tahun 1860 yang berbuah 6.685 pohon, dan hasilnya sekitar 396 pikul pala dengan harga 30 *gulden* per pikul, dan 27,5 pikul fuli dengan harga 50 *gulden* per pikul.¹¹⁶

Telah disebutkan bahwa harga pala dan fuli semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 1828 sampai tahun 1834, harga 100 pala dengan fuli antara 10 sampai 30 sen, pada tahun 1837 harga naik menjadi 50 sampai 70 sen, dan pada tahun 1838 harga naik lagi menjadi 80 sampai 120 sen. Kemudian harga turun yang disebabkan oleh turun-

¹¹⁴E.W.A. Ludeking, *op. cit.*, hlm. 96 dan 141.

¹¹⁵P. van der Crab, *loc. cit.*

¹¹⁶*Ibid.*

nya kualitas pala, yang sebagian besar karena kesalahan penduduk itu sendiri. Penduduk terlena oleh harga yang tinggi, takut adanya pencurian buah, didorong oleh ambisi untuk mendapatkan uang yang lebih besar, maka buah yang belum masak sudah dipetik. Di samping itu penduduk kurang mampu menyiapkan pengiriman pala dengan baik untuk pengiriman ke tempat yang jauh seperti ke Jawa dan Cina. Akibatnya pala yang dikirim setelah sampai di tempat tujuan sudah rusak. Penyebab yang lain yaitu proses pengeringan pala kurang sempurna karena pala hanya dijemur sebentar kemudian dimasukkan dalam karung.¹¹⁷

4. Hasil bumi yang lain

Pulau Ambon menghasilkan berbagai jenis kayu antara lain, kayu lingoa, kayu akar, kayu abanus, kayu lasi, kayu arang, kayu buku, kayu besi, dan kayu nani.¹¹⁸ Diantara berbagai jenis kayu itu, kayu akar yang dikenal sebagai kayu perabot Ambon merupakan jenis kayu yang indah, kuat, dan cocok untuk dibuat perabotan, sedangkan kayu lingoa merupakan kayu yang harganya paling mahal yaitu antara

¹¹⁷Ibid., hlm. 97.

¹¹⁸G.W.W.C. Baron van Hoëvell, 1875, op. cit., hlm. 198.

100 sampai 120 *gulden* per lembarnya. Kayu jati sedikit dihasilkan sebab tanahnya kurang cocok untuk ditanami kayu jati.¹¹⁹

Sebagian dari kayu-kayu itu digunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk membuat bangunan dan kapal, sebagian diekspor ke Cina terutama Kayu abanus yang berwarna hitam.¹²⁰ Pemerintah Hindia Belanda mendapatkan kayu-kayu itu dengan cara penyerahan wajib terutama untuk bangunan pemerintah, dan sebagian lagi membelinya dari penduduk. Pada tanggal 31 Maret 1826, Pemerintah Hindia Belanda membeli kayu sebanyak 209 potong dengan harga 10 *stuiver* per potong, jadi sekitar 69,20 *gulden*. Pada bulan Mei sampai Desember tahun 1826, Pemerintah Hindia Belanda membeli kayu sebesar 3277,15 *gulden*.¹²¹ Mengenai jumlah kayu yang diekspor dapat dilihat pada bab III.

Penduduk telah mengusahakan tanaman kopi dan tembakau tetapi kurang berhasil sebab tanahnya tidak cocok untuk tanaman itu. Kedua tanaman itu hasilnya sedikit dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi masih tetap

¹¹⁹E.W.A. Ludeking, *op. cit.*, hlm. 107.

¹²⁰D.W.R. van Hoëvell, *op. cit.*, hlm. 257.

¹²¹Inkoop en Kosten van Houten Over het jaar 1827. Bundel Ambon, No. 12

kurang dan harus mendatangkan dari Jawa. Tembakau Jepang dan Havana kurang berhasil ditanam disini, di samping itu juga kurang laku sebab penduduk lebih menyukai tembakau Jawa.¹²²

Di Pulau Ambon terdapat perkebunan minyak kayu putih tetapi tidak seluas perkebunan di Pulau Buru. Hasilnya sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan lokal,¹²³ dan sebagian diekspor bersama dengan minyak kayu putih dari Pulau Buru. Mengenai besarnya ekspor minyak kayu putih dapat dilihat dalam ekspor-impor bab III.

Pada tahun 1829 Pemerintah Hindia Belanda di bawah Gubernur A.A. Ellinghuijzen, membuka perkebunan kayu manis di Batu Gajah dan berhasil dengan baik. Dalam perkembangannya tanaman itu terbengkalai karena penduduk kurang mengenal manfaatnya. Di samping itu para Kepala *Negori* lebih memperhatikan tanaman sagu sebab merupakan bahan pangan pokok *negorinya* daripada kayu manis. Pada tahun 1832, Pemerintah Hindia Belanda mencoba lagi menanam kayu manis di bawah pengawasan Asisten Residen Saparua dan

¹²²Algemeen Verslag van het Moluksche Over het Jaar 1833. Bagian D

¹²³E.W.A. Ludeking, op. cit., hlm. 97 dan 104, dan G.W.W.C. Baron van Hoëvell, 1875, op. cit., hlm. 64.

Hila. Usaha itu cukup berhasil dan hasilnya laku dijual dengan harga 60 sen per setengah pon Belanda.¹²⁴ Sejak itu Pemerintah memberitahukan pada para Kepala *Negori* dan penduduk tentang manfaat tanaman itu.

Sesudah tahun 1833, atas perintah Komisaris Kepala Pertanian, penduduk mulai menanam kayu manis. Empat tahun kemudian dimulai pengupasan kulit menurut pedoman yang kabur. Akibatnya kayu manis yang dihasilkan mutunya sangat rendah, sehingga kurang laku di pasaran. Oleh karena itu pada tahun 1838 atas perintah Direktur Perkebunan, pengulitan dan penanaman dihentikan, dan ternyata pada saat itu tanaman kayu manis sudah tidak lagi berharga.¹²⁵

Beberapa penjelasan tentang hasil bumi pulau Ambon, dan dapat disimpulkan bahwa Pulau Ambon mempunyai potensi alam yang terbatas. Hanya cengkih dan pala yang dapat tumbuh subur dan merupakan barang dagangan yang laku di pasar internasional. Terbatasnya potensi ekonomi menjadi salah satu penyebab mundurnya perdagangan kota Ambon. Bagaimana dengan potensi pulau-pulau di sekitarnya yang menjadi daerah penyangga kota Ambon ?

¹²⁴Algemeen Verslag van het Moluksche Over het Jaar 1833. Bagian D

¹²⁵E.W.A. Ludeking, op. cit., hlm. 97.

B. Potensi Wilayah Karesidenan Ambon.

1. Pulau Buru

Hasil bumi dari Pulau Buru yaitu, minyak kayu putih, damar, gandum jenis hoton, kacang, sagu, berbagai jenis kayu, kota aros, tembakau, katun jenis fernambuk, minyak kelapa, pala dan fuli, serabut tenun, kayu cat, masoi dan kulit lawan.¹²⁶ Di antara hasil bumi itu minyak kayu putih dan sagu merupakan produk ekspor yang paling utama.

Pusat penyulingan minyak kayu putih berada di Kajeli yang merupakan ibukota Pulau Buru. Dari tahun ke tahun hasilnya semakin meningkat yang dapat dilihat dari jumlah minyak kayu putih yang dihasilkan dan jumlah ketel yang digunakan untuk menyuling daun-daun minyak kayu putih menjadi minyak kayu putih. Pada tahun 1817 sampai tahun 1818, daun-daun minyak kayu putih disuling dalam 2 ketel, pada tahun 1819 sampai tahun 1823 daun disuling dalam 3 ketel, pada tahun 1824 sampai tahun 1825 daun disuling dalam 4 ketel, pada tahun 1826 sampai tahun 1829 daun disuling dalam 5 ketel, pada tahun 1830 sampai tahun 1832 daun disuling dalam 6 ketel, pada tahun 1833 daun disuling dalam 7 ketel, pada tahun 1835 daun disuling dalam 8 ketel, pada tahun 1836 daun disuling dalam 11 ketel, pada

¹²⁶Ibid., hlm. 120-121.

tahun 1840 daun disuling dalam 16 ketel, pada tahun 1845 daun disuling dalam 23 ketel, pada tahun 1850 daun disuling dalam 30 ketel, pada tahun 1854 daun disuling dalam 46 ketel dan pada tahun 1855 daun disuling dalam 50 ketel.

Pada tahun 1817 sampai tahun 1818, dari penyulingan itu dihasilkan 800 botol minyak kayu putih. Pada tahun 1854 hasilnya mencapai 7000 botol,¹²⁷ dan sesudah tahun 1855 hasilnya mencapai 10.000 botol dengan harga sekitar 1 sampai $1\frac{3}{4}$ *gulden* per botol. Minyak kayu putih itu dibawa ke Ambon, baru kemudian di bawa ke Makasar dengan menggunakan kapal-kapal Pemerintah yang datang di pelabuhan Ambon.¹²⁸

Pada tahun 1850-an, hasil Pulau Buru yang dibawa ke Ambon meliputi,¹²⁹ 2000 pikul damar murni dengan harga 8 *gulden* per pikul, 1000 pikul damar kotor dengan harga 1,50 *gulden* per pikul, 500 pikul butiran tepung dan gandum sagu dengan harga 8 *gulden* per pikul, 1000 pikul gandum hoton dengan harga 6 *gulden* per pikul, 100 pikul tembakau dengan harga 20 *gulden* per pikul, 1000 pikul kacang dengan harga 6 *gulden* per pikul, 50 botol minyak kelapa dengan harga 20

¹²⁷P. Bleeker, *op. cit.*, hlm. 30.

¹²⁸E.W.A. Ludeking, *op. cit.*, hlm. 104 dan 121.

¹²⁹*Ibid.*, hlm. 120-121.

gulden per botol, dan 200 pikul kentang dengan harga 8 *gulden* per pikul. Pengiriman itu menunjukkan bahwa Pulau Buru mempunyai arti penting bagi kota Ambon yaitu sebagai wilayah penyangga kota terutama dalam hal pangan dan produk barang ekspor.

2. Pulau Seram

Pulau Seram lebih cocok untuk daerah persawahan sebab memiliki dataran rendah yang cukup luas dan sungai yang lebar, sehingga dapat digunakan untuk mengairi sawah. Menurut Engelhard, pada tahun 1827 penduduk Seram telah menanam padi tetapi mutunya rendah. Sementara itu tembakau dan katun yang diusahakan oleh penduduk hasilnya sedikit dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Sagu dan kayu merupakan hasil utama Pulau Seram. Kebun sagu diusahakan oleh Pemerintah Belanda dan penduduk pribumi. Sagu yang dihasilkan sangat banyak, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk di wilayah sekitarnya termasuk Ambon, bahkan ada yang diekspor ke Belanda.¹³⁰ Oleh karena banyaknya sagu maka Pulau Seram disebut

¹³⁰Ibid., hlm. 87.

sebagai gudang sagu.¹³¹ Begitu banyaknya pohon sagu, ketika pada tahun 1833 Pulau Seram dilanda bencana angin kencang, kebun yang ada masih mampu menghasilkan sagu sebanyak 8000 *gulden*.

Dalam perkembangannya sagu yang dibawa ke Ambon dari tahun 1834 sampai tahun 1840 dan dari tahun 1851 sampai tahun 1855 cenderung turun, walaupun pada tahun 1837 ada sedikit kenaikan. Untuk lebih jelasnya ekspor sagu ke Ambon dari tahun 1834 sampai tahun 1854 dapat dilihat pada grafik no. 18.

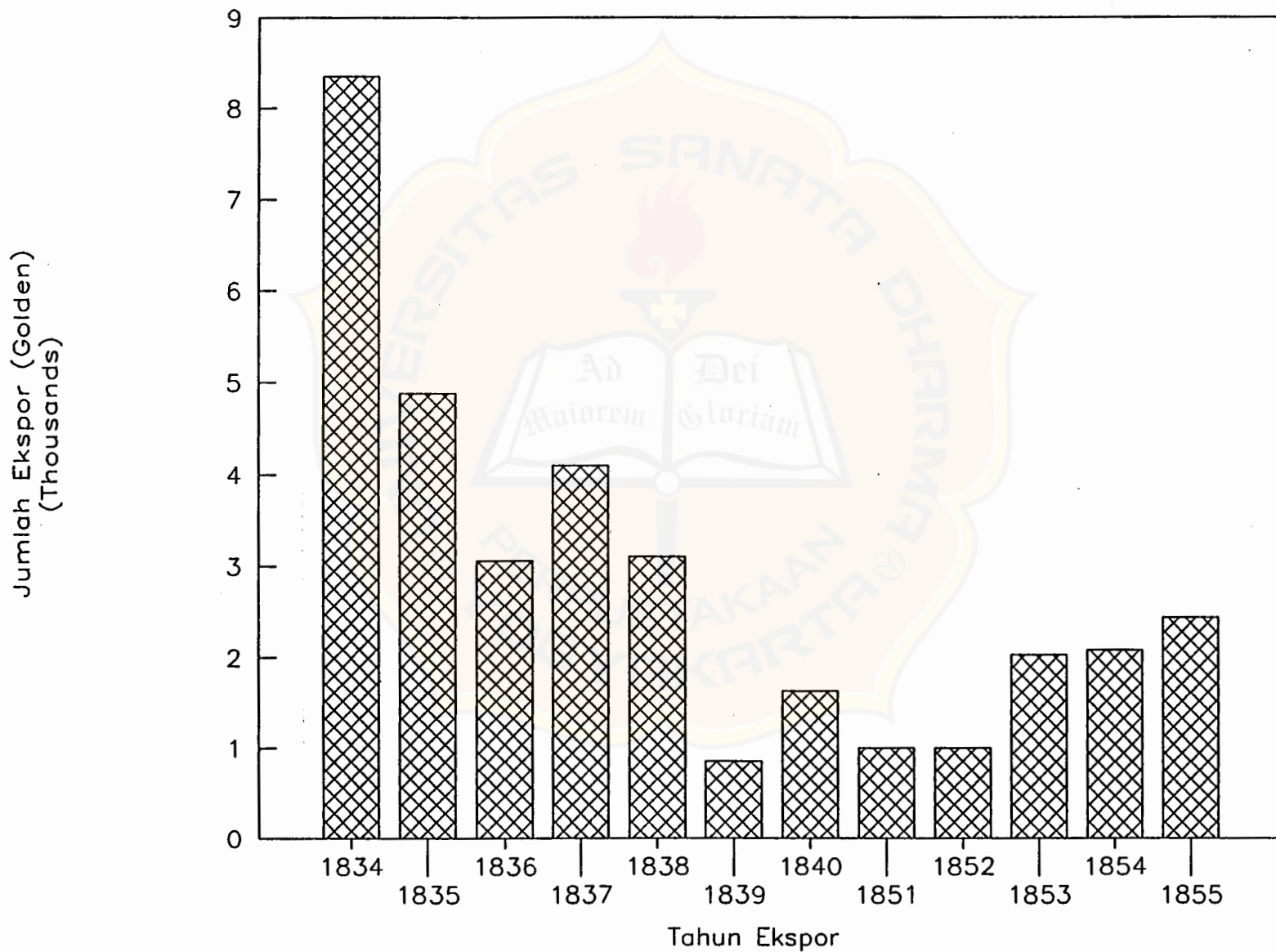
Ekspor sagu turun yang disebabkan oleh bencana alam kekeringan sehingga banyak pohon yang mati, dan berjangkitnya berbagai wabah penyakit yang melanda Pulau Seram. Berbagai wabah penyakit mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja untuk mengolah sagu menjadi tepung. Pada tahun 1837 berjangkit wabah penyakit empedu, kemudian disusul dengan penyakit disentri pada tahun 1841.¹³² Pada tahun 1842 sampai tahun 1843 kondisi kesehatan pada umumnya membaik, tetapi pada pertengahan tahun 1843 muncul penyakit panas. Pada tahun 1852 kondisi kesehatan masyarakat umumnya

¹³¹G.W.W.C. Baron van Hoëvell, 1875, *op. cit.*, hlm. 54-55.

¹³²E.W.A. Ludeking. *op. cit.*, hlm. 141.

Sagu Yang di Ekspor ke Ambon

Dari tahun 1834-1855



Sumber: G.W.W.C. Baron van Hoevell, Ambon en Meer Bepanidelijk de Oelinsers, Geographisch, Ethnographisch, Politisch en Historisch Geshets (Dordrecht: Blusse en van Braam, 1875), hlm. 54-55.

membaik lagi. Akan tetapi dua tahun kemudian berjangkit wabah penyakit malaria dan satu tahun kemudian berjangkit wabah penyakit cacar.¹³³ Pada tahun 1860 kondisi kesehatan masyarakat membaik kembali.

Dari berbagai jenis kayu yang terdapat di Pulau Seram, kayu lingoa merupakan kayu yang paling terkenal. Dengan cara mengeraskan kulitnya kayu lingoa berubah menjadi sejenis kayu akar yang indah, kuat, dan banyak dicari orang.¹³⁴ Sebagian besar kayu-kayu itu dibawa ke Ambon untuk kemudian diekspor ke luar Maluku. Hasil bumi yang lain yakni tembakau jenis Tuluti dan Kamarian, katun, serta coklat yang diusahakan oleh dua perkebunan swasta.¹³⁵ Tanaman coklat yang dihasilkan mutunya lebih rendah bila dibandingkan dengan produk dari daerah lain seperti dari Jawa dan Sumatra, sehingga kurang mampu bersaing di pasaran.¹³⁶

¹³³Ibid., hlm. 141-144.

¹³⁴J.F.G. Brumund, "Aanteekeningen Gehouden op Eene Reis in het Oostelijke Gedeelte van den Indischen Archipel", Tijdschrift Voor Nederlandsch Indië. II. (Zalt-Bommel: Joh Noman en Zoon, 1845), hlm. 54.

¹³⁵G.W.W.C. Baron van Hoëvell, 1868, op. cit., hlm. 137.

¹³⁶G.W.W.C. Baron van Hoëvell, 1875, op. cit., hlm. 64.

3. lease

Cengkih merupakan hasil bumi yang utama dari *Lease*. Jumlah pohon cengkih di *Lease* pada tahun 1826, 1839, dan 1854 dapat dilihat pada grafik no. 19. Dari grafik itu tampak bahwa pada tahun 1839, di Haruku dan Saparua jumlah pohon cengkih yang terletak di dalam kebun menurun bila dibandingkan dengan tahun 1826, sedangkan di Nusalaut jumlahnya meningkat. Penurunan itu disebabkan oleh banyaknya pohon cengkih yang mati, pemilihan tanah yang kurang tepat, dan kekeringan. Di Nusalaut jumlah pohon cengkih cenderung meningkat karena adanya penanaman baru.

Dari tahun 1826 sampai tahun 1839 jumlah pohon cengkih yang berada di luar kebun meningkat dengan tajam, sebab adanya penanaman baru. Akan tetapi pada tahun 1854 jumlah pohon turun, karena bencana alam kekeringan dan berkurangnya tenaga sebagai akibat wabah penyakit yang melanda penduduk, sehingga pohon-pohon tidak terawat dengan baik dan banyak yang mati. Pada tahun 1862, rata-rata di Pulau Haruku dan Saparua terdapat 46.291 pohon cengkih, sedangkan pada tahun 1863 terdapat 38.963 pohon cengkih, diantaranya hanya 461 pohon yang berbuah.

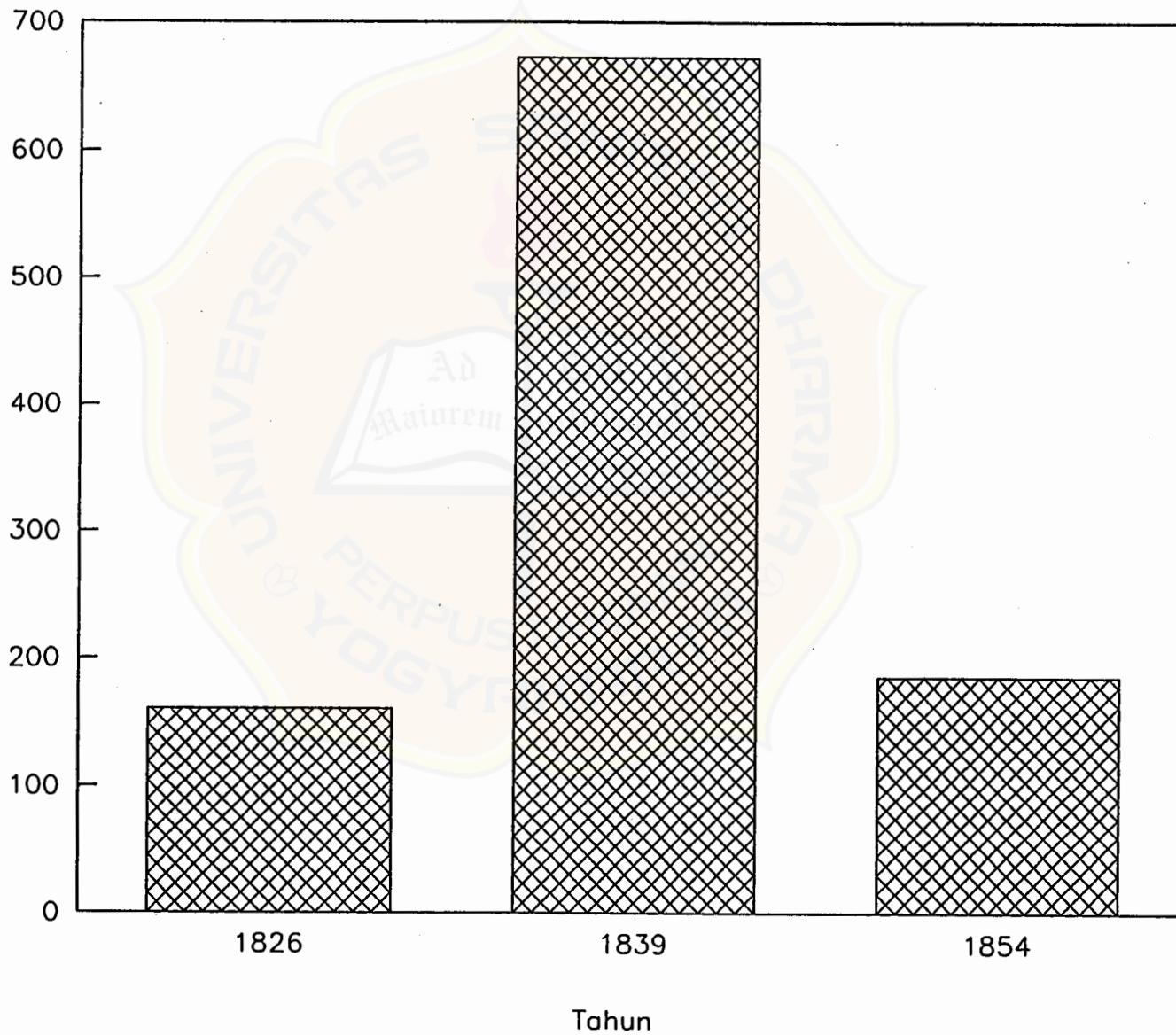
Pada tahun 1826, di Haruku pohon cengkih yang berasal dari dalam kebun menghasilkan cengkih sebanyak 1.411 pon dan yang dari luar kebun sebanyak 84.553 pon. Di Saparua

Grafik No. 19

Jumlah Pohon Cengkih di Lease

Pada Tahun 1826,1839,1854

Jumlah Pohon Cengkih



Sumber: R.Z. Leirisa, dkk., Maluku Tengah di Masa Lampau
 Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas
 (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982),
 hlm. 131-132, P. Bleeker, Reis Door de Minahasa
 en den Molukschen Archipel Gedann in de Maanden
 September en Oktober 1855 in het Gevolg van den
 Gouverneur-General Mr. A.J. Duymner van Twist
 (Batavia: Lange & Co., 1856), hlm. 174, 184 dan
 195, Algemeen Verslag van het Moluksche Over het
 Jaar 1853, bagian D.

pohon cengkih yang berasal dari dalam kebun menghasilkan cengkih sebanyak 1.286 pon dan dari luar kebun sebanyak 150.508 pon. Di Nusalaut pohon cengkih yang berasal dari dalam kebun menghasilkan cengkih sebanyak 1841 pon dan dari luar kebun sebanyak 150.485 pon.¹³⁷

Pada tahun 1854, Nusa Laut menghasilkan cengkih sebanyak 120.183 pon, sedangkan Pulau Haruku menghasilkan cengkih sebanyak 38.803 pon dan Saparua menghasilkan cengkih sebanyak 181.137 pon. Pada tahun 1862, Amboina dan Saparua menghasilkan cengkih sebanyak 48.947 pon, sedangkan Haruku menghasilkan cengkih sebanyak 34.889 pon, Hila dan Larike menghasilkan cengkih sebanyak 1.288 pon.¹³⁸

Berdasarkan peraturan setiap dati diwajibkan merawat 40 pohon tua dan 50 pohon semi dewasa, kecuali di Saparua dan Haruku jumlah pohon yang dirawat sebanyak 35 pohon, sebab terbatasnya lahan dan tenaga kerja. Pada Akhir Desember 1832, Ambon mempunyai 787 dati dengan pohon cengkih sebanyak 31.480 pohon tua dan 39.350 pohon muda. Saparua mempunyai 650 dati dengan pohon cengkih sebanyak 26.000 pohon tua dan 32.500 pohon muda. Haruku mempunyai

¹³⁷Algemeen Verslag van het Moluksche Over het Jaar 1833. Bagian D

¹³⁸R.Z. Leirissa, dkk., 1982, op. cit., hlm. 140-141.

568 dati dengan pohon cengkih sebanyak 22.720 pohon tua dan 24.400 pohon muda. Nusalaut mempunyai 274 dati dengan pohon cengkih sebanyak 10.960 pohon tua dan 12.700 pohon muda.¹³⁹

Pulau Saparua di samping sebagai daerah penghasil cengkih juga penghasil sagu, yang sebagian hasilnya dikirim ke Ambon. Berdasarkan daftar kapal dan perahu yang masuk ke pelabuhan Ambon pada tahun 1834, tampak ada beberapa pengiriman sagu sebagai berikut, pada tanggal 9 Juni perahu dengan nomer pendaftaran 120, yaitu perahu milik Rotoh yang berasal dari Liang dengan tujuan Ambon membawa 100 tumang sagu. Pada tanggal 16 juni perahu dengan nomer pendaftaran 124, yaitu perahu milik Patimuda yang berasal dari Morela dengan tujuan Ambon membawa 100 tumang sagu. Pada tanggal 16 Juni perahu dengan nomor pendaftaran 125, yaitu perahu milik Patiselan yang berasal dari Morela dengan tujuan Ambon membawa 100 tumang sagu. Pada tanggal 30 Juni perahu dengan nomor pendaftaran 145, yaitu perahu milik Baharudin yang berasal dari Hitulama dengan tujuan

¹³⁹ Algemeen Verslag van het Moluksche Over het Jaar 1833. Bagian D.

Ambon membawa 40 tumang sagu.¹⁴⁰

Dari beberapa pulau yang telah dijelaskan itu tampak bahwa pulau-pulau di sekitar Ambon mempunyai potensi ekonomi yang terbatas. Selain cengkih dan kayu hampir tidak ada hasil bumi yang dapat dijual di pasar internasional. Namun demikian pulau-pulau itu mempunyai peran yang penting bagi kehidupan kota Ambon yakni sebagai daerah penyangga kota terutama dalam hal pangan dan produk ekspor. Terbatasnya potensi wilayah penyangga itu mempengaruhi aktivitas pelayaran dan perdagangan di kota Ambon. Kota Ambon tidak lagi menarik para pedagang untuk mengunjunginya sebab hampir tidak ada hasil bumi yang dapat dimuat ke kapalnya, sedangkan cengkih masih dimonopoli oleh Pemerintah.

¹⁴⁰ Surat Asisten Residen Saparua kepada Gubernur Maluku, No. 23, Tanggal 22 Pebruari 1834. Bundel Ambon, no. 1103 A.

BAB V

DAMPAK KEMUNDURAN KOTA PELABUHAN AMBON BAGI
KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PENDUDUK

Sebagian besar masyarakat kota pelabuhan Ambon hidup dari sektor perekonomian di luar pertanian seperti, perdagangan, perikanan, dan industri rumah tangga. Dalam periode tahun 1817 sampai tahun 1865 sektor perdagangan mengalami kemunduran, sedangkan sektor perikanan dan industri rumah tangga kurang mampu untuk berkembang. Mundurnya perdagangan dan kurang berkembangnya sektor-sektor itu menjadi salah satu penyebab dari mundurnya kota Ambon. Apa dampak kemunduran kota bagi kesempatan kerja, pendidikan, perkembangan fisik kota, dan kesehatan masyarakat ?

1. Kesempatan Kerja

Oleh karena sektor-sektor perdagangan, perikanan, dan industri rumah tangga kurang dapat memberikan kehidupan yang lebih baik, maka penduduk Ambon mencari kesempatan kerja di luar sektor itu seperti pada sektor militer. Alasan penduduk memilih pekerjaan itu karena alasan mendapat gaji yang tetap setiap bulannya dan dapat meningkatkan

status sosialnya.

Kesempatan kerja pada bidang militer bagi penduduk terbuka luas, sebab Pemerintah Hindia Belanda memberi kesempatan pada penduduk untuk menjadi tentara. Sejak awal keanggotaan dalam sistem kemiliteran Belanda bersifat heterogen. Hal itu tampak pada keragaman anggotanya yang terdiri dari berbagai suku bangsa Indonesia dan yang terbanyak berasal dari Ambon. Bagi Pemerintah Hindia Belanda wilayah Ambon dalam perkembangannya kurang mempunyai banyak arti, kecuali sebagai tempat cadangan tenaga militer. Hal itu disebabkan oleh mundurnya perdagangan cengkih, letaknya yang jauh dan di luar jalan perniagaan besar, kurang menghasilkan bahan-bahan kebutuhan pokok bagi pasar internasional dan regional, bahkan kurang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan tergantung pada wilayah lain. Oleh karena keterbatasan wilayah itu, maka banyak penduduk Ambon yang memilih tentara sebagai pekerjaannya, sehingga muncul suatu sindiran bahwa orang Ambon sama dengan "serdadu".¹

Pada masa VOC di dalam ketentaraan Belanda senantiasa terdapat pasukan dari Ambon. Masuknya penduduk Ambon

¹A.G. Boes, "Uit het Land Kruidnagelen", Indië, hlm. 23.

menjadi tentara dimulai ketika VOC membutuhkan tentara untuk armada *kora-kora*. Tujuannya untuk mengatasi perdagangan gelap, menjaga monopoli perdagangan cengkih, mengatasi perlawanan lokal, menumpas bajak laut dari Mindano, Halmahera, dan Seram Utara.²

Pada masa Pemerintahan Inggris *hong-tochten* dihapus, tetapi keinginan penduduk menjadi tentara terus bertambah besar. Hal itu disebabkan gaji yang diberikan oleh Pemerintah Inggris relatif besar, mendapat pensiun, mendapat tunjangan, orang Inggris tidak terlalu diskriminatif, dan mendapat seragam yang dipandang mewah sehingga dapat meningkatkan status.³ Untuk masa dinas 4 sampai 5 tahun tentara mendapat tunjangan sebesar 120 sampai 200 *gulden*, sedangkan untuk perpanjangan kontrak selama 2 tahun mendapat 50 *gulden*, 4 tahun mendapat 150 *gulden*, dan 6 tahun mendapat 240 *gulden*. Setelah dinas selama 25 tahun, tentara dapat pulang ke daerah asalnya dan mendapat tunjangan sebesar 200 *gulden*. Tentara yang berpangkat Kopral mendapat 240 *gulden*, sedangkan Sersan mendapat 300 *gulden* per

²R.Z. Leirissa, dkk., Maluku Tengah di Masa Lampau Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982), hlm. 81.

³H.J. de Graaf, De Geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken (T. Wever B.V., -Franeker, 1977), hlm. 215.

tahun.⁴

Pada masa awal pendudukan kembali Belanda, jumlah penduduk yang menjadi tentara lebih sedikit bila dibandingkan pada masa sebelumnya. Hal itu disebabkan kecilnya tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tentara. Untuk masa dinas 1 tahun tentara mendapat bayaran sekitar 15 *gulden*, dan untuk masa dinas 5 tahun tentara mendapat bayaran sekitar 30 *gulden*. Alasan yang lain yakni prestise tentara Belanda dihadapan orang Ambon turun, sebab banyak serdadu Belanda yang berasal dari Jawa ketika sedang jaga tidak memakai seragam secara utuh, tetapi "bertelanjang dada" karena kekurangan kain. Di samping itu ada perasaan takut dari penduduk bila dikirim ke Jawa mengingat kekejaman Daendels.⁵

Pada tahun 1824 Pemerintah Hindia Belanda menghapus *hong-tochten*, tetapi kesempatan penduduk untuk menjadi tentara masih terbuka. Pemerintah Hindia Belanda mengganti *kora-kora* dengan *orembai* yang dilengkapi dengan senjata, rute patroli, jumlah awak kapal, dan waktu patroli.⁶ Dengan demikian penghapusan pelayaran *hong* tidak menutup

⁴A.G. Boes, op. cit., hlm. 23-24.

⁵H.J. De Graaf, op. cit., hlm. 214-215 dan 248.

⁶R.Z. Leirissa, dkk., op. cit., hlm. 82.

atau mengurangi kesempatan penduduk untuk menjadi tentara. Kesempatan penduduk menjadi tentara terbuka ketika Daendels mengadakan reorganisasi ketentaraan, yakni dengan pembentukan pasukan baru diantaranya 2.430 tentara dari orang Eropa, 13.800 tentara dari orang Jawa, Madura, makasar, dan Bugis, serta 1500 tentara dari orang Ambon.

Sampai tahun 1830 pasukan dalam ketentaraan Belanda di Indonesia merupakan bagian dari *het Netherlandse Leger*. Dalam kurun waktu antara tahun 1820 sampai tahun 1830 ada usaha untuk menjadikan tentara Indonesia bagian tersendiri dan tercapai pada tahun 1830. Melalui *besluit* Gubernur Jendral Van den Bosch tanggal 4 Desember 1830, No. 1, Pemerintah Hindia Belanda mengadakan pemisahan, sedangkan keputusan Gubernur Jendral disahkan dengan dikeluarkannya *Koninklijk Besluit* tanggal 10 Maret 1832, No. 93 dan 94. Kemudian berdiri *Koninklijk Nederlands Indisch Leger* atau dikenal dengan singkatan KNIL.⁷ Di Dalam kesatuan itu pasukan Ambon mengambil bagian yang terpenting. Sebagian

⁷I.O. Nanulaita, Timbulnya Militerisme Ambon: Sebagai Suatu Persoalan Politik, Sosial-Ekonomis (Jakarta: Bhratarra, 1966), hlm. 111.

besar pasukan Ambon ditempatkan di luar Ambon,⁸ seperti di Jawa dan Sumatra untuk menghindari perlawanan mereka yang dapat mengancam kedudukannya.

Pasukan dari Ambon dianakemaskan oleh Pemerintah Hindia Belanda karena kualitas berperangnya, keberaniannya, dan disiplin yang tinggi, sehingga dapat membantu Belanda dalam menjalankan politik *divide et impera*.⁹ Sikap Pemerintah Hindia Belanda yang menganakemaskan tentara Ambon itu semakin mendorong penduduk Ambon untuk menjadi tentara.

Perang Diponegoro menjadi penyebab berkurangnya keuangan negara, oleh sebab itu Pemerintah Hindia Belanda melakukan penghematan. Untuk sementara Pemerintah Hindia Belanda tidak menerima penduduk menjadi tentara. Baru pada tahun 1832 Pemerintah memberi kesempatan lagi pada penduduk untuk "*teken soldadu*", dan jumlahnya 130 orang setiap tahunnya. Pada tahun 1825, tentara menerima gaji tetap sebesar 15 *Spaanse Matten*,¹⁰ dan pada tahun 1834 gaji yang

⁸P. Bleeker, Reis Door de Minahasa en den Molukschen Archipel. Gedaan In de Maaden September en Oktober 1855 in het Gevolg van den Gouverneur Generaal Mr. A. A.J. Duymaer van Twist (Batavia, Lange & Co., 1856), hlm. 108.

⁹I.O. Nanulaita, op. cit., hlm. 112.

¹⁰1 *Spaanse Mat* = 2,50 *gulden*. Ibid., hlm. 113.

diterima tentara besarnya setengah dari gaji serdadu Belanda, dan masih diberi kesempatan untuk menjadi opsir dengan upah penuh, dan hak pensiun yang besarnya setengah dari gaji. Bagi tentara yang dinas di Jawa, sesudah 6 bulan dinas secara bergiliran mendapat kesempatan cuti pulang.¹¹ Tujuan Pemerintah memberi gaji dan hak-hak itu untuk mendorong pemuda pribumi menjadi tentara, sebab Pemerintah membutuhkan banyak tentara sehubungan dengan meningkatnya perhatian ke daerah luar Jawa.

Pada tahun 1830 sampai tahun 1838, penduduk yang masuk tentara jumlahnya sekitar 358 orang,¹² dan pada tahun 1840 ada 763 orang. Pada tahun 1846, upah dan premi penerimaan akan disamakan dengan gaji serdadu Belanda. Bagi *gepasporteerden*,¹³ akan diberi *burgerrecht* di *negori* masing-masing. Dalam perkembangannya jumlah penduduk yang menjadi tentara turun, sebab Pemerintah Hindia Belanda memberi batasan bahwa hanya penduduk yang beragama Kristen yang dapat menjadi tentara. Di samping itu berjangkitnya berbagai wabah penyakit yang menyebabkan jumlah penduduk

¹¹Ibid., hlm. 113.

¹²Ibid., hlm. 113.

¹³*Gepasporteerden* yaitu mereka yang diberhentikan dengan hormat dan menerima paspor. Ibid., hlm. 113.

turun, sehingga jumlah penduduk yang masuk tentara juga turun. Pada tahun 1860 sampai 1870 penduduk yang mendaftar menjadi tentara sekitar 350 orang, tahun 1871 ada 91 orang, dan tahun 1872 ada 68 orang.¹⁴

Sejak tahun 1875, orang yang masuk menjadi tentara meningkat sebab pemberian gaji dan tunjangan yang semakin baik. Pemerintah meningkatkan taraf hidup tentara dengan cara memberi uang pensiun pada Sersan Mayor dan Sersan sebesar 300 *gulden*, dengan syarat telah berdinasi selama 25 tahun. Untuk Kopral sebesar 240 *gulden*, dan serdadu sebesar 200 *gulden*. Besarnya uang pensiun itu tidak jelas untuk tiap bulan atau tiap tahun.¹⁵ Janda dan anak-anaknya yang sah diberi pensiun. Selama 6 tahun premi penerimaan sebesar 200 *gulden*, 4 tahun sebesar 150 *gulden*, 2 tahun sebesar 60 *gulden*, dan 1 tahun sebesar 25 *gulden*. "Gepas-porteerden" dapat mengadakan kontrak selama 2 tahun dengan premi sebesar 60 *gulden*. Kepala *Negori* menerima premi per rekrut sebesar 50 *gulden* atas jasanya mendorong penduduk menjadi tentara. Sebagai hasilnya jumlah tentara Ambon meningkat menjadi satu batalion pada tahun 1877.¹⁶

¹⁴Ibid., hlm. 113.

¹⁵Ibid., hlm. 114.

¹⁶Ibid., hlm. 114.

Pada tahun 1892 ditetapkan pembagian batalion-batalion sebagai berikut, batalion kesatu ditempatkan di Surakarta dan Banyubiru, kedua dan keenam ditempatkan di Magelang, ketiga, ditempatkan di Aceh, dan keempat ditempatkan di Jogjakarta dan Willem I Ambarawa. Setiap batalion terdiri dari 2 kompi, berformasi 12 orang Belanda dan 128 serdadu Ambon. Tentara Ambon mendapat upah, pakaian, dan makanan yang besarnya sama dengan upah yang diterima tentara Belanda yakni sebesar 0,33 *gulden* sehari, tiap 6 tahun ada kenaikan sebesar 0,12 *gulden*. Setiap tahun tentara menerima *gratifikasi* sebesar 15 *gulden* dalam masa kontrak kedua selama 6 tahun. Untuk mendapatkan hak pensiun tentara harus berdinis selama 25 tahun, dan yang telah berdinis selama 12 tahun diberi medali perunggu.¹⁷

Untuk menjaga ketenangan dan ketertiban kota, dibentuk kesatuan pertahanan sipil di bawah Asisten Residen yang berpangkat Letnan Kolonel.¹⁸ Golongan *Burger* baik yang tinggal di dalam kota maupun luar kota diwajibkan menjadi anggota Korps Pertahanan Kota atau anggota

¹⁷Ibid., hlm. 114.

¹⁸P. van der Crab, De Moluksche Eilanden Reis van Z.E. den Gouverneur-Generaal Charles Ferdinand Pahud Door den Molukschen Archipel (Batavia: Lange & Co., 1862), hlm. 113.

Schutterij.¹⁹ Semua *Burger* yang menetap di ibukota memiliki seragam militer dan bersenjata.²⁰ Golongan *Burger* yang tinggal di luar kota tetapi tidak mau masuk dinas pertahanan sipil harus membayar apa yang dinamakan bayar *beaurs* sebesar 0,50 *gulden* setiap bulan. Orang Eropa kelahiran Ambon tidak diwajibkan masuk dinas pertahanan sipil, tetapi diwajibkan membayar upeti sesuai dengan tingkat penghasilannya.²¹

Di Ibukota Ambon terdapat 1 batalion tentara untuk pertahanan sipil yang terdiri dari 7 kompi. Pada akhir tahun 1854 pertahanan sipil berkekuatan 32 orang perwira, 1775 bintara dan tantama. Di dalam kompi terdapat dua kelompok yakni kelompok barisan dan kelompok senjata yang terdiri atas 16 perwira, 360 bintara dan tantama. Pada akhir tahun 1855 pertahanan sipil terdiri atas 31 perwira dan 1641 bintara dan tantama, yang berarti ada penurunan

¹⁹R.Z. Leirissa, dkk., "Maluku Tengah Dalam Abad Ke Sembilan Belas: Studi Pendahuluan", *Prisma*, th. IX, No. 8 (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 74.

²⁰Baron van Hoeffell, Ambon en Meer Bepaaldelijk de Oeliasers Geographisch, Ethnographisch, Politisch en Historisch Geschetst (Dordrecht: Blusse en van Braam, 1875), hlm. 17.

²¹P. van der Crab, op. cit., hlm. 74.

karena wabah penyakit. Pada tahun 1860 pertahanan sipil beranggotakan 30 perwira, 1805 bintara dan tamtama. Pertahanan sipil mempunyai 1 korps musik yang semuanya anggotanya orang Ambon.²² Korps musik mempunyai tugas mengisi acara-acara seperti, pemakaman militer, parade, dan konser di istana Batugajah. Korps musik merupakan ciri dari militer Ambon dan dibentuk untuk tujuan membangkitkan semangat militer orang Ambon.²³

2. Pendidikan

Perlu untuk diketahui bahwa data tentang pendidikan di Ambon seperti laporan-laporan mengenai perkembangan mutu dan anak didik sangat sedikit. Oleh karena itu sulit untuk menjelaskan perkembangan pendidikan di kota Ambon. Namun demikian dari data yang berhasil dikumpulkan dapat diketahui bahwa Pemerintah Hindia Belanda memberi kesempatan pada penduduk untuk mendapatkan pendidikan.

Sejak masa VOC sampai Pemerintahan Hindia Belanda sistem pendidikan bersifat diskriminatif, dalam pengertian ada pembatasan dalam penerimaan murid dan pembedaan kelas menurut status dan agama penduduk. Pemerintah Hindia

²²P. Bleeker, op. cit., hlm. 108.

²³H.J. De Graaf, op. cit., hlm. 246.

Belanda memberi batasan bahwa hanya penduduk yang beragama Kristen yang diperbolehkan masuk sekolah.

Pada tahun 1627 di Ambon telah berdiri 16 sekolah dan pulau di sekitarnya 18 sekolah, dengan jumlah murid seluruhnya sekitar 1300 orang.²⁴ Dalam perkembangannya yakni pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, di *negori-negori* Ambon dan sekitarnya terdapat 68 sekolah dengan 72 guru dan 7581 anak wajib sekolah.²⁵ Berarti ada peningkatan dan kesungguhan Pemerintah Hindia Belanda dalam memberikan kesempatan pada penduduk untuk mendapatkan pendidikan. Di ibukota didirikan dua sekolah dasar untuk murid pribumi. Salah satu sekolah dasar mempunyai murid sebanyak 59 murid dan berada di bawah pengelolaan guru tingkat 2 A Cupaerus, sedangkan sekolah dasar yang satunya mempunyai murid sebanyak 136 murid dan dikelola oleh guru tingkat 3 L.E. Boijer yang dibantu oleh wakil kepala H.W. Benz.²⁶

Di samping itu ada sekolah pendidikan calon guru yang didirikan untuk penduduk pribumi. Pada awalnya lembaga itu

²⁴I. Djumhur dan H. Danasuparta, Sejarah Pendidikan (Bandung: C.V. Ilmu Bandung, tanpa tahun), hlm. 116.

²⁵Koloniaal Verslag Over het Jaar 1855. Hlm. 64.

²⁶P. van der Crab, op. cit., hlm. 119.

dibiayai oleh *Rotterdamsche zendelingen en Genootschap*,²⁷ yang dipimpin oleh pendeta B.N.J. Roskott yang berkarya di Ambon sejak tahun 1810 sampai tahun 1877. Pada tahun 1834, pendeta B.N.J. Roskott membuka sekolah pendidikan bagi penduduk Ambon yang berumur 30 tahun, dan telah berhasil meluluskan puluhan guru. Sekolah itu diadakan di rumah pendeta B.N.J. Roskott yang terletak di dekat Batumerah. Masa pendidikan tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.²⁸ Pelajaran utama yang diberikan meliputi, sejarah injil, pelajaran agama, berhitung, menulis, geografi, dan menyanyi. Di luar jam pelajaran siswa mendapat aktivitas berkebun dan pertukangan kayu, dengan alasan supaya para siswa tidak terpisah dari masyarakatnya.²⁹

Pada tahun 1855 sekolah pendidikan calon guru Roskott mempunyai 190 murid. Dari jumlah itu yang diangkat menjadi guru sekitar 82 orang, 61 orang diantaranya ditempatkan di Karesidenan Amboina, 15 orang ditempatkan di Karesidenan Banda, 6 orang ditempatkan di Kepulauan Barat Daya, 1 orang ditempatkan di Karesidenan Ternate, 3 orang ditempatkan di Karesidenan Menado, dan 2 orang ditempatkan di

²⁷R.Z. Leirissa, dkk., 1982, op. cit., hlm. 227.

²⁸P. Bleeker, op. cit., hlm. 109.

²⁹H.J. de Graaf, op. cit., hlm. 259.

Timor Kupang.³⁰ Dari jumlah murid calon guru dan jumlah kelulusannya menunjukkan bahwa profesi guru cukup diminati oleh penduduk.

Dalam pertengahan abad ke-19 sistem pendidikan mengalami perubahan baik itu dalam kurikulum maupun organisasinya. Sebelumnya sistem pendidikan tidak terpisah dari pendidikan agama sehingga sifatnya agak eksklusif. Selain pelajaran agama Kristen diberikan pelajaran menulis, membaca, berhitung, dan menyanyi, sedangkan bahasa pengantarnya yakni bahasa Belanda. Materi pelajaran itu dipandang sudah mencukupi untuk menjadi seorang guru. Pertumbuhan liberalisme memberi pengaruh pada perkembangan pendidikan, yang tampak pada pemisahan gereja dan negara di bidang pendidikan. Pengajaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah bersifat netral, artinya tidak didasarkan pada aliran agama tertentu. Oleh karena itu pelajaran agama tidak diberikan, dengan demikian kurikulum menjadi sangat sekuler.³¹

Perubahan-perubahan itu dimulai di sekolah guru. Pada masa sebelumnya sekolah dipegang oleh badan *Zending* yang

³⁰P. Bleeker, op. cit., hlm. 110.

³¹Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium. Jilid I (PT. Gramedia, 1987), hlm. 353.

juga menjabat ketua *Sub-Commissie Onderwijs*, kini dipegang oleh Pemerintah Hindia Belanda. Di samping itu Panitia pengajaran juga merubah namanya menjadi *Sub-Commissie Inlandsch Onderwijs*. Sejak itu muncul sekolah-sekolah Belanda.³²

Perdebatan antara lembaga *zending* dengan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1854, menghasilkan keputusan bahwa lembaga *zending* akan menyerahkan 6 pendeta yang digaji oleh Pemerintah, tetapi tetap bertugas dalam yayasan. Jadi seperti sebelumnya yakni sebagai pengawas masyarakat Kristen dan guru. Pendeta tidak lagi mempunyai wewenang atas sekolah sebab wewenangnya diambil oleh Pemerintah. Setelah 10 tahun percobaan lembaga itu tidak mau meneruskan keputusan itu dan tetap mempertahankan lembaga guru *zending*,³³ sebab pengajaran yang dikelola oleh Pemerintah kurang bermutu.

Pada tahun 1869 di ibukota Ambon didirikan *Ambonse Burgerschool*, khusus bagi murid-murid golongan *Burger*. Pelajaran yang diberikan yaitu bahasa Belanda dan pelajaran-pelajaran yang lain di bawah pimpinan seorang guru

³²R.Z. Leirissa, dkk., 1982, *op. cit.*, hlm. 217.

³³H.J. De Graaf, *op. cit.*, hlm. 255-256.

Belanda dan dibantu oleh beberapa guru bantu Ambon.³⁴ Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa guru pribumi mendapat tempat dan dilibatkan dalam proses pengajaran, walaupun secara umumnya pendidikan dikuasai oleh sebagian besar guru Belanda.

Dalam proses belajar itu ada beberapa faktor yang menjadi penghambatnya yakni digunakannya bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, sehingga menyulitkan proses belajar. Di samping itu kemampuan pengajar masih relatif rendah dan ketidakhadiran para murid yang tinggi menyebabkan mutu pendidikan rendah.³⁵ Para murid banyak yang tidak hadir karena waktunya tersita di kebun cengkih, serta wabah penyakit yang melanda penduduk.

Pemerintah Hindia Belanda ikut campur tangan dalam proses belajar mengajar. Supaya pendidikan dapat berjalan dengan lancar, maka Pemerintah memberi tugas pada Kepala *Negeri* atau *Regent* untuk mengawasi sekolah *negeri*, supaya sebanyak mungkin penduduk pribumi dapat membaca dan menulis, dan supaya para orang tua secara terus menerus mengirimkan anak-anaknya ke sekolah. Selain itu *Regent* juga harus mengawasi agar kas sekolah untuk pembelian alat-alat

³⁴Ibid., hlm. 253.

³⁵Sartono Kartodirdjo, op. cit., hlm. 359.

pendidikan tetap terjamin.³⁶

3. Perkembangan Fisik Kota

Kemunduran kota pelabuhan Ambon tidak banyak berpengaruh pada perkembangan fisik kota baik itu dilihat dari sudut perluasan kota maupun penambahan bangunan. Struktur kota pelabuhan Ambon tidak banyak berbeda dari struktur kota pada masa VOC.³⁷ Perbedaannya terletak pada pemeliharaan kota baik pemeliharaan lingkuannya maupun pemeliharaan bangunan-bangunannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan fisik kota pelabuhan Ambon tidak banyak berubah pada masa Pemerintahan Hindia Belanda.

Pertama, karena kondisi geografi kota Ambon. Wilayah kota pelabuhan Ambon berbentuk segitiga, dengan luas daratan yang relatif sempit yaitu 4789 mil persegi. Kota Ambon terletak di dataran rendah dengan posisi tanahnya agak miring ke arah pantai. Di sebelah barat kota dibatasi

³⁶R.Z. Leirissa, dkk., 1982, op. cit., hlm. 219.

³⁷Mengenai struktur kota pelabuhan bandingkan peta yang dibuat oleh Francois Valentijn, Oude en Nieuw Oost-Indien. Jilid II (Dordrecht: Joannes van Braam, tanpa tahun) dan peta yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1925 yang terdapat dalam koleksi kartografi Arsip Nasional Republik Indonesia N0. 2828.

oleh Teluk Ambon, sebelah utara dan timur dibatasi oleh Bukit Soya, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Sungai Gajah.³⁸ Dengan terbatasnya wilayah daratan maka pemekaran kota sulit terjadi, demikian pula dengan penambahan bangunan. Apalagi sejak jaman VOC kota Ambon telah penuh dengan bangunan baik bangunan sipil maupun militer. Perluasan kota ke arah daerah di belakang bukit tidak terjadi, karena bukit Soya diutamakan untuk perkebunan cengkih dan tanaman yang lainnya.

Kedua, kemampuan keuangan Pemerintah Hindia Belanda untuk memperluas kota, menambah bangunan baru, dan memelihara kota sangat terbatas, sebagai akibat mundurnya perdagangan cengkih. Suatu tinjauan khusus tentang bangunan umum baik sipil maupun militer terutama bangunan benteng, memperlihatkan bahwa VOC mempunyai perhatian yang besar pada bangunan militer, sebagai upaya untuk menegakkan kekuasaannya. Hal itu memberi petunjuk bahwa VOC mempunyai kemampuan keuangan, sebab tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk memelihara bangunan. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda terjadi pengabaian pada beberapa bangunan

³⁸Batas-batas kota pelabuhan Ambon berdasarkan pada peta yang dibuat oleh Francois Valentijn, loc. cit.

terutama bangunan militer karena politik penghematan. Laporan khusus mengenai rencana pembongkaran bangunan dan penghematan menunjukkan bahwa kondisi bangunan sipil dan militer sangat menyedihkan dan pada umumnya dalam kondisi buruk.³⁹ Ketiga, turunnya jumlah penduduk, dan mundurnya perekonomian penduduk karena perdagangan turun, serta sektor-sektor perekonomian yang lain seperti perikanan dan industri rumah tangga kurang dapat berkembang, menyebabkan pemeliharaan lingkungan kota oleh penduduk kurang dapat berjalan dengan lancar.

Struktur kota Ambon yang tidak banyak mengalami perubahan sejak masa VOC dapat dilihat dari beberapa jalan, bangunan-bangunan umum, dan pemukiman penduduk. *De Heeren-Straat* memanjang lurus dari Benteng Victoria sampai istana Batugajah atau *Versailles van Ambon* Tampaknya jalan itu dibangun seiring dengan pembangunan istana Batugajah yang merupakan tempat kediaman Gubernur, dan sekaligus sebagai tempat untuk mengatur pemerintahan dan pertemuan-pertemuan penting lainnya.

Di tepi sepanjang jalan itu terdapat bangunan-bangu-

³⁹D.W.R. van Hoëvell, "Tegenwoordige Gestelheid der Moluksche Eilanden", Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. 18^{de} Jaargang, AFL. 1-6, Eerste Deel (Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon, 1856), hlm. 264.

nan seperti, *De Hollandsche Kerk*, *De Oude Wooning van de Gouverneur*, *De Pagar Noodwijk*, *De Oude Gouvern^S Thuyn*, dan pemukiman orang Eropa yang tidak hanya di sepanjang *de Heeren-Straat*, tetapi juga di sebelah barat daya benteng yakni di sepanjang tepi *De Conings-Straat*, *De Prince-Straat*, dan *De Groene Geuse-Straat*.⁴⁰ Di sekitar pemukiman orang Belanda terletak beberapa bangunan penting seperti, *Het Stadhuys*, dan *Compagnies Winkel*, *Het Armen-Weeshuys*.⁴¹

Pemukiman orang Cina berada di sebelah selatan benteng terletak antara pemukiman orang Eropa dan pantai. Antara pemukiman Eropa dengan Cina, terdapat *De Chi-neesche-Straat*, yang memisahkan kedua pemukiman itu. Di sekitar pemukiman orang Cina terdapat *De Maleytse Kerk*, *De Inlandsche Borger Wacht*, *De Nederlandsche Borger Wacht*, sedangkan di sebelah barat pemukiman orang Cina, di tepi pantai terletak *De Pasar of Markt*. Bangunan-bangunan lain yang berada di kota Ambon yakni *Het Sieken-Huys*, *'S Comp^S Paarden-stal*, dan *De Steenbakery*.⁴²

Pemukiman warga Ambon, meliputi beberapa kampung yang terpisah dari bagian inti kota, dan membatasi pemukiman

⁴⁰ Francois Valentijn, loc. cit.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

orang Eropa dan Cina. Sebelah timur laut dari benteng sampai Sungai Wayallat terletak *Negori Soya*, Halong, dan *Mardika*, sedangkan *Negori Hative* terletak di sebelah utara Sungai Wayallat. *Negori Latoehalat* terletak di sebelah tenggara pemukiman Cina dan sebelah selatan pemukiman orang Eropa. Sebelah timur *Negori Latoehalat* terletak *negori Noessanivel*, *Oerimessing*. Antara pemukiman orang Cina dengan *Latoehalat* dipisahkan oleh *De Chinesche-Straat*, sedangkan antara pemukiman orang Eropa dengan *Latoehalat*, *Noessanivel*, dan *Oerimessing* dibatasi oleh jalan *Oerimessing*.⁴³

Berdasarkan peta kota Ambon yang dibuat oleh Francois Valentijn menunjukkan bahwa pemukiman orang Timur asing lainnya seperti Jawa, Makasar, dan Bugis tidak ada. Hal itu disebabkan jumlah mereka yang sedikit sebagai akibat kebijaksanaan VOC yang membatasi para pedagang itu untuk berdagang di Ambon. Melalui Perjanjian Bongaya tahun 1667, VOC membatasi aktivitas pelayaran orang Makasar dan Bugis.

4. Kesehatan Masyarakat

Selama masa Pemerintahan Hindia Belanda di kota Ambon khususnya dan Karesidenan Amboina pada umumnya berjangkit

⁴³Ibid.

berbagai wabah penyakit seperti, pes, cacar, kolera, empedu, beri-beri, dan demam yang mengakibatkan banyak penduduk meninggal. Khususnya di daerah ibukota terdapat penyakit sipilis sebagai akibat dari adanya tempat-tempat hiburan.⁴⁴ Dapat dikatakan bahwa tingkat kematian penduduk lebih tinggi daripada tingkat kelahiran.⁴⁵

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat rendah. Pertama, lingkungan kota Ambon yang tidak sehat, yang disebabkan oleh tidak berfungsinya saluran air dan banyaknya rawa. Bahkan sebelum tahun 1837 kota Ambon tidak mempunyai saluran air, sehingga sumber penyakit malaria jauh lebih besar.⁴⁶ Di samping itu rapatnya bangunan kota terutama perkampungan warga dan penduduk pribumi, banyaknya timbunan sampah, serta rapatnya penanaman sagu menyebabkan udara menjadi tidak segar.⁴⁷ Demikian

⁴⁴O. Mohnike, "Amboina", Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Nieuwe Serie. Deel I (Batavia: Lange & Co., 1859), hlm. 645-647.

⁴⁵E.W.A. Ludeking, Schets van de Residentie Amboina ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1868), hlm. 139-157, dan P. Bleeker, Reis door de Minahasa en den Molukschen Archipel Gedaan in de Maanden September en Oktober 1855 in het Gevolg van den Gouverneur Generaal Mr. A. J. Duymaer van Twist (Batavia: Lange & Co., 1856), hlm. 104.

⁴⁶E.W.A. Ludeking, op. cit., hlm. 147-148.

⁴⁷P. Bleeker, op. cit., hlm. 102.

pula di daerah pantai banyak timbunan sampah dan kotoran hewan.⁴⁸

Kedua, turunnya tingkat perekonomian penduduk sebagai akibat mundurnya perdagangan dan sektor perekonomian yang lain kurang berkembang. Hal itu menyebabkan kualitas kehidupan juga turun. Penduduk mengkonsumsi makanan yang kurang menyehatkan sehingga daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit rendah.

Pemerintah Hindia Belanda tidak mempunyai banyak uang untuk memelihara kota. Akibatnya kota menjadi kotor dan menjadi sumber penyakit. Di samping itu Pemerintah Hindia Belanda kekurangan tenaga medis dan kurang mampu menyediakan dana kesehatan untuk melengkapi fasilitas rumah sakit dan pengadaan obat-obatan untuk masyarakat.

⁴⁸Ibid., hlm. 148.

BAB VI

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1817 sampai tahun 1865 kota pelabuhan Ambon mengalami kemunduran. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran yaitu faktor dari dalam dan dari luar kota pelabuhan Ambon. Faktor dari dalam, pertama, dominasi politik dan ekonomi Pemerintah Hindia Belanda yang tampak pada kebijakan monopoli perdagangan cengkih, monopoli barang-barang ekspor dan pengangkutannya, penutupan pelabuhan Ambon sebagai pelabuhan bebas sehingga mempengaruhi aktivitas pelayaran niaga di pelabuhan Ambon, larangan dan pembatasan terhadap perdagangan asing. Kedua, turunnya jumlah penduduk sebagai akibat kondisi kesehatan masyarakat yang buruk karena lingkungan kota Ambon kotor, tidak berfungsinya saluran air, padatnya bangunan kota, dan padatnya pemukiman penduduk. Secara umum kondisi penduduk di Karesidenan Amboina buruk, dan hal itu mempengaruhi produksi cengkih yang merupakan produk ekspor utama dari kota Ambon. Ketiga, kurang adanya kebebasan dalam berdagang dan berusaha bagi penduduk, sebagai akibat dominasi ekonomi oleh Pemerintah Hindia Belanda. Perdagangan ekspor beserta

pengangkutannya dimonopoli oleh Pemerintah Hindia Belanda, sedangkan perdagangan impor dikuasai oleh pedagang Cina, Arab, dan *Burger*. Keempat, kondisi alam pelabuhan Ambon kurang dapat mendukung aktivitas pelayaran niaga dan perdagangan di kota pelabuhan Ambon.

Faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi kemunduran kota pelabuhan, pertama, potensi Pulau Ambon dan pulau-pulau di sekitarnya terbatas. Selain cengkih, pala, fuli, coklat, minyak kayu putih, dan kayu, hanya ada sedikit barang komoditi yang dapat diekspor untuk pasar internasional dan regional. Potensi wilayah luar kota Ambon yang terbatas menyebabkan aktivitas di pelabuhan Ambon juga terbatas, sebab barang-barang yang keluar masuk pelabuhan Ambon berasal dari wilayah luar kota Ambon. Kedua, perkembangan pelabuhan bebas Singapura telah menyebabkan perdagangan di kota pelabuhan Ambon kurang dapat berkembang. Pedagang-pedagang Bugis dan Makasar lebih berorientasi pada perdagangan di Singapura yang menyediakan barang-barang dengan harga yang lebih murah dan bebas dari cukai pelabuhan. Memang terjadi peningkatan pelayaran pribumi di pelabuhan Ambon terutama dari orang Bugis dan Makasar. Akan tetapi pedagang Bugis dan Makasar sebagian besar hanya melakukan aktivitas membongkar barang yang dibawanya. Seringkali perahu pedagang Bugis dan Makasar mening-

galkan pelabuhan Ambon dengan membawa barang-barang dari Ambon yang jumlahnya tidak banyak. Ketiga, kondisi iklim dan perairan sekitar Ambon menyebabkan pelayaran ke pelabuhan Ambon relatif mahal dan beresiko tinggi. Di sekitar Pulau Ambon terdapat banyak selat yang menyebabkan arus laut sangat kuat, sehingga menyulitkan pelayaran terutama pelayaran yang menggunakan perahu pribumi yang relatif kecil. Di samping itu pada musim barat seringkali terjadi badai laut yang sangat membahayakan pelayaran. Oleh sebab itu diperlukan pengetahuan kelautan yang cukup baik untuk dapat berlayar ke Ambon. Kondisi alam seperti itu ditambah dengan terbatasnya potensi Ambon menyebabkan pelayaran niaga ke Ambon kurang menarik. Keempat, pasaran internasional telah dipenuhi oleh cengkih dari berbagai wilayah, sehingga permintaan dan harga menjadi turun. Akibatnya perdagangan cengkih mundur dan hal itu mempengaruhi perdagangan kota secara keseluruhan. Tampak ada hubungan yang saling berkaitan antara faktor-faktor itu yang mempengaruhi kemunduran kota pelabuhan Ambon.

Kemunduran kota pelabuhan Ambon disebabkan pula oleh menurunnya aktivitas di pelabuhan Ambon. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelabuhan Ambon mundur, pertama, faktor fungsi ekonomi dari pelabuhan itu sendiri. Terbatasnya hasil bumi Pulau Ambon dan sekitarnya, telah menye-

babkan pelabuhan Ambon kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan *enterport* atau sebagai pelabuhan penimbun barang hasil bumi. Pelabuhan Ambon kemudian berkembang menjadi pelabuhan pribumi yang fungsinya melayani pelayaran lokal. Dikatakan sebagai pelabuhan pribumi karena perahu-perahu yang datang berlabuh di pelabuhan Ambon sebagian besar perahu pribumi dan milik orang pribumi. Kedua, faktor alam yakni pantai yang dangkal dan beberapa muara sungai yang ada relatif kecil dan dangkal, menyebabkan kapal tidak dapat merapat ke pantai. Hanya kapal dan perahu yang relatif kecil yang dapat merapat ke pantai, sedangkan kapal-kapal yang relatif besar hanya dapat membuang sauh di luar pantai. Kondisi alam seperti itu menyebabkan pelabuhan Ambon tidak dapat berkembang sebagai pelabuhan regional ataupun internasional.

Bagi penduduk kota pelabuhan Ambon kemunduran kota pelabuhan berarti kemunduran kesejahteraan hidupnya, sebab sebagian besar penduduk hidup dari sektor perekonomian non-pertanian. Kemunduran kota menyebabkan aktivitas perdagangan juga mundur, demikian pula dengan sektor-sektor yang lain seperti perikanan dan industri rumah tangga. Oleh karena sektor-sektor itu kurang dapat memberikan harapan bagi kehidupan yang lebih baik, maka pekerjaan sebagai tentara menjadi pilihan sebagian penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Algemeen Verslag van het Moluksche Over het Jaar 1833.
Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten
van de Gouverneur der Moluksche Eilanden.
Zaturdag den 20^e Junij 1818, No. 498.
Bundel Ambon. Koleksi Arsip Nasional
Republik Indonesia.

Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten
van President en Raden van Finantien van
Nederlands Indië. Maandag, den 26 Januarij 1818,
No. 45. Bundel Ambon Koleksi Arsip
Nasional Republik Indonesia.

Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten
van President en Raden van Finantien van
Nederlands Indië. Vrijdag, den 23 Oktober 1818,
No. 45. Bundel Ambon Ger. No. 1856.
Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten
van President en Raden van Finantien van
Nederlands Indië. Vrijdag, den 8 Meij 1818,
No. 27. Bundel Ambon Ger. No. 1095.
Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten
van President en Raden van Finantien van
Nederlands Indië, Maandag, den 25 Februarij
1818, No, 57. Bundel Ambon No. 688. Koleksi
Arsip Nasional Republik Indonesia.

Inkoop en Kosten van Houten Over het Jaar 1827
Bundel Ambon No. 12. Koleksi Arsip
Nasional Republik Indonesia.

Inkoop en Kosten van Lijnwaden Over het Jaar 1827
Bundel Ambon No. 12. Koleksi Arsip
Nasional Republik Indonesia.

Inkoop van Specerijen Over het Jaar 1822

Bundel Ambon No. 1101 d. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Inkoop en Kosten van Specerijen Over het Jaar 1827

Bundel Ambon No. 12. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Surat Gubernur Maluku kepada Direktur Departement van Oorlog, bulan April 1825. Bundel Ambon, no. 472. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Surat Asisten Residen Saparua kepada Gubernur Maluku, tanggal 22 Februari 1834, no. 23. Bundel Ambon, no. 1103 A. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Surat Gubernur Maluku kepada Komisariss Jendral, tanggal 10 Juni 1817, no. 4. Bundel Ambon, no. 472. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Surat Gubernur Ambon pada Direktur Keuangan, tanggal 10 Agustus 1824, no. 66. Bundel Ambon, no. 477. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Publikasi Resmi Pemerintah

Koloniaal Verslag Over het Jaar 1849. Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Koloniaal Verslag Over het Jaar 1855. Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Koloniaal Verslag Over het Jaar 1858-1859. Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Staatsblad van Nederlandsch Indië Over het Jaar 1824, No. 19 a.

Kartografi No. 2828. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia

Buku

AAK, Petunjuk Bercocok Tanam Cengkih. Yogyakarta: Kani-sius, 1991.

- Andaya, Leonard Y., The World of Maluku Eastern Indonesia in the Early Modern Period. Honolulu: University of Hawaii Press, 1993.
- Baker, Sir Ernest, ed., Social Contract. London: Oxford University Press, 1958
- Bleeker, P., Reis door de Minahasa en den Molukschen Archipel Gedaan in de Maanden September en Oktober 1855 in het Gevolg van den Gouverneur-Generaal Mr. A.J. Duymaer van Twist. Batavia: Lange & Co., 1856.
- Braudel, Fernand, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II. Volume I. New York: Harper & Row, 1972.
- Broeze, Frank, ed., Brides of the Sea Port Cities of Asia from the 16th-20th Centuries. Kensington NSW Australia: New South Wales University Press, 1989.
- Crab, P., van der, De Moluksche Eilanden Reis van Z.E. den Gouverneur-Generaal Charles Ferdinand Pahud door den Molukschen. Batavia: Lange & Co., 1862.
- Edi Sedyawati, dkk., Tuban Kota Pelabuhan di Jalan Sutera. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1992.
- Ensiklopedi Indonesia. No. 1 dan 4. Jakarta: P.T. Ichtiar Baru-van Hoeve, 1989.
- Franz Magnis Suseno, Etika Politik. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Furnivall, J.S., Netherlands India A Study of Plural Economy. Cambridge: At the University Press, 1939.
- Gilbert, Felix and Graubard, Stephen R., ed., Historical Study Today. New York: W.W. Norton and Company Inc., 1972.
- Graaf, H.J., de, De Geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken. T.Weaver B.V.-Franeker: 1977.

Guillot, Claude, The Sultanate of Banten. Jakarta: Gramedia Book Publishing Division, 1990.

Hall, D.G.E., Sejarah Asia Tenggara. Surabaya: Usaha Nasional, 1988.

Hanna, Willard A., Hikayat Jakarta. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.

-----, Kepulauan Banda Kolonialisme dan Akibatnya di Kepulauan Pala. Jakarta: Gramedia, 1983.

Hoëvell, G.W.W.C., Baron van, Ambon en Meer Bepaalde-lijk de Oeliasers, Geographisch, Ethnographisch, Politisch, en Historisch Geschets. Dordrecht: Blusse en van Braam, 1875.

I. Djumhur dan H. Danasuparta, Sejarah Pendidikan. Bandung: C.V. Ilmu Bandung.

Katoppo, E., Nuku Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

Keuning, J., Sejarah Ambon Sampai Pada Akhir Abad ke-17. Jakarta: Bhratara, 1973.

Khaldun, Ibn, The Muqaddimah: an Introduction to History. Translated from the Arabic by Rosenthal, Franz, edited and abridged by N.J. Dawood. New York: 1970.

Kol, H. van, Uit Onze Koloniën Uitvoerig Reisverhaal. Leiden: A.W. Sijthoff, 1903.

Leirissa, R.Z., Manusama, Z.J., Lopian, A.B., Paramita R. Abdurrachman, Maluku Tengah di Masa Lampau Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1982.

Leur, J.C. van, Indonesian Trade and Society Essays in Asian Social and Economic History. Bandung: Sumur Bandung, 1960.

Ludeking, E.W.A., Schets van de Residentie Amboina. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1868.

Nanulaita, I.O., Timbulnya Militerisme Ambon Sebagai Suatu Persoalan Politik, Sosial-ekonomis. Jakarta: Bhratara, 1966.

Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

Roelofs, M.A.P., Meilink, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and About 1630. Netherlands: The Haque Martinus Nijhoff, 1962.

Sartono Kartodirdjo, penyunting, Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial. Jakarta: LP3ES, 1986.

-----, ed., Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.

-----, ed., Papers of the Fourth Indonesia-Dutch History Conference Yogyakarta 24-29 July 1983, Agrarian History. Volume one. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.

-----, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif. Jakarta: Gramedia, 1982.

-----, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium. Jilid I. Jakarta: PT. Gramedia, 1987.

-----, Pengantar Sejarah Indonesia Baru; Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. Jilid II. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.

-----, Mawarti Djoned Poeponegoro, Nugroho Noto-susanto, Sejarah Nasional Indonesia. Jilid V. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.

Scott, James C., Moral Ekonomi Petani Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES, 1994.

Sobel, Robert, Basic Facts to Improve Your Grades in United States History. New York: Collier Books, 1963.

Taufik Abdullah, Sejarah Lokal di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979.

Valentijn, Francois, Oude en Nieuwe Oost-Indien. Jilid II.
Dordrecht: Joannes van Braam..

Wiwoho Soedjono, Sarana-Sarana Penunjang Pengangkutan Laut, Aid to Navigation. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Disertasi dan Tesis

Poelinggomang, Edward Lamberthus, Proteksi dan Perdagangan Bebas: Kajian Tentang Perdagangan Makasar Pada Abad ke-19. Amsterdam, Vrij Universiteit, 1991. Disertasi tidak diterbitkan.

Sutjipto Tjiptoatmodjo, F.A., Kota-Kota Pantai di Sekitar Selat Madura Abad ke-17 Sampai Medio Abad ke-19. Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, tahun 1983. Disertasi tidak diterbitkan.

Wijaya, I. Nyoman, Kekaisaran Finansial Kompeni Kecil: Pengaruh Kegiatan Bisnis Nederlandsche Handel Maatschappij Bagi perkembangan Sosial Ekonomi Indonesia. Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 1994. Tesis tidak diterbitkan.

Majalah

Bonneff, Marcel, Chambert-Loir, Henri, Lombard, Denys, Pelras, Christian, Comite de Redaction, Archipel 18. Paris: 1979.

Broersma, R., "Koopvaardij in de Molukken", Koloniaal Tijdschrift. Drie-en-Twintigste Jaargang, 1934.

Brumund, J.F.G., "Aanteekeningen Gehouden op Eene Reis in het Oostelijke Gedeelte van den Indischen Archipel", Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. II. Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon, 1845.

Eijbergen, H.C. van, "Bijdrage tot de Kennis der Kakao-Kultuur in de Residentie Amboina", Tijdschrift voor Nijverheid en landbouw in Nederlandsch Indië. Nieuwe Serie. Deel VI. Batavia: W. Ogilvie, 1865.

- Hoëvell, D.W.R. van, "Tegenwoordige Gesteldheid der Moluksche Eilanden", Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. 18^{de} Jaargang, AFL. 1-6, Eerste Deel. Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon, 1856.
- Hoëvell, G.W.W.C. Baron van, "De Hervorming der Molukken", Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. 2^e. Jaargang, 1. Eerste Gedeelte. Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon, 1868.
- Kemp, P.H. van der, "Het Herstel van het Nederlandsch Gezag in de Molukken Naar Oorspronkelijke Stukken", Bijdrage tot de Taal-land-en Volkenkunde van Nederlands Indië. 'S Gravenhage: 1911-1912.
- Leirissa, R.Z., "Maluku Tengah Dalam Abad Ke Sembilan Belas: Studi Pendahuluan", Prisma, th IX, no. 8, 1980. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Mohnike, O., "Amboina", Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Nieuwe Serie. Deel I. Batavia: Lange & Co., 1859.
- Reid, Anthony, "The Pre-Colonial Economy of Indonesia", Bulletin of Indonesian Economic Studies. Volume XX, No. 2. Agustus, Tahun 1984.



LAMP IRAN - LAMP IRAN

Lampiran 1

Tabel 5
 Pengeluaran Pemerintah Hindia Belanda
 Untuk Membeli Cengkih Tahun 1817-1823
 (Harga cengkih 16 duit per pon)

Tahun	Jumlah dlm. Pon	Harga dlm. gulden
1817	26.442	846,14
1818	194.588	6.226,82
1819	453.357	14.507,42
1820	82.077	2.626,46
1821	394.423	12.621,54
1822	203.685	6.517,92
1823	233.487	7.471,58

Sumber: E.W.A. Ludeking, Schets van de Residentie Amboina (s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1868), hlm. 93, dan Koloniaal Verslag Over het Jaar 1855, hlm. 129.

Tabel 6
 Pengeluaran Pemerintah Hindia Belanda
 Untuk Membeli Cengkih Tahun 1824-1853
 (harga cengkih 24 duit per pon)

Tahun	Jumlah dlm. Pon	Harga dlm. gulden
1824	298.844	14.344,51
1825	306.223	14.698,70
1826	60.234	2.891,23
1827	295.753	14.196,14
1828	215.384	10.338,43
1829	392.752	18.852,10
1830	266.487	12.791,38
1831	289.651	13.903,25
1832	245.639	11.790,67
1833	612.096	29.380,61
1834	509.152	24.439,30
1835	17.727	850,90
1836	679.564	32.619,07
1837	308.207	14.793,94
1838	61.854	2.968,99
1839	1.106.821	53.127,41
1840	54.038	2.593,82
1841	517.140,5	24.822,72
1842	205.813	9.879,02
1843	687.899,5	33.019,15
1844	97.781,5	4.693,48
1845	210.926	10.124,45
1846	869.727	41.746,90
1847	238.278	11.437,34
1848	450.935	21.644,88
1849	89.923	4.316,30
1850	394.907	18.955,54
1851	97.742	4.691,62
1852	309.296	14.846,21
1853	343.209	16.479,03

Sumber: E.W.A. Ludeking, Schets van de Residentie Amboina ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1868), hlm. 93, dan Koloniaal Verslag Over het Jaar 1855. Hlm. 129.

Tabel 7
Pengeluaran Pemerintah Hindia Belanda
Untuk Membeli Cengkih Tahun 1854-1863

Tahun	Harga per pikul dlm. gulden	Jumlah dlm. Pikul	Harga seluruhnya dalam gulden
1854	31,25 ⁹ /10	4.644,73	145.156,25
1855	34,02 ⁷ /10	233,63	7.950,43
1856	28,11 ¹ /10	4.937,94	138.805,49
1857	tidak ada penjualan	-	
1858	16,49 ⁸ /10	1.867,74	30.799,03
1859	tidak ada penjualan		
1860	15,54 ⁹ /10	2.207,50	34.304,55
1861	12,35 ³ /10	3.188,76	39.381,18
1862	16,43 ⁶ /10	680,99	11.188,67
1863	16,12 ³ /10	7.610,06	122.674,16

Sumber: G.W.W.C. Baron van Hoëvell, *De Hervorming der Molukken*, dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indië*. 2^e. Jaargang 1. Eerste Gedeelte (Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon, 1868), hlm. 135-136, dan P. Bleeker, *Reis Door de Minahasa en den Molukschen Archipel Gedaan in de Maanden September en Oktober 1855 in het Gevolg van den Gouverneur Generaal Mr. A.J. Duymaer van Twist* (Batavia: Lange & Co., 1856), hlm. 128.

Lampiran 2

Tabel 8
Jumlah Penduduk Karesidenan Amboina Yang
Divaksinasi Cacar dan Divaksinasi Cacar Ulang
Tahun 1842-1863

Tahun	Vaksinasi		Jumlah	Hervaksinasi		Jumlah	Jumlah Seluruh nya
	Berhasil	Tidak Berhasil		Berhasil	Tidak Berhasil		
1842	743	66	809	-	-	-	809
1843	1.154	121	1.275	-	-	-	1.275
1844	767	29	796	-	-	-	796
1845	1.648	62	1.710	-	-	-	1.710
1846	1.196	22	1.218	-	-	-	1.218
1847	1.609	45	1.654	-	-	-	1.654
1848	1.112	51	1.163	-	-	-	1.163
1849	1.440	100	1.540	-	-	-	1.540
1850	1.375	83	1.458	-	-	-	1.458
1851	1.314	56	1.370	25	3	28	1.398
1852	1.592	68	1.660	-	-	-	1.660
1853	1.362	94	1.456	119	21	140	1.596
1854	1.045	100	1.145	46	-	46	1.191
1855	5.286	1.683	6.969	9.915	2.419	12.334	19.303
1856	3.239	294	3.533	326	252	578	4.111
1857	2.135	254	2.389	73	7	80	2.469
1858	2.407	139	2.546	95	61	156	2.702
1859	1.673	239	1.912	237	52	289	2.201
1860	1.821	131	1.952	86	31	117	2.069
1861	2.220	283	2.503	127	8	135	2.638
1862	2.570	354	2.924	181	91	272	3.196
1863	2.883	426	3.309	443	119	562	3.871
Total	40.591	4.700	45291	11.673	3.064	14.737	60.028

Sumber: E.W.A. Ludeking, Schets van de Residentie Amboina
('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1868), hlm. 158.

Tabel 9
Pendapatan Pemerintah dari Penyewaan dan Sarana yang lain dalam gulden

Nama Barang	1834	1835	1836	1837	1838	1839	1840	1851	1852	1853	1854	1855
Hutan sagu di Seram	8350	4884	3055	4102	3104	849	1625	995	995	2025	2078	2433
Hipotik	2718	2960	2943	2943	2940	2893	2978	1728	1589	1641	1753	1611
Pajak kepala bagi orang Cina	292	374	349	322	302	312	414	302	278	362	342	325
Pasar ikan & penyewaan Pasar Ikan	12540	12600	12720	12780	13140	13560	13680	9350	8625	9585	9400	10320
Arak & minuman keras lainnya	2280	1740	1740	2400	3720	4020	3240	1301	1430	2000	1930	1920
Pembelian arak sagu	12840	11460	12180	12840	12900	12840	11400	5845	6540	6390	7988	7440
Rumah gadai kecil	4080	4080	4080	2400	1860	1980	3600	650	710	885	1065	1080
Candu	12300	14040	14040	12600	12720	13740	14160	12980	13830	14470	15840	15960
Pajak ekspor-impor	6503	9973	5802	4309	9081	7000	4337	13691	9256	7125	1391	-
Pajak pelabuhan dan berlabuh	1263	1179	1092	1225	1171	903	817	657	769	338	201	-
Pajak meterai kecil	4320	6881	5215	5786	5613	6438	5646	4482	4117	3858	3190	4176
Pajak warisan	1138	618	412	458	701	14319	157	2322	331	678	329	223
Pajak Pendataan	1788	2033	1295	1901	1171	1212	842	1300	1533	638	1340	1811
Pajak budak	4080	4818	4643	4558	3951	3883	3669	1407	1347	1371	1258	1166
Kuda dan kereta kuda	164	163	136	136	138	108	204	157	306	234	230	1195
Pajak pelelangan	6836	7200	7987	9484	14730	11262	8668	10743	11818	8051	8732	1086
Po-en-topospelen	1800	960	1008	2100	1860	3240	2160	2183	3483	3160	2610	2820
Jawatan Pos	201	208	157	339	474	532	616	1055	906	1579	2237	1652
Penjualan rempah	34	63	134	132	32	184	38	42	120	18	20	28
Penjualan berbagai barang	401	726	273	321	466	415	476	3103	2966	2301	1872	-
Denda dan sitaan	2585	1156	782	507	617	1497	1921	1874	2425	2818	1437	1946
Jumlah	86513	88102	80043	81643	90683	101187	80678	75967	73074	79527	65243	62192

Keterangan: tahun 1851 angka-angka tidak sama dimana-mana.

Sumber: P. Bleeker, Reis door de Minahasa en den Molukschen Archipel Gedaan in de Maanden September en Oktober 1855 in het Gevolg van den Geuverneur Generaal Mr. A.J. Duymaer van Twist. Tweede Deel (Batavia: Lange & Co., 1856), hlm. 141

Lampiran 4

Tabel 10

Harga dan Jenis Barang Yang di Jual di Pasar Kota Ambon
Tahun 1832 (dalam *gulden*)

Barang	Harga
Beras per koyang seberat 3000 kati Jawa	145 - 170
Beras per koyang seberat 3000 kati Menado	80 - 130
Beras per koyang seberat 3000 kati Bali	110 - 130
Sagu per tumang dengan ukuran panjang 1,5 depa dan lebar 1 depa	50
Jagung 100 batang	150
Kelapa 100 buah	2
Pisang per tandan	40
Nangka per buah	30
Cempedak per buah	8
Durian per buah	8
Semangka per buah	10
Minyak kelapa per botol	18
Asam	10
Arak sagu atau <i>sageru</i>	15
Tembakau Jawa per keranjang	22
Tembakau Buru per keranjang	10
1 ekor babi besar seberat 60-80 kg.	10
1 ekor babi kecil seberat 40-60 kg.	6
1 ekor kambing	8
Mentega seberat 16 sampai 20 kg.	40
Keju per batang	14
1 ekor rusa	10
1 ekor domba	4,50
1 ekor ayam	1
1 ekor burung	1,20
1 ekor itik dewasa	0,60
1 ekor itik muda	0,35
Daging sapi per pon	0,35
Daging babi per pon	0,35
Anggur merah per peti	60
Bir per dosin	8
Arak	20
Teh per pon	3,50
Kopi per pon	0,50

Sumber: Algemeen Verslag van het Moluksche Over het Jaar 1833. Bagian C

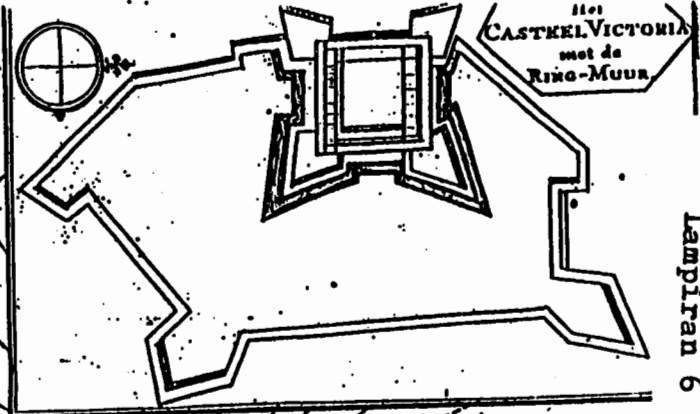
Lampiran 5

Tabel 11
 Harga dan Barang Yang Dijual di Pasar Kota Ambon
 Tahun 1862 (dalam *gulden*)

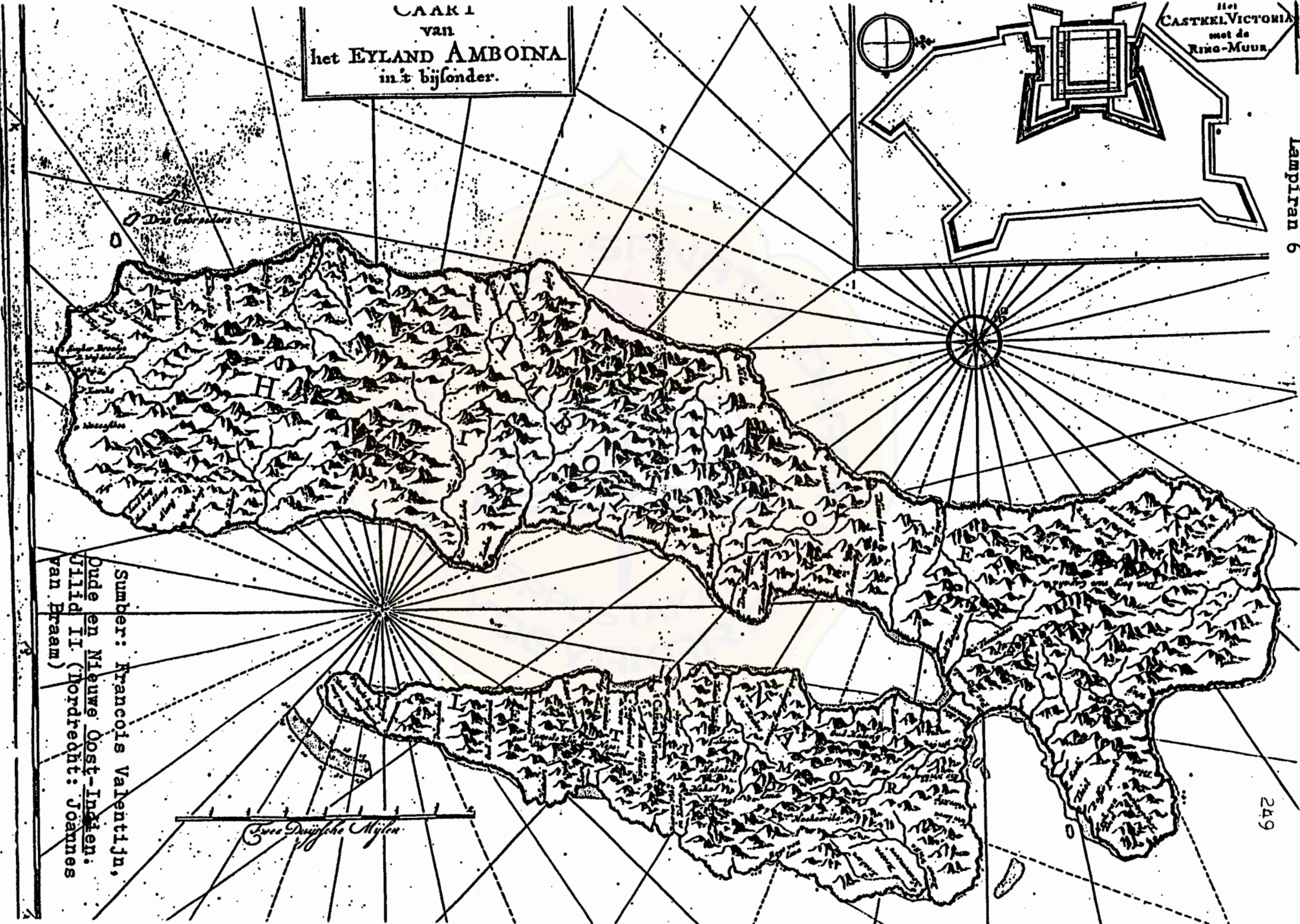
Barang	Harga
Beras per pikul	18
Kentang per pikul	15
Sagu per tumang 50lb	1
Roti 1 potong	-16
100 buah Kelapa	4
Daging 1 potong	-45
Daging rusa 1 potong	-30
Ayam per ekor	1
Bebek per ekor	1,50
Susu per botol	-40
Telur per butir	-04
Garam per pikul	15
Minyak per botol	-30
Kayu bakar per depa	5
Kentang manis per pikul	15
Tembakau per pikul	30

Sumber: R.Z. Leirissa, dkk., Maluku Tengah Di Masa Lampau
Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas
 (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia,
 1982), hlm. 177.

KAART
van
het EYLAND AMBOINA
in 't bijzonder.

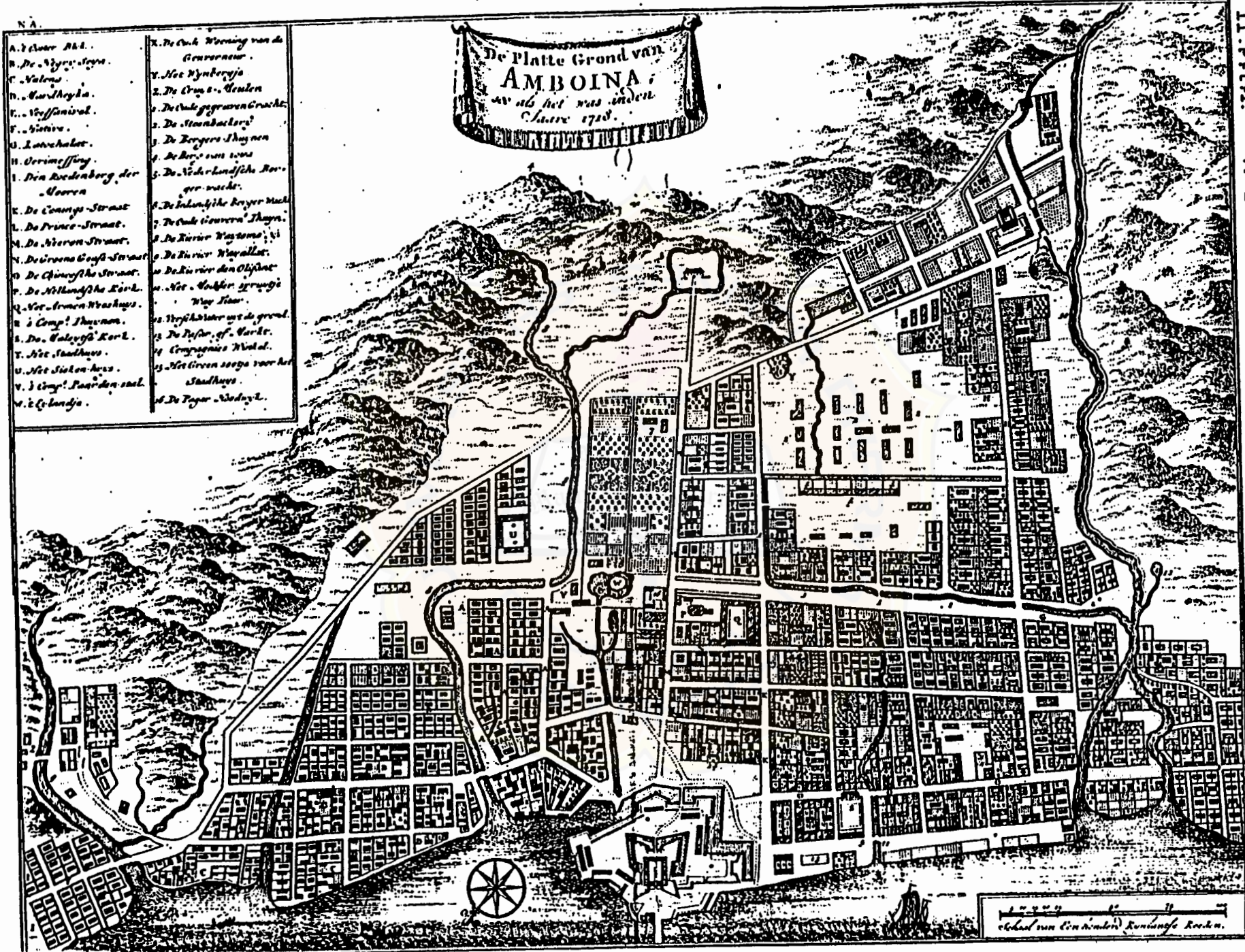


Lampiran 6



Sumber: Rançois Valentijn,
Oude en Nieuwe Oost-Indiën:
Uitd. II. (Nordrecht: Joannes
van Braam)

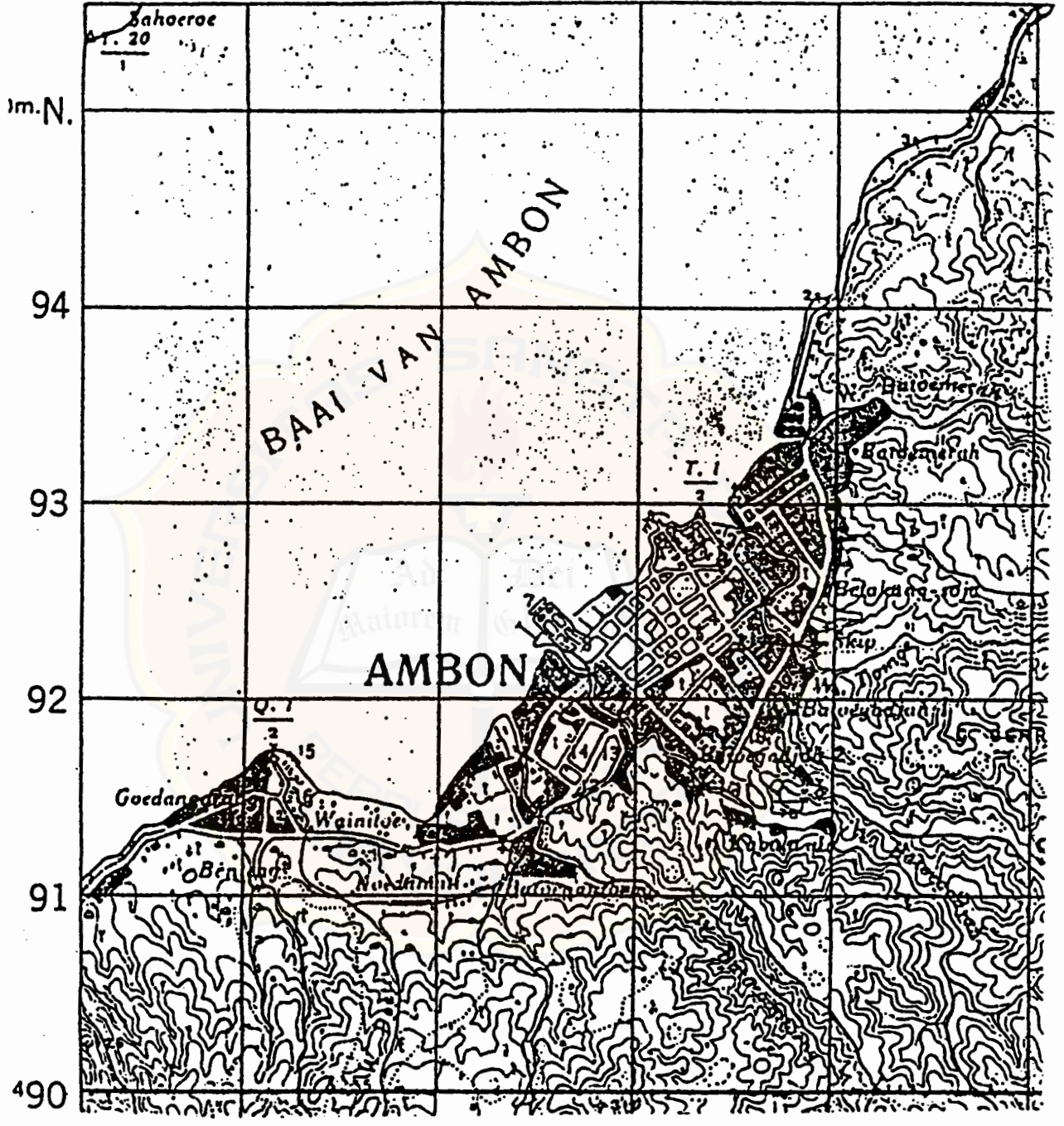
Twee Duitfche Mijlen



Sumber: Francois Valentijn, Oude en Nieuwe Cost-Indien. Jilid II (Dordrecht: Joannes van Braam).

AMBOINA ARCHIPELAGO 1:50,000

5914000m.E. 15 16 17 18



Sumber: Koleksi Kartografi ANRI No. 2828

Sumber ; Francois
valentijn, Oude en
Nieuwe Oost-Indien.
Jild II (Dordrecht:
Joannes van Braam)



At huys | 11 t Princen quartier | 12 t Verdronke Land | 13 d Rivier den Olifant | 14 Native | 15 d Rivier May-Vitse | 16 Galy hock | 17 De hock van Alang

AMBON



1 t Fortes | 2 t. Nieuwe Hospital | 3 Stadhuis | 4 Stadhuis woonhuis | 5 t. Gerecht | 6 t. Vaathuis | 7 Poffier | 8 De. Mahé's Kerk | 9. Iras. Branders